PEMERINTAH KOTA
BANDA ACEH

Banda Aceh KOTA KOLABORASI

PERUBAHAN

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

BANDA ACEH KOTA KOLABORASI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1
1.3 Hubungan Antar Dokumen 5
1.4 Maksud dan Tujuan 6
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi 1
2.1.1.2 Topografi 2
2.1.1.3 Geomorfologi 3
2.1.1.4 Geologi 4
2.1.1.5 Hidrologi 4
2.1.1.6 Klimatologi 5
2.1.1.7 Penggunaan Lahan 6
2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah 8
2.1.1.8.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota 9
2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana 13
2.1.1.10 Demografi 16
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 18
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi 18
A. Pertumbuhan PDRB 18
B. Laju Inflasi 22
C. PDRB Perkapita 22
D. Kemiskinan 23
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 27
A. Angka Melek Huruf (AMF) 27
B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 28
C. Persentase Balita Gizi Buruk / Kurang 28
D. Angka Usia Harapan Hidup 29
E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 30
F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 32
G. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 33
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 34

A. Kebudayaan 34
1. Jumlah Grup Kesenian 34
B. Pemuda dan Olahraga 35
1. Jumlah Klub Olahraga 35
C. Statistik 36
D. Persandian 37
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 38
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan 38
A. Syariat Islam 38
1. Kegiatan Syiar dan Dakwah 38
2. Musabaqah Tilawah Qur'an (MTQ) 40
B. Pendidikan Dayah 41
1. Jumlah Dayah, Guru dan Santri 41
C. Baitul Mal 43
1) Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah 43
2) Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah 43
D. Majelis Permusyawaratan Ulama 44
1) Jumlah Fatwa, Himbauan, Tausyiah yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Syariat 45
2) Kewenangan MPU : 46
E. Majelis Adat Aceh 48
F. Majelis Pendidikan Daerah 49
1. Tugas Pokok MPD 49
2. Fungsi MPD 49
3. Kewenangan MPD 50
2.1.3.2 Fokus Layanan Wajib Dasar 50
A. Pendidikan 50
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 50
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) 51
3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) 51
4. Angka Partisipasi Murni (APM) 52
5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 53
6. Angka Putus Sekolah (APtS) 53
7. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar 54
8. Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar 54
9. Capaian Rapor Pendidikan 55
10. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 56
B. Kesehatan 56
1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup 56
2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi. 57
3. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup 58

4. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 58
5. Rasio Posyandu per Satuan Balita 59
6. Rasio Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk..... 60
7. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk..... 60
8. Rasio Dokter per Satuan Penduduk 61
9. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 61
10. Cakupan Desa/ Gampong *Universal Child Immunization* (UCI)... 62
11. Stunting 63
12. Cakupan Imunisasi Campak Bayi 64
13. Jumlah Kasus Campak..... 65
14. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC.. 65
15. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)... 66
16. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD . 67
17. Penderita Diare yang Ditangani..... 68
18. Angka Kesakitan Malaria *(Annual Parasit Incidence)* 69
19. Jumlah Kasus Baru HIV 69
20. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin..... 70

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 70
1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik..... 70
2. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi..... 72
3. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat..... 73
4. Persentase Penduduk Berakses Air Minum 75
5. Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan 78
6. Ketaatan terhadap RTRW..... 79

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman..... 80
1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 80
2. Permukiman yang Tertata..... 81

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ... 82
4. Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Kota 85
5. Tingkat Waktu Tanggap *(Renponse Time Rate)* Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 86

F. Sosial 87
1) PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial 88
2) PMKS yang Mendapat Pembinaan Dalam dan Luar Panti 89
3) Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat 90
4) Jumlah Penyandang Disabilitas 90

2.1.3.3 Fokus layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 91
A. Tenaga Kerja..... 91

1) Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja dan Pengusaha Kota Banda Aceh Tahun 92
2) Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kota Banda Aceh..... 93
3) Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial..... 94
B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 94
1. Indeks Pemberdayaan Gender..... 94
1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan..... 95
2) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 96
3) Peserta KB Aktif..... 97
4) Kota Layak Anak..... 98
5) Perluasan Jaringan Khususnya Untuk Panti dan Pusat Rehabilitasi 99
6) Cakupan Penegakan Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasasn Terhadap Perempuan dan Anak Penyelesaian Kasus Melalui Litigasi dan Non Litigasi 99
C. Pangan 100
1) Pola Pangan Harapan 100
D. Lingkungan hidup 102
1. Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Banda Aceh 102
2. Capaian Menurunnya TPS Liar 103
3. Capaian Pengurusan dan Pengawasan izin Dokumen Lingkungan 104
4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan penduduk 105
5. Pemanfaatan Gas Metana dari TPA Gampong Jawa..... 106
6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 107
7. Penghargaan Adipura..... 108
8. Survey Kepuasan Masyarakat 109
9. Persentase Penerangan Jalan Umum 111
E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... 112
1) Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk..... 112
E. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 114
1) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat 116
2) Persentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong..... 117
3) Persentase Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong yang baik..... 118
4) Jumlah Desa berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 118
F. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... 120
1) Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga..... 120
1. Ratio Akseptor KB..... 120

G. Perhubungan 121
1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum 121
2) Rasio Izin Trayek 122
3) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum 122
4) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 123
5) Angkutan Darat 123
6) Kepemilikan KIR Angkutan Umum 124
8.Jumlah Orang/Barang (Penumpang) yang Terangkut Angkutan Umum 125
9. Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal 125
H. Komunikasi dan Informatika 127
I. Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 133
1) Persentase Koperasi Aktif 133
J. Penanaman Modal 134
1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) 134
2) Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 134
L. Kepemudaan dan Olahraga 135
1) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif 135
2) Pembinaan Atlet dan Pelatih 136
3) Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Pemuda 137
2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Pilihan 139
A. Pariwisata 139
1) Kunjungan Wisata 139
B. Peternakan 142
D.Perindustrian 146
1) Jumlah IKM yang Mendapatkan Bantuan Perbankan 146
2) Jumlah Produk yang Menunjang Program *One Village One Product* (OVOP) 148
C. Kelautan dan Perikanan 148
1) Produksi Perikanan 148
2.1.3.5 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan 150
A. Pengawasan 150
B. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 151
1. Kapasitas Aparatur Pemerintah 151
2. Pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural 151
3. Standar Kompetensi Administrator dan Pengawas 152
C. Keuangan 153
2.1.3.6 Fokus Otonomi Daerah 156
A. Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri 156
1) LSM, Ormas dan OKP Terdaftar 156

2) Kegiatan Pembinaan Politik daerah 158
3) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 159
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 159
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 159
1) Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran 159
2) Jenis Kelas dan Jumlah Hotel dan Penginapan 160
2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi 162
1) Lama Proses Perizinan 162
2) Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha 168
3) Perbandingan jumlah proyek dan nilai investasi tahun 2021 – 2021 (yoy) 169
4) Data Pengunjung MPP Kota Banda Aceh 172
2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 173
1) Rasio panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh 173
2) Jumlah Orang/Barang (Penumpang) yang Terangkut Angkutan Umum 174
3) Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal 176
2.2 Evaluasi Pelaksanaan P-RKPD Tahun 2025 186
2.3 Permasalahan Pembangunan 257
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 257
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 259
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 259
1. Pendidikan 259
2. Kesehatan 259
3. Pekerjaan Umum 259
A. Penyediaan Air Bersih 259
B. Drainase 259
C. Pemeliharaan Jalan Kota 259
D. Permasalahan Tata Ruang 260
4. Perumahan 260
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 260
6. Sosial 260
B. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar 261
1. Tenaga Kerja 261
2. Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 262
3. Ketahanan Pangan 262
4. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan 262
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa 262

6. Perhubungan 263
7. Komunikasi dan Informatika 263
8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 263
C. Urusan Pelayanan Pilihan 263
1. Industri 263
2. Kelautan dan Perikanan 264
D. Penunjang Urusan 264
1. Perencanaan Pembangunan 264
2. Keuangan 264
3. Pengawasan 267
E. Otonomi Daerah 267
1. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Kepegawaian 267
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 267
F. Urusan Keistimewaan 268
1. Syariat Islam 268
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs 268
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi 1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional 2
3.1.2. Kondisi Perekonomian Aceh 3
3.1.3. Kondisi Perekonomian Kota Banda Aceh 3
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 4
b. Tingkat Inflasi 6
c. Tingkat Kemiskinan 7
d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 8
e. Indeks Pembangunan Manusia 9
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 10
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh 10
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 15
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 17
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 1
4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 4
4.3 Program Proritas Pembangunan 6
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 1
5.1 Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025. 1
BAB VI PENUTUP 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh 1
Tabel 2. 2 Nama Sungai dan Panjang Alirannya di Kota Banda Aceh.....5
Tabel 2. 3 Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2023.....6
Tabel 2. 4 Jenis Penggunaan Lahan di Kota Banda Aceh Tahun 2024.....7
Tabel 2. 5 Penggunaan Lahan Eksiting - Lahan Belum Terbangun Kota Banda Aceh ..8
Tabel 2. 6 Rencana Pusat-Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh.....10
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....16
Tabel 2. 8 Indikator Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....17
Tabel 2. 9 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Banda Aceh (Juta) 19
Tabel 2. 10 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh (Juta).....19
Tabel 2. 11 Perkembangan Konstribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK).....20
Tabel 2. 12 Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024....21
Tabel 2. 13 Rekap Data P3KE Desil 1 Persentil Tahun 2023.....27
Tabel 2. 14 Kondisi Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 31
Tabel 2. 15 Jenis Pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024 32
Tabel 2. 16 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020 – 2024 33
Tabel 2. 17 Capaian Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024 34
Tabel 2. 18 Perkembangan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024 35
Tabel 2. 19 Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu, 2019-2024 36
Tabel 2. 20 Frekuensi Syiar dan Dakwah di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....39
Tabel 2. 21 Jumlah Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan, Ketertiban dan Aksessibilitas Tahun 2019-2024 39
Tabel 2. 22 Jumlah Peserta MTQ Kota Banda Aceh berdasarkan Cabang MTQ yang diperlombakan dalam MTQ Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2019-2024.....40
Tabel 2. 23 Jumlah Dayah, Guru dan Santri Tahun 2020 – 2024.....41
Tabel 2. 24 Jenis dan Tipe Dayah di Kota Banda Aceh Tahun 2023 41
Tabel 2. 25 Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 43

Tabel 2. 26 Jumlah Rumah Dhuafa yang Dibangun Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 44
Tabel 2. 27 Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 (jiwa) 44
Tabel 2. 28 Keputusan, Hasil Penelitian, Surat Edaran, Rekomendasi/Saran/Nasehat, Arahan, Himbauan dan TAusyiah yang dikeluarkan MPU KOta Banda Aceh Tahun 2020-2024 45
Tabel 2. 29 Keputusan Keulamaan 46
Tabel 2. 30 Perkembangan Angka Pendidikan yang ditamatkan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 52
Tabel 2. 31 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 53
Tabel 2. 32 Capaian Raport Pendidikan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2023 55
Tabel 2. 33 Perkembangan Guru Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 (Dalam Persen) 56
Tabel 2. 34 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 57
Tabel 2. 35 Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per-Satuan Balita Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 59
Tabel 2. 36 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 60
Tabel 2. 37 Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 61
Tabel 2. 38 Perkembangan Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 61
Tabel 2. 39 Prevalensi Stunting Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 64
Tabel 2. 40 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 66
Tabel 2. 41 Sebaran Kasus DBD Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam orang) 67
Tabel 2. 42 Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Kota Banda Aceh Tahun 2023 69
Tabel 2. 43 Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Status (Jalan Nasional, Provinsi, dan Kota) Kota Banda Aceh Tahun 2023 71
Tabel 2. 44 Status Kondisi Jalan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019 - 2024 71
Tabel 2. 45 Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase 72
Tabel 2. 46 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019 - 2024 72
Tabel 2. 47 Kondisi Drainase di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 74
Tabel 2. 48 Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase Tahun 2019-2024 75
Tabel 2. 49 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 79

Tabel 2. 50 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 (dalam persen).....80
Tabel 2. 51 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....80
Tabel 2. 52 Luas Kawasan Kumuh Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 (dalam Ha).....82
Tabel 2. 53 Persentase Penegakan Perda Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....82
Tabel 2. 54 Jumlah Perkara Syariat, Trantibum, Pajak dan Retribusi Daerah, dan Cara Penyelesaiannya 83
Tabel 2. 55 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 83
Tabel 2. 56 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam persen) 84
Tabel 2. 57 Jumlah Pelanggaran K3 dan Cara Penyelesaiannya 84
Tabel 2. 58 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 85
Tabel 2. 59 Cakupan Pelayanan Penaggulangan Kebakaran Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 86
Tabel 2. 60 Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan.....86
Tabel 2. 61 Jumlah Kasus Kebakaran Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....87
Tabel 2. 62 Penyandang Masalah Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....87
Tabel 2. 63 Jangkauan KPM dan Jumlah Bantuan Diterima Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....89
Tabel 2. 64 Penerima Bantuan Sosial dalam Masa Tanggap Darurat Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 90
Tabel 2. 65 Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....91
Tabel 2. 66 Jenis pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 (dalam orang) 91
Tabel 2. 67 Jumlah Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja dan Pengusaha Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023.....93
Tabel 2. 68 Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....93
Tabel 2. 69 Jumlah Sarana Hubungan Industrial yang Telah Mendapatkan Pengesahan dan Pencatatan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....94
Tabel 2. 70 Persentase Pegawai Negeri Sipil Laki-laki dan Perempuan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....96
Tabel 2. 71 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....97
Tabel 2. 72 Indikator Kota Layak Anak yang Dicapai Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....98

Tabel 2. 73 Skor Pola Pangan Harapan Kota Banda Aceh Tahun 2023 101
Tabel 2. 74 Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 . 102
Tabel 2. 75 Persentase Capaian Menurunnya TPS Liar Tahun 2019-2024 104
Tabel 2. 76 Capaian Izin/Rekomendasi Lingkungan Hidup pada Tahun 2019-2024 105
Tabel 2. 77 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk (persen) Tahun 2019-2024 106
Tabel 2. 78 Realisasi Sampah Terkelola Tahun 2018-2024 106
Tabel 2. 79 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 106
Tabel 2. 80 Penghargaan Adipura Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 109
Tabel 2. 81 Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2024 109
Tabel 2. 82 Rincian Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 110
Tabel 2. 83 Rincian Jumlah Responden Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan DLHK3 Tahun 2024 110
Tabel 2. 84 Nilai Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DLHK3 Tahun 2024 110
Tabel 2. 85 Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 112
Tabel 2. 86 Rasio Kepemilikan KTP Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 113
Tabel 2. 87 Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 114
Tabel 2. 88 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Program PUEM Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 116
Tabel 2. 89 Capaian Pengelolaan Aset Gampong Tahun 2019-2024 117
Tabel 2. 90 Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong Tahun 2019-2024 118
Tabel 2. 91 Jumlah Desa berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 119
Tabel 2. 92 Data BUMG Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 119
Tabel 2. 93 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 120
Tabel 2. 94 Rasio Akseptor KB Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 120
Tabel 2. 95 Rasio Izin Trayek Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 122
Tabel 2. 96 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 .. 122
Tabel 2. 97 Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 123
Tabel 2. 98 Persentase Angkutan Darat Tahun 2019-2024 123
Tabel 2. 99 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 124
Tabel 2.100 Persentase Pemasangan Rambu Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 .. 125
Tabel 2.101 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 126

Tabel 2.102 Jumlah Terminal Angkutan Penumpang/Barang Kota Banda Aceh yang Telah Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 126
Tabel 2.103 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019-2024 129
Tabel 2.104 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan 130
Tabel 2.105 Persentase website OPD yang aktif Kota Banda Aceh Tahun 2020- 2024 131
Tabel 2.106 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kecamatan Kota Banda Aceh, 2019-2024..... 132
Tabel 2.106 Jumlah Investor yang Berinvestasi Provinsi Aceh dan Banda Aceh Tahun 2019-2024..... 134
Tabel 2.107 Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 135
Tabel 2.108 Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024..... 135
Tabel 2.109 Data Cabang Olahraga dan Atlit Binaan Dispora Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024..... 136
Tabel 2.110 Data Organisasi Kepemudaan Di Banda Aceh Tahun 2023 137
Tabel 2.111 Jenis dan Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif Kota Banda Aceh Tahun 2024..... 142
Tabel 2.112 Populasi Ternak Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024..... 142
Tabel 2.113 Jumlah Produksi Daging Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 143
Tabel 2.114 Kondisi Pasar Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024..... 144
Tabel 2.115 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024..... 146
Tabel 2.116 Perkembangan Industri Kecil dan Nilai Investasi Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024..... 147
Tabel 2.117 Cakupan jenis produk IKM yang akan diseleksi sebagai produk OVOP Kota Banda Aceh sesuai dengan petunjuk teknis OVOP pada Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/2007 : (Tahun 2022) 148
Tabel 2.118 Produksi Ikan di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 (Dalam Ton)..... 147
Tabel 2.119 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024..... 150
Tabel 2.120 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2020-2024 150
Tabel 2.121 Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan formal di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh..... 151
Tabel 2.122 Pejabat Struktural yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh 152
Tabel 2.123 Jumlah Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi 153

Tabel 2.124 Opini BPK TAhun 2019-2024 155
Tabel 2.125 Persentase SiLPA terhadap APBD 155
Tabel 2.126 Persentase Belanja Pendidikan 155
Tabel 2.127 Persentase Belanja Kesehatan 155
Tabel 2.128 Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa 156
Tabel 2.129 Penetapan APBD Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 156
Tabel 2.130 Jumlah LSM Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 157
Tabel 2.131 Jumlah Ormas yang Terdaftar, Ormas Tidak Aktif dan Ormas Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 157
Tabel 2.132 Jumlah OKP yang Terdaftar, OKP Tidak Aktif dan OKP Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 158
Tabel 2.133 Target dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 158
Tabel 2.134 Target dan Realisasi Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 159
Tabel 2.135 Jumlah Restoran, rumah MAkan dan Cafe Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 160
Tabel 2.136 Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 161
Tabel 2.137 Lama Proses Pemenuhan Komitmen dan Proses Perizinan Non Berusaha di DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2023 162
Tabel 2.138 Prestasi yang telah diraih DPMPTSP Kota Banda Aceh 165
Tabel 2.139 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2019-2024 169
Tabel 2.140 Perbandingan jumlah proyek dan nilai investasi tahun 2020-2024 170
Tabel 2.141 Data Pengunjung MPP Kota Banda Aceh berdasarkan Gender dari Tahun 2020-2024 173
Tabel 2.142 Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 173
Tabel 2.143 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2019-2024 175
Tabel 2.144 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh tahun 2019-2024 176
Tabel 2.145 Jumlah Terminal Angkutan Penumpang/Barang Kota Banda Aceh yang Telah Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 177
Tabel 2.146 Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3 per-satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 178
Tabel 2.147 Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif terhadap Penduduk Tidak produktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 178
Tabel 2.148 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 179

Tabel 2.149 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 181
Tabel 2.150 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 182
Tabel 2.151 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 183
Tabel 2.152 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 184
Tabel 2.153 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023 184
Tabel 2.154 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan I Tahun 2025 per Dinas 187
Tabel 2.155 Permasalahan Pembangunan Kota Banda Aceh Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan 258
Tabel 2.156 Daftar Aset Produktif Belum Optimal Pemerintah Kota Banda Aceh 265
Tabel 3. 1 Target Kebijakan Perekonomian Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2025 1
Tabel 3. 2 Target Kebijakan perekonomian Kota Banda Aceh Tahun 2025 2
Tabel 3. 3 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha.....5
Tabel 3. 4 Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional 7
Tabel 3. 5 Persentase Penduduk Miskin 8
Tabel 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh,Provinsi Aceh dan Nasional 2020-2024 (dalam %).....9
Tabel 3. 7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh,Provinsi Aceh dan Nasional 2020-2024 10
Tabel 3. 8 Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I tahun 2025 11
Tabel 3. 9 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 13
Tabel 3. 10 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 16
Tabel 3. 11 Perubahan Pembiyaan Daerah Tahun Anggaran 2024.....17
Tabel 4. 1 Hubungan Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Banda Aceh Berdasarkan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 1
Tabel 4. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh TAhun 2025 3
Tabel 4. 3 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2025 4
Tabel 4. 4 Target Indikator Makro Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Nasional Tahun 2025.....5
Tabel 4. 5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2025 memperhatikan Visi Misi Tahun 2025-2029 6
Tabel 4. 6 Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Walikota untuk Tahun 2025 11
Tabel 4. 7 Sasaran Pembangunan Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025.....12
Tabel 4. 8 Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 20

Tabel 4. 9 Realisasi SPM Tahun 2023 dan Target Capaian SPM Kota Banda Aceh Tahun 2025.....26
Tabel 4. 10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025.....29
Tabel 4. 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2024.....30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh 1
Gambar 2. 2 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh 2
Gambar 2. 3 Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh 3
Gambar 2. 4 Kondisi Geologi Kota Banda Aceh 4
Gambar 2. 5 Hidrologi Kota Banda Aceh 5
Gambar 2. 6 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kota Banda Aceh 7
Gambar 2. 7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh 9
Gambar 2. 8 Kawasan Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh 11
Gambar 2. 9 Rencana Pengembangan Central Bussiness District (CBD) Keudah Kota Banda Aceh 12
Gambar 2. 10 Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong Kota Banda Aceh 13
Gambar 2. 11 Peta Bahaya Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh 14
Gambar 2. 12 Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh 14
Gambar 2. 13 Kawasan Bahaya Gempa Kota Banda Aceh 15
Gambar 2. 14 Kawasan Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh 15
Gambar 2. 15 Grafik Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2012-2024 16
Gambar 2. 16 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 18
Gambar 2. 17 Grafik Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 22
Gambar 2. 18 PDRB Per Kapita Kota Banda Aceh ADHB Tahun 2020-2024 23
Gambar 2. 19 Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 23
Gambar 2. 20 Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh Tahun 2020-2024 25
Gambar 2. 21 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 26
Gambar 2. 22 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 27
Gambar 2. 23 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020-2024 28
Gambar 2. 24 Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk/Kurang Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 29
Gambar 2. 25 Angka Harapan Hidup Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 30
Gambar 2. 26 Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024 31
Gambar 2. 27 Jumlah Pencari Kerja Tahun 2020 – 2024 32
Gambar 2. 28 Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020 – 2024 33
Gambar 2. 29 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024 34
Gambar 2. 30 Perkembangan Siswa PAUD Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 50
Gambar 2. 31 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (%) Kota Banda Aceh Tahun 2020–2024 51
Gambar 2. 32 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 53

Gambar 2. 33 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2024 54
Gambar 2. 34 Rasio Guru/Murid Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2024 55
Gambar 2. 35 Perkembangan AKB Banda Aceh Tahun 2019-2024 57
Gambar 2. 36 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2019-2024 58
Gambar 2. 37 Angka Kasus Kematian Ibu di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 59
Gambar 2. 38 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 62
Gambar 2. 39 Cakupan Desa/Gampong Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2019-2024 Kota Banda Aceh 63
Gambar 2. 40 Cakupan Imunisasi Campak Bayi Tahun 2019-2024 64
Gambar 2. 41 Jumlah Kasus Campak Tahun 2019-2024 65
Gambar 2. 42 Kasus Kematian Akibat DBD Tahun 2019-2023 68
Gambar 2. 43 Penderita Diare yang Ditangani Tahun 2019-2023 68
Gambar 2. 44 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 70
Gambar 2. 45 Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2020 - 2024 72
Gambar 2. 46 Jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi Tahun 2019 - 2024 73
Gambar 2. 47 Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh 74
Gambar 2. 48 Peta Rencana Zona Wilayah Pelayanan Teknis PDAM Tirta Daroy 76
Gambar 2. 49 Peta Rencana Jaringan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2029 77
Gambar 2. 50 Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 78
Gambar 2. 51 Jumlah Bangunan ber IMB Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 79
Gambar 2. 552 Indeks Pemberdayaan Gender Banda Aceh 95
Gambar 2. 553 Peserta KB Aktif (%) 98
Gambar 2. 54 Jumlah Izin/ Rekomendasi Lingkungan Tahun 2018-2024 105

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.

Dokumen Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 Ayat (5). Dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dokumen Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 345 yang terdiri atas :

a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
c. Penetapan.

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
c) Menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan surat edaran tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan menyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita Presiden dan wakil presiden serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Walikota terpilih.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka redaksional SKPD diganti menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
30. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12);
31. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
32. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
33. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
34. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6);
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
37. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16);
38. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
39. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);
40. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;
41. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, Rancangan Akhir RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional,dan pedoman penyusunan RKPD.

Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek selama satu tahun. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada didalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD memuat rencana kerja dari seluruh SKPD pada tahun yang bersangkutan, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Sehingga masing-masing SKPD memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya. Perubahan RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBK Perubahan, yang terdiri dari RKPD Perubahan, KUA-PPAS Perubahan, dan RKA Perubahan Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 berpedoman pada dokumen perencanaan baik ditingkat provinsi maupun nasional. Adapun dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pendukung penyusunan Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025, yaitu: RPJP Nasional Tahun 2025-2045; RPA Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Aceh Tahun 2025; serta RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027 dan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Pedoman penyusunan RKPD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam satu tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis,

partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. RKPD menjadi pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBK kota serta Rancangan Prioritas danPlafon Anggaran Sementara Kota.

Perubahan RKPD Kota Banda Aceh disusun mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan yang masih relevan dan berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan yang telah ada. Secara substansial, Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2025. Secara normatif, Perubahan RKPD Kota Banda Aceh dijadikan sebagai :

a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
b. Pedoman penyusunan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBK Banda Aceh serta Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Banda Aceh yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRK sebagai landasan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (P-RAPBK). Secara operasional, Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 yaitu:

1. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBK Tahun 2025 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBK Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRK untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBK Tahun 2025 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBK Tahun 2025 antara DPRK Banda Aceh dengan Walikota Banda Aceh yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (Perubahan APBK) Tahun 2025;
2. Terumuskannya program dan kegiatan yang menjadi prioritas Walikota terpilih.
3. Menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan RAPBK.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain seperti: RPD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan Perubahan RKPD Provinsi untuk penyusunan Perubahan RKPD Kab/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan secara ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memaparkan hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh sampai dengan triwulan II dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, serta berbagai permasalahan dan kendala dalam proses pembangunan pada tahun 2025.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan mengenai kondisi geografi daerah, kondisi demografi, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah

diolah dalam tahap perumusan ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBK Tahun 2025

Menjelaskan telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan APBK Semester I.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanjadaerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Gambaran tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang kondisi perekonomian dan keuangan dalam skala lokal maupun nasional menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2025.

3.2 Perubahan Kebijakan

3.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Berisikan uraian mengenai kondisi terkini kinerja perekonomian daerah maupun nasional, serta memperhatikan perhitungan APBK Tahun Anggaran 2025 khususnya evaluasi kinerja bidang pendapatan.

3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Memuat tentang hasil pelaksanaan APBK Murni TA 2025 semester pertama dan memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh sehingga berdampak pada belanja Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2025.

3.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Mengemukakan tentang Kebijakan pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 yang mengalami perubahan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan yang diambil dari dokumen RPD.

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil.

4.3 Program Prioritas Pembangunan

Program prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh dikaitkan dengan program prioritas pembangunan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat yang mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok.

BAB VII PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah secara umum digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu daerah. Aspek-aspek tersebut juga akan digunakan untuk menggambarkan kondisi Kota Banda Aceh di dalam dokumen RKPD 2025. Berikut merupakan gambar Masjid Raya Baiturrahman yang menjadi ikon sekaligus kebanggaan Kota Banda Aceh.

Gambar 2. 1 Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, letak Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat strategis. Kota Banda Aceh berada di bagian barat Indonesia dengan letak geografis berada antara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT. Kota ini terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dengan 90 Gampong. Luas wilayah Kota Banda Aceh secara administratif adalah 61,36 km^2 atau 6136 Ha, namun berdasarkan hasil digitasi GIS Citra Satelit Resolusi Tinggi pada Tahun 2015, luas wilayah Kota Banda Aceh secara spasial mengalami perubahan luas wilayah yaitu menjadi 59,002 km^2. Berkurangnya luas wilayah tersebut akibat adanya bagian daratan di pesisir sepanjang garis pantai Kota Banda Aceh yang masuk ke area perairan laut dan penyesuaian tapal batas gampong setelah terjadinya bencana Tsunami 2004. Luas wilayah administrasi Kota dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini:

Tabel 2. 1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas Secara administrasi		Luas secara Digitasi Spasial	
		(Km²)	Persentase	(Km²)	Persentase
1	Kec. Meuraxa	7,260	11,83	8,459	14,34%
2	Kec. Baiturrahman	4,540	7,40	4,142	7,02%
3	Kec. Kuta Alam	10,050	16,38	9,587	16,25%
4	Kec. Syiah Kuala	14,240	23,21	13,591	23,03%
5	Kec. Ulee Kareng	6,150	10,02	5,182	8,78%
6	Kec. Banda Raya	4,790	7,81	4,949	8,39%
7	Kec. Kuta Raja	5,210	8,49	3,889	6,59%
8	Kec. Lueng Bata	5,340	8,7	4,445	7,53%
9	Kec. Jaya Baru	3,780	6,16	4,759	8,07%
Jumlah		**61,360**	**100,00**	**59,002**	**100,00**

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2024

Luas Wilayah Kota Banda Aceh berdasarkan RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018) dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini

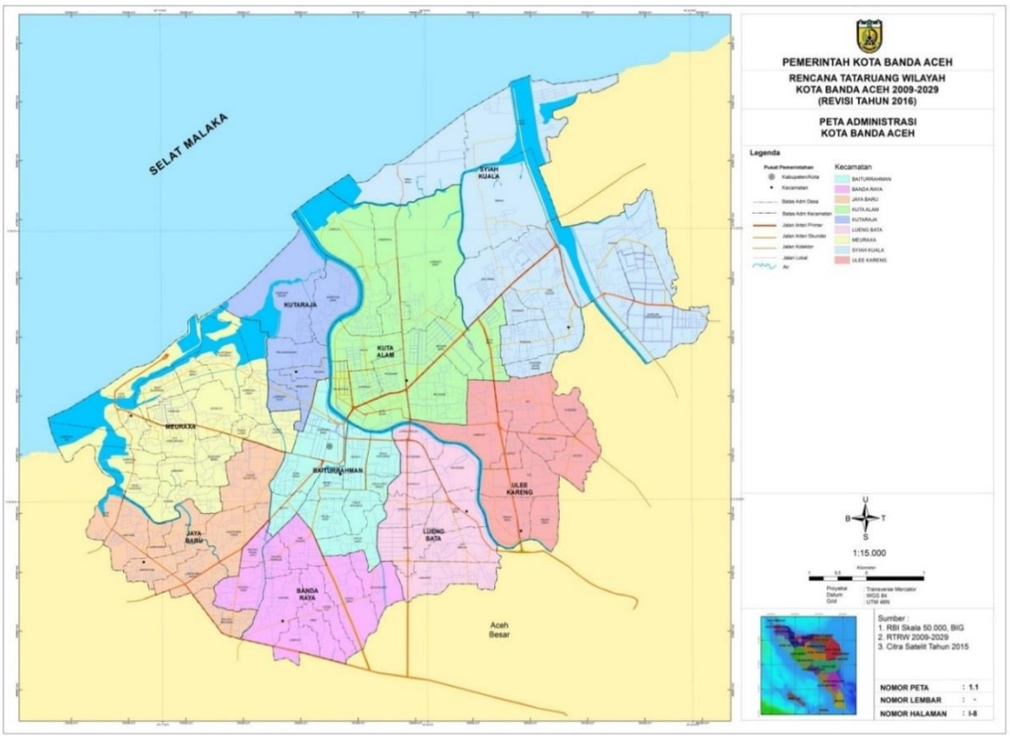

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 2 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh

Secara administrasi batas-batas wilayah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selat Malaka
Sebelah Timur : Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Selatan : Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Barat : Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

2.1.1.2 Topografi

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara -0,45 m sampai dengan +1,00 m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2-8%. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian Utara atau pesisir pantai.

Dalam lingkup makro, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 5 meter dpl. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut. Kondisi topografi dan fisiografi lahan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di Kota Banda Aceh cukup bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah Timur dan Selatan kota, kadang-kadang tergenang dan tergenang terus-menerus seperti pada kawasan rawa-rawa/genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian di bawah

permukaan laut baik pada saat pasang maupun surut air laut. Lebih jelasnya gambaran kondisi topografi kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.3.

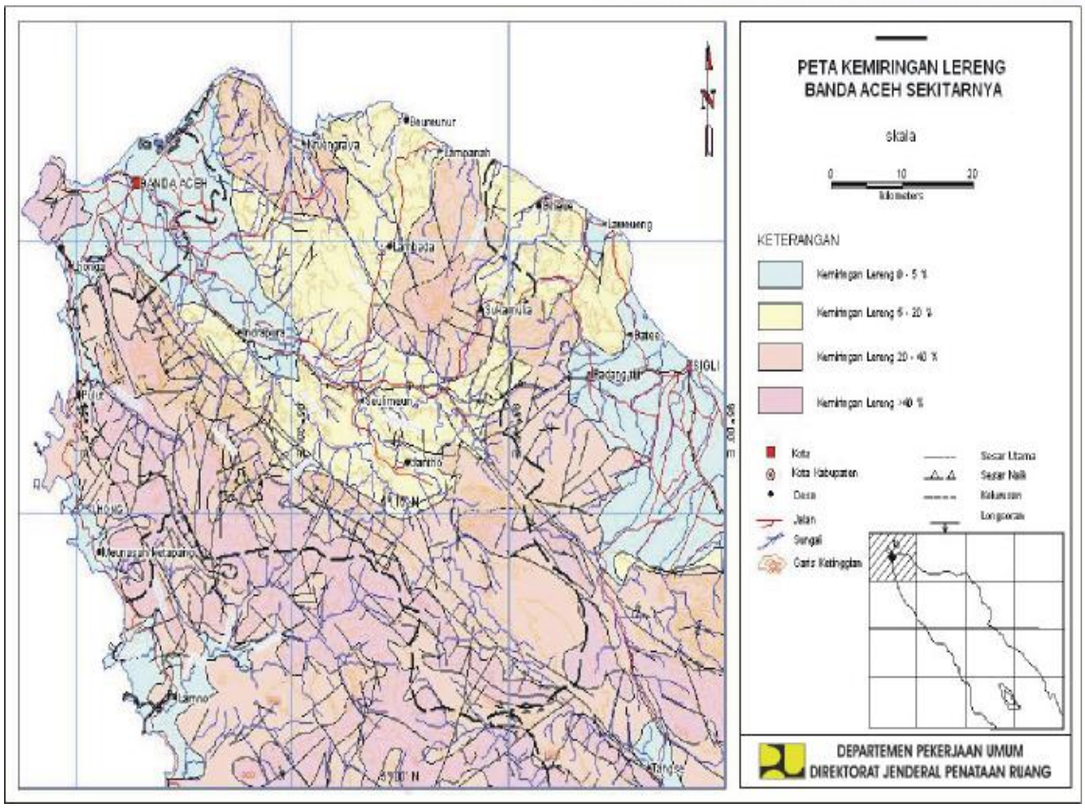

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 3 Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh

Berdasarkan Gambar 2.3 di atas dapat dilihat bahwa Kota Banda Aceh terletak pada dataran rendah dengan kemiringan 0-5%.

2.1.1.3 Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan vulkanis tertier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (di sepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur (di bagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (dibagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam. Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi dataran yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai yang terletak di wilayah barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa. Daerah dataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistim marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (aluvial) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan aluvial/ koluvial dari daerah sekitarnya.

2.1.1.4 Geologi

Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai Sesar Semangko (*Semangko Fault*). Oleh karenanya daerah yang terlintasi patahan ini rentan terhadap gempa dan longsor. Berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia berjarak ±130 km dari garis pantai barat sehingga daerah ini rawan terhadap Tsunami. Litologi Kota Banda Aceh merupakan susunan batuan yang kompleks, terdiri dari batuan sedimen, meta sedimen, batu gamping, batuan hasil letusan gunung api, endapan alluvium, dan intrusi batuan beku, dan secara umum dibagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu :

1. Alluvium
2. Batuan Kuarter (sedimen dan volkanik)
3. Batuan Tersier (sedimen dan volkanik)
4. Batuan metasedimen, malihan, dan terobosan Pra-Tersier

Untuk mengetahui kondisi geologi Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.4 di bawah ini.

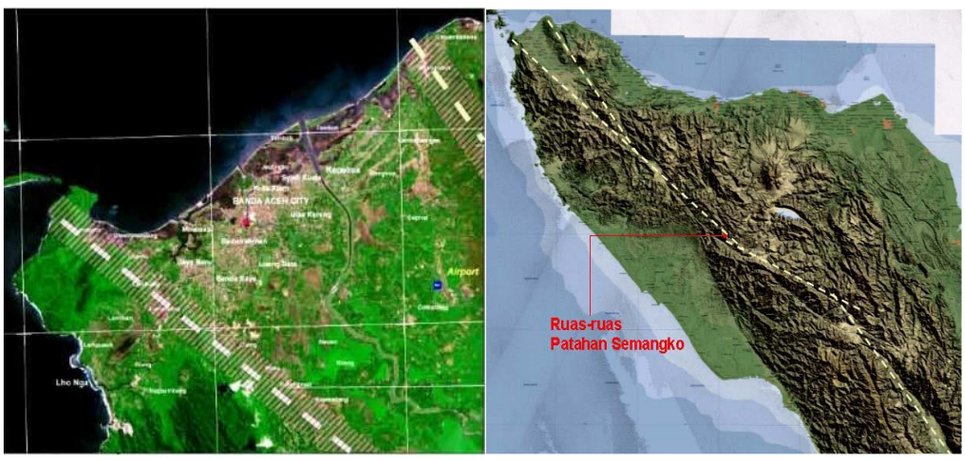

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 4 Kondisi Geologi Kota Banda Aceh

Pada Gambar 2.4 di atas menunjukkan ruas-ruas patahan Semangko di Pulau Sumatera dan juga kedudukan-nya terhadap Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di Tenggara Kota.

2.1.1.5 Hidrologi

Terdapat 7 (tujuh) sungai yang melalui Kota Banda Aceh yang berfungsi diantaranya sebagai daerah aliran sungai dan sumber air baku dan kegiatan perikanan. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan kota membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Ulee Kareng danKecamatan Banda Raya. Untuk mengetahui nama sungai dan panjang alirannya, dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2. 2 Nama Sungai dan Panjang Alirannya di Kota Banda Aceh

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Krueng Aceh	**723,60**
2	Krueng Daroy	**3,60**
3	Krueng Doy	**2,00**
4	Krueng Neng	**4,10**
5	Krueng Lueng Paga	**26,33**
6	Krueng Tanjong	**2,25**
7	Krueng Titi Panjang	**1,60**
8	Krueng Kon Keumeh	**3,27**
9	**Krueng Geunasen**	**1,25**

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa Krueng Aceh merupakan sungai yang terpanjang alirannya, yaitu 723,69 Km, sedangkan Krueng Geunasen merupakan sungai yang terpendek alirannya, yaitu hanya sepanjang 1,25 Km. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah terjadinya pendangkalan sungai yang dapat menyebabkan terjadinya banjir pada musim hujan. Di samping itu, permasalahan lainnya adalah pemanfaatan lahan oleh masyarakat disepanjang aliran sungai hulu dan hilir yang dapat menggangu lancarnya aliran sungai khususnya pada saat hujan.

Untuk mengetahui hidrologi Kota Banda Aceh, dapat dilihat pada Peta Hidrologi Kota Banda Aceh pada Gambar 2.5 berikut ini:

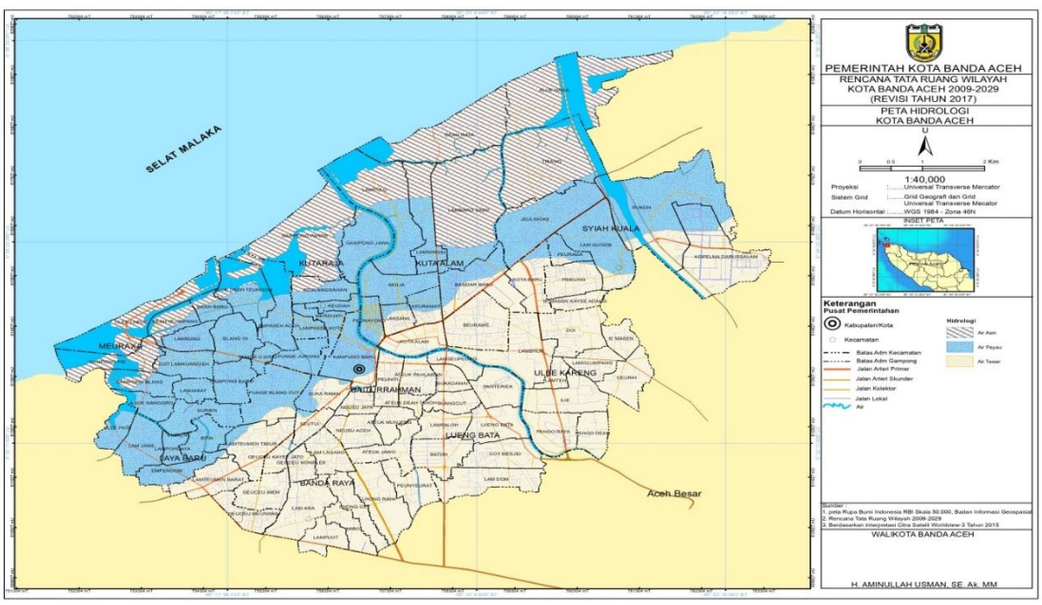

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029

Gambar 2. 5 Hidrologi Kota Banda Aceh

2.1.1.6 Klimatologi

Menurut Schmidt dan Ferguson, untuk menentukan tipe iklim adalah dengan menghitung angka perbandingan antara rata-rata bulan kering (BK) dengan bulan basah (BB) dikali 100%. Bulan kering ditandai dengan jumlah curah hujan kurang dari 60 mm, sedangkan bulan basah adalah jumlah curah hujan di atas 100 mm. Kondisi iklim Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Suhu (°C)	Kelembaban (%)
1	Januari	603.70	16	26.0	84.10
2	Februari	355.90	17	26.3	82.60
3	Maret	253.60	12	26.8	80.00
4	April	59.80	6	27.8	78.80
5	Mei	64.50	14	28.6	77.20
6	Juni	72.30	9	28.8	69.30
7	Juli	111.60	8	28.8	66.70
8	Agustus	53.70	11	28.2	71.30
9	September	131.60	20	27.5	75.00
10	Oktober	199.60	25	26.8	81.50
11	November	411.90	26	26.6	84.60
12	Desember	217.90	20	26.7	83.60
Jumlah		253.1	184	-	-
Rata-rata		211.3	15	27.4	77.89

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa curah hujan Kota Banda Aceh terbesar pada Tahun 2023 terjadi pada Bulan Januari yaitu sebesar 603,70 mm dan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Agustus sebesar 53,70 mm yang berlangsung selama 11 (sebelas) hari. Hari hujan terlama terjadi pada bulan November yang selama 26 hari. Secara keseluruhan, Jumlah curah hujan selama tahun 2023 yaitu sebesar 253.1 mm, dengan rata-rata 211,3 mm/bulan. Rata-rata suhu udara pada Tahun 2023 adalah 27,4^{0}C dengan kelembaban rata-rata sebesar 77,89%. Dari hasil perbandingan BK dan BB didapatkan nilai Q sebesar 0,25 yang menunjukkan tipe iklim pada Kota Banda Aceh termasuk iklim tipe B (iklim basah).

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Berdasarkan kondisi saat ini, kecenderungan perkembangan Kota Banda Aceh lebih mengarah pada bagian timur dan bagian selatan kota. Di bagian timur, berada di wilayah Ulee Kareeng dan sekitarnya. Kawasan Ulee Kareng, saat ini telah didominasi oleh aktivitas perdagangan dan jasa dan aktivitas permukiman. Kawasan Ulee Kareeng semakin berkembang akibat adanya pergeseran atau perembetan perkembangan fisik kota dikarenakan kawasan ini tidak ikut terkena dampak bencana tsunami. Ditambah dengan lokasinya yang tidak jauh darikawasan pusat pendidikan yakni Kopelma Darussalam (IAIN, dan Unsyiah) dan Lampoh Keudee (Universitas Abulyama), kemudian menarik aktivitas lain seperti permukiman yang terlihat dari tingginya alih fungi lahan dari ex-persawahan menjadi permukiman – permukiman baru. Sedangkan untuk bagian selatan, perkembangan fisik kota sebagian bahkan telah merembet hingga ke wilayah kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dikarenakan secara administratif, wilayah yang mengalami perkembangan berbatasan langsung dengan kabupaten Aceh Besar. Adapun perkembangan dibagian selatan ini meliputi sebagian wilayah kecamatan Baiturrahman (Neusu) dan kecamatan Banda Raya (Lamlagang, Lhong Raya, Lampeuot), dan wilayah Batoh dan Lamdom.

Perkembangan fisik kota dibagian selatan ini salah satunya dilatar belakangi karena bagian selatan ini tidak terkena dampak langsung bencana tsunami 2004 silam. Adapun aktivitas yang berkembang di bagian selatan ini meliputi aktivitas permukiman yang perdagangan dan jasa, permukiman dan olahraga (keberadaan

Stadion Harapan Bangsa Lhoong Raya sebagai *sport center)*. Jenis penggunaan lahan di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Jenis Penggunaan Lahan di Kota Banda Aceh Tahun 2024

No.	Jenis Penggunaan	Luas Area (Ha)	Persentase
1	Pemukiman	1.318,21	22,34
2	Perkantoran dan Perdagangan	220,69	3,74
3	Fasilitas Kesehatan	36,95	0,63
4	Fasilitas Pendidikan	70,89	1,20
5	Pariwisata	6,85	0,12
6	Peribadatan	14,48	0,25
7	Olah Raga	12,23	0,21
8	Transportasi	1,41	0,02
9	RTH	209,10	13,54
10	Perairan	686,74	11,64
11	Jalan	386,27	6,55
12	TPA dan IPAL	18,52	0,31
13	Ruang Terbuka	2.918,23	49,45
14	Telekomunikasi	0,41	0,01
Jumlah		**5.900,99**	**100**

Sumber: PUPR Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa lebih dari 50 persen lahan di Kota Banda Aceh adalah ruang terbuka (2.969,44 Hektar), sedangkan pemukiman dan perairan masing-masing sebesar 22,03% (1.300,10 Hektar) dan 11,69 persen (690,09 Hektar). Penggunaan lahan untuk TPA dan IPA menempati bagian terkecl dari luas Kota Banda Aceh, yaitu seluas 0,65 Hektar (0,01 persen).

Berdasarkan digitasi dari Citra Satelit Tahun 2015, luas wilayah Kota Banda Aceh 5.900,20 Ha dengan penggunaan lahan kawasan yang sudah terbangun seluas 3.137, 12 Ha atau 53,17 persen dari luas wilayah kota. Dominasi pemanfaatan eksisting lahan terbangun adalah pemanfaatan kawasan perumahan, pemanfaatan peruntukan lainnya, dan pemanfaatan area infrastruktur jalan.

Pemanfaatan lahan eksisting di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada pada Gambar 2.6 berikut ini:

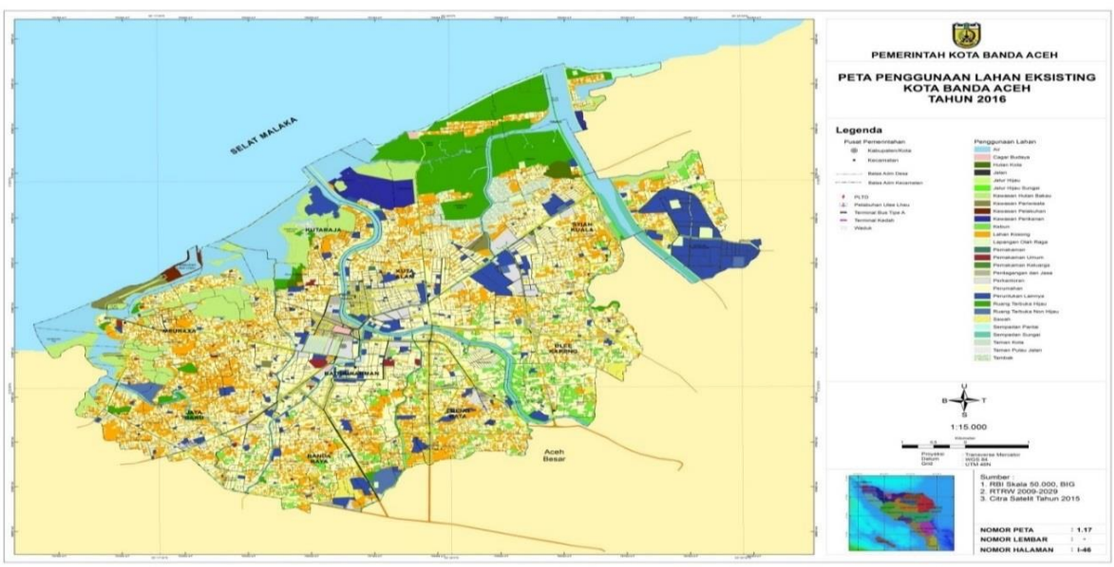

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029

Gambar 2. 6 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kota Banda Aceh

Di samping itu, untuk mengetahui secara rinci penggunaan lahan eksisting-lahan belum terbangun dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2. 5 Penggunaan Lahan Eksiting - Lahan Belum Terbangun Kota Banda Aceh

No	Penggunaan Lahan	Luas	
		Hektar	%
1	Air/Sungai	573.82	21.00
2	Hutan Kota	19.46	0.71
3	Jalur Hijau Jalan	58.15	2.13
4	Jalur Hijau Sungai	20.55	0.75
5	Kawasan Hutan Bakau	308.84	11.30
6	Kawasan Pariwisata	33.29	1.22
7	Kebun	179.41	6.56
8	Lahan Terbuka Produktif	801.61	29.33
9	Pemakaman	22.85	0.84
10	Ruang Terbuka Hijau	431.31	15.78
11	Sawah	9.57	0.35
12	Sempadan Pantai	37.85	1.38
13	Sempadan Sungai	102.16	3.74
14	Taman Kota	37.06	1.36
15	Taman Pulau Jalan	0.61	0.02
16	Tambak	96.53	3.53
	Total	**2733.08**	**100.00**

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029

Kawasan belum terbangun pemanfaatannya antara lain area air/sungai, RTH (hutan kota dan taman kota, RTH lainnya), sempadan pantai, sempadan sungai, jalur hijau sungai, jalur hijau jalan, taman pulau jalan, kebun masyarakat, lahan kosong masyarakat, lahan pemakaman, sawah, tambak, hutan bakau dan kawasan wisata. Area yang yang belum terbangun di wilayah Kota Banda Aceh dengan luasan 2.763,08 Ha atau 46,83 persen dari luas wilayah Kota Banda Aceh. Area yang belum terbangun didominasi oleh area lahan terbuka produktif, area air/sungai dan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan analisis pemanfaatan lahan eksisting area terbangun dan area belum terbangun di Kota Banda Aceh dengan menggunakan Citra Satelit keluaran Februari Tahun 2015, bahwa area tebangun mencapai 53,17 persen dan lahan belum terbangun 46,83 persen dari luas wilayah kota. Hal tersebut menunjukan bahwa kecendrungan pembangunan fisik di wilayah Kota Banda Aceh semakin pesat setiap tahunnya. Oleh karena itu proses perkembangan fisik wilayah kota perlu diantisipasi terhadap daya dukung dan daya tampung terhadap proses pemanfaatan lahan serta perlu diantisipasi ketersedian ruang terbuka hijau yang berkelanjutan untuk keseimbangan ekosistem lingkungan di wilayah Kota Banda Aceh.

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Sistem Perkotaan Nasional, Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana yang dikemukakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kebijakan status PKN juga sudah ditetapkan di dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Penetapan Kota Banda Aceh sebagai PKN di dalam RTRW-Nasional merupakan suatu potensi kebijakan pengembangan wilayah Kota Banda Aceh untuk menjadi skala prioritas Nasional dalam pembangunan nasional.

2.1.1.8.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Rencana sistem pusat pelayanan dimaksudkan untuk memperjelas hirarki kota sesuai dengan struktur kota yang ditetapkan sehingga diperoleh suatu sistem pemanfaatan ruang yang optimal untuk setiap bagian kota. Dalam realitanya, pengembangan sistem pusat pelayanan akan mempermudah masyarakat kota untuk mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan.

Dalam sistem struktur ruang Kota Banda Aceh, dikembangkan dengan Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan terdiri :

1. Pusat Kota Lama Pasar Aceh – Peunayong
2. Pusat Kota Baru Batoh/Lamdom
3. Sub Pusat Kota Lamtemen
4. Sub Pusat Kota Ulee Kareng

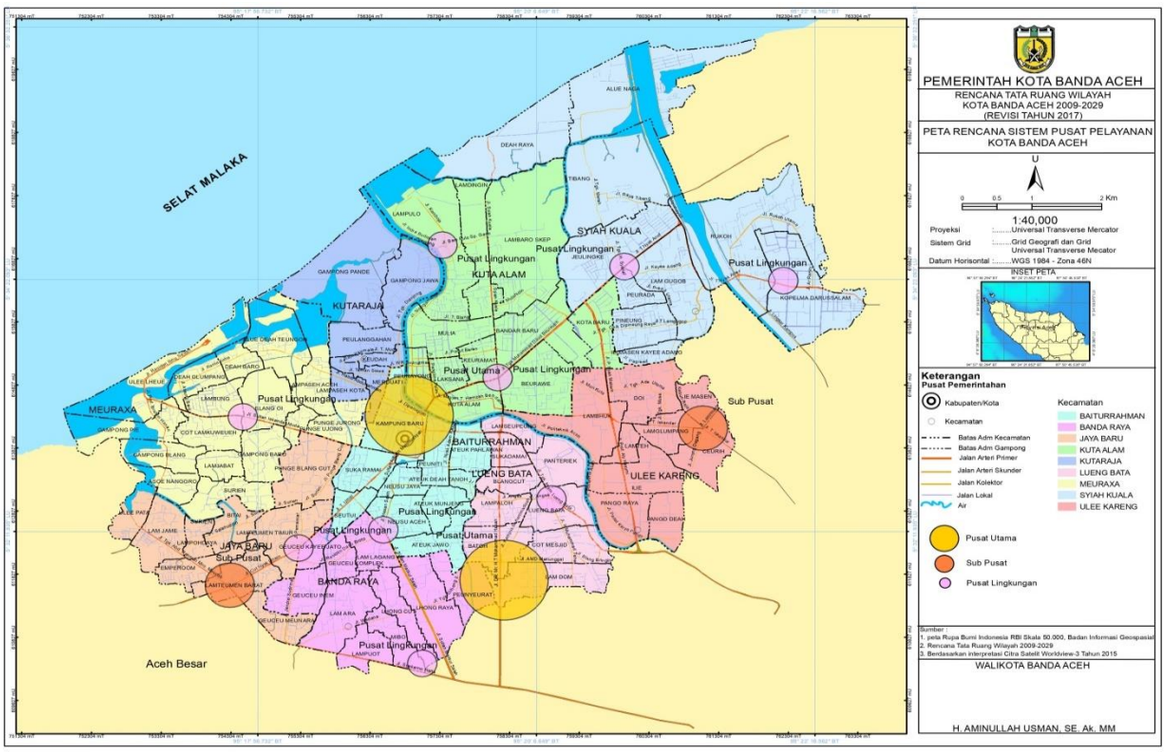

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029

Gambar 2. 7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

Untuk lebih jelas mengenai sistem pusat pelayanan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh dan Tabel 2.6 Rencana pusat–pusat Pelayanan Kota Banda Aceh berikut ini.

Tabel 2. 6 Rencana Pusat-Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

No	Pusat Pelayanan / Subpusat Pelayanan/ Unit Lingkungan	Fungsi	Skala Pelayanan
A.	Pusat Kota		
1.	Peunayong / Kampung Baru (Pusat Kota Lama)	• Pusat pemerintahan Kota Banda Aceh • Perdagangan dan Jasa • Perkantoran	Regional & Kota
2.	Batoh/Lamdom (Pusat Kota Baru)	• Pusat pemerintahan / perkantoran yang baru • Pusat perdagangan dan jasa • Permukiman	Regional Regional & Kota
B.	Sub Pusat Kota		
1.	Lamtemen	• Perdagangan dan Jasa • Permukiman	Regional dan Lokal
2.	Ulee Kareng	• Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan lokal
C.	Pusat Lingkungan		
1.	Lampulo	• Pelabuhan ikan • Galangan kapal • Industri pengolahan ikan • Perumahan nelayan	Regional & Kota
2.	Jambo Tape	• Pusat Pemerintahan Prov Aceh & Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting) • Perdagangan dan jasa	Regional Kota dan Lokal
3.	Neusu	• Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan lokal
4.	Kopelma Darussalam	• Pendidikan • Perdagangan dan jasa	Regional Kota dan lokal
5	Jeulingke	• Pusat Pemerintahan Prov Aceh & Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting) • Perdagangan dan jasa • Permukiman	Regional Kota dan Lokal
6	Lueng Bata	• Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan lokal
7	Mibo	• Pusat Pemerintahan dan Perkantoran Kota Banda Aceh • Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan Lokal
8	Blang Oi	• Perdagangan dan jasa • Permukiman • Perikanan • Pelabuhan • Wisata	Kota dan lokal Regional dan Lokal
9	Lamteumen	• Perkantoran • Perdagangan dan jasa • Permukiman	Regional, Kota dan lokal

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Rencana pengembangan kawasan pusat kota lama Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan nilai *heritage* kawasan Pusat Kota Lama sehingga meningkatkan nilai historis Kota Banda Aceh. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian dalam rencana ini adalah:

1. Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman

Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman bertujuan untuk meningkatkan nilai historis dan memberikan citra baru terhadap *landmark* Provinsi Aceh, sehingga kawasan ini dapat terpadu sebagai kawasan *heritage* dengan kawasan komersial Kota Banda Aceh yang memiliki nilai yang tinggi terhadap fungsi dan citra

kawasan. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan terhadap pengembangan kawasan ini adalah peningkatan *landmark* Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh serta mendukung penataan kawasan *water front city,* dimana Sungai Krueng Aceh dan jembatan Pante Pirak menjadi salah satu gerbang masuk ke kawasan Mesjid Raya Baiturrahman. Adapun luas kawasan yang akan digunakan untuk area pengembangan Mesjid Raya Baiturrahman ini adalah sekitar 12,08 Ha, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.8 berikut ini:

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 8 Kawasan Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh

2. Pengembangan Kawasan CBD Peunayong

Rencana Pengembangan Kawasan CBD Peunayong terdiri atas dua rencana pengembangan; (1) Pengembangan Kawasan Terminal Keudah, yang terintegrasi dengan zona komersial; dan (2) Pengembangan Jembatan Penyebrangan Pedestrian Keudah-Peunayong. Pengembangan kawasan ini adalah untuk me-revitalisasi kawasan Pusat Kota Lama kawasan Peunayong.

3. Pengembangan Kawasan Terminal Keudah

Pengembangan Kawasan Terminal Keudah bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik di Kota Banda Aceh, meningkatkan akses dan kenyamanan publik terhadap transportasi publik. Rencana pengembangan kawasan ini mengadaptasikan konsep *mix-use building*, dimana Kawasan Terminal Keudah akan diarahkan untuk menjadi kawasan *one-stop shopping*, sehingga kawasan ini mampu untuk menjadi titik transit bagi pengguna angkutan umum. Kawasan ini juga akan diarahkan untuk memiliki ruang parkir yang luas dan terintegrasi dengan sisi Barat (Jl. Tentara Pelajar) sebagai pintu masuk dan sisi Timur (Jl. Cut Mutia) sebagai pintu keluar. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pengembangan kawasan ini dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut ini:

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 9 Rencana Pengembangan Central Bussiness District (CBD) Keudah Kota Banda Aceh

4. Rencana Jembatan Penyebrangan Pedestrian Keudah Peunayong

Jembatan penyebrangan pedestrian Keudah-Peunayong direncanakan selain fungsinya sebagai jembatan penyebrangan pedestrian, juga akan memiliki fungsi sebagai daya tarik antara Peunayong dan Keudah, jembatan ini diarahkan untuk dapat menciptakan ruang publik yang terpadu dengan kawasan perdagangan dan jasa (dengan spesialisasi kuliner; restoran, warung kopi, dan cafe). Konsep rencana pengembangan ini dapat dilihat pada Gambar 2.10 berikut ini :

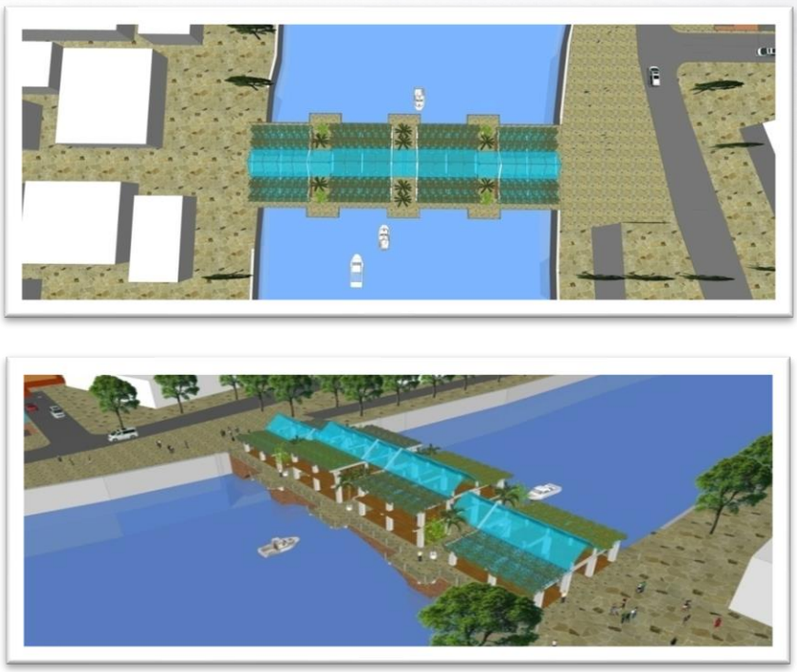

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 10 Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong Kota Banda Aceh

2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Ditinjau dari wilayah rawan bencana, Kota Banda Aceh masih dalam kategori sedang. Berdasarkan dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Banda Aceh memiliki indeks resiko bencana dengan skor 127,31. Sementara itu, Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana Kota Banda Aceh berada pada kategori sedang dengan skor 0,58 pada tahun 2020. Adapun ancaman bencana di Kota Banda Aceh antara lain berupa:

1. Rawan bencana banjir
2. Rawan bencana gempa bumi
3. Rawan bencana tsunami
4. Ancaman kebakaran hutan dan lahan
5. Ancaman bencana gelombang ekstrim dan abrasi
6. Ancaman tanah longsor
7. Ancaman kekeringan
8. Rawan bencana cuaca ekstrem

Kawasan rawan bencana yang telah ditetapkan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan Banda Aceh ke depan baik dari segi penetapan struktur ruang dan pola ruang, maupun dalam menentukan pengaturan bangunan (*building code*) dan manajemen mitigasi bencana. Untuk lebih jelasnya kawasan rawan bencana di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.11 sampai dengan 2.14 di bawah ini:

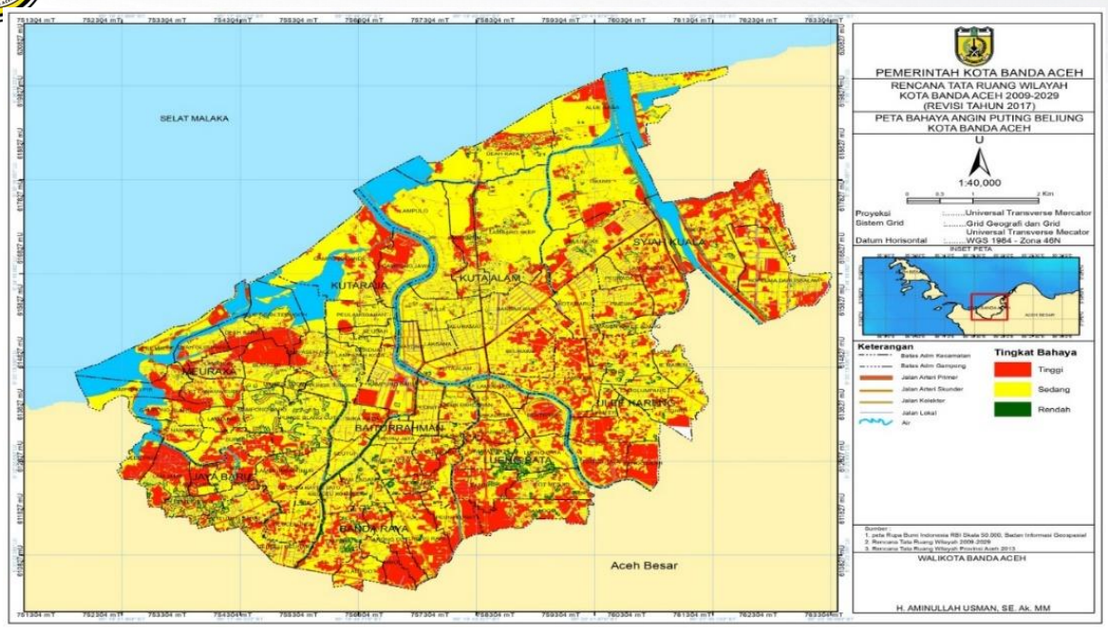

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 11 Peta Bahaya Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh

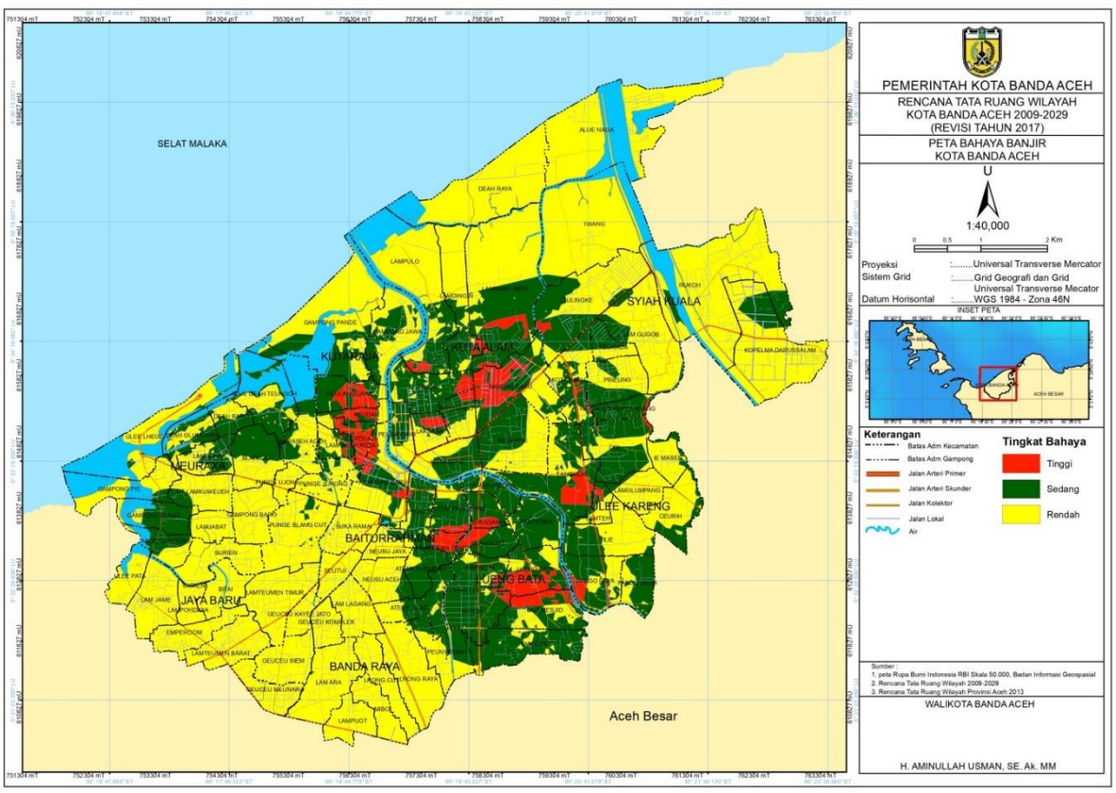

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 12 Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh

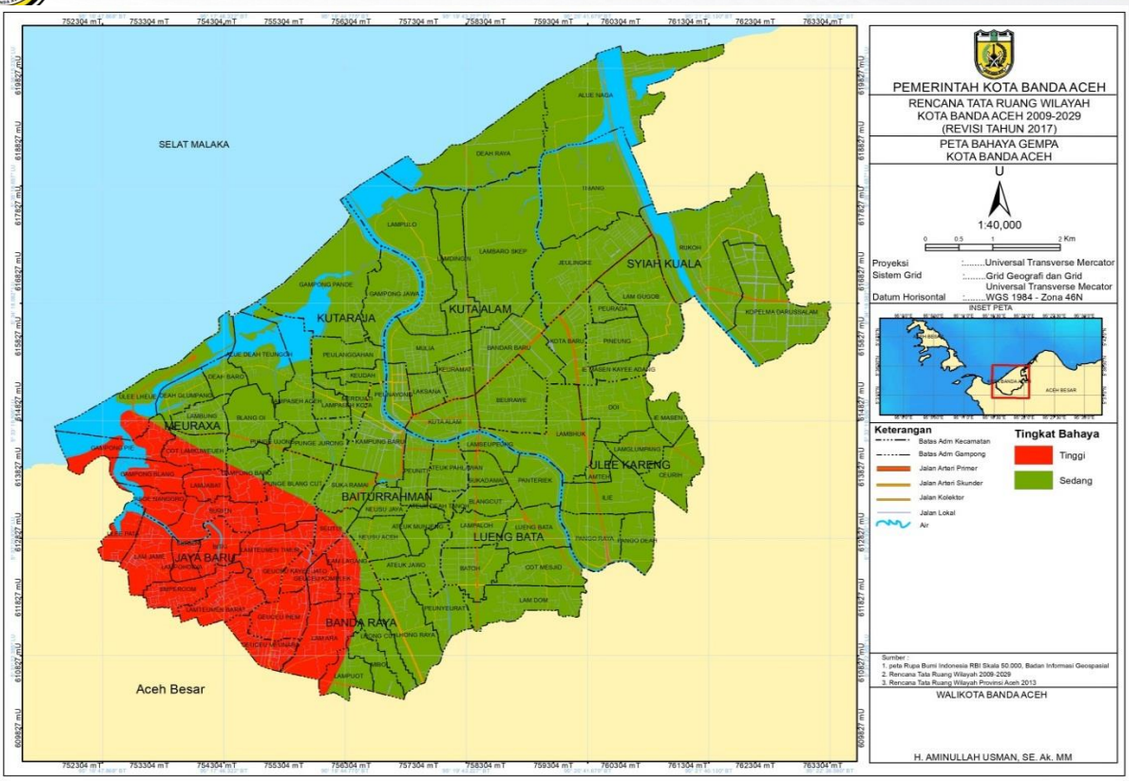

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 13 Kawasan Bahaya Gempa Kota Banda Aceh

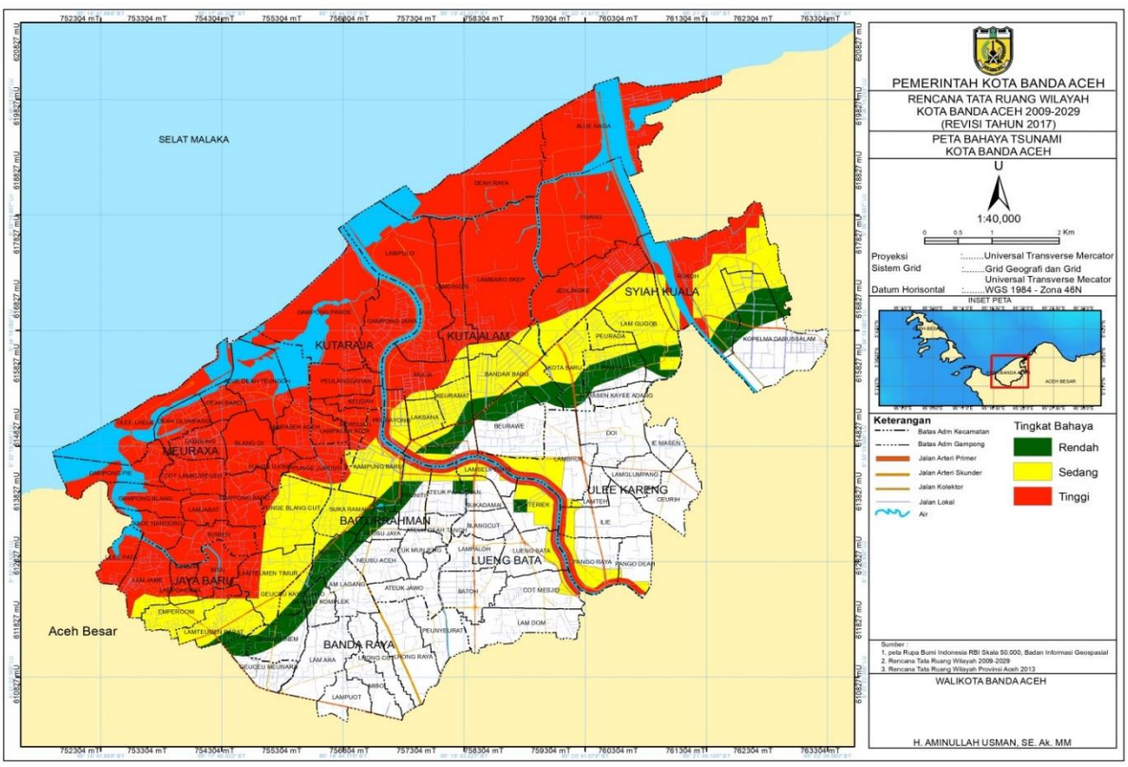

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 14 Kawasan Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh

2.1.1.10 Demografi

Jumlah penduduk adalah penduduk yang tercatat sebagai warga Kota Banda Aceh. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2024 sebanyak 265,020 jiwa. Secara rinci peningkatan jumlah penduduk Kota Banda Aceh dari Tahun 2011 sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.15 di bawah ini:

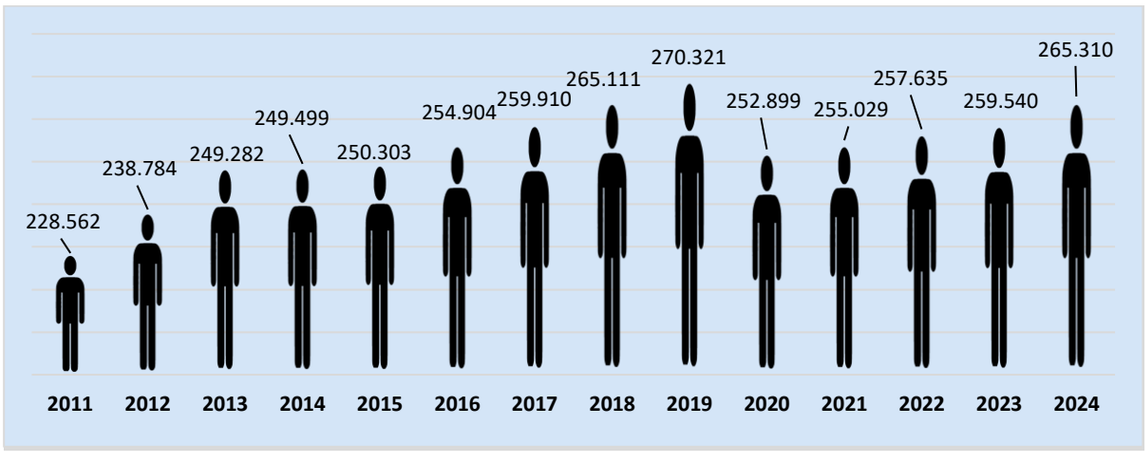

Sumber : Kota Banda Aceh dalam Angka (Beberapa Tahun), 2024

Gambar 2. 15 Grafik Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2012-2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2019 sebesar 270.321 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 252.899 jiwa menurun daripada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena sensus penduduk dilakukan oleh BPS pada bulan September 2020 bersamaan dengan terjadinya pandemic *Covid*-19. Berdasarkan penjelasan BPS Kota Banda Aceh, penurunan jumlah penduduk Kota Banda Aceh tahun 2020 terjadi akibat sebagian besar proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dilakukan secara daring selama masa *Covid*-19 di tahun 2020. Pada masa *Covid*-19, sebagian besar mahasiswa PTN/PTS tidak berada di Kota Banda Aceh dan melakukan kegiatan daring dari kampung halaman masing-masing. Di samping itu, survei penduduk oleh BPS dilakukan secara *de vakto*. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Banda Aceh kembali meningkat menjadi 255.029 jiwa. Dan di tahun 2024 jumlah penduduk Kota Banda Aceh semakin bertambah menjadi 265.020 jiwa.

Data terkait jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2024

KELOMPOK UMUR	ACEH				KOTA BANDA ACEH			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL PENDUDUK	PERSENTASE (%)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL PENDUDUK	PERSENTASI (%)
0-4	258.484	247.555	506.039	9.11	11.463	10.837	22.300	8.40
5-9	248.953	238.027	486.980	8.77	13.763	13.077	26.840	10.11
10-14	247.392	235.992	483.384	8.70	13.364	12.541	25.905	9.76
15-19	248.173	233.515	481.688	8.67	11.603	11.166	22.769	8.58
20-24	241.976	229.967	471.943	8.50	9.282	9.106	18.388	6.93
25-29	235.413	226.681	462.094	8.32	8.986	9.894	18.880	7.11
30-34	224.857	218.945	443.467	7.98	10.476	11.596	22.072	8.31
35-39	212.915	210.552	423.467	7.62	11.293	12.284	23.577	8.88

KELOMPOK UMUR	ACEH				KOTA BANDA ACEH			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL PENDUDUK	PERSENTASE (%)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL PENDUDUK	PERSENTASI (%)
40-44	194.737	194.678	389.415	7.01	10.831	10.718	21.549	8.12
45-49	174.590	176.504	351.094	6.32	8.762	8.134	16.896	6.36
50-54	148.217	151.633	299.850	5.40	7.169	7.101	14.270	5.37
55-59	119.147	123.877	243.024	4.38	5.455	5.803	11.258	4.24
60-64	92.214	98.320	190.534	3.43	4.174	4.248	8.422	3.17
65-69	65.402	72.265	137.667	2.48	2.743	2.724	5.467	2.06
70-74	41.831	50.132	91.963	1.66	1.576	1.795	3.371	1.27
75+	35.390	56.481	91.871	1.65	1.1.309	2.037	3.346	1.26
Total	**2.789.691**	**2.765.124**	**5.554.815**	**100**	**132.249**	**133.061**	**265.310**	**100**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2.7 di atas menunjukkan di Provinsi Aceh menurut kelompok umur dan jenis kelamin tertinggi adalah pada kelompok umur antara (0-4) tahun, yaitu sebanyak 506.039 jiwa (9.11%) dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 258.484 jiwa dan perempuan sebesar 248.953 jiwa. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin terendah adalah pada kelompok umur 75+ tahun, yakni sebesar 91.871 jiwa (1,65%). Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki pada kelompok umur ini adalah sebesar 35.390 jiwa dan perempuan sebesar 56.481 jiwa. Jumlah penduduk usia muda pada kelompok umur antara (10-14) tahun sebesar 483.384 jiwa (8.70%), dan jumlah penduduk usia remaja pada kelompok umur (15-19) tahun sebesar 481.688 jiwa (8.67%).

Kota Banda Aceh, jumlah penduduk tertinggi berada pada kelompok umur antara (5-9) tahun sebesar 26.840 jiwa (10,11%). Jumlah penduduk menurut terendah adalah pada kelompok umur 75+ tahun, yakni sebesar 3.346 jiwa (1,26%). Jumlah penduduk usia muda pada kelompok umur antara (10-14) tahun menjadi urutan kedua jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 25.905 jiwa (9,76%).

Adapun permasalahan mengenai kependudukan yang terjadi di Kota Banda Aceh saat ini tidak jauh berbeda dengan kota-kota lainnya. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah perpindahan penduduk dari daerah lain di Provinsi Aceh ke Kota Banda Aceh yang menyebabkan bertambahnya penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya di ibukota provinsi. Daya tarik Kota Banda Aceh yang memiliki sarana dan prasarana yang relatif lebih baik dan berkualitas dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi, sosial dan bidang lainnya.

Untuk mengetahui indikator kependudukan Kota Banda Aceh yang meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, dan sex ratio penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2. 8 Indikator Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	Jiwa	252.899	255.029	257.635	259.540	265.310
Pertumbuhan	%	-6,44	0,84	1,02	1,62	2.22
Kepadatan	Ribu Jiwa/ km^2	4,12	4,15	4,19	4,23	4,32
Sex Ratio	%	102	102	102	99,43	99,39

Sumber : BPS Kota Banda Aceh, 2024

Laju pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 sebesar -6,44 persen yang diakibatkan oleh pandemi Covid 19. Namun pada tahun 2021 dan tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan sebesar 0,84 persen dan 1,02 persen. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 2,22 persen. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2024 berjumlah 4,32 ribu jiwa per km^2 yang mengalami peningkatan kepadatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4,23 ribu jiwa per km^2. Berdasarkan data diatas sex ratio dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 sex ratio sebesar 99,39%.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.16 berikut ini:

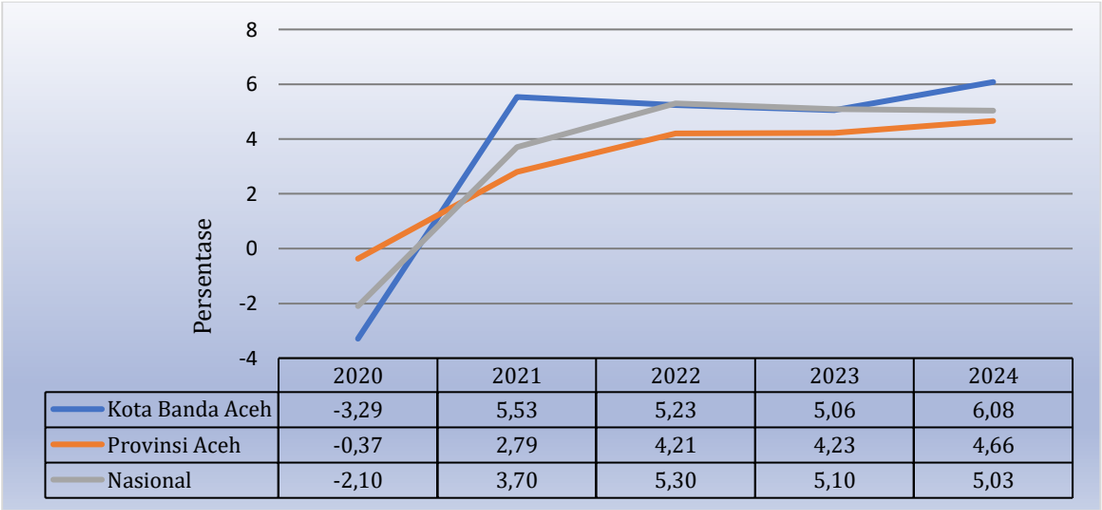

	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Banda Aceh	-3,29	5,53	5,23	5,06	6,08
Provinsi Aceh	-0,37	2,79	4,21	4,23	4,66
Nasional	-2,10	3,70	5,30	5,10	5,03

Sumber : Kota Banda Aceh dalam Angka, 2024

Gambar 2. 16 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mengalami pelambatan pada tahun 2020 akibat dari pandemi *Covid*-19 yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Seluruh sektor mengalami pelambatan yang pada akhirnya menurunkan secara drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. hingga menjadi -3.29 di tahun 2020. Pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh kembali meningkat menjadi 5,53 persen. Namun, pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh kembali mengalami penurunan menjadi 5,23 pada tahun 2022 dan 5,06 pada tahun 2023. Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh meningkat dengan cukup baik hinga mencapai 6.08.

Rendahnya nilai PDRB pada tahun 2020 menunjukkan penurunan kinerja perekonomian. Pandemi *Covid*-19 telah mengakibatkan penurunan perekonomian Kota Banda Aceh yang dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Kenaikan PDRB selama 4 tahun terakhir disebabkan adanya peningkatan adminsitrasi

pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Kota Banda Aceh adalah pusat ibukota Provinsi Aceh menjadi tempat beraktivitas Pemerintahan Provinsi Aceh. Struktur Kota Banda Aceh hingga tahun 2024 masih didominasi oleh sektor jasa yakni Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kedua kategori tersebut memiliki peranan yang besar terhadap pembentukan PDRB (masing-masing 22,06 persen dan 21,3 persen). Namun peranan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung berkurang dari tahun ke tahun.

Terdapat tiga sektor yang tumbuh di atas 10 persen pada tahun 2024 yakni sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (22,06 persen, perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor (21,3 pesen), dan sektor transportasi dan perdagangan (11,09), sedangkan sektor lainnya masih dibawah 10 persen.

Tabel 2. 9 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Banda Aceh (Juta)

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	246,29	1,33	253,95	1,27	274,74	1,27	393,38	1,65	458,49	1,76
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	395,97	2,14	436,74	2,19	480,55	2,23	493,48	2,08	541,49	2,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	70,81	0,38	71,84	0,36	74,61	0,35	79,44	0,33	85,56	0,33
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,27	0,16	30,02	0,15	33,34	0,15	35,10	0,15	43,21	0,17
6	Konstruksi	1 175,72	6,35	1 194,85	5,99	1 280,42	5,94	1 358,68	5,71	1.468,05	5,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 875,51	20,95	4 208,23	21,1	4 563,76	21,17	5 237,04	22,03	5.543,,51	21,3
8	Transportasi dan Pergudangan	1 352,99	7,31	1 714,52	8,60	1 928,40	8,95	2 338,13	9,83	2.886,61	11,09
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	785,44	4,25	769,87	3,86	1 022,32	4,74	1 220,85	5,13	1.313.40	5,05
10	Informasi dan Komunikasi	960,39	5,19	999,34	5,01	1 107,86	5,14	1 283,92	5,40	1.294,40	4,97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	611,61	3,31	621,35	3,12	653,53	3,03	591,19	2,49	702,69	2,7
12	Real Estate	1 545,84	8,36	1 604,64	8,05	1 719,40	7,98	1 803,85	7,59	1.880,74	7,23
13	Jasa Perusahaan	464,11	2,51	475,35	2,38	534,02	2,48	551,75	2,32	577,47	2,22
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4 326,81	23,39	4 729,95	23,72	4 808,66	22,31	5 121,50	21,54	5.741,91	22,06
15	Jasa Pendidikan	1 473,45	7,96	1 548,02	7,76	1 631,47	7,57	1 703,04	7,16	1.828,82	7,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	796,39	4,30	881,69	4,42	990,93	4,60	1 047,41	4,41	1.106,84	4,25
17	Jasa lainnya	390,02	2,11	403,01	2,02	452,97	2,10	518,72	2,18	551,94	2,12
	PDRB	18 501,63	100,00	19 943,40	100,00	21 556,95	100,00	23 777,46	100,00	26.025,15	100

Sumber: Banda Aceh dalam angka, 2025

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga sehingga dapat memberikan pengertian yang salah akan perkembangan perekonomian. Untuk itu agar dapat melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2012. Nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh pada tahun 2023 sebesar Rp 17,07 Juta, naik pada tahun 2025 sebesar 18,11 juta.

Tabel 2. 10 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh (Juta)

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	170,01	4,64	170,11	0,06	177,65	4,43	242,84	36,69	272,48	12,21
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	307,51	-4,72	315,96	2,75	323,95	2,53	323,85	-0,03	349,38	7,89
4	Pengadaan Listrik dan Gas	68,84	5,76	68,64	-0,28	70,21	2,28	73,12	4,14	75,78	3,64
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,82	-2,76	16,67	-0,88	18,30	9,79	*18,55*	*4,19*	19,40	*4,58*
6	Konstruksi	1 008,50	4,42	1 019,22	1,06	1 022,54	0,33	1 060,13	3,68	1 135,08	7,07
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 940,62	-5,13	3 073,18	4,51	3 274,16	6,54	*3 541,43*	*8,16*	*3 633,29*	*2,59*
8	Transportasi dan Pergudangan	1 366,71	-24,53	1 717,31	25,65	1 821,86	6,09	1 899,29	4,26	2 222,59	17,02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	467,19	-11,56	451,62	-3,33	581,06	28,66	*692,61*	*19,20*	*732,39*	*5,74*
10	Informasi dan Komunikasi	1 245,76	9,52	1 350,92	8,44	1 476,56	9,30	1 599,55	8,33	1 678,59	4,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	415,51	2,24	400,82	-3,53	395,10	-1,43	352,12	-10,88	412,19	17,06
12	Real Estate	1 097,92	-3,10	1 135,07	3,38	1 183,77	4,29	1 221,17	3,16	1 275,40	4,44
13	Jasa Perusahaan	345,92	-3,87	348,24	0,67	375,40	7,80	372,33	-0,82	393,86	5,78
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3 206,04	-1,57	3 326,18	3,75	3 341,84	0,47	3 427,18	2,55	3 576,10	4,35
15	Jasa Pendidikan	1 036,33	5,31	1 065,12	2,78	1 102,63	3,52	1 128,80	2,37	1 183,96	4,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	639,73	7,11	675,86	5,65	740,26	9,53	749,45	1,24	758,32	1,18
17	Jasa lainnya	310,89	0,17	315,03	1,33	352,64	11,94	377,45	7,04	398,96	5,70
	PDRB	**14 644,29**	**-3,39**	**15 449,97**	**5,50**	**16 257,93**	**5,23**	**17 079,85**	**5,06**	**18 117,78**	**6,08**

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2024

Bila dibandingkan untuk setiap lapangan usaha/sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 pada masing-masing lapangan usaha ada yang meningkat namun ada juga yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat kategori berdasarkan PDRB ADHB dan ADHK yang tumbuh di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2024. Untuk PDRB ADHB terdapat tiga sektor yang tumbuh di atas 10 persen pada tahun 2024 yakni sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (22,06 persen, perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor (21,3 pesen), dan sektor transportasi dan perdagangan (11,09 persen). Sedangkan untuk PDRB ADHK peningkatan laju pertumbuhan terbesar dialami sektor jasa keuangan dan asuransi. Sektor ini mengalami peningkatan laju pertumbuhan sebesar 17,06 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar -10,88 persen. Sektor transportasi dan pergudangan juga mendominasi pada PDRB ADHK yakni sebesar 17,02 persen.

Tabel 2. 11 Perkembangan Konstribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Banda Aceh

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,33	4,64	1,27	0,06	1,27	4,43	1,65	36,69	1,76	12,21
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	2,14	-4,72	2,19	2,75	2,23	2,53	2,08	-0,03	2,08	7,89
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,38	5,76	0,36	-0,28	0,35	2,28	0,33	4,14	0,33	3,64

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	-2,76	0,15	-0,88	0,15	9,79	0,15	*4,19*	***0,17***	4,58
6	Konstruksi	6,35	4,42	5,99	1,06	5,94	0,33	5,71	3,68	5,64	7,07
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,95	-5,13	21,1	4,51	21,17	6,54	22,03	*8,16*	***21,30***	2,59
8	Transportasi dan Pergudangan	7,31	-24,53	8,60	25,65	8,95	6,09	9,83	4,26	11,09	17,02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,25	-11,56	3,86	-3,33	4,74	28,66	5,13	*19,20*	***5,05***	5,74
10	Informasi dan Komunikasi	5,19	9,52	5,01	8,44	5,14	9,30	5,40	8,33	4,97	4,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,31	2,24	3,12	-3,53	3,03	-1,43	2,49	-10,88	2,70	17,06
12	Real Estate	8,36	-3,10	8,05	3,38	7,98	4,29	7,59	3,16	7,23	4,44
13	Jasa Perusahaan	2,51	-3,87	2,38	0,67	2,48	7,80	2,32	-0,82	2,22	5,78
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23,39	-1,57	23,72	3,75	22,31	0,47	21,54	2,55	22,06	4,35
15	Jasa Pendidikan	7,96	5,31	7,76	2,78	7,57	3,52	7,16	2,37	7,03	4,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,30	7,11	4,42	5,65	4,60	9,53	4,41	1,24	4,25	1,18
17	Jasa lainnya	2,11	0,17	2,02	1,33	2,10	11,94	2,18	7,04	2,12	5,70
	PDRB	**100,00**	**-3,39**	**100,00**	**5,50**	**100,00**	**5,23**	**100,00**	**5,06**	**100,00**	6,08

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2024

Untuk distribusi PDRB ADHB berdasarkan pengeluaran pada tahun 2024 dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menunjukkan kontributor terbesar pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Komponen ini terlihat mendominasi dalam PDRB yang melebihi 50 persen.

Tabel 2. 12 Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024

Komponen	2020		2021		2022		2023		2024	
	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,38	-2,12	58,46	2,36	57,14	3,43	55,76	4,33	53,62	3,57
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,75	-5,44	1,59	-2,78	1,63	9,98	1,64	9,90	1,81	14,68
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	42,69	-6,85	41,70	2,95	37,14	-5,83	35,28	1,32	37,17	14,13
Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,21	2,00	24,22	0,85	23,29	0,37	23,62	5,87	24,26	8,43
Perubahan Inventori	0,78	-29,41	0,91	4,90	0,87	4,22	0,22	-	0,10	-
Net Ekspor	-30,81	-2,72	-26,88	-20,68	-20,06	-48,32	-16,52	-	-16,95	-
P D R B	**100,00**	**-3,39**	**100,00**	**5,50**	**100,00**	**5,23**	**100,00**	**5,06**	**100,00**	**6,08**

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2025

Pada tahun 2024 distribusi PDRB ADHK menurut pengeluaran dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi LNPRT yaitu sebesar 14,68 persen. Pengeluaran konsumsi LNPRT yaitu pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui perbandingan tingkat inflasi di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.17 di bawah ini :

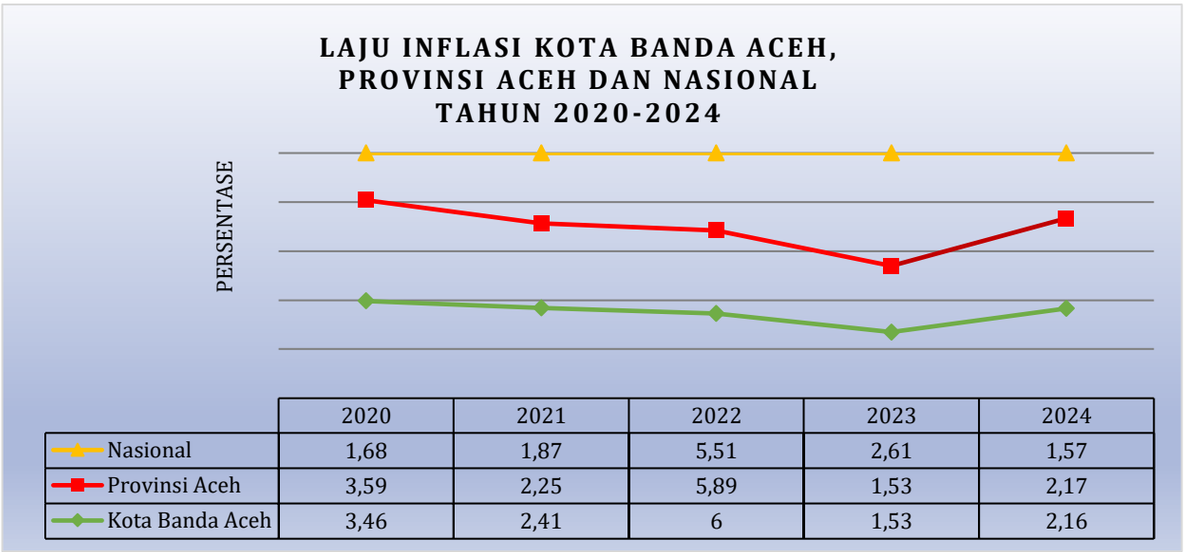

	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
Provinsi Aceh	3,59	2,25	5,89	1,53	2,17
Kota Banda Aceh	3,46	2,41	6	1,53	2,16

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 17 Grafik Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Gambar 2. 17 di atas menunjukkan laju inflasi Kota Banda Aceh pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Laju inflasi Kota Banda Aceh berada pada angka 2,16, tidak berbeda jauh daripada laju inflasi Provinsi Aceh yaitu sebesar 2,17. Fluktuasi dari laju inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh menunjukkan adanya kejutan/shock yang disebabkan faktor-faktor penyebab inflasi baik dari sisi permintaan (masyarakat) atau yang lebih dikenal dengan istillah tarikan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) ataupun dari sisi penawaran (pelaku usaha) atau dikenal dengan istillah dorongan dari sisi penawaran (*cost push inflation*).

C. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari PDRB Per-Kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh sebab itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita dan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Semakin tinngi pendapatan per kapita sering dikaitkan dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. PDRB per-Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Untuk mengetahui nilai PDRB Per-Kapita Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Gambar 2.18 di bawah ini:

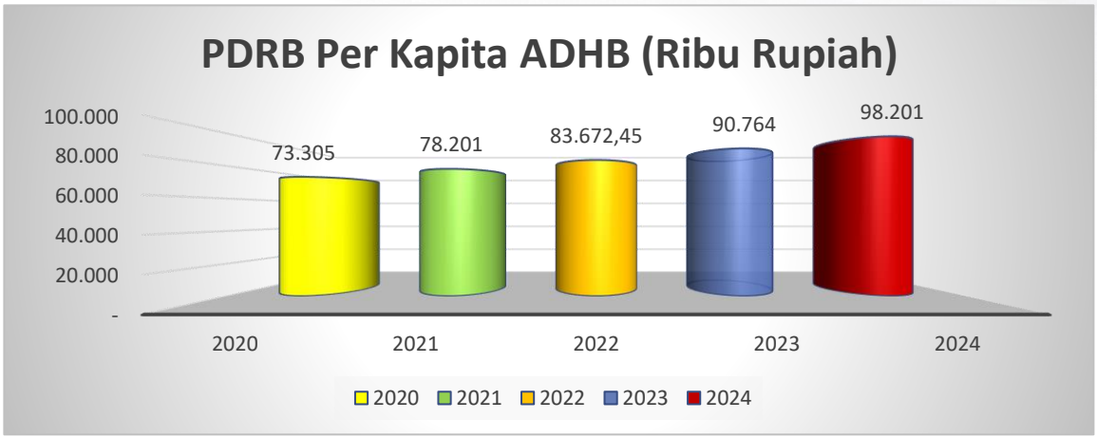

Sumber : BPS Kota Banda Aceh Tahun 2024

Gambar 2. 18 PDRB Per Kapita Kota Banda Aceh ADHB Tahun 2020-2024

Gambar 2.18 di atas menunjukkan bahwa PDRB per-Kapita Kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku selama periode Tahun 2020 sampai Tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 98,201 ribu rupiah.

Di samping itu, untuk mengetahui pertumbuhan PDRB per-Kapita Kota Banda Aceh atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Gambar 2.19 di bawah ini:

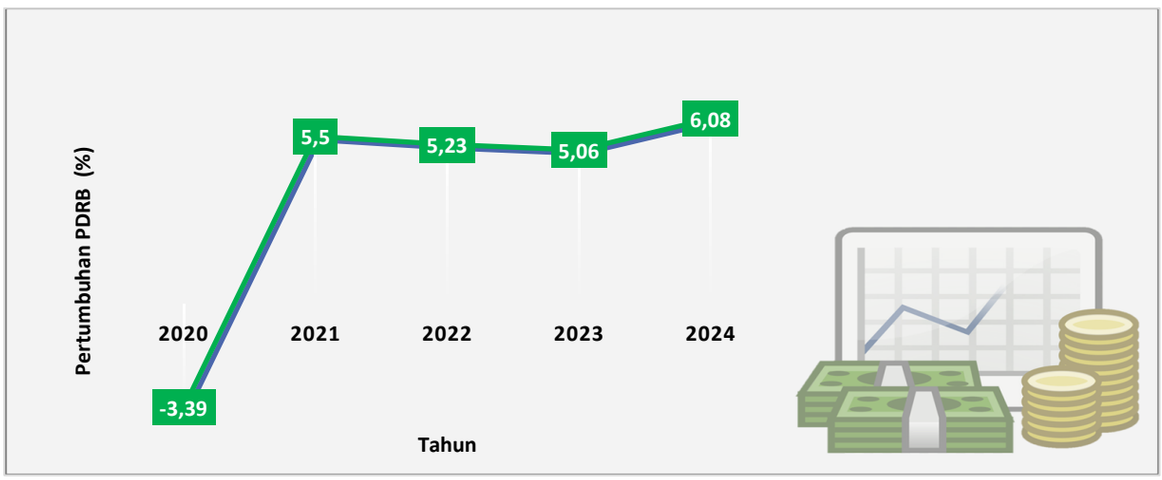

Sumber : BPS Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 19 Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2.19 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB per-kapita Kota Banda Aceh atas dasar harga konstan Tahun 2020 sampai Tahun 2024 berfluktuasi setiap tahunnya. PDRB pada tahun 2020 sebesar -3,39. Penurunan PDRB ini disebabkan karena adanya pandemi *Covid*-19 yang melemahkan aktivitas perekonomian. Tahun 2021 PDRB Kota Banda Aceh kembali meningkat sebesar 5.5 persen. PDRB Kota Banda Aceh pada tahun 2024 mencapai 6,08.

D. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang melingkupi banyak faktor termasuk ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Arti kemiskinan lebih dari sekedar rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari indikator kesejahteraan terukur seperti garis kemiskinan, namun berkaitan juga dengan ketidakmampuan

untuk mencapai aspek di luar pendapatan *(non-income factors)* seperti akses kebutuhan dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Mengingat multidimensionalnya permasalahan kemiskinan, penanganannya memerlukan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu. Dalam hal ini, perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin" yang ditetapkan misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/ pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "orang miskin selalu hadir bersama kita". dengan menggunakan definisi ini, penduduk miskin di suatu negara kaya dapat dikategorikan sebagai penduduk sejahtera di negara berkembang seperti Indonesia. (Ravallion, 1998 : 26).

Selain itu, juga dikenal terminologi kemiskinan lain seperti kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam "Suyanto (1995:59) mendefinisikan bahwa "Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan". Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang sehingga ia tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Dalam hal ini, faktor-faktor adat dan budaya justru menyebabkan seseorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini seperti yang dialami oleh suku terasing yang terikat dengan tradisi sosio-kultural seperti suku Badui, suku Dayak di pedalaman Kalimantan dan lain-lain. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach).* Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Untuk mengetahui Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.20 di bawah ini:

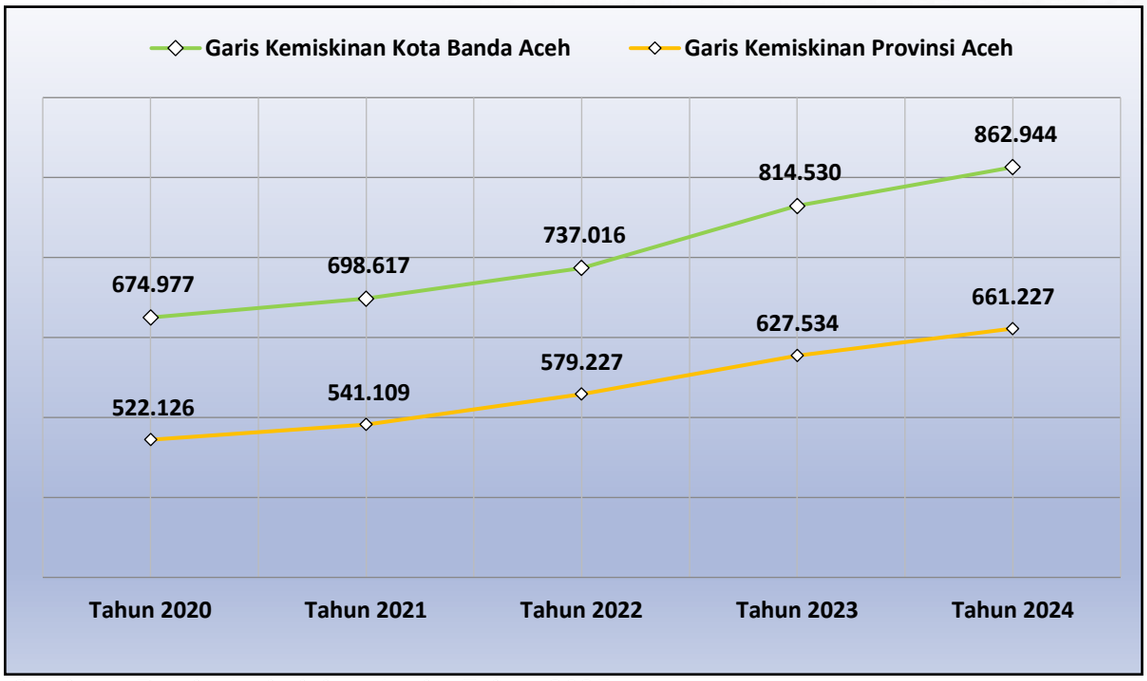

Sumber : Banda Aceh dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2. 20 Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

Gambar 2.20 di atas membandingkan antara garis kemiskinan Kota Banda Aceh dan garis kemiskinan Provinsi Aceh. Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa garis kemiskinan Kota Banda Aceh berada di atas garis kemiskinan Provinsi Aceh selama periode 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran per-kapita per-bulan penduduk Kota Banda Aceh lebih tinggi dari pengeluaran per-kapita penduduk Provinsi Aceh. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Meskipun garis kemiskinan Kota Banda Aceh masih lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh, namun garis kemiskinan Kota Banda Aceh selama periode 2020-2024 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dimana Tahun 2020 meningkat menjadi Rp 674.977 per bulan. Begitu juga untuk 4 (empat) tahun berikutnya (2021-2024), Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh meningkat lagi menjadi masing-masing Rp 698.617; Rp 737.016; Rp 814.530; dan Rp 862.944; Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya garis kemiskinan di Kota Banda Aceh selama ini adalah pengaruh mahalnya harga barang dan jasa yang mengakibatkan kenaikan harga umum.

Di samping itu, untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.21 di bawah ini:

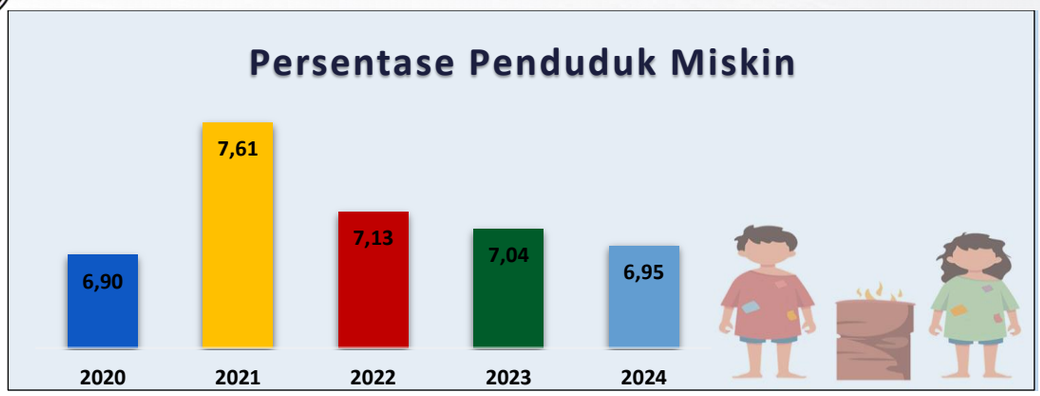

Sumber : Banda Aceh dalam Angka Tahun, 2025

Gambar 2. 21 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2021 sebesar 7,61 %, pada tahun 2024 menurun menjadi 6,95%. Ini merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan karena Kota Banda Aceh terus menuju pemberantasan kemiskinan. Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, angka kemiskinan Kota Banda Aceh masih lebih rendah dibandingkan keduanya.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang tertuang dalam RKPD dan APBD. Pada Tahun 2022 Kota Banda Aceh telah menyiapkan anggaran kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu sebesar Rp. 130.616.828.186, hingga bulan Mei telah terealisasi sebesar Rp. 21.041.759.328 (16,11%). Langkah Kongkrit dalam penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui 6 strateri penanganan, yaitu:

1. Mengurangi Beban Pengeluaran, kegiatannya antara lain:
   - Asupan Makanan dan Nutrisi Ibu Hamil, Menyusui, Balita dan Bayi
   - Beasiswa miskin SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA
   - Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) / Faqir Miskin
   - Program Keluarga Harapan (PKH)
   - DLL
2. Meningkatkan Pendapatan, kegiatannya antara lain:
   - Bantuan Kelompok Usaha
   - Program Pembiayaan Revolving Gampong
   - Belanja Hibah Kepala Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
   - Kegiatan Job Fair
3. Meningkatkan Kualitas SDM, Kegiatannya antara lain:
   - Pelatihan manajemen usaha bagi perempuan
   - Optimalisasi omzet melalui market place
   - Pelatihan peningkatan kapasitas perempuan
   - Pelatihan berbasis kompetensi
4. Mengurangi kantong-kantong kemiskinan, kegiatan antara lain:
   - Perbaikan rumah tidak layak huni
   - Pembangunan rumah layak huni
   - Bantuan biaya pembangunan rumah duafa
   - Bantuan biaya renovasi rumah duafa

5. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, kegiatannya antara lain:
   - Pasar murah
   - Pelaksanaan pasar pangan murah (toko tani)
6. Menanggulangi dan mengurangi dampak bencana, kegiatannya antara lain:
   - Penyediaan makanan (program penanganan bencana)
   - Bantuan musibah kebakaran duafa

Data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem lingkup desa/kelurahan Rekap Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 Persentil Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 13 Rekap Data P3KE Desil 1 Persentil Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desil Kesejahteraan 1	PERSENTIL									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOTA BANDA ACEH	Kec. Baiturrahman	1573	249	216	67	202	117	32	11	287	136	256
	Kec. Kuta Alam	1598	259	190	62	167	112	34	13	409	160	192
	Kec. Meuraxa	1375	176	147	53	157	116	22	4	294	141	265
	Kec. Syiah Kuala	1788	376	183	89	189	150	33	20	350	122	276
	Kec. Lueng Bata	1101	136	124	53	121	105	19	0	221	91	231
	Kec. Kuta Raja	1399	463	195	46	138	100	49	6	189	69	144
	Kec. Banda Raya	1459	253	162	66	155	100	22	29	331	110	231
	Kec. Jaya Baru	838	68	66	44	134	56	15	0	204	118	133
	Kec. Ulee Kareng	1318	149	140	88	169	128	70	0	275	93	206
TOTAL		12449	2129	1423	568	1432	984	296	83	2560	1040	1934

Sumber: Bappeda (data diolah), 2024
Proses kompilasi dari OPD

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Angka Melek Huruf (AMF)

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Angka Melek Huruf menjadi acuan pengembangan pendidikan di suatu daerah. Upaya pembangunan dan pengembangan pendidikan pada umumnya lebih diarahkan pada usaha memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk mecapai hal tersebut pemerintah berupaya menyediakan sarana wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan tahun 1984 menjadi wajib belajar 9 tahun yang dimulai tahun 1994. Dengan demikian diharapkan tingkat pendidikan penduduk menjadi lebih baik dan jumlah penduduk buta huruf akan berkurang terutama pada usia sekolah (7-18 tahun). Perkembangan AMH di Kota Banda Aceh, Aceh dan nasional, dapat dilihat pada Gambar 2.22 di bawah ini:

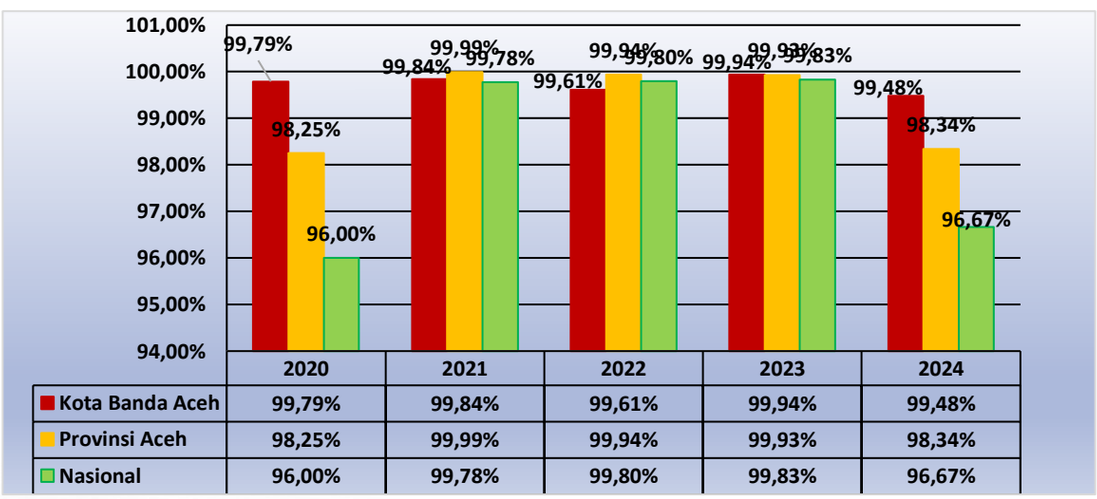

	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Banda Aceh	99,79%	99,84%	99,61%	99,94%	99,48%
Provinsi Aceh	98,25%	99,99%	99,94%	99,93%	98,34%
Nasional	96,00%	99,78%	99,80%	99,83%	96,67%

Sumber : BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2025

Gambar 2. 22 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2.22 di atas, dapat dilihat persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang mampu baca tulis di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 s/d 2023 terus meningkat, namun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2024 angka melek huruf Kota Banda Aceh sebesar 99,48%. Tetapi jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional, Kota Banda Aceh memiliki angka melek huruf yang lebih tinggi.

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun). Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di suatu daerah. RLS merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Grafik berikut menggambarkan perbandingan kondisi angka rata-rata lama sekolah di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional selama lima tahun terakhir.

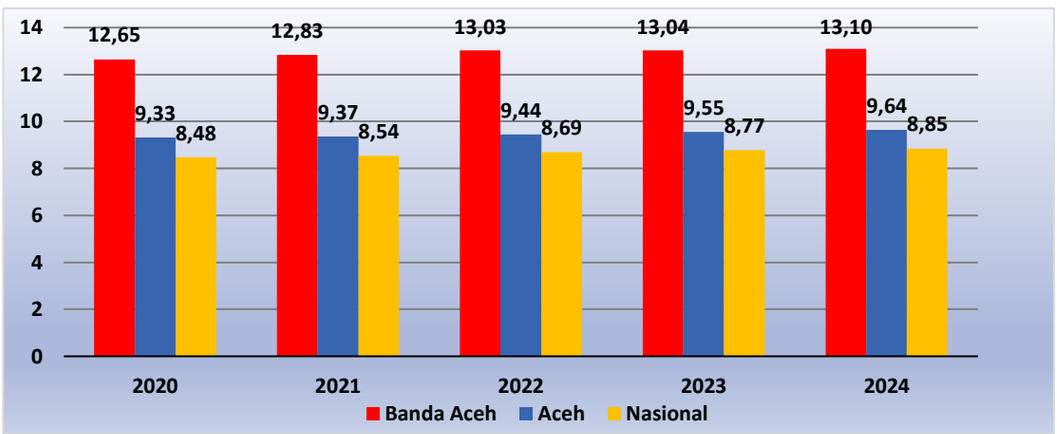

Sumber : BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2025

Gambar 2. 23 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020-2024

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Banda Aceh mencapai 13,10 pada tahun 2024, artinya penduduk Kota Banda Aceh usia 15 tahun ke-atas sudah menyelesaikan pendidikan SMA sederajat. Angka rata-rata lama sekolah sejak tahun 2020-2024 di Kota Banda Aceh menunjukkan trend yang meningkat. Angka rata-rata tersebut mengalami peningkatan dari 12,65 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,10 tahun pada tahun 2024. Pencapaian tersebut tersebut sudah memenuhi target pencapaian nasional rata-rata 12 tahun. Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional, penduduk usia sekolah di Kota Banda Aceh mendapatkan masa pendidikan jauh lebih lama dibandingkan rata-rata lama sekolah pada Provinsi Aceh dan Nasional, dimana pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah Provinsi Aceh sebesar 9,64 dan Nasional sebesar 8,85.

C. Persentase Balita Gizi Buruk / Kurang

Penanganan masalah gizi sangat terkait dengan strategi dalam menciptakan SDM yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya peningkatan SDM yang berkualitas dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak sebagai bagian dari keluarga dengan asupan gizi dan pola asuh yang baik karena status gizi memengaruhi

kecerdasan, daya tahan tubuh terhadap penyakit, kematian bayi, kematian ibu dan produktivitas kerja. Anak-anak umur 0–5 tahun merupakan golongan yang paling rentan terhadap gizi, anak-anak biasanya menderita bermacam-macam infeksi serta berada dalam status gizi rendah bahkan buruk. Gambar 2.24 berikut ini menunjukkan jumlah kasus Balita Gizi Buruk/Kurang di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 :

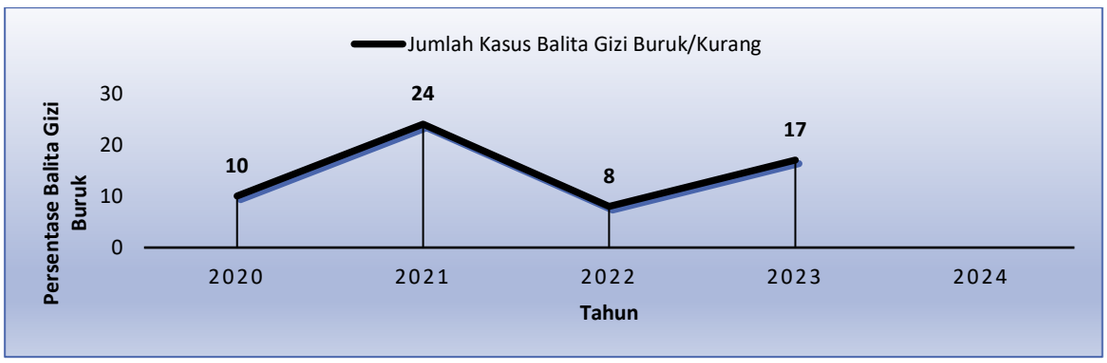

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2025
Proses kompilasi dari OPD

Gambar 2. 24 Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk/Kurang Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Gambar 2.24 di atas menunjukkan jumlah balita gizi buruk/kurang di Kota Banda Aceh selama periode 2022-2023 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 jumlah kasus balita gizi buruk sebesar 12 kasus meningkat menjadi 17 kasus pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya partipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan pertumbuhan di posyandu masih kurang sehingga penanganan kasus balita beresiko malnutrisi secara dini belum terlaksana secara optimal, masih kurangnya kemampuan kader dalam pemberian konseling terkait hasil pemantauan pertumbuhan balita dan makanan pendamping ASI sehingga upaya pencegahan belum terlaksana secara maksimal, keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pelaksana gizi dalam melaksanakan pendampingan dan monitoring balita bermasalah gizi.

Peningkatan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk yang ada di Kota Banda Aceh hingga saat ini semua kasus sudah ditangani dan dilakukan intervensi 100%. Namun dalam pelaksanaannya masih belum terintegrasi antara pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif sehingga penanganan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk tidak terlaksananya secara tuntas sesuai akar masalahnya. Penanganan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk juga terkendala pada kondisi balita yang mengalami penyakit penyerta seperti penyakit jantung, TBC dan penyakit infeksi lain yang dipicu dengan daya tahan tubuh yang rentan karena tidak adanya imunisasi, kondisi sanitasi yang buruk serta pola asuh yang tidak optimal. Maka menjadi tugas besar bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan upaya promotif yang lebih pro aktif kepada masyarakat, serta upaya kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan secara teringrasi melalui upaya intervensi sensitif dan spesifik.

D. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Gambar 2.25 menggambarkan

perkembangan angka harapan hidup di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2022 dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Aceh dan Nasional:

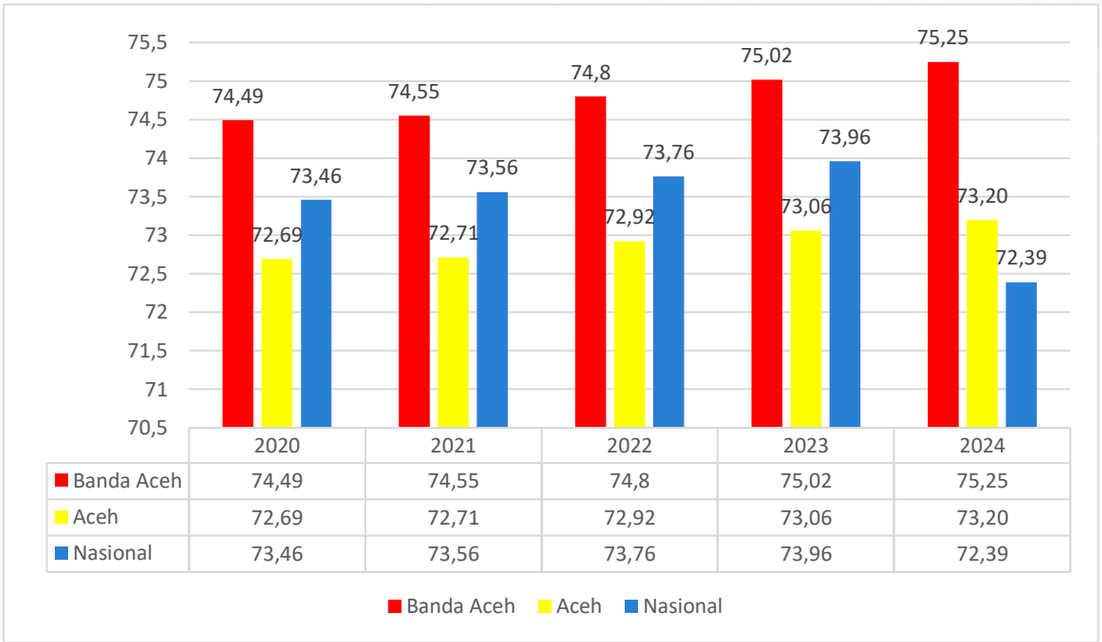

	2020	2021	2022	2023	2024
Banda Aceh	74,49	74,55	74,8	75,02	75,25
Aceh	72,69	72,71	72,92	73,06	73,20
Nasional	73,46	73,56	73,76	73,96	72,39

Sumber : BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2025

Gambar 2. 25 Angka Harapan Hidup Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Angka harapan hidup di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari 74,49 tahun 2020 menjadi 75,25 tahun 2024. Peningkatan AHH sejak 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan derajat kesehatan penduduk Kota Banda Aceh sudah membaik. Gambaran perbandingan perkembangan AHH antara Banda Aceh, Aceh, dan Nasional pada tahun 2020–2024 terlihat Kota Banda Aceh sudah diatas nasional dan Provinsi Aceh. Namun pencapaian tersebut tetap harus terjaga dan diupayakan terus meningkat. Oleh karenanya program-program peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus tetap dijalankan.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Dengan kata lain, TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK dapat mengidentifikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

Tenaga kerja yang merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pembangunan pada suatu negara ataupun daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi. Permasalahan ketenagakerjaan menjadi isu disetiap daerah sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah pokok yang harus merangkul swasta untuk bersama-sama mengurangi dan menuntaskan masalah ketenagakerjaan di Indonesia khusunya di Banda Aceh. Banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Kebijakan-kebijakan tersebut diwujudkan dalam usaha konkret, yaitu memperluas kesempatan kerja dan lapangan kerja serta meningkatkan mutu tenaga kerja. Gambaran kondisi ketenagakerjaan Kota Banda Aceh pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.14 dibawah ini:

Tabel 2. 14 Kondisi Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja (jiwa)	131.147	136.675	130.689	123.727	126.258
	- Bekerja	118.637	124.460	119.476	113 790	116.723
	- Pengangguran	12.510	12.215	11.213	9.937	9.535
2	Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	79.605	80.277	90.660	66.550	67.762
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,54	63	59	65,02	65,07
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,54	8,94	8,62	8,03	7,55

Sumber : Badan Pusat Statitik Kota Banda Aceh, 2024

Jumlah angkatan kerja di Kota Banda Aceh pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan jumlah angkatan kerja menjadi 126.258 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tersebut tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja atau kapasitas produksi, akibatnya jumlah pengangguran pun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran merupakan masalah yang sangat serius dan sangat mempengaruhi kondisi daerah, karena jumlah pengangguran merupakan indikator majunya perekonomian suatu daerah yang dapat menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang merata atau tidak di daerah tersebut. Jumlah pengangguran yang ada di Kota Banda Aceh Tahun 2024 sebesar 9.535 jiwa, terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Selain masih terbatasnya lapangan pekerjaan, pengangguran di kota Banda Aceh disebabkan juga oleh beberapa faktor seperti arus urbanisasi dari daerah kabupaten lain ke Kota Banda Aceh untuk mencari pekerjaan, skill yang masih kurang dari pencari kerja yang tidak sesuai dengan standar dunia kerja dan masih kurangnya minat pencari kerja untuk berwirausaha secara mandiri.

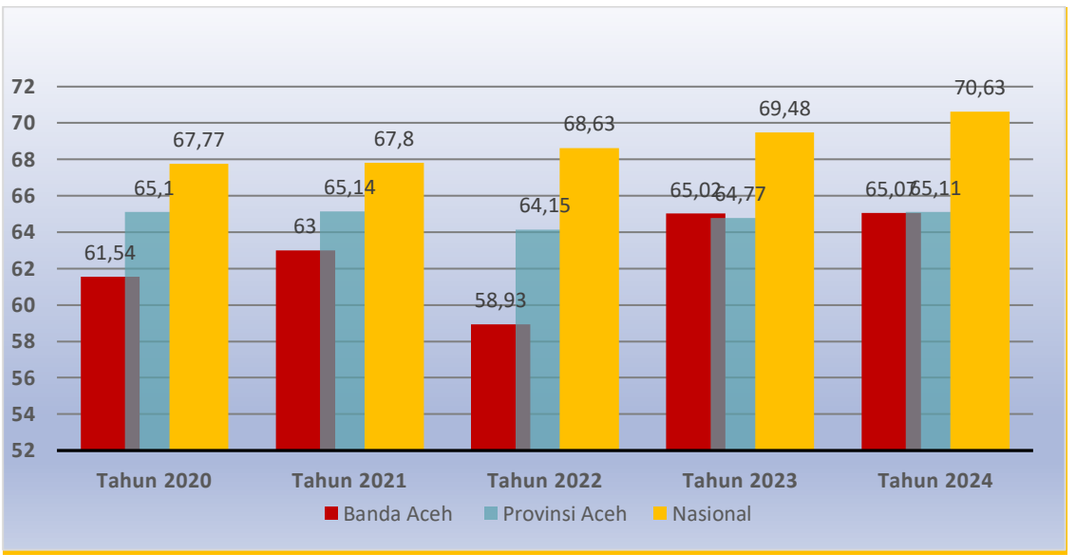

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 26 Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Dari Gambar 2.26 di atas, perkembangan TPAK setiap tahunnya semakin meningkat di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional. TPAK Kota Banda Aceh selama beberapa tahun terakhir selalu lebih rendah daripada Provinsi Aceh dan Nasional. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh sebagai dinas yang berhubungan langsung dengan pengangguran telah melakukan usaha-usaha pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja setiap tahunnya melalui BLK Kota Banda Aceh. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan setiap tahun nya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 15 Jenis Pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024

Kejuruan Pelatihan	Tahun					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Menjahit	80	32	32	48		
Teknisi Cooling System	16	-	-	32		
Teknisi Sepeda Motor	32	16	16	16		
Las Listrik	32	36	16	32		
Kewirausahaan Membuat Kue	32	32	32	32		
Tata Rias dan Kecantikan	-	-	32	32		
English for Tour Guides	-	-	-	16		
Penggambaran Auto CD	-	16	-	-		
Estimator Bangunan Gedung	-	-	16	16		
Juru Gambar Arsitektur	-	-	16	16		
Pengolahan Ikan	-	-	16	16		
Front Office Kejuruan Pariwisata	-	-	-	16		
Jumlah	**192**	**132**	**176**	**272**		

Sumber: Disnaker Kota Banda Aceh, 2024
Proses kompilasi dari OPD

Tabel 2.15 menunjukkan secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir (2019-2023), Pemerintah Kota Banda Aceh hanya mampu memberikan pelatihan untuk pengangguran/pencari kerja sebanyak 246 orang per tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah pencari kerja yang mencapai 343 orang per tahun, maka Kota Banda Aceh belum bisa memenuhi keseluruhan pencari kerja untuk mengikuti pelatihan yang diberikan. Jumlah pencari kerja di Kota Banda Aceh untuk periode 2020-2024 terlihat dalam gambar 2.27 berikut:

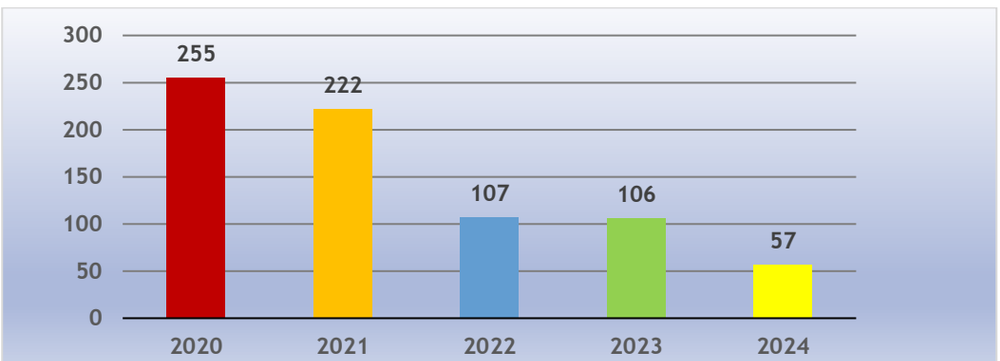

Sumber: Kota Banda Aceh dalam Angka ,2025

Gambar 2. 27 Jumlah Pencari Kerja Tahun 2020 – 2024

Pemerintah Kota Banda Aceh terus meningkatkan perbandingan antara jumlah pencari kerja terdaftar dengan pelatihan yang diberikan. Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada dinas tenaga kerja di Kota Banda Aceh sebesar 57.

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). Dengan kata lain, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu

wilayah/negara. IPM dapat digunakan sebagai data strategis untuk mengukur kinerja Pemerintah. Di Indonesia, IPM juga merupakan salah satu faktor penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM digunakan dengan mengukur 3 dimensi, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Ada 4 indikator yang digunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan. IPM juga dapat digunakan untuk memperbandingkan kualitas pembangunan manusia lintas daerah dan tingkat adminintrasi. IPM Kota Banda Aceh dibandingkan dengan Propinsi Aceh dan Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	IPM Nasional	71,94	72,29	72,91	74,41	75,02
2	IPM Provinsi Aceh	71,99	72,18	72,80	74,70	75,36
3	IPM Kota Banda Aceh	85,41	85,71	86,28	88,32	88,85
4	Pertumbuhan IPM Kota Banda Aceh	0,40	0,35	0,66	0,45	0,60

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2024

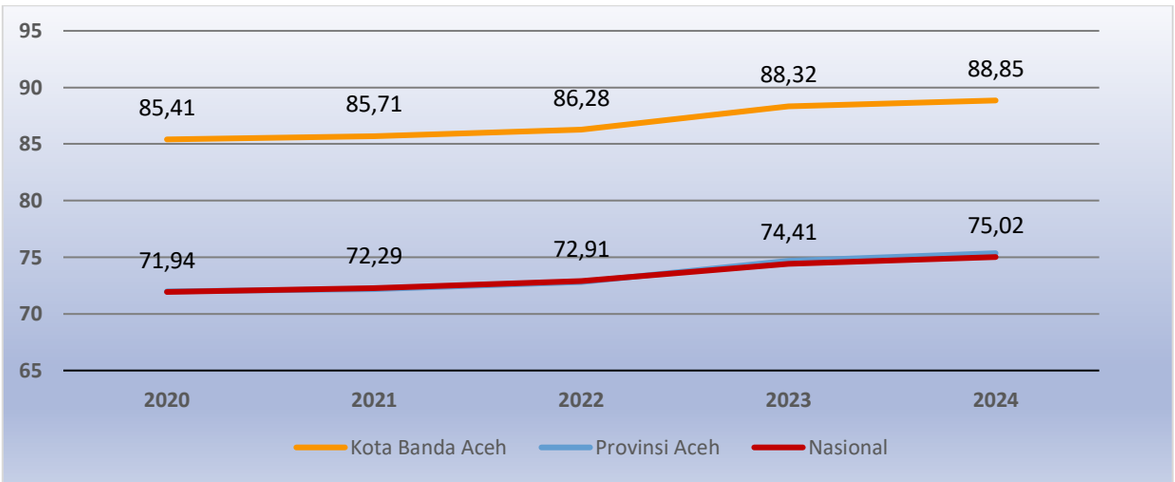

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2025

Gambar 2. 28 Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Tabel 2.16 dan Gambar 2.28 di atas, dapat diketahui bahwa IPM Kota Banda Aceh menunjukkan trend yang terus meningkat setiap tahunnya. IPM tertinggi Kota Banda Aceh yaitu pada tahun 2024 sebesar 88,85. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Banda Aceh terus membaik seiring berjalannya waktu. IPM Kota Banda Aceh telah melewati IPM Aceh dan Nasional. Kesenjangan IPM antara Banda Aceh dan Provinsi Aceh menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pembangunan manusia antara Kota Banda Aceh dan kabupaten lainnya di Provinsi Aceh. Kesenjangan ini adalah salah satu pemicu tingginya migrasi penduduk terutama tenaga kerja ke Kota Banda Aceh.

G. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi berbagai negara di dunia, tingginya angka pengangguran akan berakibat pada lambannya jalan perekonomian. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang harus

dapat diatasi dengan baik. Pengangguran yang terlalu besar membawa efek terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, memperlambat proses pembangunan, meningkatnya angka kriminalitas dan lain sebagainya. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengetahui perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.29 berikut ini:

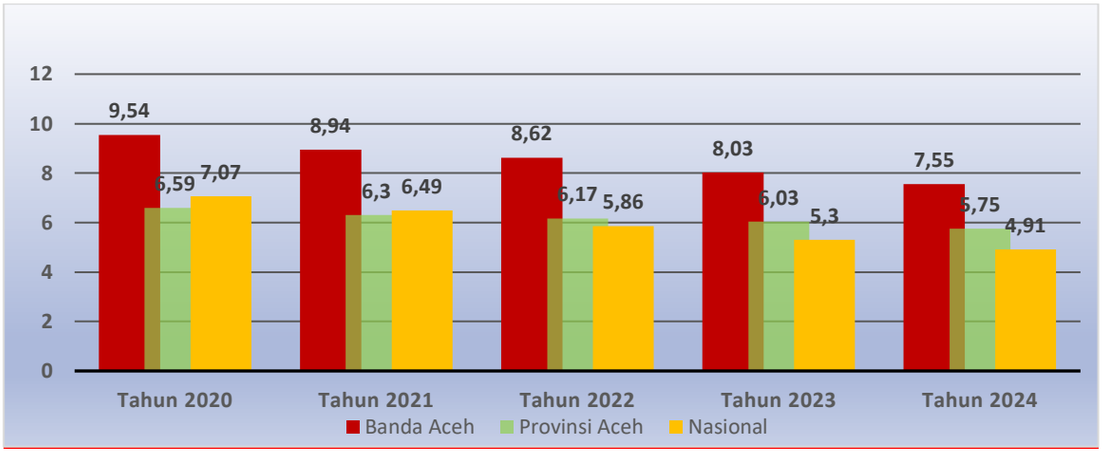

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2025

Gambar 2. 29 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Banda Aceh mengalami penurunan dari 9,54 persen pada tahun 2020 menjadi 7,55 persen pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Aceh dan Nasional, kondisi pengangguran di Kota Banda Aceh pada tahun 2020 sampai dengan 2024 berada diatas keduanya. Tingkat pengangguran yang tinggi ini, terutama di tahun 2020 dan 2021 sangat dipengaruhi dengan melambatnya kondisi ekonomi Kota Banda Aceh yang terimbas dengan adanya pandemi *Covid-19.* Selain dari pandemi *Covid-19*, faktor pendukung yang menjadi pemicu meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Banda Aceh disebabkan oleh adanya pertumbuhan jumlah kesempatan kerja yang tersedia tidak bisa mengimabngi pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat. Hal ini berdampak pada melambatnya perekonomian Kota Banda Aceh, ditambah lagi dengan kondisi melambatnya perekonomian secara nasional.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Kebudayaan

1. Jumlah Grup Kesenian

Kota Banda Aceh memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat. Pengembangan seni budaya diharapkan dapat menjadi pendorong berkembangnya potensi daerah. Untuk mengetahui capaian kebudayaan Kota Banda Aceh yang diukur berdasarkan jumlah sanggar kesenian per 10.000 penduduk periode Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.16 di bawah ini:

Tabel 2. 17 Capaian Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024

No	Capaian Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	5.8*	5.8*	6.0	6.0	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Tabel 2.17 di atas menunjukan bahwa jumlah sanggar kesenian yang tersedia untuk 10.000 penduduk Kota Banda Aceh pada Tahun 2019 dapat dihitung sebanyak 5,5 sanggar kesenian untuk 10.000 penduduk dan terus meningkat sebanyak 6,0 lembaga pada tahun 2022.

Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan jumlah sanggar seni yang dibentuk oleh masyarakat dan peningkatan jumlah group kesenian yang dibentuk oleh sekolah yang terdiri dari jenjang sekolah dasar (SD) dan jenjang Sekolah menengah Pertama (SMP), untuk tahun 2023 tidak ada penambahan sanggar seni/grup kesenian walaupun jumlah penduduk terus bertambah.

Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni yang ada di Kota Banda Aceh untuk bisa tampil pada pentas seni budaya di tingkat Provinsi Aceh dan Nasional.

B. Pemuda dan Olahraga

1. Jumlah Klub Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga bertujuan untuk membangun penduduk yang sehat secara jasmani dan rohani dan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, terutama generasi muda. Pembangunan pemuda dan olahraga di Kota Banda Aceh dilakukan dengan melakukan pemberdayaan pemuda dan olahraga melalui dorongan, dukungan dan pembinaan.

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berusaha meningkatkan pembinaan olahraga melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dan instansi terkait lainnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan olahraga di Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.18 di bawah ini:

Tabel 2. 18 Perkembangan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024

No	Capaian Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk.	6,0*	5,9*	5,9	5,8	
2	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk.	0,2*	0,2*	0,2	0,2	

Sumber: Dispora Kota Banda Aceh, 2024
**)Data Tahun 2019-2023 disesuaikan*
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.18 di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja olahraga mengalami peningkatan. Klub Olahraga per 10.000 penduduk di Kota Banda Aceh pada Tahun 2021 dan 2022 berjumlah 151 Klub. Pada Tahun 2023, jumlah ini tidak mengalami penambahan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Namun jumlah penduduk Kota Banda Aceh meningkat dari Tahun 2022 sebanyak 257.635 jiwa menjadi 259.538 jiwa pada Tahun 2023. Untuk indikator gedung olahraga per 10.000 penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2023, tidak terdapat penambahan jumlah gedung olahraga dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu terdapat 6 gedung olahraga di kota Banda Aceh yang terdiri dari: Gor Pango, Stadion H. Dimurthala, Lapangan Tenis Indoor Blang Oi, Lapangan Tenis Outdoor Blang Oi, Lapangan Volly Gampong Mibo dan Lapangan Sepak Bola Lambhuk.

Secara keseluruhan, capaian indikator perkembangan olahraga di Kota Banda Aceh sudah baik. Namun demikian, perlu dilakukan pembangunan dan pembinaan yang berkelanjutan. Selain untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Dispora yaitu jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standar, juga untuk menghasilkan atlet-atlet berprestasi baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.

C. Statistik

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas penyediaan data statistik sektoral yang akurat, terkini, dan tepat waktu. Upaya ini juga diarahkan untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang statistik sektoral, baik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Pemerintah Kota Banda Aceh maupun dengan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh serta stakeholder lainnya.

Data Statistik Sektoral memegang peran krusial sebagai dasar informasi dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, data ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk memantau kondisi, kinerja, perubahan, serta kebutuhan di setiap sektor, sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif dan terarah.

Tabel 2. 19 Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat waktu , 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	10	15	20	25	27	29

Bidang Statistik Kota Banda Aceh telah menjalankan berbagai kegiatan strategis selama tahun 2024-2025, dengan fokus pada kerja sama, penyusunan dokumen statistik, pembinaan statistik sektoral, peningkatan kapasitas, dan pengelolaan data terbuka. Salah satu pencapaian utama adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas MIPA USK, Program Studi Statistika, dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada 1 Januari 2023. Selain itu, koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah dilakukan, termasuk pembahasan rekomendasi statistik, evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, dan penyusunan rencana aksi statistik. Forum Satu Data Kota Banda Aceh juga semakin diperkuat dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Walikota pada 11 Juli 2024.

Dalam hal penyusunan dan penerbitan dokumen statistik, Bidang Statistik berhasil menyelesaikan beberapa dokumen penting, seperti Buku “Banda Aceh Dalam Angka 2024” yang diterbitkan pada 5 Januari 2024. Revisi Peraturan Walikota (Perwal) No. 46/2021 tentang Satu Data Banda Aceh menjadi Perwal No. 53/2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Banda Aceh juga menjadi pencapaian signifikan. Selain itu, dokumen seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Statistik, dan Surat Keputusan (SK) terkait penanggung jawab data statistik sektoral telah disusun dan diterbitkan secara tepat waktu. Evaluasi Indeks Pembangunan Statistik (IPS) juga dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan.

Penyelenggaraan dan pembinaan statistik sektoral menjadi salah satu fokus utama dalam periode ini. Bidang Statistik telah melaksanakan pembinaan statistik sektoral di berbagai OPD, termasuk Dinas Kesehatan dan Pariwisata, serta menyelenggarakan pelatihan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024. Forum Satu Data juga semakin diperkuat melalui pencanangan sekretariat, Focus Group Discussion (FGD), dan pengembangan website sebagai

sarana pengelolaan data yang transparan dan terintegrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data statistik di tingkat sektoral.

Peningkatan kapasitas dan literasi statistik juga menjadi prioritas dalam periode ini. Bidang Statistik menyelenggarakan kegiatan literasi statistik dengan tema "Cerdas Mengelola Informasi dengan Literasi Statistik" pada 26 November 2024, serta bimbingan teknis aplikasi Open Data Kota Banda Aceh pada 1-3 Oktober 2024. Selain itu, asistensi evaluasi reformasi birokrasi tematik dan review data prioritas bersama Bappeda turut dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Dalam hal perencanaan dan pengembangan data statistik, Bidang Statistik telah menyusun Rencana Aksi Statistik dan menetapkan Analisis Jabatan (Anjab) serta Analisis Beban Kerja (ABK) untuk jabatan fungsional statistisi. Penetapan Daftar Data Kota Banda Aceh oleh Walikota pada 17 September 2024 menjadi langkah penting dalam memastikan konsistensi dan ketersediaan data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan. Evaluasi EPSS tahun 2025 juga telah direncanakan untuk menyusun strategi pengembangan statistik ke depan.

Pengelolaan Open Data Kota Banda Aceh melalui website data.bandaacehkota.go.id menjadi salah satu inovasi penting yang dijalankan oleh Bidang Statistik. Portal ini berfungsi sebagai sarana publikasi data yang diunggah dan diperbarui secara rutin oleh seluruh OPD. Dukungan regulasi, seperti SK Walikota Nomor 551 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Data Pemerintah Kota Banda Aceh, memastikan bahwa pengelolaan data dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan partisipasi publik dalam pemanfaatan data untuk pembangunan.

Secara keseluruhan, Bidang Statistik Diskominfotik Kota Banda Aceh telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) menunjukkan peningkatan dari skor 1,83 (cukup) pada tahun 2023 (Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-386.nv/01000/ES/11/2023 tanggal 6 November 2023) menjadi 2,57 (cukup) pada tahun 2024 (Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-829/01000/ES/2024 tanggal 17 September 2024). Kerja sama strategis, pengelolaan data berbasis digital, dan pembinaan statistik sektoral telah berkontribusi pada pembangunan berbasis data yang terintegrasi di Kota Banda Aceh. Pengelolaan portal Open Data menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

D. Persandian

Dalam perkembangan teknologi digitalisasi informasi saat ini, aplikasi dan website telah menjadi salah satu instrument pokok pada OPD Pemerintah Kota Banda Aceh. Pemanfaatan aplikasi dan website pada OPD bertujuan untuk mewujudkan informasi dan pelayanan pemerintahan yang efisien, cepat, tepat, transparan dan aman. Kesiapan penanganan insiden siber pada era digitalisasi ini sangatlah penting untuk
menjamin keamanan dan keberlangsungan penyelenggaraan TIK pemerintah daerah khususnya dalam hal mengamankan informasi pemerintah yang sifatnya rahasia.

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian adalah melakukan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dan melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota. Hal ini diperlukan untuk menjaga informasi yang disebarkan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia telah memberikan Surat Tanda Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident

Response Team (CSIRT) kepada Pemerintah Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Februari 2024. Dengan dibentuknya Computer Security Insident Response Team (CSIRT), maka diharapkan kepada seluruh OPD dapat melindungi data elektronik milik pemerintah daerah serta melakukan pencegahan, penanganan dan pemulihan insiden siber sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan aman

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

A. Syariat Islam

1. Kegiatan Syiar dan Dakwah

Kegiatan syiar dan dakwah di masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam (DSI). Pada Tahun 2024 Dinas Syariat Islam melaksanakan kegiatan penguatan pemahaman dan pengamalan syariat Islam yang dirangkai dalam beberapa kegiatan, yaitu:

i. Dakwah keliling dilakukan secara rutin dengan menggunakan mobil operasional dakwah dalam rangka mensosialisasikan informasi – informasi Syariat Islam agar diketahui oleh masyarakat Kota Banda Aceh secara cepat dan sesuai dengan momen-momen yang ada. Masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan berpatisipasi dalam penegakan Syariat Islam.
ii. Safari dakwah (Safda) yang dilaksanakan setiap malam Ahad mulai Maghrib sampai Isya dengan mendatangi masjid-masjid secara bergantian dalam wilayah Kota Banda Aceh dengan sasaran utama yaitu meningkatkan kesadaran beribadah terutama shalat berjamaah dan membangun tanggung jawab bersama penegakkan syariat Islam dilingkungan masing-masing.
iii. Safari dakwah da'iyah (Sa'idah) dilaksanakan oleh Da'iyah Kota Banda Aceh setiap ba'da Jumat di masjid/meunasah/mushalla/gampong dalam Kota Banda Aceh secara bergantian. Adapun sasaran kegiatan ini adalah ibu rumah tangga dengan menekankan pada penguatan fungsi ibu sebagai madrasatul'ula, membangun semangat beribadah dalam ruangan (memotivasi keluarga untuk shalat berjamah) dan mencegah generasi muda dari kerusakan moral.
iv. Safari dakwah sekolah adalah safari dakwah di sekolah yang dilaksanakan setiap Jumat pagi di sekolah-sekolah dalam wilayah Kota Banda Aceh secara bergantian. Kegiatan ini melibatkan Da'i Kota Banda Aceh, kelompok kerja Da'i Penyelamatan Generasi Muda Islam (PGMI) dengan fokus kepada membangun semangat belajar, menghindari generasi muda dari pornografi dan narkotika.
v. Dakwah Da'iyah Ramadhan dilaksanakan oleh Da'iyah Kota Banda Aceh selama Bulan Ramadhan di 90 gampong dalam Kota Banda Aceh. Adapun sasaran kegiatan ini adalah ibu-ibu pengajian di gampong

Untuk mengetahui frekuensi syiar dan dakwah yang dilakukan oleh DSI di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2. 20 berikut ini:

Tabel 2. 20
Frekuensi Syiar dan Dakwah di Kota Banda Aceh
Tahun 2019-2024

No	Kegiatan	Frekwensi Pelaksanaan Pertahun (kali)						Jumlah	%
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Safari Dakwah (Safda) Malam Minggu	44	44	36	40	34	35	233	16
2	Safari Da'iyah (Jumat Siang)	44	32	44	40	37	44	241	17
3	Safari Dakwah Sekolah	18	8	15	20	26	21	108	8
4	Ceramah Penyejuk Hati	290	0	0	0	0	0	290	20
5	Dakwah Da'iyah Ramadhan	90	0	0	0	0	90	180	13
6	IRUP ke Sekolah	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Pelaksanaan Pengajian dan Zikir	28	15	5	6	0	0	54	4
8	Dakwah Warung Kopi	10	5	1	5	10	0	31	2
9	Dakwah Keliling	44	40	15	18	15	22	154	11
10	Dakwah Online	0	100	0	25	0	0	125	9
Total		568	244	116	154	122	212	1416	100

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2. 20 di atas ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2020-2024 seperti kegiatan Ceramah Penyejuk Hati, IRUP Ke Sekolah, Pelaksanaan Pengajian dan Zikir serta Dakwah Online dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan tersebut.

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada Tahun 2024 tidak melaksanakan kegiatan Pelatihan Takmir Masjid yang merupakan kegiatan pembinaan dan penilaian masjid dikarenakan tidak tersedianya SPD sehingga data yang diminta tidak dapat kami penuhi.

Tabel 2. 21
Jumlah Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan, Ketertiban dan Aksessibilitas Tahun 2019-2024

No	Tahun	Jumlah Masjid	Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan	Masjid yang Ramah Disabilitas
1	2019	113	36	3
2	2020	114	-*	-*
3	2021	115	-*	-*
4	2022	115	-	-
5	2023	115	-	-
6	2024	120	-	-

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2024
**) Data tahun 2020 dan 2021 disesuaikan*

Berdasarkan Tabel 2. 21 di atas menunjukkan bahwa selama periode Tahun 2020-2024 tidak dilaksanakan penilaian standar kebersihan, ketertiban dan aksessibilitas.

2. Musabaqah Tilawah Qur'an (MTQ)

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) merupakan ajang uji kemampuan bagi para qari-qariah, hafizh-hafizah, penulis khat, pensyarah dan penghapal Al-Qur'an. Pelaksanaan MTQ untuk Tingkat Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pelaksanaan MTQ bertujuan sebagai syiar dan uji kemampuan pada seni-seni Al-Qur'an yang diperlombakan. Jumlah peserta yang mengikuti MTQ Aceh sesuai dengan cabang yang dilombakan selama periode Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2. 22 di bawah ini.

Tabel 2. 22
Jumlah Peserta MTQ Kota Banda Aceh
Berdasarkan Cabang MTQ yang diperlombakan dalam
MTQ Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2019-2024

No	Cabang-Cabang MTQ	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tilawah	*)	**)	17	17	*)
2	Tafsir	*)	**)	6	6	*)
3	Tahfizh	*)	**)	10	10	*)
4	Fahmil Qur'an	*)	**)	6	6	*)
5	Syarhil Qur'an	*)	**)	6	6	*)
6	Khattil Qur'an	*)	**)	8	8	*)
7	MMQ	*)	**)	2	2	*)
	Total	-	**)	55	55	-

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2024
**) MTQ Tingkat Provinsi dilaksanakan pada Tahun Ganjil*
***) Tidak dapat dilaksanakan MTQ Tingkat Provinsi dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rencananya akan dilaksanakan pada Tahun 2022.*

Tabel 2. 22 di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 tidak dilaksanakannya MTQ, karena MTQ Tingkat Provinsi dilaksanakan 2 (dua) Tahun sekali. Pada Tahun 2023 kafilah MTQ Kota Banda Aceh berhasil memperoleh Peringkat Juara Umum I dari 23 kabupaten/kota yang mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Aceh di Kabupaten Semeulue.

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam mempertahankan Juara Umum MTQ Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Membentuk panitia kafilah Kota Banda Aceh yang berintegritas.
2. Melakukan seleksi untuk menghimpun potensi kafilah Kota Banda Aceh.
3. Melakukan Pembinaan intensif dan berkelanjutan dengan pola :
    a. Merumahkan kafilah
    b. Melaksanakan TC Berjalan
    c. Melaksanakan TC Terpusat (intensifikasi)
    d. Melaksanakan Try Out (uji tanding)
    e. Pembinaan mental kafilah
    f. Penyiapan sarana dan prasarana pendukung yang memadai
    g. Membangun dukungan sponsorship

B. Pendidikan Dayah

1. Jumlah Dayah, Guru dan Santri

Dalam konteks Banda Aceh saat ini dayah di Banda Aceh dibagi dengan 2 tipe dayah yaitu Salafi (tradisional) dan Terpadu (modern). Saat ini semua guru Dayah belum bersertifikasi karena belum ada format dari instansi pemerintah. Untuk itu perlu dipikirkan langkah-langkah strategis guna mewujudkan sertifikasi guru dayah. Terkait dengan akreditasi dayah saat ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Berdasarkan Data dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh hanya ada 4 (empat) Dayah yang terakreditasi A yaitu Darul Ulum, Babun Najah, Inshafuddin dan Madinatul Fata.

Jumlah dayah, jumlah guru dan jumlah santri Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.23 di bawah ini:

Tabel 2.23 Jumlah Dayah, Guru dan Santri Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dayah	45	38	40	40	40
2	Guru	901	901*	1.214	1.214	846
3	Santri	6.451	6.560*	4.720	4.720	6.410
Rasio Guru/Santri		1 : 7	1 : 7	1 : 3	1 : 3	1:7

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 jumlah dayah turun menjadi 38 dayah dibandingkan tahun 2020 sebanyak 45 dayah. Penurunan tersebut karena setelah dilakukan evaluasi terhadap keberadaan dayah yang ada di Banda Aceh yang pada akhirnya diturunkan statusnya menjadi Balai Pengajian. Sebayak 7 dayah dikualifikasi menjadi Balai Pengajian karna tidak sesuai dengan syarat da kriteria dayah sesuai dengan Perwal 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan jumlah santri dikarnakan banyak santri dari luar Kota Banda Aceh dan Luar Negeri pulang kekampung halamannya dikarnakan adanya kebijakan suntik vaksin covid-19, yang menyebabkan banyak santri tidak balek lagi untuk mondok di Dayah yang ada di Banda Aceh. Dapat kami sampaikan juga pada Dayah Salafiyah (Madinatul Fata dan Nidhamul Fata) dua dayah ini sejak 2019 hingga 2021 banyak santri Luar Negeri (Malaysia) yang mondok akan tetapi saat terjadi pandemic covid-19 kedua dayah ini santrinya merosot. Umumnya Balek ke kampong halamannnya masing-masing ini juga terjadi disejumlah dayah di Banda Aceh. Kondisi ini berimbas pada penurunan jumlah santri di Tahun 2022 hingga 2023. Pada tahun 2024 jumlah santri meningkat tajam berjumlah 6.410 santri.

Ditinjau dari sisi rasio antara guru dan santri pada Dayah di Kota Banda Aceh selama periode 2020-2024 juga menggambarkan rasio yang relatif baik dan memadai. Hal ini menjadi peluang dalam mewujudkan sinergisitas antara ulama dengan umara. Insya Allah kedepan keberadaan dayah di Banda Aceh semakin diminati orang tua/wali santri, bukan hanya dari Banda Aceh akan tetapi wali santri dari berbagai Kabuapten Kota di Banda Aceh. Untuk mengetahui jenis dan tipe Dayah di Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.24 berikut ini

Tabel 2. 24 Jenis dan Tipe Dayah di Kota Banda Aceh Tahun 2023

No.	Nama Dayah	Alamat		Jenis Dayah	Tipe
		Gampong	Kecamatan		
1	Darul Ulum	Keuramat	Kuta Alam	Terpadu	A
2	Dayah Inshafuddin	Lambaro Skep	Kuta Alam	Terpadu	A

No.	Nama Dayah	Alamat		Jenis Dayah	Tipe
		Gampong	Kecamatan		
3	Dayah Al-Ikhlas	Beurawe	Kuta Alam	Salafiyah	NT/D
4	Raudhatul Muttaqin	Gp.Jawa Kec Kuta Raja	Kutaraja	Salafiyah	NT/D
5	Raudhatul Jannah	Ateuk Jawo	Baiturrahman	Salafiyah	C
6	Markas Al Ishlah Al-Aziziah	Lueng Bata	Luengbata	Terpadu	B
7	Bustanul Amilin Ad-Daudiyah	Gp Blang Cut	Luengbata	Salafiyah	NT/D
8	Madinatul Fata	Lampeuot	Banda Raya	Salafiyah	A
9	Darul Hijrah	Lamlagang	Banda Raya	Salafiyah	C
10	Liwaul Mukhlishin	Lamlagang	Banda Raya	Salafiyah	C
11	Fauzul karimah	Lam lagang	Banda Raya	Salafiyah	NT/D
12	Nidhamul Fata	Lamlagang	Banda Raya	Salafiyah	C
13	Babun Najah	Doy	Ulee Kareng	Terpadu	A
14	Madinatul Fatayat	Lampeuot	Banda Raya	Salafiyah	B
15	Darul Amin Al Waliyah	Desa Ilie	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D
16	Raudhatul Jannah	Gp.Ilie	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D
17	Al-Islahiyah	Lambuk	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D
18	Darul Mufadzal Al Aziziyah	Pelanggahan	Kuta Raja	Salafiyah	C
19	Raudhatul Hikmah Al Waliyah	Pango Raya	Ulee Kareng	Salafiyah	C
20	Nurusshadiqah	Lamglumpang	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D
21	Dayah BTRG	Ceurih	Ulee Kareng	Salafiyah	C
22	Babul Jannah	Ceurih	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D
23	Budi Muthmainnah	Ceurih	Ulee Kareng	Salafiyah	C
24	Mabdaul Ulum Al-Aziziyah	Lamtemen Timur	Jaya Baru	Salafiyah	B
25	Darul Fikri Al Waliyah	Cot Lamkuweuh	Meuraxa	Salafiyah	C
26	Mishrul Huda Malikussaleh	Lamjamee	Jaya Baru	Salafiyah	B
27	Mini Aceh	Alue Naga	Syiah Kuala	Salafiyah	B
28	Mudhiatul Fata	Lampaseh Aceh	Kutaraja	Salafiyah	C
29	Raudhatul Wustha	Bitai	Jaya Baru	Salafiyah	NT/D
30	Misbahus Shalihin Al Waliyah	Gampong Pande	Kuta Raja	Salafiyah	B
31	Al Fatani Darussalam	Punge Blang Cut	Jaya Baru	Salafiyah	C
32	Al Athiyah	Beurawe	Kuta Alam	Terpadu	C
33	Bustanul Huda	Lambaro Skep	Kuta Alam	Salafiyah	NT/D
34	Baital `Atiq	Bitai	Jaya Baru	Salafiyah	C
35	Sirathal Mustaqim Misrul Muarrif Al Aziziyah	Surien	Meuraxa	Salafiyah	C
36	Tahfidz Al Hanifi	Lamdingin	Kuta Alam	Salafiyah	NT/D
37	Al Mukmin	Lamgugop	Syiah Kuala	Salafiyah	NT/D
38	Al Huda	Emperom	Jaya Baru	Salafiyah	NT/D
39	Pesantren Tahfidz Qur`an Baitussalihin	Ceurih	Ulee Kareng	Terpadu	NT/D
40	Darul Fityan	Tibang	Syiah Kuala	Salafiyah	C

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

C. Baitul Mal

Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam urusan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sadaqah, harta waqaf dan harta agama. Penyelenggaraan urusan dalam hal melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pembinaan dan pengelolaan zakat, wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat islam.

1) Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Baitul Mal terus meningkatkan upaya penerimaan zakat dari masyarakat. Sejak tahun 2017 penerimaan zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, seiring dengan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat di lembaga amil zakat pemerintah yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selain zakat penghasilan, zakat mperniagaan, infaq dan sadaqah. Baitul Mal juga melaksanakan pemotongan zakat pada setiap SP2D belanja daerah sesuai ketentuan yang telah di tetapkan melalui peraturan Walikota. Untuk mengetahui secara rinci tentang penerimaan zakat, infaq, dan sadaqah pada Baitul Mal di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.25 di bawah ini:

Tabel 2. 25 Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Thn	Target	Realisasi Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Ribu)				
		Zakat Penghasilan	Zakat Perniagaan	Infaq	Shadaqah	Jumlah
2020	22.064.260.000	13.714.128.368	1.554.162.106	1.631.728.035	2.573.489	16.902.591.999
2021	24.349.130.000	11.182.953.209	1.275.607.379	1.640.282.993	4.430.860	14.103.274.443
2022	21.789.130.000	11.899.361.544	1.686.488.162	2.078.451.093	14.092.653	15.678.393.454
2023	18.594.523.464	11.967.429,688	1.568.378.809	1.977.708.967	2.061.985	15.535.579.450
2024		12.253.710.288	1.421.050.022	2.842.980.353	6.866.912	16.524.607.575

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.25 di atas menunjukkan realisasi penerimaan zakat, infaq dan sadaqah. Dari seluruh realisasi penerimaan yang ada, persentase penerimaan zakat yang berasal dari zakat penghasilan dan perniagaan masih lebih besar daripada penerimaan infaq dan sadaqah. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan sumber penerimaan dari zakat, infaq dan shadaqah di Kota Banda Aceh berkaitan dengan perencanaan, pendistribusian dan penerima zakat, infaq dan shadaqah. Pada tahun 2024 jumlah realisasi penerimaan zakat, infaq dan shadaqah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 16.524.607.575.

2) Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah Kota Banda Aceh salah satunya dilakukan melalui pembangunan rumah dhuafa. Untuk mengetahui pembangunan Rumah Dhuafa dapat dilihat pada Tabel 2.26 di bawah ini:

Tabel 2.26 Jumlah Rumah Dhuafa yang Dibangun Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)
2020	20
2021	20
2022	30
2023	35
2024	
Total	

Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.26 di atas dapat diketahui bahwa selama periode 2019-2023 jumlah zakat, infaq dan shadaqah untuk telah digunakan untuk pembangunan rumah dhuafa sebanyak 124 rumah yang jumlahnya berfluktuasi setiap tahunnya. Penyaluran bantuan untuk pembangunan rumah dhuafa ini sangat bermanfaat bagi kaum dhuafa karena rumah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya kaum dhuafa yang membutuhkan bantuan rumah dhuafa sementara kemampuan keuangan yang bersumber dari zakat, infaq dan shadaqah masih sangat terbatas. Atas dasar ini maka pembangunan rumah dhuafa untuk kaum dhuafa harus berdasarkan kepada prioritas yang membutuhkannya.

Di samping itu, zakat, infaq dan shadaqah di Kota Banda Aceh juga diberikan dalam bentuk beasiswa untuk masyarakat miskin. Adapun jumlah penerima beasiswa miskin yang berasal dari penerimaan zakat di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.27 di bawah ini:

Tabel 2.27 Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 (jiwa)

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Beasiswa ½ penuh	Beasiswa Tahfidz	Beasiswa santri Salafi	Total
2020	991	992	87	396	13	39	2518
2021	1.000	1.000	100	299	0	48	2447
2022	1.000	1.000	100	299	0	49	2448
2023	993	995	99	399	102	44	2632
2024							
Jumlah							

Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.27 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerima beasiswa miskin di Kota Banda Aceh yang bersumber dari zakat pada tahun 2019 dengan total penerima 2.918 jiwa. Beasiswa diberikan untuk berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Beasiswa juga diberikan untuk program beasiswa tahfidz dan santri salafi. Pada tahun 2023, jumlah penerima beasiswa menjadi 2.632 siswa.

D. Majelis Permusyawaratan Ulama

Majelis Permusyawaratan Ulama yang disingkat dengan MPU adalah suatu lembaga independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRK. MPU

merupakan wadah untuk meningkatkan peran ulama dalam pembangunan Kota Banda Aceh. MPU merupakan mitra kerja Pemerintahan Daerah dan DPRK dalam perumusan Kebijakan Daerah, yang berfungsi " memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan berdasarkan Syariat Islam serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan Syariat Islam ". Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, maka MPU Kota Banda Aceh mempunyai tugas:

1) Memberi masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam
2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam
3) Melakukan pengkaderan Ulama.
4) Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

Di samping itu, kewenangan MPU juga melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh dan memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

1) Jumlah Fatwa, Himbauan, Tausyiah yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Syariat

MPU Kota Banda Aceh telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan secara proposional dan terstruktur pada sistem perencanaan, dan telah pula melakukan kegiatan yang didasari pada prakarsa insidental, temporal dan profesionalisme keulamaan dengan mengeluarkan keputusan keulamaan. Berikut Jumlah keputusan, hasil penellitian, surat edaran, rekomendasi/ saran/ nasehat, arahan, himbauan dan tausiyah yang dikeluarkan MPU Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.28 berikut ini :

Tabel 2.28 Keputusan, Hasil Penelitian, Surat Edaran, Rekomendasi/Saran/ Nasehat, Arahan, Himbauan dan Tausiyah Yang Dikeluarkan MPU Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Keputusan	1	-	-	-		
2	Hasil Penelitian	-	-	-	-		
3	Surat Edaran	-	-	-	-		
4	Rekomendasi/Saran/Nasehat	4	-	4	-		
5	Surat Arahan	-	-	-	16		
6	Himbauan	9	-	-	-		
7	Tausiyah	8	6	4	2		
Jumlah		22	6	8	18		

Sumber: Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.28 di atas menunjukkan bahwa MPU Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019-2023 telah mengeluarkan 11 keputusan, 1 hasil penelitian, 0 surat edaran, 12 rekomendasi/saran/nasehat, 31 surat arahan, 9 himbauan dan 20 tausiyah.

2) Kewenangan MPU :

Kewenangan MPU Kota Banda Aceh terdiri dari:

(1) Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh;
(2) Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh telah melaksanakan segenap kegiatan yang telah direncanakan secara proposional dan terstruktur pada sistem perencanaan, dan telah pula melakukan kegiatan yang didasari pada prakarsa insidental, temporal dan profesionalisme keulamaan dengan mengeluarkan Keputusan Keulamaan pada Tabel 2.29 di bawah ini :

Tabel 2. 29 Keputusan Keulamaan

No	Tahun		Keterangan
1	2019	a.	Surat Arahan untuk Kegiatan Malam Resepsi HUT Kota Banda Aceh ke-841
		b.	Surat Arahan untuk Kegiatan PLN Aceh tentang "BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Aceh Tahun 2019"
		c.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentang "Pekan Kreatif Banda Aceh Tahun 2019"
		d.	Surat Arahan Kegiatan untuk Bank Indonesia tentang " Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah Aceh (Fesa) 2019"
		e.	Surat Arahan Kegiatan untuk PT Era Baru Mandiri tentang " Amazing Muharram Hijrah & Ukhuwah"
		f.	Surat Arahan kepada Dinas PU Kota Banda Aceh untuk Pembangunan Tugu Tauhid di Ulee Lheue
		g.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Perhubungan Aceh tentang "Malam Keakraban Hari Perhubungan Nasional Tahun 2019"
		h.	Surat Arahan Kegiatan untuk Zawiyah Nurun Nabi "Zikir Akbar, Shalawat dan Doa Bersama Masyarakat Kota Banda Aceh
		i.	Surat Arahan Kegiatan untuk Teater Wanito Ngunandiko Yogyakarta
		j.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentang "Banda Aceh Coffee Festival"
		k.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tentang "Aceh Agro Expo"
		l.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Koperasi dan UKM Aceh tentang "Aceh UMKM Expo 2019"
		m.	Surat Arahan Kegiatan untuk BRI (Persero), Tbk tentang “Pesta Rakyat Simpedes BRI Tahun 2019”
		n.	Surat Arahan Kegiatan untuk Gudang Garam tentang “Pawai Budaya Bersama Gudang Garam”
		o.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentang " Kutaraja Festival"
		p.	Keputusan Plt. Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/01/2019 tentang Pelaksanaan Musyawarah Ulama Pembentukan MPU Tahun 2019
		q.	Keputusan Plt. Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/02/2019 tentang Penetapan Tim Penguji Baca Kitab Calon Anggota MPU Kota Banda Aceh, pada Musyawarah Ulama Kota Banda Aceh Tahun 2019
		r.	Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 152 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggota MPU Kota Banda Aceh Masa Khidmat 2019-2024
		s.	Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 155 Tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan MPU Kota Banda Aceh Masa Khidmat 2019-2024
		t.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/010/2019 tentang Pelaksanaan Sidang Paripurna - I Tahun 2019 MPU Kota Banda Aceh
		u.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/011/2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi MPU Kota Banda Aceh Masa Khidmat 2019-2024
		v.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 017/2019 tentang Pedoman Zakat Fitrah Tahun 2019
		w.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 024/2019 tentang Identifikasi Aliran Sesat dan Wahabi Salafi

No	Tahun		Keterangan
		x.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/026 /2019 tentang Pelaksanaan Sidang Paripurna - II Tahun 2019 MPU Kota Banda Aceh
		y.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/031/2019 tentang Pelaksanaan Sidang Paripurna - III Tahun 2019 MPU Kota Banda Aceh
		z.	Saran dan nasehat tentang penolakan kedatangan DR. Firanda Andirja Lc, MA
		aa.	Saran dan nasehat tentang Fungsi Masjid di Kota Banda Aceh
2	2020	a.	Tausiyah MPU Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Siaga darurat *Corona virus Disease (Covid-19*) di Kota Banda Aceh
		b.	Tausiyah MPU Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan Dalan Situasi pandemi *Corona Virus Disease (Covid*-19) di Kota Banda Aceh
3	2021	a.	Tausiyah MPU tentang penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dalam situasi pandemi Corona Virus Deseare (COVID-19) di Kota Banda Aceh
		b.	Tausiyah MPU tentang Peperangan Ghaza Palestina dan Pencegahan COVID-19
		c.	Tausiyah MPU tentang pelaksanaan Qurban 1441 h dan pelaksanaan ibadah sesuai protocol kesehatan di masa pandemic Covid-19
		d.	Tausiyah MPU tentang Pemilihan Geuchik Langsung
		e.	Tausiyah MPU tentang pemberian tahun Hijriah pada surat dinas
		f.	Tausiyah MPU tentang Qanun penyelenggaraan pariwisata natal Kota Banda Aceh
4	2022	a.	Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama tentang Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan Tahun 1443 H/ 2022 M di Kota Banda Aceh.
		b.	Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama tentang Status Pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid Babu Zamzam Peunayong.
		c.	Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama tentang Penertiban Lapangan Blang Padang.
		d.	Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama tentang Isu-isu Sosial/Keagamaan.
		e.	"Direktur Utama PT.Sarana Aceh Ventura Konveksi menjadi lembaga keuangan syariah" (Rekomendasi)
		f	Pimpinan Yayasan Islam Ar-Risalah Audiensi " Audiensi buku syair Aqidah diajarkan dan dianut masyarakat Kota Banda Aceh" buku ini bagus diajarkan kepada pelajar dan masyarakat dalam upaya penguatan aqidah Islamiyah(Rekomendasi)
		g	" Ketua Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri (Baitul Qiradh Bima) Perubahan AD/ART Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)(Rekomendasi)
		h	Kepala Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh "Permohonan Pembentukan Dewan Syariah Kota Banda Aceh " (Rekomendasi)
5	2023	a.	Tausiah MPU Tentang Pendistribusian Daging Qurban 1443 H
		b.	Tausiah MPU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan 1444 H
		c.	Kepada Ketua Himpunan mahasiswa Fisika (Kegiatan " Closing Ceremony PC OH)
		d.	Kepada Direktur CV.AMC Event Organizer Kegiatan "Expo UMKM ACEH 2023" (Arahan)
		e.	Kepada Direktur CV.BOMS-SKY Event Management Kegiatan "PEKAN RAYA CAHAYA ACEH" (Arahan)
		f.	Kepada Ketua Panitia Grub Paduan Suara New Laras Cita (Kegiatan " Mengembangkan Bakat Vokal Milenial Untuk Menciptakan Generasi Bertalenta)
		g.	Kepada Kadis Koperasi UMKM ACEH Kegiatan " Expo Enterpreneur 2023"
		h.	Kepada Koordinator Shelter Cooporation Kegiatan " Honda Sport Motor Show dan Honda Premium Matic Day"
		i.	Kepada Kadis Kebudayaan & Pariwisata Aceh Kegiatan " Seudati dan Expo 2023"
		j.	Kepada Kadis Kebudayaan & Pariwisata Aceh Kegiatan " Aceh PoP Culture Festifal 2023" Kepada Panitia Mahkota Production Kegiatan " Atjeh Fest 2023"

No	Tahun		Keterangan
		k.	Kepada Direktur PT.Farobi Eventporium Organizer Kegiatan "Pasar Murah dan Bazar UKM Bersama Pema 2023"
		l.	Kepada Ketua Panitia Shelter Corporation Kegiatan " Honda Premium Matic Day dan Silaturrahim Honda Matic Lovers"
		m.	Kepada Ketua Pelaksana Mahkota Produktion Kegiatan " Soundsation"
		n.	Kepada Ketua pelaksana Honda Klasik Aceh (Hoka) Kegiatan " Anniversary 1 Dekade Honda Klasik Atjeh (Hoka) dan Honda Tuha Atjeh Festifal 2023"
		o.	Kepada Ketua Pelaksana Manager Lingkar Kreatif Kegiatan " Expo Pemuda Kreatif"
		p.	Kepada Ketua Panitia Shelter Corporation Kegiatan " Honda Custom Playground dan Honda Sport Motor Show"
		q	Kepada Ketua Panitia Komunitas Musik Banda Aceh Kegiatan " Komunitas Musik"
6	2024		

Sumber : Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Sertifikasi produk halal dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan lembaga pelaksana Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan (LPPOM). Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan ke LPPOM MPU Aceh. Adapun persyaratan yang harus disiapkan oleh pelaku usaha sebagai pemohon, antara lain: KTP, Profil Perusahaan, matrik bahan baku dan diagram alur proses produksi. Tata cara sertifikasi halal dimulai dengan menyampaikan pengajuan permohonan sertifikasi halal kepada LPPOM MPU, melengkapi persyaratan yang diminta dan penjadwalan audit.

E. Majelis Adat Aceh

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat.

Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat adalah Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga-lembaga Adat. Selanjutnya, dikuatkan keberadaan Sekretariatnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2011 untuk mengisi Keistimewaan Aceh dibidang Adat Istiadat yang merupakan seperangkat nilai-nilai keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat Istiadat tersebut telah

memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh merupakan lembaga non struktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Dalam menentukan kebijakan di bidang adat serta untuk melestarikan, membina, mengkaji dan mengembangkan Adat-istiadat.

F. Majelis Pendidikan Daerah

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) merupakan sebuah lembaga setingkat Musyawarah Pimpinan Daerah sebagaimana lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) dan Majelis Adat Aceh (MAA). Lembaga ini hanya ada di Aceh sebagai sebuah kekhususan Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. MPD adalah lembaga yang mengkhususkan diri dalam urusan pendidikan. MPD Banda Aceh merupakan lembaga yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. MPD lahir sejak Tahun 1990 di Banda Aceh yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990. Kemudian juga dilahirkan di seluruh kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

MPD Kota Banda Aceh telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu Pendidikan khususnya Pendidikan dalam bidang agama islam yang diwujudkan dalam kurikulum Pendidikan diniyah mulai dari tingkat Pendidikan dasar sampai dengan menengah diseluruh wilayah Kota Banda Aceh, disamping itu peran lembaga ini juga memberikan berbagai pertimbangan kepada Pemerintah kota Banda Aceh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

1. Tugas Pokok MPD

1) Memberikan pertimbangan kepada pemerintah kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan
2) Menyusun konsep pendidikan islami dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah, keluarga dan masyarakat
3) Memberi pertimbangan tentang kurikulum sekolah dan madrasah
4) Memberi pertimbangan dalam peningkatan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di kota
5) Memberi pertimbangan dalam penyusunan konsep pendidikan dan pelatihan guru, rekruitmen pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah/madrasah berdasarkan kemampuan profesional
6) Mengadakan penelitian dan penjaminan mutu pendidikan
7) Memberi pertimbangan terhadap kebijakan bidang pendidikan dan program-program pendidikan di sekolah/ madrasah/ dayah menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan
8) Mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah/ madrasah
9) Meningkatkan motivasi pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah/madrasah untuk berprestasi, berinovasi dan berkemampuan profesional yang islami
10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota

2. Fungsi MPD

1) Sebagai badan pemikir (*Think tank body*)
2) Sebagai badan pemberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah mengenai pendidikan (*advisory body*)
3) Sebagai badan penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan (*motivating body*)

4) Sebagai badan pengawas pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan (*controlling body*)
5) Sebagai badan mediator antara masyarakat dan pemerintah serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat (*mediating body*)

3. Kewenangan MPD

1) Menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang baik negeri maupun swasta
2) Memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan di kota
3) Mengembangkan sistem pendidikan islami di kota
4) Menampung aspirasi dan hasil kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan
5) Mengembangkan sistem pendidikan Islami di Provinsi Aceh.

2.1.3.2 Fokus Layanan Wajib Dasar

A. Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Diselenggarakan Sebelum Jenjang Pendidikan Dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal, Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. dan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Perkembangan siswa PAUD di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.30 berikut:

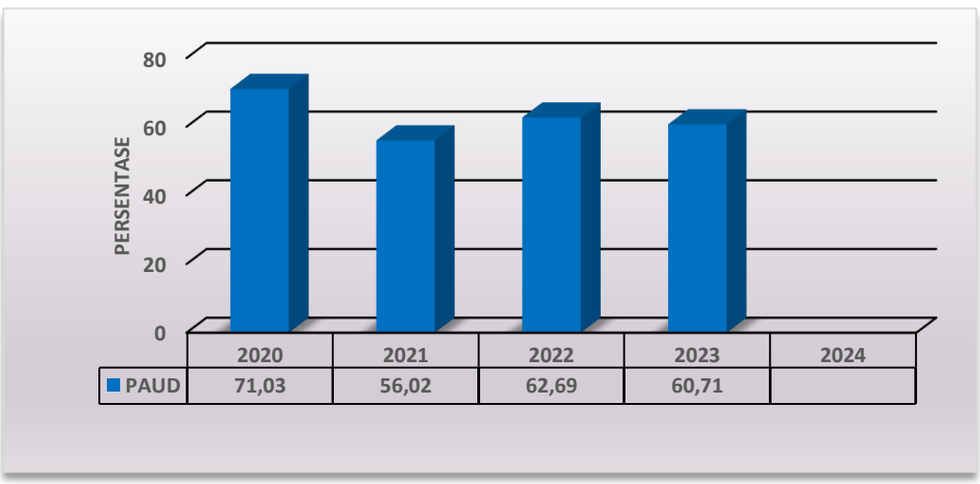

Sumber: Profil Pendidikan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 30 Perkembangan Siswa PAUD Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan partisipasi PAUD terus menerus mengalami fluktuasi perkembangan, penurunan disebabkan

oleh beberapa faktor diantaranya adalah 1). Masih adanya orang tua yang men-cutikan anaknya bersekolah PAUD disebabkan karena 2). Masih adanya PAUD yang dikelola oleh masyarakat belum memiliki izin Operasional sehingga peserta didik PAUD tidak terdata dalam aplikasi Dapodik. 3) Masih belum meratanya Taman Kanak-kanak Negeri pada kecamatan Kota Banda Aceh. 4) masih kurangnya pengawas/penilik PAUD baik jalur formal maupun non formal yang dapat memberikan pembinaan dan pengawasan. Apabila faktor-faktor tersebut dapat dikelola dengan baik capaian PAUD pada Tahun 2023 sebesar 60,71 persen akan dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK yang tinggi menandakan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur atau melebihi umur yang seharusnya.

Untuk mengetahui Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Banda Aceh untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada Gambar 2.31 di bawah ini:

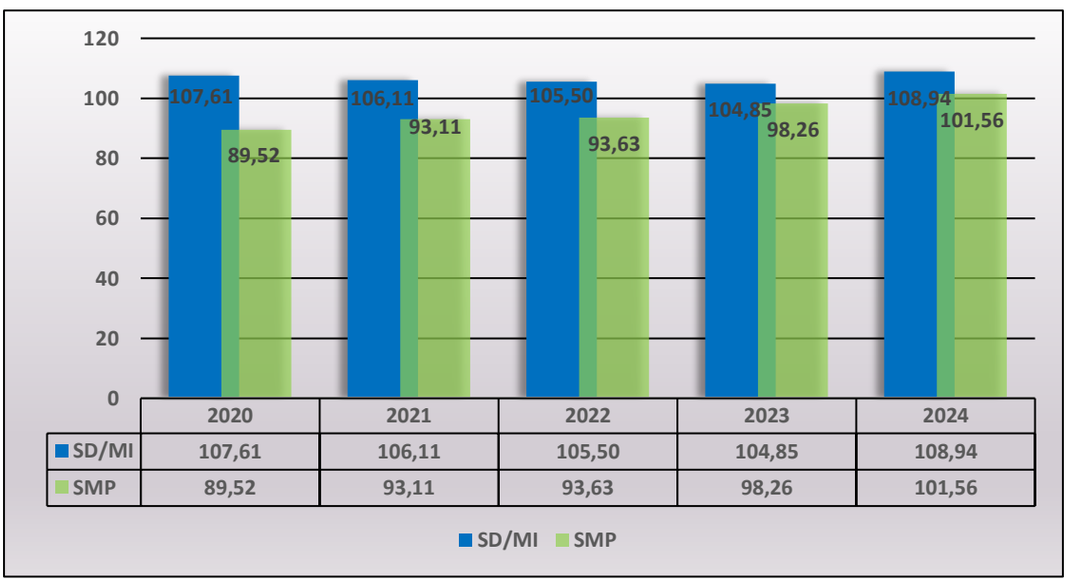

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Gambar 2. 31 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (%) Kota Banda Aceh Tahun 2020–2024

Berdasarkan Gambar 2.31 diatas dapat diketahui bahwa APK di jenjang SD/MI di Kota Banda Aceh cenderung mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 APK di jenjang SD/MI sebesar 107,61 persen kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 108,94 persen. Status APK untuk jenjang SMP/MTS terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024, tahun 2024 APK sebesar 101,56 persen.

3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah jumlah peserta didik yang telah menamatkan pendidikan pada tingkat akhir suatu jenjang baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) semakin tinggi angka pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik pengelolaan pendidikan di suatu daerah. Tabel

2.30 menunjukkan APT di Kota Banda Aceh pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs Kota Banda Aceh selama periode 2019-2023 sebagai berikut ini:

Tabel 2. 30 Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI						
1)	Jumlah siswa Lulusan di jenjang pendidikan SD/MI	5.771	5.703	5.611	5.051	3.962	
2)	Jumlah Siswa Tkt. VI	5.771	5.703	5.611	5.051	3.962	
3)	APT SD/MI	100	100	100	100	100	
2	SMP/MTs						
1)	Jumlah siswa lulusan di jenjang SMP/MTs	4.417	5.237	4.874	5.619	3.735	
2)	Jumlah siswa Tkt. III	4.420	5.237	4.874	5.622	3.742	
3)	APT SMP/MTs	99,93	100	100	99,98	99.81	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.30 di atas dapat dilihat bahwa capaian angka pendidikan yang ditamatkan (APT) pada jenjang Sekolah Dasar telah tercapai 100 persen artinya semua Peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar di kota Banda Aceh menamatkan pendidikan pada tahun 2022. Akan tetapi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 angka pendidikan yang ditamatkan adalah sebesar 99,96 persen, hal tersebut disebabkan adanya sejumlah siswa yang tidak menamatkan pendidikan pada jenjang SMP sebanyak 3 (tiga) orang dan jumlah yang tidak mengikuti ujian sebanyak 4 (empat) orang.

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Penyebaran sekolah untuk jenjang SD/MI sampai SMP/MTs sudah merata dan menjangkau seluruh wilayah Kota Banda Aceh sampai ke daerah pinggiran kota.

Gambar 2.33 berikut ini menggambarkan perkembangan APM untuk tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024:

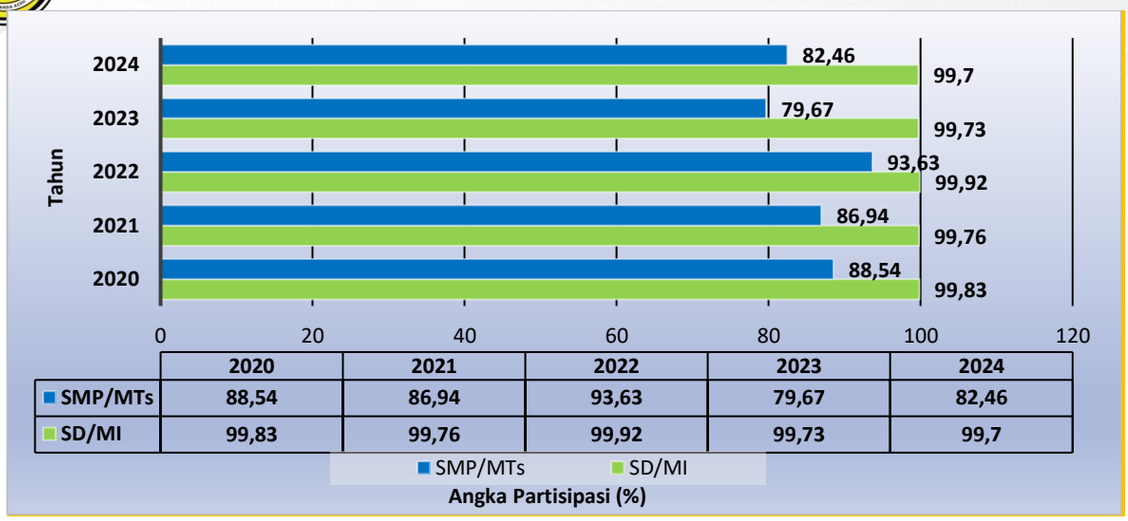

	2020	2021	2022	2023	2024
SMP/MTs	88,54	86,94	93,63	79,67	82,46
SD/MI	99,83	99,76	99,92	99,73	99,7

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud, 2024

Gambar 2. 32 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2.32 di atas dapat diketahui bahwa APM SD/MI cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, APM SD/MI sebesar 99,70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kota Banda Aceh yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SD/MI pada Tahun 2024.

Sementara itu APM untuk tingkat pendidikan SMP/MTs berfluktuasi dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 APM SMP/MTs adalah 82,46 persen.

5. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan rasio anak yang masih sekolah pada usia tertentu (usia sekolah) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sama tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. APS juga merupakan indikator yang digunakan sebagai petunjuk keberhasilan program wajib belajar. Program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS umur 7 – 12 tahun lebih dari 95 persen dan APS umur 13 – 15 tahun lebih dari 70 persen. Tabel 2.31 berikut ini menunjukkan perkembangan APS di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 31 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	APS SD/MI (usia 7 -12 tahun)	99,99	99,98	99,92	99.92	99,98
2	APS SMP/MTs (usia 13 – 15 tahun)	99,89	99,99	99,05	99.05	99,95

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel 2.31 ini diketahui bahwa pada tahun ajaran 2024 APS usia 7 – 12 tahun meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,98 persen. Sedangkan untuk APS usia 13 – 15 tahun di tahun 2024 mencapai 99,95 Angka tersebut menunjukkan pencapaian APS usia 13 – 15 tahun dan APS usia 7 – 12 tahun sudah melebihi standar yang ditetapkan.

6. Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan

dibidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya; kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan adanya keterbatasan si anak.

Pada tahun 2024 di Kota Banda Aceh tidak ada lagi siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah**.**

7. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio Ketersediaan Sekolah adalah kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan pada jenjang tertentu. Standar rasio ketersediaan sekolah dihitung berdasarkan jumlah ketersediaan sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah, semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia sekolah, semakin tinggi rasio akan semakin baik pencapaiannya. Rasio ketersediaan sekolah di Kota Banda Aceh selama periode 2019-2024 dapat pada Gambar 2.33 di bawah ini:

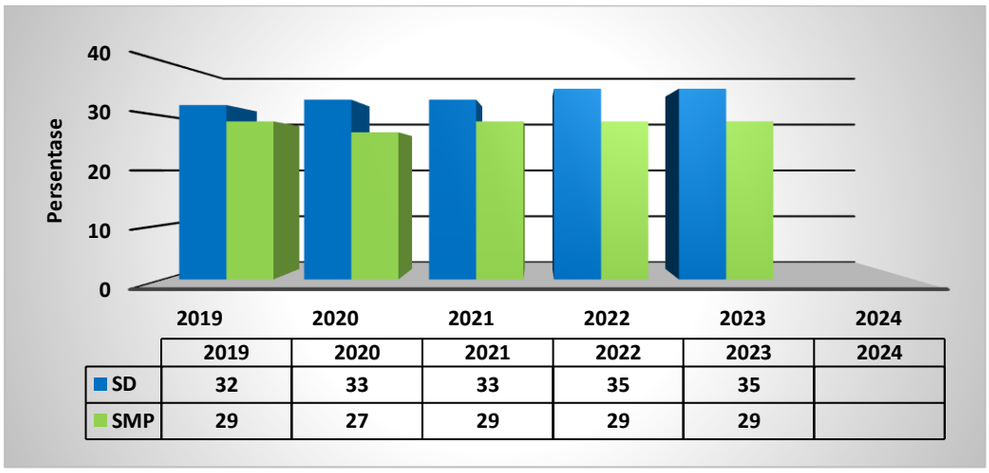

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SD	32	33	33	35	35	
SMP	29	27	29	29	29	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 33 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2024

Berdasarkan Gambar 2.33 di atas dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah baik jenjang SD/MI pada tahun 2023 sebesar 35 artinya tiap 10.000 penduduk terdapat 35 gedung sekolah. Begitu juga dengan rasio ketersedian sekolah SMP/MTs memiliki rasio 29 gedung/10.000 penduduk. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk usia 13-15 tahun tetapi tidak diimbangi dengan penambahan jumlah sekolah secara signifikan serta adanya sekolah SMP swasta yang tutup karena tidak ada siswa yang mendaftar (SMP Swasta Cut Meutia).

8. Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 1.000 jumlah murid, rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah tenaga pengajar, selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. menetapkan tunjangan profesi akan didapatkan oleh guru jika mengajar di satuan pendidikan dengan rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru adalah sebagai berikut :

a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 1 : 15;
b. untuk SD atau yang sederajat 1 : 20;
c. untuk MI atau yang sederajat 1 : 15;
d. untuk SMP atau yang sederajat 1 : 20;
e. untuk MTs atau yang sederajat 1 : 15;

Untuk mengetahui rasio guru/murid di Kota Banda Aceh selama periode 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.34 di bawah ini:

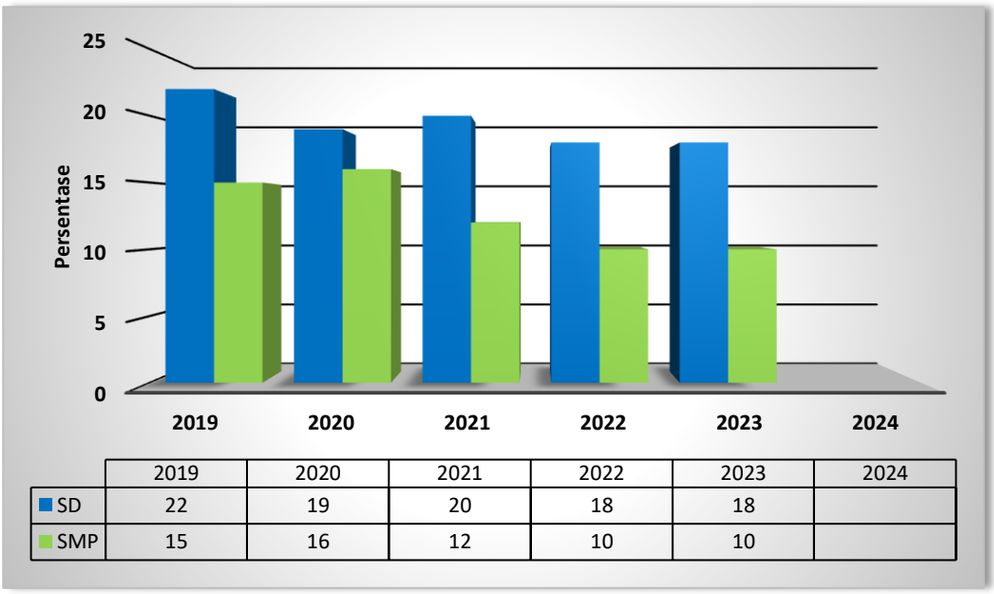

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SD	22	19	20	18	18	
SMP	15	16	12	10	10	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 34 Rasio Guru/Murid Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2024

Selama tahun 2019 hingga tahun 2024, dibandingkan standar nasional terlihat bahwa rasio guru terhadap siswa pada per-jenjang sekolah sudah memenuhi standar minimal. Pencapaian ini sangat menggembirakan. Sudah saatnya Kota Banda Aceh tidak hanya melihat rasio jumlah kuantitas guru terhadap murid saja namun perlu melihat rasio jumlah ketersediaan guru menurut mata pelajaran yang ada di SD/MI dan SMP/MTs. Hal ini untuk mendapatkan pemerataan yang proporsional di setiap sekolah dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh.

9. Capaian Rapor Pendidikan

Capaian Raport pendidikan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 32 Capaian Raport pendidikan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Indikator	Realisasi SD		Realisasi SMP	
		2023	2022	2023	2022
1	Literasi	68,69	60,66	74,94	70,38
2	Numerasi	46,07	30,47	45,03	44,20
3	Karakter	53,40	52,49	54,81	53,89
4	Kualitas Pembelajaran	65,69	58,93	62,27	59,94

5	Iklim Kebhinekaan	68,66	59,73	67,97	60,99
6	Iklim Inklusivitas	55,59	52,22	54,87	53,07

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Dari Tabel 2.32 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Raport Pendidikan Kota Banda Aceh pada tahun 2023 untuk kemampuan Literasi mencapai 68.69 untuk Sekolah Dasar, dan 74.94 untuk Sekolah Menengah Pertama artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik untuk menjadi mahir. Kemampuan Numerasi, 46.07 untuk Sekolah Dasar dan 45.03 untuk Sekolah Menengaah Pertama kurang dari 50% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi dan Indeks karakter 53,40 untuk Sekolah Dasar dan 54,81 untuk Sekolah Menengah pertama dapat dijelaskan bahwa peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari.

10. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang memegang penting dalam menjamin mutu pendidikan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompetensi yang teruji yang dinyatakan dengan sertifikat profesi untuk dapat mewujudkan kinerja yang bermutu.

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik yang dimiliki oleh para guru. Dari data perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV terus mengalami peningkatan. Perkembangan dapat dilihat pada Tabel 2.33 berikut:

Tabel 2.33 Perkembangan Guru Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 (Dalam Persen)

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
Guru yang Memenuhi Kualifikasi SI/ D-IV	86,96	89,07	90,59	96,99	86,84		Tidak termasuk Guru Depag

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

B. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Salah satu indikator utama kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan naik turunnya angka kematian bayi, diantaranya :

1) masih ada ibu dengan penyakit penyerta yang ingin hamil tanpa direncanakan dengan baik;
2) kurangnya pengetahuan keluarga dalam mendeteksi resiko tinggi pada ibu hamil dan perawatan kesehatan pada bayi;

Sampai dengan tahun 2023 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banda Aceh sebesar 3,2 per 1000 kelahiran hidup, atau sebanyak 16 kasus yang dilaporkan. Ada banyak faktor yang memengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB. Untuk mengetahui perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.35 di bawah ini:

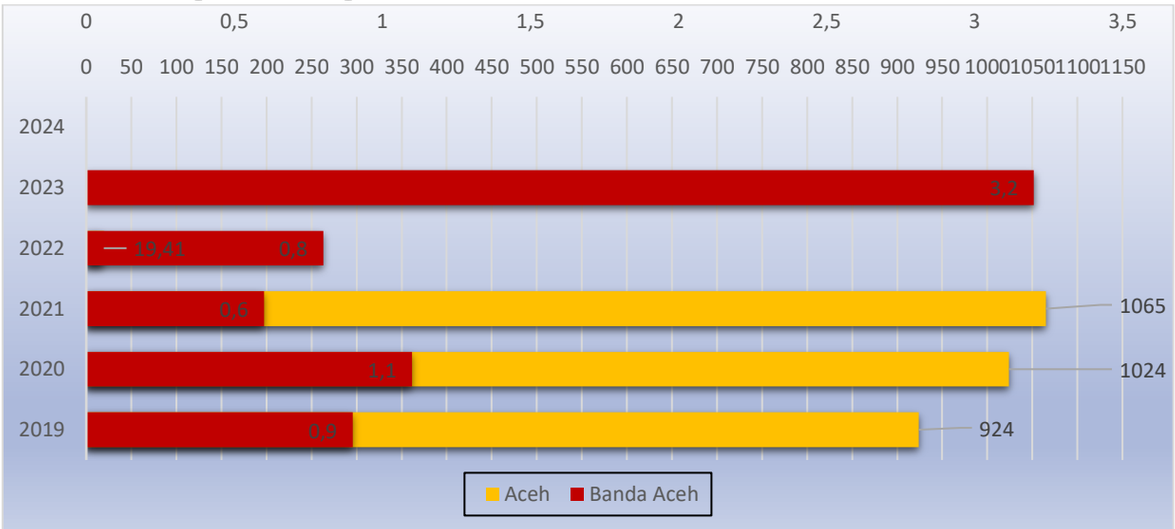

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 35 Perkembangan AKB Banda Aceh Tahun 2019-2024

Berdasarkan Gambar 2.35 diatas menunjukkan angka kematian bayi di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan, peningkatan tersebut memerlukan perhatian dan usaha dari pihak terkait untuk terus berupaya menurunkan angka kematian bayi.

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-AKB). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.34 di bawah ini :

Tabel 2.34 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan	Rumus	Capaian Setiap Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	1000 (KH) - angka kematian bayi (AKB)	998	998	999	999	997	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.34 dapat disimpulkan bahwa Angka kelangsungan hidup bayi di kota Banda Aceh dalam 5 tahun terakhir stabil dan menurun di tahun 2023, Adanya penurunan terhadap angka kelangsungan hidup bayi mengalami penurunan di sebabkan oleh faktor Angka Kematian Bayi yang meningkat dimana pada tahun 2022 AKB 1,6 per 1000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2023 AKB 3 per 1000 kelahiran hidup.

3. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neo-Natal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kematian neonatal umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Untuk mengetahui perkembangan Angka Kematian Neonatal di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.36 di bawah ini:

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 36 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2019-2024

Berdasarkan Gambar 2.36 di atas, angka kematian neonatal di Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 sebesar 2,4 per 1000 Kelahiran Hidup. Angka ini berkaitan dengan upaya untuk mengurangi angka kematian neonatal melalui program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian tablet zat besi dan vaksinasi suntikan anti tetanus.

4. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu Melahirkan yang dilaporkan pada tahun 2023 sebesar 101 per 100.000 kelahiran hidup, atau sebanyak 5 kasus. Hal ini dipengaruhi faktor masih kurangnya pemahaman ibu terhadap resiko kehamilan dengan penyakit penyerta, pemeriksaan rutin ANC serta multi gravida. Selain itu kematian ibu juga dipengaruhi oleh adanya tata cara adat yang memberikan larangan atau pantangan-pantangan makanan bagi ibu pasca melahirkan sehingga menyebabkan suplai gizi yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan ibu serta kesiapan menyusui menjadi kurang. Untuk mengetahui perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.37 di bawah ini:

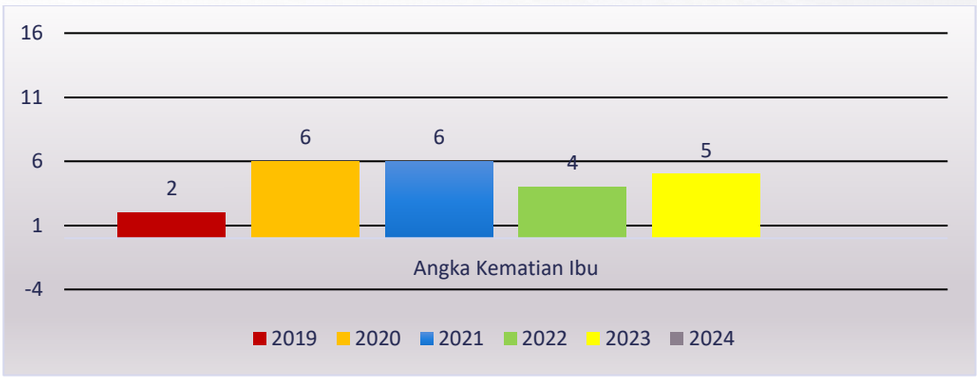

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 37 Angka Kasus Kematian Ibu di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

5. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita. Jadi posyandu adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Posyandu dibentuk bertujuan untuk :

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas)
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Tujuan pembentukan posyandu tersebut didukung dengan 5 kegiatan pokok posyandu, yaitu :

1. KIA
2. KB
3. lmunisasi
4. Gizi
5. Penanggulangan Diare.

Tabel 2.35 Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per-Satuan Balita Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
2019	114	20.838	1 : 182
2020	114	27.572	1 : 241
2021	114	11.323	1 : 99
2022	115	13.775	1 : 120
2023	114	11.887	1 :104
2024			

Sumber : Dinas Kesehatan Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Perkembangan rasio pelayanan posyandu di Kota Banda Aceh untuk per-satuan balita tahun 2023 adalah 104 balita yang dilayani oleh 1 posyandu. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan kurangnya parsipasi

masyarakat untuk berkunjung ke posyandu membawa balita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

6. Rasio Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk

Jumlah fasilitas kesehatan menggambarkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan dan sarana pelayanan kesehatan yang dimaksud ialah ; Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Puskesmas Keliling, Pos KIA, Balai Pengobatan dan lain-lain. Jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.36 berikut:

Tabel 2.36 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Fasilitas Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit Umum	13	13	14	14	14	
Rumah Bersalin	7	7	7	7	7	
Puskesmas	11	11	11	11	11	
Puskesmas Pembantu	27	27	27	27	27	
Polindes/Poskedes	34	34	34	34	34	
Posyandu	114	114	114	114	114	
Klinik/Balai Kesehatan	39	39	54	54	54	
Puskesmas Keliling	7	7	7	7	7	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Pelayanan kesehatan dasar yang diterapkan di Indonesia memegang peranan penting dalam pemberian layanan kesehatan yang dapat menjangkau wilayah-wilayah pedesaan. Untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang terjangkau, maka sarana dan prasarana pelayanan kesehatan harus tersedia atau tersebar di setiap kecamatan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik.

7. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan dibidang pelayanan langsung seperti Rumah sakit, bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan medik dan rujukan kesehatan secara terpadu serta meningkatkan dan memantapkan manajemen pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian.

Pelayanan kesehatan rumah sakit di Kota Banda Aceh telah menunjukkan kinerja yang baik. Ketersediaan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta sudah tersebar dan mencukupi untuk pelayanan kesehatan rujukan.

Tabel 2.37 Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit (Umum+Swasta)	13	13	14	14	15	
Jumlah Penduduk	268,156	252,899	276,223	257,635	255.409	
Rasio	1 : 21	1 : 21	1 : 18	1 : 17	1:25	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dilihat bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit masih memenuhi standar rasio rumah per-satuan penduduk. Idealnya satu rumah sakit melayani seratus ribu penduduk, sementara data diatas menunjukkan rata-rata rumah sakit melayani penduduk dibawah seratus ribu penduduk. Namun over capacity pelayanan dapat terjadi apabila banyaknya pasien dari luar wilayah Kota Banda Aceh yang dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh terutama rumah sakit pemerintah.

8. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk adalah Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah (di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain) per 100.000 penduduk. Ketersediaan jumlah dokter memberikan gambaran pelayanan kesehatan dari sisi kuantitas tenaga medis terhadap masyarakat. Pola hidup yang semakin berubah terutama diperkotaan menjadikan masyarakat rentan terhadap gejala penyakit maupun keluhan kesehatan lainnya yang membutuhkan penanganan dokter. Kota Banda Aceh sebagai pusat pelayanan kesehatan di Provinsi Aceh memiliki beban besar dalam pelayanan kesehatan terutama penyediaan tenaga medis. Tabel berikut menggambarkan kondisi pelayanan dokter terhadap penduduk di Kota Banda Aceh.

Tabel 2.38 Perkembangan Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Praktik Dokter Perorangan	637	469	697	665	502	
Jumlah Penduduk	270.321	252.899	255.029	257,635	257.313	
Rasio/100.000 penduduk	1 : 42	1 : 53	1 : 36	1 : 39	1 : 512	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Menurut WHO, rasio ideal antara dokter dan masyarakat adalah 1:1000 orang. Artinya satu dokter untuk melayani 1000 penduduk di satu wilayah. Jika dilihat dari rasio dokter per satuan penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan jumlah dokter yang ada di Kota Banda Aceh sudah cukup memadai, 1 orang dokter melayani 514 penduduk di tahun 2023.

9. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Masa kehamilan merupakan masa yang sangat menentukan bagi si anak yang dikandungnya, menjaga kesehatan dan asupan makanan bergizi adalah suatu keharusan yang tidak boleh dilupakan oleh ibu hamil. Berbagai masalah kesehatan dapat dialami oleh ibu hamil, dan jika tidak ditangani dengan baik maka dapat saja hal tersebut mengganggu kesehatan baik si ibu hamil maupun janin yang

dikandungnya. Beberapa ibu hamil dapat tergolong dalam kasus risiko tinggi (risti) atau mengalami komplikasi dalam kehamilan sehingga memerlukan pelayanan kesehatan rujukan. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani merupakan salah satu indikator kinerja bidan. Untuk mengetahui cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.38 dibawah ini:

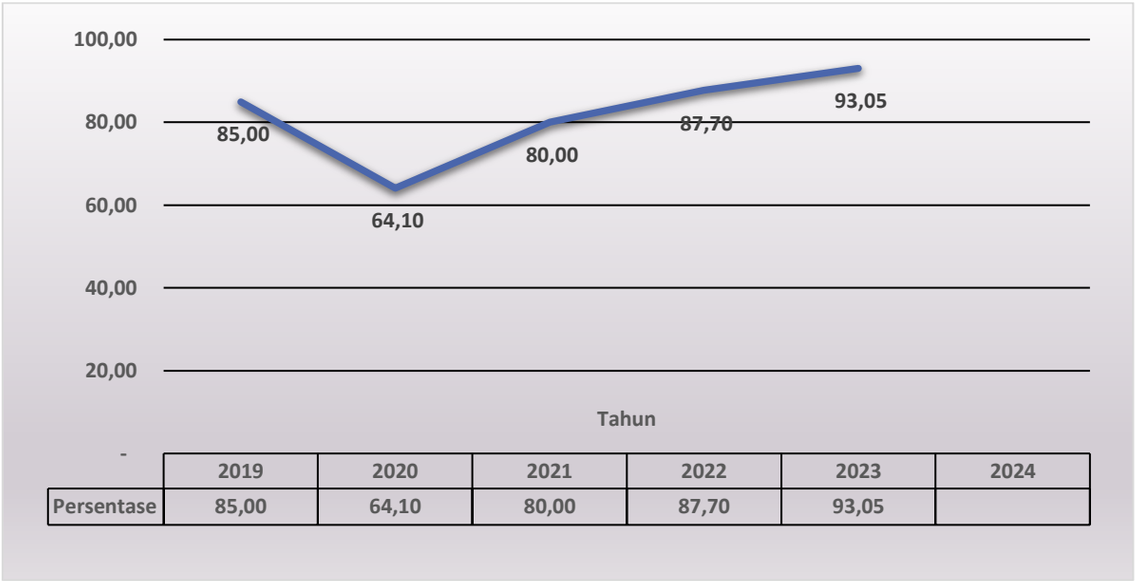

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase	85,00	64,10	80,00	87,70	93,05	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 38 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Berdasarkan Gambar 2.38 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019-2023, cakupan ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar 85%, pada Tahun 2020 sebesar 64,10%. Pada tahun 2021 sebesar 80,00 %, dan pada tahun 2022 cakupan komplikasi kebidanan di kota Banda Aceh sebesar 87,70 %, dan pada tahun 2023 sebesar 93,05% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, kondisi ini masih belum tercapai maksimal mengingat target yang ditetapkan adalah sebesar 100%, atau hanya tercapai 87 %. Hal ini menunjukkan masih perlunya dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan pelayanan kebidanan yang adekuat dan penanganan komplikasi kebidanan serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan untuk meningkatkan kinerja bidan.

10. Cakupan Desa/ Gampong *Universal Child Immunization* (UCI)

Pencapaian *Universal Child Imunization* (UCI) pada dasarnya merupakan suatu gambaran terhadap cakupan bayi (0-11 bulan) yang telah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap yang meliputi BCG, DPT, Polio, Hepatitis B dan campak. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut dapat digambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat terhadap penularan PD3I (Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi). Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI secara merata pada bayi di seluruh gampong. Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap jumlah gampong UCI dari Tahun 2019-2024 di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.39 berikut ini:

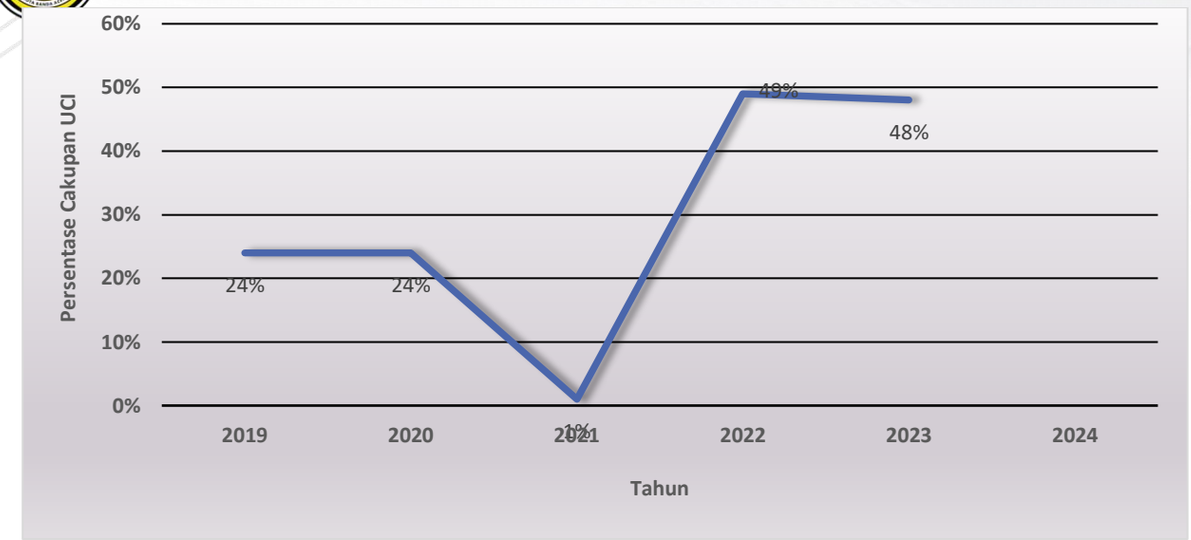

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 39 Cakupan Desa/Gampong Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2019-2024 Kota Banda Aceh

Berdasarkan Gambar 2.39 diatas, dari Tahun 2019-jumlah gampong yang telah melaksanakan UCI bagi bayi 0-11 bulan mengalami penurunan drastis, terutama pada tahun 2021 dimana masih terjadi pandemi covid 19 dan tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 49% akan tetapi tahun 2023 menurun sedikit menjadi 48%. Peningkatan cakupan dan pemerataan pelayanan imunisasi sampai ke seluruh gampong di Kota Banda Aceh perlu terus diupayakan, namun terkendala kurangnya keinginan masyarakat untuk memberikan imunisasi dasar lengkap bagi balita dikarenakan faktor isu kehalalan vaksin. Hal ini untuk memastikan target minimal 80 persen bayi yang ada di seluruh gampong telah mendapatkan lima inumisasi dasar lengkap sesuai yang diisyaratkan oleh Kementerian Kesehatan.

11. Stunting

Stunting yang sering disebut kerdil atau pendek merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standard deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Penyebab dari masalah stunting berhubungan dengan empat faktor yaitu akses terhadap pangan bergizi, praktek pemberian makanan bayi dan anak, akses terhadap pelayanan kesehatan serta akses terhadap kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Sedangkan penyebab tidak langsungnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan.

Kota Banda Aceh sejak tahun 2022 telah ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten/Kota Lokasi Fokus (Lokus) prioritas percepatan penurunan stunting dalam rangka mendukung target nasional sebesar 16 persen pada tahun 2023. Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 prevalensi stunting Kota Banda Aceh sebesar 23,4 persen, terendah se-Provinsi Aceh. Namun pada akhir tahun 2022 hasil SSGI Kota Banda Aceh mengalami peningkatan menjadi 25,1 persen. Berdasarkan data yang didapatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh melalui pencatatan aplikasi E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yakni sebesar 9,53 persen pada Desember 2023.

Untuk mengetahui persentase stunting di Kota Banda Aceh tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 39 Prevalensi Stunting Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Balita	Stunting	Persentase (%)
2019	20.846*)	211*)	1.01
2020	17.922	197	1.10
2021	21.699	186	0.85
2022	13.533	864	7.13
2023	11.887	953	9.53
2024			

Sumber: Laporan Rutin dan Survey EPPGBM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
**) Data tahun 2018-2019 disesuaikan*
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.39 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 prevalensi stunting di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk mengatasi permasalahan stunting, Pemerintah Kota Banda Aceh perlu meningkatkan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang melibatkan lintas sektor, mengingat sasaran penanganan stunting dimulai sejak remaja putri sampai dengan bayi 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran). Tingginya angka stunting juga berkaitan dengan kemiskinan, walaupun kemiskian dan kesehatan adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan dan pengurangan angka kemiskinan secara konvergen.

12. Cakupan Imunisasi Campak Bayi

Salah satu penyakit yang termasuk ke dalam golongan PD3I (Penyakit Menular yang dapat di Cegah dengan Imunisasi) adalah campak. Penyakit campak (*Measles*) adalah salah satu penyakit yang sangat menular. Cakupan imunisasi campak pada bayi Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.40.

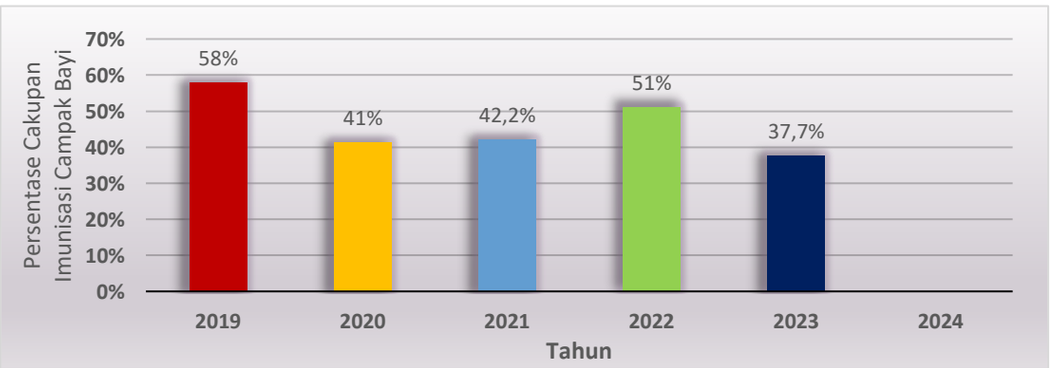

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 40 Cakupan Imunisasi Campak Bayi Tahun 2019-2024

Pada Gambar 2.40 di atas dapat dilihat bahwa tidak semua bayi yang ada di Kota Banda Aceh telah mendapatkan imunisasi campak. Cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi campak mulai terjadi peningkatan akan tetapi di tahun 2023 kembali turun menjadi 37.7%. Penurunan cakupan imunisasi campak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah keengganan orang tua untuk melakukan imunisasi campak pada bayi dan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap legalitas kehalalan bahan imunisasi dan kekhawatiran orang tua terhadap efek demam pasca pemberian imunisasi. Cakupan imunisasi campak sangat penting untuk mencegah

penyakit ini dan menutup kesenjangan sehingga tidak ada daerah yang dapat menjadi sumber penularan. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata minimal 95% dapat membentuk herdimmunity dan memutus rantai penularan penyakit campak.

13. Jumlah Kasus Campak

Campak yang juga dikenal dengan sebutan *Morbili* atau Measles, merupakan salah satu penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (*rash*) disertai dengan batuk dan/atau pilek dan/atau mata merah (*conjunctivitis*). Penyakit ini sering menyebabkan kejadian luar biasa (KLB). Penyakit ini tidak bisa diobati, namun pengobatan yang dapat diberikan kepada penderita hanya bersifat suportif. Tapi, penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi. Berikut Gambar 2.41 memperlihatkan jumlah kasus campak di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 :

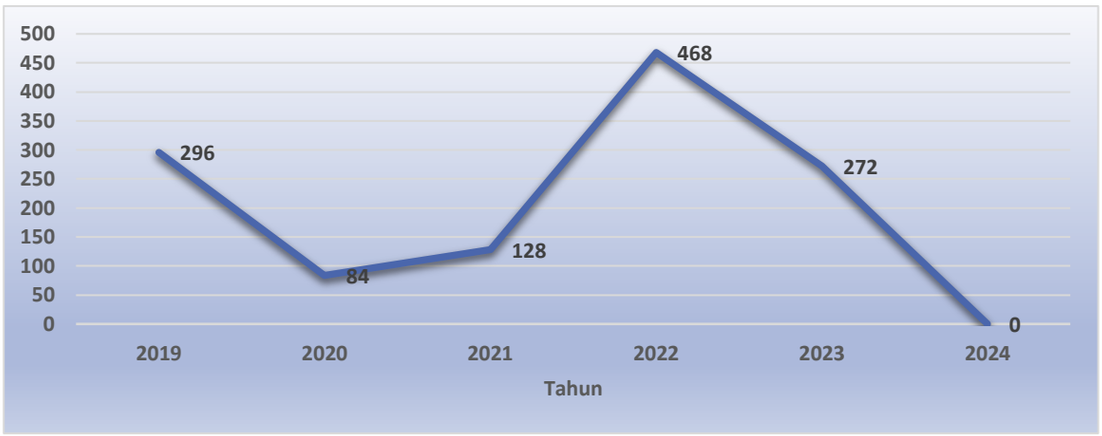

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
**) Data 2018 dan 2019 disesuaikan*
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 41 Jumlah Kasus Campak Tahun 2019-2024

Gambar 2.41 menunjukkan jumlah kasus campak berfluktuasi dari Tahun 2018-2022, dimana lonjakan tertinggi terjadi pada Tahun 2022 dengan jumlah kasus 468 kasus. Tahun 2023 terjadi penurun kasus menjadi 272 kasus dengan insiden rate suspek campak sebesar 104.5 persen per 100.000 penduduk.

14. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang menyerang paru-paru dan bisa berdampak pada bagian tubuh lainnya. TB menyebar melalui udara dan menularkan kepada orang lain dan apabila tuberkulosis laten tidak mendapatkan pengobatan maka lebih dari 50% dapat menyebabkan kematiaian. Penemuan pasien bertujuan untuk mendapatkan pasien TB melalui serangkaian kegiatan dari mulai penjaringan terhadap terduga pasien TB. Pemeriksaan fisik dan laboratoris dilakukan untuk menentukan klasifikasi penyakit serta tipe pasien TB.

Dalam menilai kemajuan atau keberhasilan program pengendalian TB digunakan beberapa indikator. Indikator utama program pengendalian TB secara Nasional ada 2, yaitu:

1. Cakupan Penemuan Kasus TB (*Case Notification Rate* = CNR)
2. Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Treatment Success Rate* = TSR).

Dari Tabel 2.40 berikut dapat dilihat cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh pada periode Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 40 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Aceh		Banda Aceh	
	Cakupan Penemuan Kasus	Angka Keberhasilan Pengobatan TB(%)	Cakupan Penemuan Kasus	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (%)
2019	8.647	84%	255	97,90%
2020	664	83%	147	91,70%
2021	4.069	7.017	435	81,32%
2022	10.754	89%	623	93,49%
2023	11.856	84%	1361	99.8%
2024				

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi Dari OPD

Tabel 2.40 diatas merupakan cakupan penemuan dan penanganan TB di Aceh dan Banda Aceh. Berdasarkan isi tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 angka penemuan kasus TB di Provinsi Aceh terjadi peningkatan yang cukup tinggi dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 dilaporkan ada 4.069 kasus meningkat menjadi 10.754 kasus pada tahun 2022 dan embali meningkat pada tahun 2023 sebesar 11.856. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa angka keberhasilan pengobatan TB di Provinsi Aceh jika dibandingkan dengan Kota Banda Aceh cenderung lebih kecil.

Cakupan penemuan kasus TB (CNR) di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuatif. Peningkatan penemuan kasus pada tahun 2022 sampai dengan 2023 disebabkan karena sistem penjaringan kasus TB di sarana pelayanan kesehatan dari sebelumnya dilakukan secara pasif (sistem menunggu di layanan kesehatan) menjadi aktif (sistem mencari langsung ke masyarakat).

Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kota Banda Aceh pada Tahun 2022 sebesar 93,49 persen meningkat menjadi 99,8% persen pada tahun 2023 . Data diatas menunjukkan bahwa target kesembuhan pasien sudah melebihi target nasional yaitu 80 persen. Tercapainya keberhasilan ini didukung oleh kepatuhan pengobatan pasien dan kegiatan aktif di puskesmas untuk memantau pasien melalui Pemberian Makanan Tambahan pada pasien.

15. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Tahun 2023 angka kematian akibat tuberkulosis sebesar 5,3%. Angka tersebut 5,3% dari tahun 2022 yaitu sebesar 5,4%. Proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh mencapai 90,69%, sisanya masih dalam proses pengobatan. Namun pada tahun 2022 ditemukan kasus meninggal pada pasien TB dengan penyebab meninggal bermacam-macam antara lain TB dengan penyakit lain seperti TB dengan DM, TB Resisten Obat dengan berbagai komplikasi, tuberkulosos resistem obat dan lain-lain Perilaku atau pola hidup pasien serta adanya komplikasi dengan penyakit lainnya menjadi faktor pendorong terjadinya kasus kematian, juga peran pemerintah terkait dengan tingginya angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) TB BTA+ (Bahan Tahan Asam) dengan selalu tersedianya obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jejaring pelayanan TB yang baik dimana akan terlayani pasien kemanapun pasien pindah baik pindah kabupaten maupun provinsi. Untuk tahun 2024 masih dalam proses kompilasi dari OPD.

16. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit demam berdarah *dengue* (DBD) adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan oleh nyamuk aedes aegypty. Penyakit DBD masih merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya tingginya curah hujan sehingga banyak terjadi genangan air pada wadah atau tempat yang dapat menampung air hujan sebagai tempat perindukan nyamuk DBD di lingkungan luar sekitar rumah, faktor yang lainnya juga dapat dilihat dari tingkat pengetahuan, pemahaman dan kepedulian serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat yang masih rendah, bisa dikarenakan tidak mengetahui ataupun tidak mempunyai kesempatan untuk memantau tempat-tempat perindukan nyamuk DBD yang ada di dalam rumah, seperti ditempat penampungan air dispenser, kulkas, bak mandi, vas bunga, talang air yang tersumbat dan lain lain. Hal ini menjadi salah satu faktor berkembang biaknya nyamuk DBD secara cepat.

Tabel 2. 41 Sebaran Kasus DBD Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam Orang)

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kuta Alam	49	14	3	44	3	
Lueng Bata	34	9	1	22	20	
Meuraxa	41	11	4	75	61	
Syiah Kuala	60	15	1*	26	29	
Ulee Kareng	36	6	2*	22	25	
Banda Raya	31	14	6*	61	36	
Jaya Baru	42	15	0	58	24	
Kuta Raja	13	2	0	19	17	
Baiturrahman	38	12	2*	39	23	
Total	**344**	**98**	**19***	**366**	**269**	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Banda Aceh pada tahun 2023 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022. Masih tingginya kasus DBD di Kota Banda Aceh tahun 2023 masih dipengaruhi tingginya curah hujan diawal tahun dan akhir tahun 2023 serta kurangnya kebersihan lingkungan, sedangkan upaya yang dilakukan masih sebatas pengasapan atau *fogging* yang hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan pemberantasan tempat-tempat perindukan nyamuk DBD dengan cara Pemberdayaan Masyarakat melalui Kader JUMANTIK = Juru Pemantau Jentik serta kegiatan gotong royong Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan metode 3M Plus yaitu Menguras bak mandi atau membersihkan genangan air, Menutup tempat tempat penampungan air, Mendaur ulang barang bekas plus menghindari gigitan nyamuk.

Berikut pada Gambar 2.42 dapat dilihat kasus kematian DBD di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 :

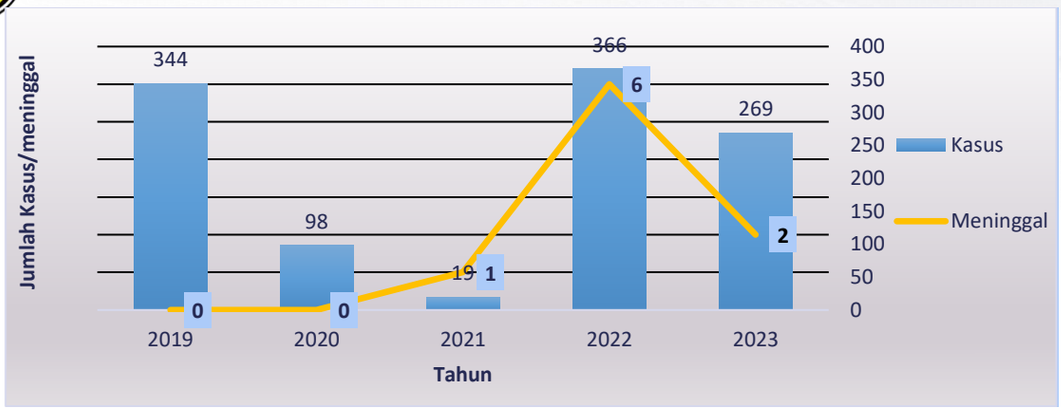

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 42 Kasus Kematian Akibat DBD Tahun 2019-2023

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD sangat memuaskan yakni 100%, hal ini disebabkan karena DBD merupakan penyakit musiman yang dapat dicegah melalui pola hidup bersih dan sehat, dilaksanakan melalui promosi kesehatan lingkungan yang terus menerus.

Adapun kasus DBD tertinggi pada Tahun 2022 sebanyak 366 kasus meningkat drastis dari tahun sebelumnya dan kematian akibat DBD sebanyak 6 kasus disebabkan karena pasien terlambat melapor untuk berobat ke fasilitas kesehatan sehingga terlambat mendapatkan penanganan karena menganggap hanya demam biasa. Pada tahun 2023 jumlah kasus DBD mengalami penurunan menjadi 269 kasus dengan kasus kematian yang disebabkan oleh DBD sebanyak 2 kasus.

17. Penderita Diare yang Ditangani

Penyakit diare masih menjadi salah satu masalah Kesehatan yang menjadi fokus pemerintah, karena penyakit ini masih sering timbul dalam bentuk Kejadian Luar Biasa (KLB) dan disertai dengan angka kematian yang tinggi. Diare juga menjadi salah satu penyebab sebagian besar kematian pada anak usia dibawah lima tahun di Indonesia. Berikut akan tersedia data terkait Penderita Diare yang Ditangani di Kota Banda Aceh, dimana Penderita diare yang ditangani adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di Puskesmas. Berikut pada Gambar 2.43 dapat dilihat penderita diare yang ditangani di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 :

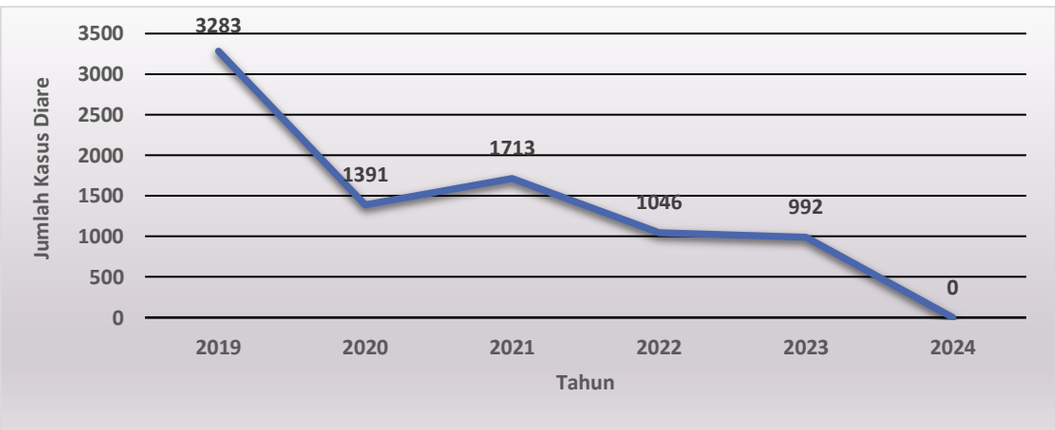

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 43 Penderita Diare yang Ditangani Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 2.43 terjadi peningkatan jumlah penderita diare kategori semua umur yang ditangani dari Tahun 2018 hingga Tahun 2019, namun

tahun-tahun selanjutnya hingga tahun 2022 mengalami tren penurunan kecuali sedikit peningkatan pada tahun 2021. Angka-angka tersebut di atas merupakan angka penderita yang dilayani oleh 11 Puskesmas. Penderita Diare umur Balita diberikan Oralit dan Zinc, sedangkan penderita Diare umur >5 tahun diberikan Oralit sesuai standar penanganan Diare dan terapi simptomatis lainnya.

18. Angka Kesakitan Malaria *(Annual Parasit Incidence)*

Malaria merupakan penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina yang mengandung *Plasmodium* didalamnya. Penyakit ini harus ditangani dengan cepat, karena dapat menimbulkan komplikasi dan menyebabkan kematian. Prevalensi Malaria atau Angka Kesakitan Malaria (*Annual Parasit Incidence*) dihitung dari banyaknya kasus malaria yang baru dengan yang lama dibagi jumlah penduduk di wilayah Kota Banda Aceh. Angka Kesakitan Malaria digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas atau tingkat penularan malaria di suatu daerah. Kasus malaria yang dimaksud disini adalah kasus malaria dengan diagnosa positif yaitu kasus dengan gejala klinis malaria.

Kota Banda Aceh bukan wilayah endemik malaria, beberapa kasus yang ditemukan bukan terjangkit di Banda Aceh tetapi dari wilayah lain. Namun untuk pelayanan terhadap malaria tetap tersedia pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam bentuk surveillance.

19. Jumlah Kasus Baru HIV

HIV (*Human Immunodefiency Syndrome*) menyebabkan penyakit AIDS (*Acquired Immunodefiency Syndrome* (AIDS) dan dapat ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman, beresiko, jarum suntik yang digunakan bersama, produk darah dan cairan tubuh serta dari ibu hamil yang positif HIV dapat menularkan kepada bayinya. Berikut pada Tabel 2.42 dapat dilihat jumlah kasus HIV dan AIDS di Kota Banda Aceh Tahun 2023 :

Tabel 2. 42 Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Kelompok Umur	H I V				Aids			
		L	P	L+P	Proporsi Kelompok Umur	L	P	L+P	Proporsi Kelompok Umur
1	≤ 4 Tahun								
2	5 - 14 Tahun		1	1	1.01%				
3	15 - 19 Tahun	4		4	4.04 %				
4	20 - 24 Tahun	27	1	28	28.2%	7		7	17.07%
5	25 - 49 Tahun	60	5	65	65.6%	31	1	32	78.04%
6	≥ 50 Tahun	1		1	1.01%	2		2	4.87%
Jumlah		92	7	99	**100**	**40**	**1**	**41**	**100**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Kegiatan pengendalian HIV/AIDS untuk menghentikan epidemi AIDS di Kota Banda Aceh diperlukan untuk mencegah kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS, serta peningkatan upaya penyebaran atau

penularan penyakit. Untuk itu ditetapkan semua fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit pemerintah dan swasta dapat memeberikan layanan perawatan dan pengobatan bagi penderita HIV/AIDS dengan tetap memegang prinsip kerahasiaan pasien.

20. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan sudah berbasis hak seluruh masyarakat sehingga tidak membedakan lagi berdasarkan tingkat sosial ekonominya. Berikut pada Gambar 2.44 dapat dilihat cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 :

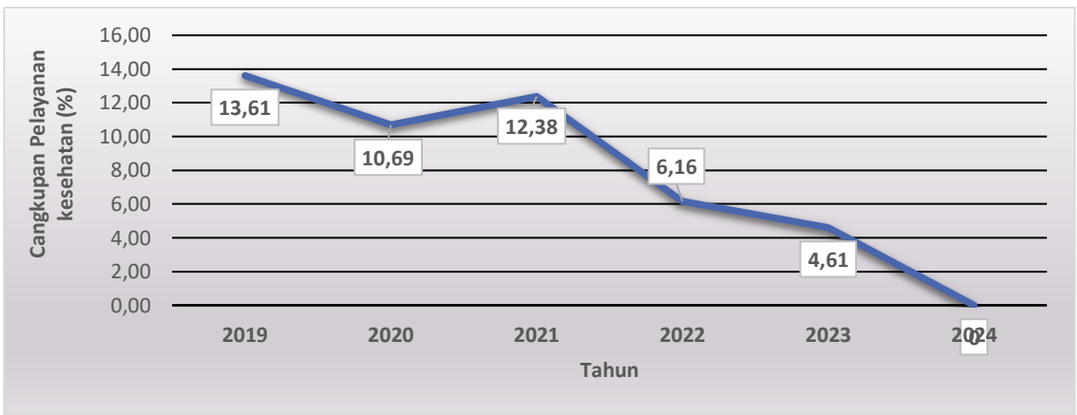

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 44 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Berdasarkan Gambar 2.44 di atas, cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin menunjukkan tren yang menurun. Jumlah tertinggi penderita yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 13,61 persen dan terendah pada Tahun 2023 sebanyak 4.61 persen. Pada tahun 2020 cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin menurun dari tahun sebelumnya sebesar 10.69 persen. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 12.38 persen namun tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 6.16 persen yang dapat diasumsikan karena jumlah penderita masyarakat miskin mengalami penurunan. Pada tahun 2023 cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin terjadi penurunan sebesar 4.61. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100 persen. Namun demikian pasien masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan semuanya tertangani dengan baik.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh mutlak diperlukan, mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial Kota Banda Aceh. Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah, hal ini disebabkan perannya dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia, dan barang.

Panjang ruas jalan dibedakan berdasarkan status/kewenangan pembinaannya yang dikelompokkan menjadi Jalan Nasional, Jalan Propinsi, dan Jalan Kota. Jalan Nasional pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR), Jalan Provinsi pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh (Dinas PUPR Propinsi Aceh), dan Jalan Kota yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota (Dinas PUPR Kota Banda Aceh). Dari Tabel 2.43 berikut dapat dilihat panjang ruas jalan berdasarkan status di Kota Banda Aceh Tahun 2023:

Tabel 2. 43 Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Status (Jalan Nasional, Provinsi dan Kota) Kota Banda Aceh Tahun 2023

Status Jalan		
Nasional (Km)	**Provinsi (Km)**	**Kota (Km)**
40,04	22,65	620,960

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.43 di atas dapat dilihat dari total panjang ruas jalan nasional, yang termasuk jalan provinsi sebesar 22,65 Km dan jalan Kota Banda Aceh sebesar 620,960 Km. Kondisi ruas jalan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Kondisi jalan yang baik/ rusak merupakan ukuran yang dapat menggambarkan baik buruknya operasional lalu lintas berupa kecepatan, waktu tempuh (efiensi waktu), kenyamanan, pandangan bebas, keamanan dan keselamatan Jalan. Pada Tabel 2.46 berikut ini dapat dilihat status kondisi jalan di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh pada Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 44 Status Kondisi Jalan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Aceh									Banda Aceh								
	Panjang Jalan (KM)	Baik		Sedang		Rusak		Belum Tembus		Panjang Jalan (KM)	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		km	%	Km	%	Km	%	Km	%		km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2020	1781,72	1.321,82	74,19%	92,14	5,17%	312,16	17,52%	55,6	3,12%	620.960	585.887	94,35	22.329	3,59	10.795	1,74	1.949	0,31
2021	1781,72	1.155,51	64,85%	208,42	11,70 %	361,1	20,27%	56,69	3,18%	620.960	593.338	95,55	17.891	2,88	7.805	1,26	1.926	0,31
2022	1781,72	1.391,21	78,08%	112,72	6,33%	221,4	12,43%	56,39	3,16%	620.960	597.338	96,2	15.891	2,56	6.805	1,1	0,64	0,15
2023	1781,72	1.439,46	80,79%	95,15	5,34%	189,52	10,64%	57,59	3,23%	620.960	495.250	79,76	77.480	12,48	36.355	5,86	11.875	1,91
2024										620.960	503,30		78,88		38,15		0,63	

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.44 diatas dapat diketahui bahwa kondisi jalan Provinsi Aceh dalam jangka waktu 5 tahun terakhir terus meningkat menjadi lebih baik. Namun, pada tahun 2021 kondisi jalan di Provinsi Aceh menurun 9,34% dibandingkan tahun 2020, dan pada tahun 2023 kondisi jalan dalam status baik kembali meningkat dan lebih besar dari pada tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat dari data dalam tabel tersebut, kondisi jalan di Kota Banda Aceh jauh mengalami penurunan dibandingkan dengan jalan Provinsi Aceh. Dapat dilihat pada tahun 2023 jalan dengan kondisi baik di Kota Banda Aceh sebesar 79,76% berbeda 1,03% dari jalan Provinsi Aceh.

Tabel diatas juga menunjukkan status kondisi jalan Kota Banda Aceh pada tahun 2023 sebesar 79,76 persen dalam kondisi baik, 12,48 persen dalam kondisi sedang 5,86 persen dalam kondisi rusak ringan, dan hanya 1,91 persen dalam keadaan rusak berat.

Pertumbuhan sosial, ekonomi, dan pembangunan di kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan yang memperlancar, merangsang dan memacu aktifitas pembangunan. Saat ini panjang jalan di Kota Banda Aceh 620,960 km dengan kondisi baik 79,76 persen.

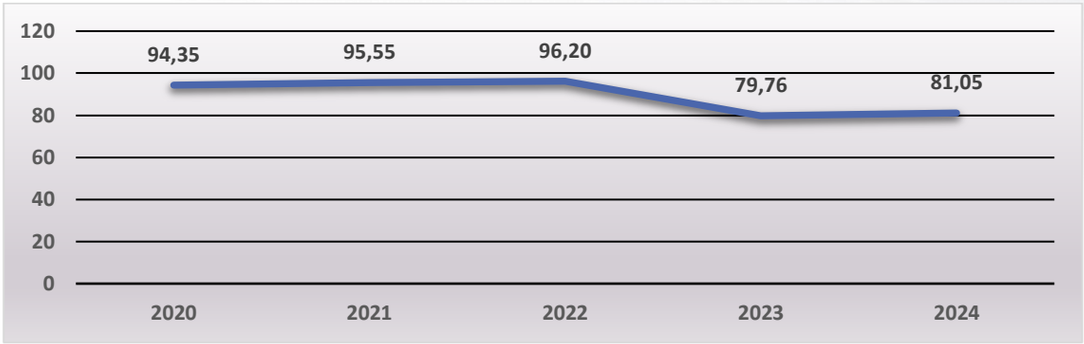

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 45 Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2020 - 2024

Gambar 2.45 di atas terlihat bahwa trend panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan fluktuasi. sedangkan pada tahun 2024 trend Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan persen. Hal ini disebabkan karena penyesuaian data dengan survey kondisi jalan Kota Banda Aceh tahun 2024.

Dari total jalan yang ada di Kota Banda Aceh, panjang jalan yang memiliki trotoar dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sama sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 100 meter dengan persentase meningkat sebesar 0,02 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyediakan trotoar dan drainase untuk menciptakan Kota Banda Aceh yang bebas dari banjir. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.45.

Tabel 2. 45 Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	59,435	59,435	59,435	59,435	59,535	
Panjang seluruh jalan kota (km)	707,343	620,960	620,960	620,960	620,960	
Persentase	8,40	9,57	9,57	9,57	9,59	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

2. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Sektor sanitasi yang mencakupi bidang air limbah, persampahan dan drainase merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu faktor bagi menurunnya derajat kesehatan masyarakat.

Pengembangan sanitasi Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur serta pelayanan sanitasi menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota. Persentase rumah tinggal yang berakses air bersih/sanitasi di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.46 di bawah ini:

Tabel 2. 46 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	Aceh				Banda Aceh				
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi					59.848	59.998	60.227	60.49	
Jumlah rumah tinggal					68.507	68.507	68.023	63.768	
Persentase	77,06	77,55	77,48	78,85	87,36	87,58	88,54	94,98%	

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024 (II-99&II-100), Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Dari tabel 2.46 terlihat bahwa persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Aceh tahun 2020 sampai dengan 2022 cenderung sama dengan persentase 77%. Namun, jika dilihat dari tahun 2019 sampai 2022 persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Aceh mengalami peningkatan 4,32%. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya kesadaran dari masyarakat terhadap hidup bersih dan sehat. Pada tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Banda Aceh lebih besar dibandingkan Provinsi Aceh meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 sampai 2021 di Kota Banda Aceh.

Berikut pada Gambar 2.46 dapat dilihat Persentase rumah tinggal yang berakses air bersih/sanitasi di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2024:

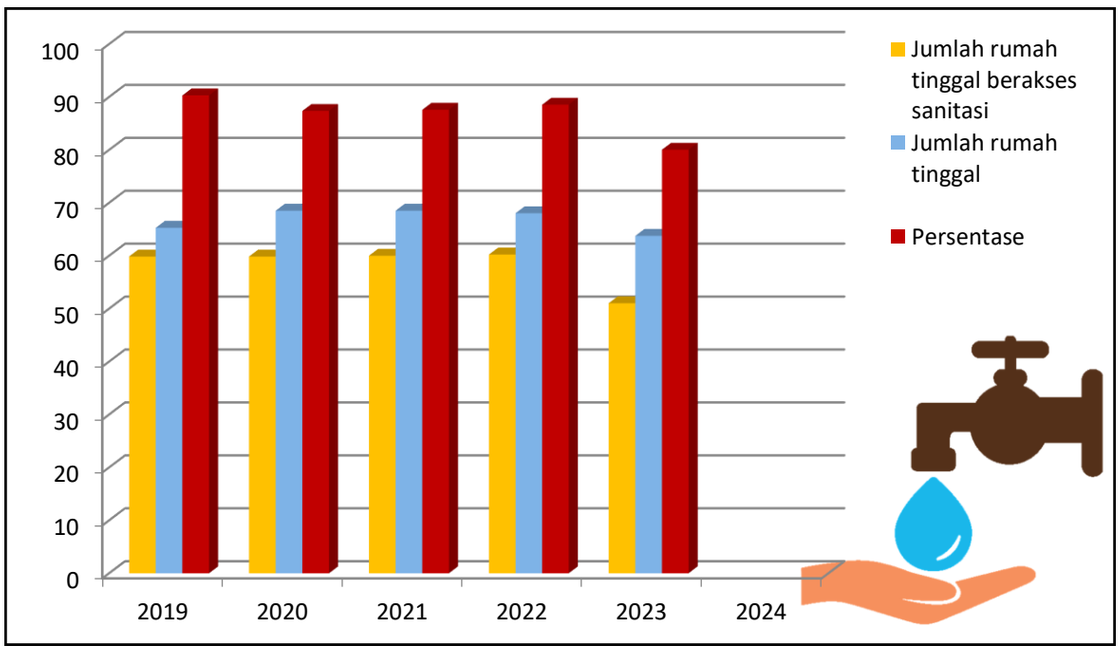

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 46 Jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi Tahun 2019 - 2024

Berdasarkan Tabel 2.48 dan Gambar 2.46 persentase rumah tinggal yang berakses sanitasi pada tahun 2019 mencapai 90,3 persen. Namun pada tahun 2022, jumlah rumah tinggal yang berakses sanitasi menurun menjadi 88,54 persen. Penurunan ini menjadi perhatian Kota Banda Aceh dan perlu ditingkatkan karena seharusnya jumlah rumah tinggal bersanitasi perlu untuk terus ditingkatkan per tahunnya, hingga mencapai 100 persen.

3. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat

Pengembangan sistem drainase di Kota Banda Aceh harus mempertimbangkan kondisi geografis yang relatif datar dan berada pada kawasan pesisir sehingga Kota Banda Aceh termasuk salah satu kota pantai. Rata-rata kondisi topografi berada pada elevasi 0,80 meter di atas permukaan air laut dan memiliki bentuk permukaan lahan relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2-8 persen. Pengembangan sistem drainase juga harus mempertimbangkan kondisi daratan yang merupakan dataran banjir Krueng Aceh. Sungai Krueng Aceh mengalir melalui Kota Banda Aceh dan memiliki anak sungai seperti Krueng Daroy, krueng Doy dan Krueng Neng yang berfungsi sebagai saluran drainase alam yang menjadi outlet dari saluran-saluran drainase yang ada. Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.47 berikut ini:

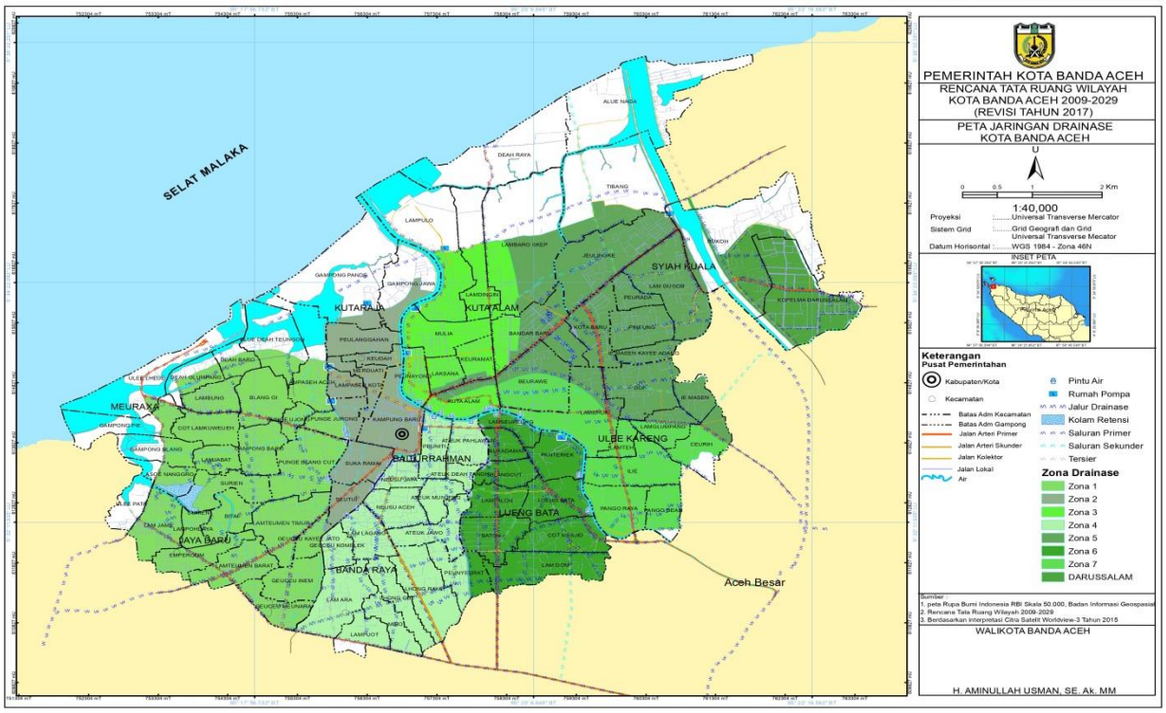

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 47 Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh

Akibat kondisi topografi yang relatif datar, Kota Banda Aceh sangat rentan terhadap banjir kiriman, banjir genangan dan banjir pasang air laut. Oleh karena itu diperlukan saluran drainase yang baik. Untuk lebih jelasnya kondisi drainase Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.47:

Tabel 2. 47 Kondisi Drainase di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Panjang total (km)		Kondisi drainase					
			Baik		rusak ringan		rusak berat	
	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder
2019	189,7	2260,39	159,46	1769,64	5,8	45,941	22,95	440,82
2020	190,3	2262,55	160,48	1812,13	5,8	45,858	22,95	400,56
2021	191,2	2262,55	161,83	1812,13	5,8	45,858	22,95	400,56
2022	193,7	2262,55	164,34	1861,87	6,32	45,858	22,95	350,83
2023	194,05	2262,55	168,11	1683,79	12,46	337,38	13,48	241,38
2024								

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.47 di atas dapat dilihat bahwa panjang total drainase primer dan sekunder mengalami peningkatan sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Pada Tahun 2023 panjang total drainase primer adalah 194,05 km yang mengalami penambahan panjang. Begitu juga dengan panjang total drainase sekunder di Tahun 2023 sepanjang 2.262,55 km yang bertambah panjang dari Tahun 2019. Panjang saluran drainase primer di Kota Banda Aceh pada Desember 2023 adalah 194,05 Km. Dengan rincian kondisi drainase dalam kondisi baik sepanjang 168,11 Km, drainase dalam rusak ringan 12,46 km dan rusak berat sepanjang 13,48 Km. Panjang saluran sekunder di Kota Banda Aceh pada Desember 2023 adalah 2262,55 Km. Dengan rincian kondisi drainase dalam kondisi baik sepanjang 1,683,79 Km. drainase dalam kondisi rusak ringan 337,38 km dan rusak berat sepanjang 241,38 Km

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan

Sistem Drainase Perkotaan meliputi upaya perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan. Adapun Sistem teknis drainase perkotaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh tidak hanya meliputi jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran local saja. Namun juga penanganan terhadap bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik dengan jaringan saluran drainase.

Dalam perencanaan drainase terdapat banyak faktor yang perlu pertimbangan seperti pendangkalan saluran (sedimentasi), limbah, sampah dan pasang surut air laut. Pada tempat-tempat tertentu seperti pada pertemuan drainase dengan badan air (*receiving waters*) khususnya di dekat pantai perlu direncanakan bangunan kolam pengumpul yang dilengkapi dengan pompa.

Pembagian zonasi drainase ini dilakukan berdasarkan sungai yang ada di Kota Banda Aceh. Pembuangan akhir dari drainase pada zona 1 diarahkan menuju Kr. Neng dan Kr. Doy, Zona 2 menuju Kr. Aceh dan Kr.Doy. Zona 3 menuju Kr. Aceh, Zona 4 menuju Kr. Daroy dan Kr. Lueng Paga, Zona 5 menuju Kr. Titi Panyang dan Kr. Cut, Zona 6 menuju Kr. Lueng Paga dan Kr. Tanjung, Zona 7 dan Zona 8 menuju Kr. Aceh dan Kr. Cut. Tabel 2.48 menunjukkan persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 48 Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	59.435	59.435	59.435	59.435	59,535	
Panjang seluruh jalan kota (km)	707.343	620.960	620.960	620.960	620,960	

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi Dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.48 di atas, perbandingan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase pada Tahun 2022 sebesar 59.435 km. Panjang seluruh jalan kota pada Tahun 2022 sebesar 620.960 km. Namun, angka ini masih rendah dan perlu dilakukan pemeliharaan dan pembangunan jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang masih harus ditingkatkan.

4. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Kebutuhan akan air bersih saat ini meningkat dengan tajam sejalan pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan kegiatan ekonomi dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya air minum untuk hidup sehat. Dilain pihak, kapasitas sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan air minum masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas produksi dan jaringan pipa distribusi air minum.

Sumber air yang digunakan oleh PDAM Tirta Daroy adalah dari Krueng Aceh, sungai terbesar yang membelah Kota Banda Aceh. Untuk menaikan muka air dan menjaga adanya *intrusi* air laut kedalam sungai Krueng Aceh telah terpasang unit bendung karet. Upaya-upaya untuk tetap menjaga kuantitas air dan kualitas air yang baik harus dilaksanakan dengan strategi yang jelas dan program kegiatan yang baik, antara lain dengan:

- Menjaga kualitas air baku agar tetap memenuhi daya dukungnya dengan melakukan monitoring secara rutin;
- Menindak tegas tanpa ada tawar menawar pada semua industri dan atau

lainnya yang membuang limbah cairnya ke badan air sehingga kualitas mengalami penurunan;
- Melakukan pengamanan terhadap kawasan daerah pengaliran sungai, agar tetap menjadi daerah tangkapan air yang baik bagi Sungai Krueng Aceh;
- Melakukan koordinasi dengan Pihak BWS Sumatera 1 sebagai pemilik kewenangan atas Krueng Aceh di Bawah Wilayah Sungai Aceh-Meureudu.

Untuk mendukung terlaksananya sistem penyediaan air minum dengan baik, maka sistem pendistribusian dan pola pelayanan air minum Kota Banda Aceh pun harus mengikuti pertumbuhan kepadatan kota yang terus meningkat. Salah salah satunya dengan membentuk Zona Distribusi untuk membagi blok pelayanan secara teknis perpipaan. Tujuan pembentukan Zona Distribusi, antara lain :

1. Standar Pelayanan 4 K dapat tercapai dan terlaksana dengan baik;
2. Memudahkan dalam manajemen pengelolaan;
3. Memudahkan dalam manajemen pemeliharaan;
4. Meminimalisir tingginya tingkat kehilangan air (NRW).

Peta rencana zona wilayah pelayanan teknis PDAM Tirta Daroy dan Peta rencana jaringan air bersih Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.48 dan 2.49:

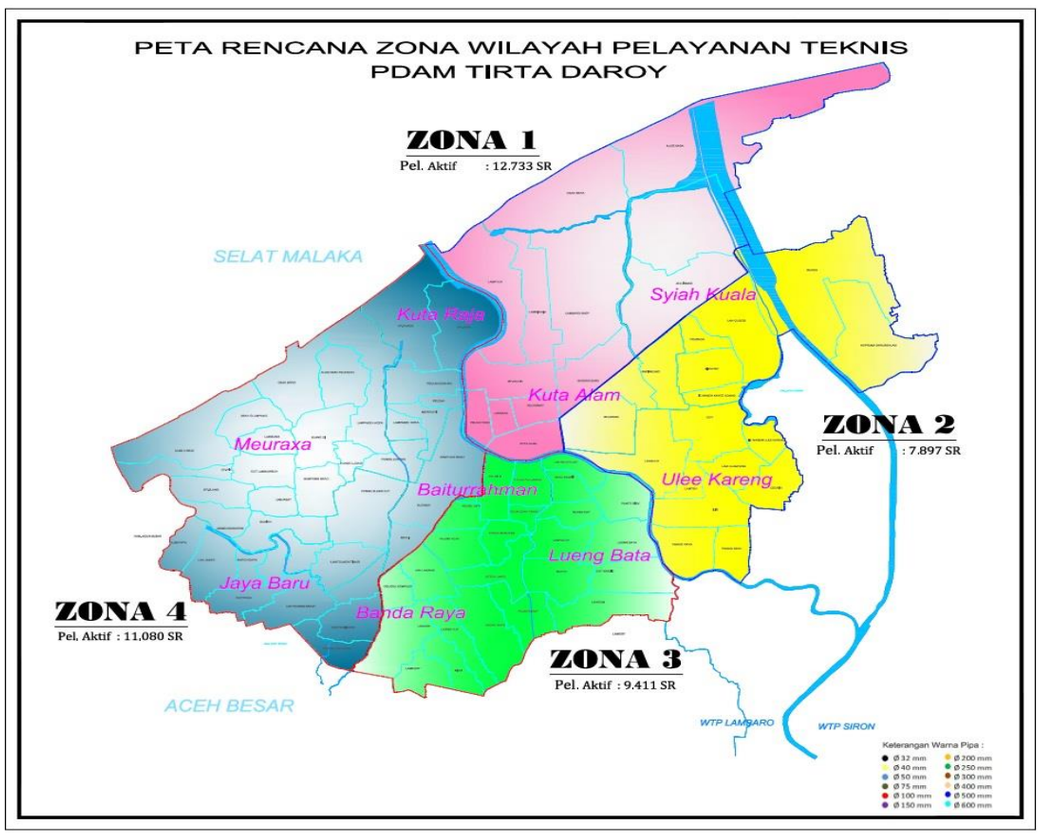

Sumber : PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 2024

Gambar 2. 48 Peta Rencana Zona Wilayah Pelayanan Teknis PDAM Tirta Daroy

Sumber air yang digunakan oleh PDAM Tirta Daroy adalah dari Krueng Aceh, sungai terbesar yang membelah Kota Banda Aceh. Untuk menjaga adanya intrusi air laut kedalam sungai Krueng Aceh telah terpasang unit bendung karet. Namun demikian, kondisi bendung karet saat ini dalam keadaan rusak dan membutuhkan perbaikan atau pembangunan unit yang baru. Saat ini pemerintah Kota Banda Aceh melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 1 tengah merencanakan pembangunan bendung karet baru sehingga kualitas air baku dapat terjaga dengan optimal.

Berdasarkan data tahun 2008, pada tahun 2007 debit Sungai Krueng Aceh 177,88m³/detik atau dengan rata-rata per-bulan sebesar 14,82 m³/detik, sehingga sungai Krueng Aceh sebagai sumber air baku yang potensial bagi penyediaan air bersih Kota Banda Aceh dan perlu dijaga dengan baik, karena air permukaan sangat rawan terhadap pengaruh pencemaran. Upaya-upaya untuk tetap menjaga kuantitas air dan kualitas air yang baik harus dilaksanakan dengan strategi yang jelas dan program kegiatan yang baik, antara lain dengan:

- Menjaga kualitas air baku agar tetap memenuhi daya dukungnya dengan melakukan monitoring secara rutin,
- Menindak tegas tanpa ada tawar menawar pada semua industri dan atau lainnya yang membuang limbah cairnya kebadan air sehingga kualitas mengalami penurunan,
- Melakukan pengamanan terhadap kawasan daerah pengaliran sungai, agar tetap menjadi daerah tangkapan air yang baik bagi Sungai Krueng Aceh.

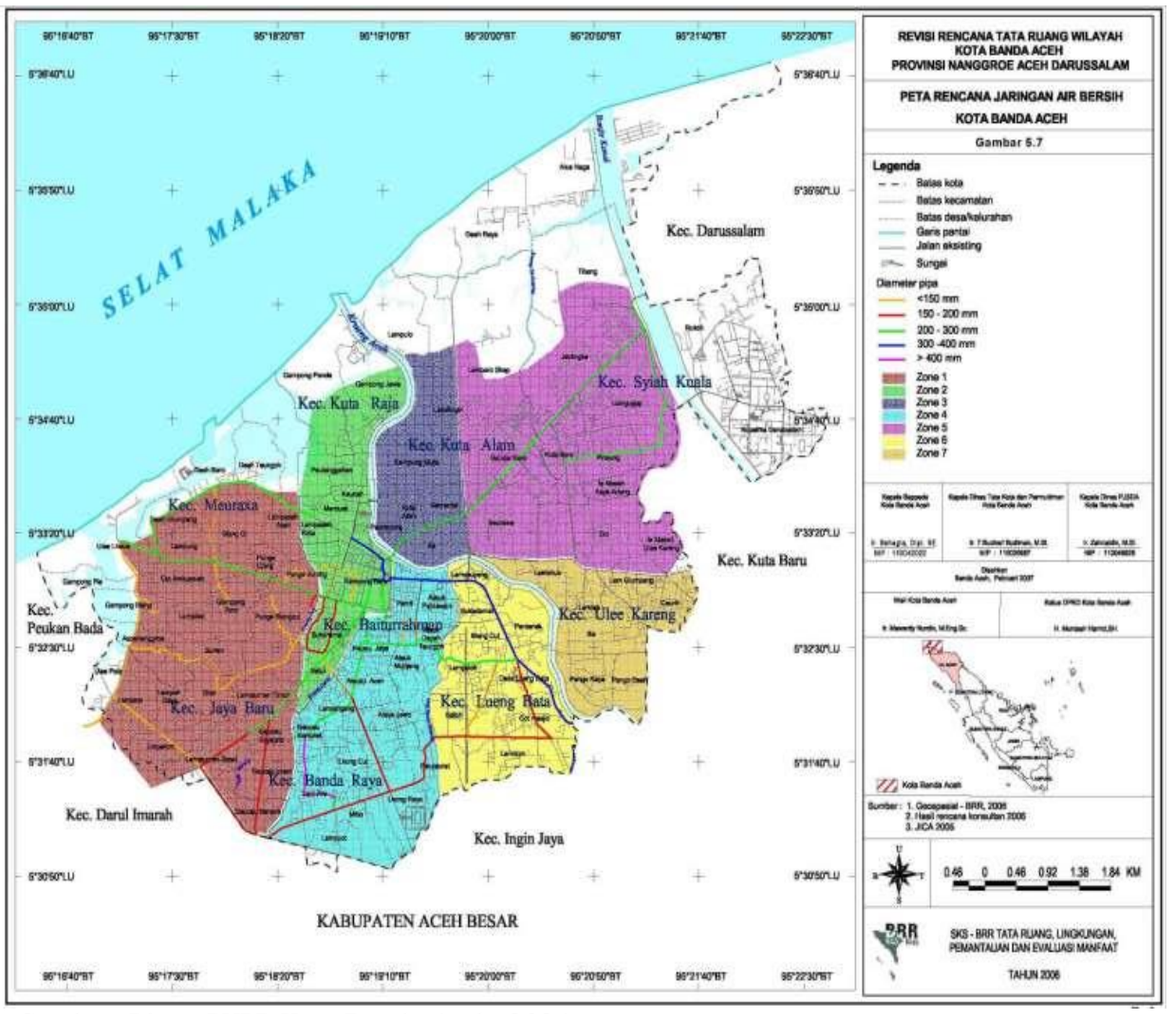

Sumber: Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 49 Peta Rencana Jaringan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2029

Salah satu solusi yang bisa ditawarkan dalam masalah ini adalah pemanfaatan Sungai Sarah sebagai sumber air bersih untuk warga Kota Banda Aceh. Sungai Sarah lebih tepat untuk menjadi sumber air karena masih alami dan belum tercemar. Walau begitu pemerintah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar harus mengkomunikasikan hal ini dengan baik, karena sungai Sarah berada di wilayah Aceh Besar.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum disebutkan bahwa setiap pelanggan air minum berhak memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Data tahun 2024 menunjukkan persentase cakupan pelayanan air minum di Kota Banda Aceh telah mencapai 80,26 persen. Persentase menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 80,02 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan cakupan pelayanan air minum di Kota Banda Aceh belum mencapai 100%. Untuk itu, Pemerintah Kota Banda Aceh masih perlu untuk memberikan cakupan layanan air minum kepada penduduknya sampai dengan 100 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.50 berikut:

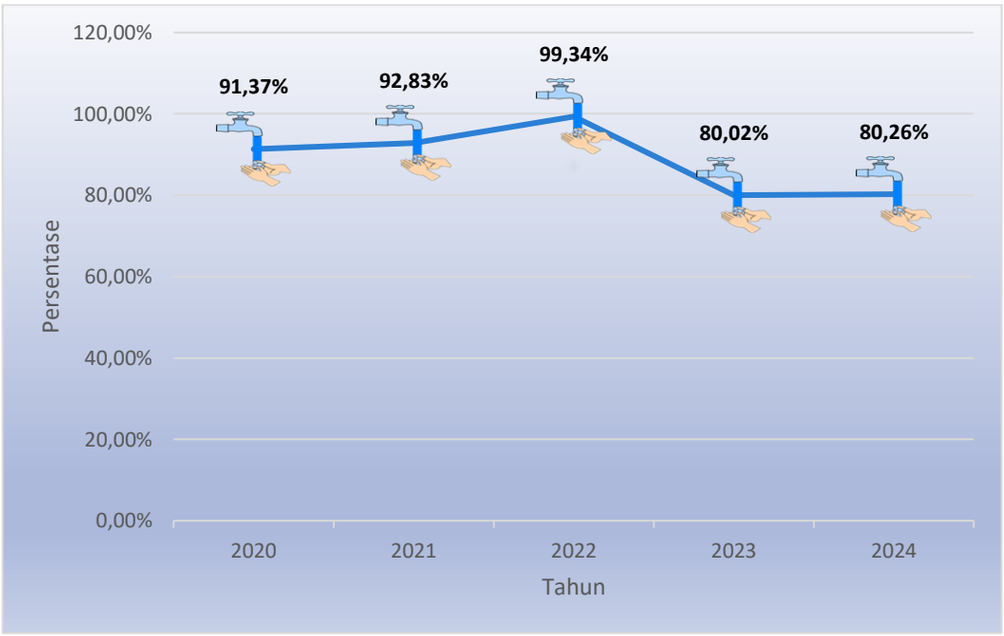

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, PDAM Tirta Daroy, 2023

Gambar 2. 50 Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

5. Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Jumlah bangunan di Kota Banda Aceh Tahun 2022 sebanyak 76.753 unit. Bangunan di Kota Banda Aceh yang terbangun sebelum tahun 2004 (sebelum terjadinya bencana Tsunami) tidak memiliki akurasi yang lengkap terhadap dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengingat banyak arsip IMB yang hilang pasca terjadinya tsunami. Pasca tsunami terjadinya pertumbuhan bangunan yang begitu pesat dari tahun ke tahun, bahkan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2005 sampai dengan 2009 adanya pertumbuhan bangunan antara 2.000 unit sampai dengan 3.000 unit bangunan setiap tahunnya. Data bangunan yang memiliki IMB di Kota Banda Aceh, untuk bangunan yang telah terbangun sebelum tahun 2004 diprediksikan 50% memiliki IMB, sedangkan pasca tsunami pada saat rehab dan rekon pembangunan bangunan yang memiliki IMB sebanyak ±60% bangunan telah melakukan pengurusan IMB dari jumlah yang dibangun.

Analisis data bangunan yang memiliki IMB di Kota Banda Aceh, dikaji dengan perkiraan persentase pada bangunan yang terbangun sebelum tahun 2004 dan dikombinasikan dengan data bangunan yang mengurus IMB baik bangunan telah ada maupun bangunan yang dibangun baru dari tahun ke tahun. Rasio bangunan ber-IMB di Kota Banda Aceh tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.49 berikut ini:

Tabel 2. 49 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Bangunan ber-IMB	53.555	55.108	56.271	57.395	57,764	
2	Jumlah Bangunan	72.536	74.139	75.650	76.753	77,377	
3	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	73,60	74,20	74,43	74,78	74,65	75,04

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Rasio bangunan ber-IMB Tahun 2019 hingga 2024 di Kota Banda Aceh tersebut dapat dilihat Gambar 2.51 berikut ini:

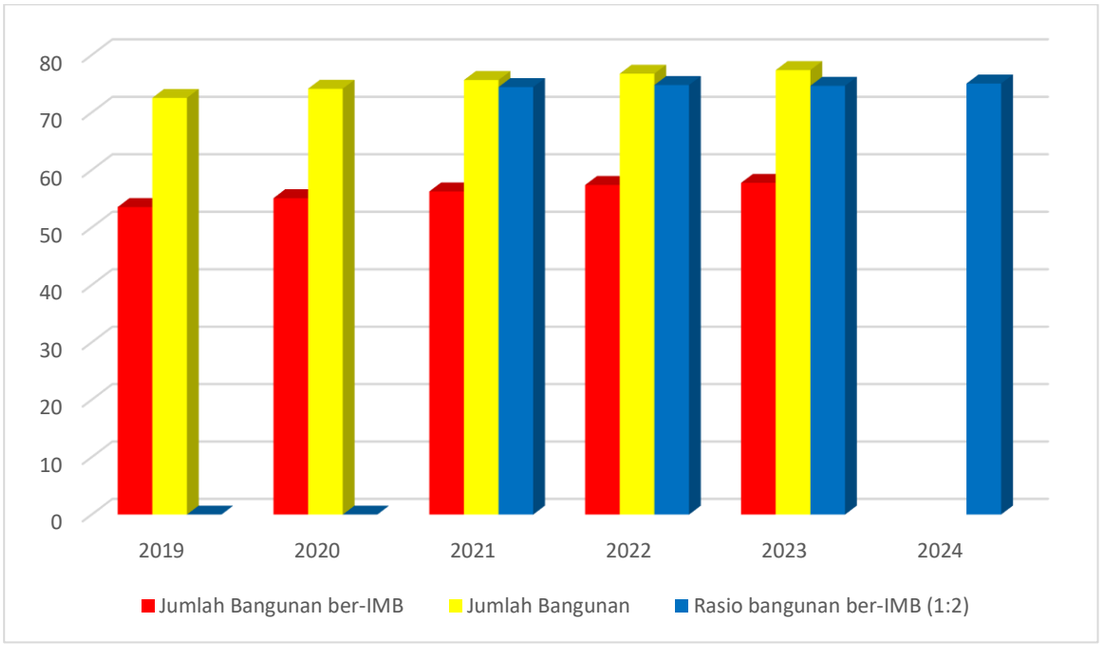

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 51 Jumlah Bangunan ber IMB Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Berdasarkan Tabel 2.49 dan Gambar 2.51 di atas dapat dilihat persentase jumlah bangunan yang memiliki IMB dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Artinya 74,65 persen jumlah bangunan yang ada di Kota Banda Aceh sudah memiliki izin bangunan. Meski terjadi peningkatan pada persentase ini, pemerintah Kota Banda Aceh tetap perlu melakukan pengawasan agar terciptanya tata letak bangunan di Kota Banda Aceh yang teratur dan nyaman.

6. Ketaatan terhadap RTRW

Berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan Penataan Ruang yang berpijak pada kondisi dan potensi wilayah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam Qanun (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam pengembangan Kota Banda Aceh yang mengacu pada Qanun tersebut seperti penyesuaian pemanfaatan lahan berdasarkan pola ruang dan struktur ruang yang ada dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh. Salah satu indikator ketaatan terhadap RTRW Kota adalah pelaksanaan

pembangunan baik bangunan pemerintah, bangunan swasta, bangunan masyarakat yang dibangun sesuai dengan peruntukan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW Kota Banda Aceh. Peningkatan pemahaman dalam implementasi penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi penataan ruang kepada setiap *stakeholder*, sehingga diprediksikan setiap tahunnya ditargetkan adanya peningkatan kesesuaian pembangunan dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan dan berimplikasi pada peningkatan rasio ketaatan terhadap RTRW. Rasio ketaatan masyarakat terhadap RTRW dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut:

Tabel 2. 50 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 (dalam Persen)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi RTRW	73,83	78,57	81,07	81,18	81,28	81,67
2	Rencana Peruntukan RTRW	100	100	100	100	100	
3	Rasio (1/2)	0,74	0,79	0,81	0,81	0,81	

Sumber: Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi Dari OPD

Tabel 2.50 di atas menunjukkan dari Tahun 2019 sampai dengan 2024 realisasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi melalui perizinan IMB, pengawasan dan penertiban secara rutin oleh Tim Pengawasan Bangunan di Dinas PUPR. Ketaatan terhadap RTRW ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang rencana tata ruang kota yang ada serta keterbukaan informasi tentang tata ruang.

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta mendukung kesehatan penghuninya. Meningkatnya kebutuhan rumah di Kota Banda Aceh dipicu oleh kondisi Kota Banda Aceh yang terus berkembang terutama bidang pendidikan, perekonomian dan jasa, yang kemudian menstimulasi perpindahan penduduk dari luar Kota Banda Aceh. Hal ini kemudian berdampak pada kebutuhan rumah yang tinggi di Kota Banda Aceh.

Dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni menjadi penting. Hingga saat ini, persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Banda Aceh sudah cukup tinggi. Tabel dibawah ini merupakan cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Banda Aceh dalam rentang waktu 2020-2024.

Tabel 2. 51 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah	68.507	54.689	54.689	54.689	64.39
Jumlah Rumah Layak Huni	64.314	50.424	50.574	50.771	61.463
Persentase	93,88	92,2	92,48	92,84	95.45

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banda Aceh, 2024

Dari tabel di atas terlihat jumlah rumah dan jumlah rumah layak huni di Kota Banda Aceh mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 bersifat fluktuatif, tetapi cenderung mengalami kenaikan pada tiga tahun terakhir. Jumlah rumah tersebut di tahun 2020

memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2021-2024. Jumlah rumah layak huni pada tahun 2020 telah mencapai 64.314 unit. Pada tahun 2024 jumlah rumah layak huni sebesar 61.463. Hal ini disebabkan karena perbedaan metode pendataan rumah.

Tahun 2019 dan 2020, jumlah rumah dihitung berdasarkan jumlah bangunan yang ada di Kota Banda Aceh, termasuk di antaranya adalah toko-toko di kawasan perdagangan dan jasa, sehingga jumlah rumah di tahun tersebut belum sepenuhnya mewakili jumlah rumah eksisting di Kota Banda Aceh. Jumlah rumah tahun 2021-2023 merupakan data hasil survei yang dilaksanakan pada 90 Gampong di Kota Banda Aceh, sehingga data ini lebih mewakili kondisi eksisting jumlah rumah di Kota Banda Aceh.

Penurunan jumlah rumah layak huni di periode tahun 2019 dan 2020 dan tahun 2021-2024 juga dipengaruhi oleh jumlah rumah di periode yang sama. Perbedaan metode pendataan menyebabkan terjadinya perubahan jumlah rumah dan rumah layak huni yang signifikan. Namun demikian, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan pembangunan rumah layak huni dari berbagai sumber pendanaan, seperti APBK, DAK Fisik Perumahan, Dana Otsus, dan ZIS. Hal ini tentu saja dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Permukiman yang Tertata

Dalam rangka mengedepankan konsep kota berkelanjutan, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya untuk mengintegrasikan konsep keberlanjutan ekonomi, ekologi, kesetaraan sosial, dan kenyamanan huni dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah-wilayah prioritas Kota Banda Aceh. Pengembangan kawasan permukiman pada wilayah ini memiliki fungsi yang strategis dalam mewujudkan Kota Banda Aceh tanpa permukiman kumuh dan menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh. Pemenuhan kebutuhan permukiman yang layak secara langsung akan memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Permukiman yang tertata adalah permukiman yang dilaksanakan dengan mengedepankan hal-hal dasar dalam sebuah permukiman, seperti kondisi bangunan rumah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah dan persampahan, dan proteksi kebakaran. Persentase permukiman yang tertata dapat diukur dari perbandingan luas pemukiman yang tertata dengan jumlah permukiman keseluruhan.

Tertatanya kawasan permukiman kumuh akan memberikan manfaat terhadap lingkungan, diantaranya adalah:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan mengurangi kekumuhan
2. Mengurangi dampak pencemaran lingkungan
3. Mengurangi tingkat bahaya pada saat bencana
4. Mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi karena tidak tersedianya drainase lingkungan yang layak

Penataan kawasan kumuh di Kota Banda Aceh berimplikasi pada pengurangan luas kawasan kumuh. Tabel di bawah menunjukkan penurunan luas kawasan kumuh yang bervariasi pada periode tahun 2019-2024. Luas kawasan kumuh di Kota Banda Aceh ditentukan berdasarkan hasil survey tujuh indikator kumuh, yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Banda Aceh.

Untuk lebih jelasnya luas kawasan kumuh di Kota Banda Aceh Tahun 2019 hingga Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 52 Luas Kawasan Kumuh Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 (dalam Ha)

No	Uraian	Banda Aceh				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	461,48	451,4	451,4	451,40	377,12
2	Luas Wilayah (Ha)	59.002	59.002	59.002	59.002	59.002
3	Luas Penanganan (Ha)	4,9	8,47	60,61	77,39	7,71
4	Sisa Luas Kawasan Kumuh (Ha)	456,58	442,93	390,79	374,01	369,41

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel di atas, pada tahun 2020, luas penanganan kawasan kumuh sebesar 4,9 Ha. Sejak tahun 2020, luas kawasan kumuh dihitung tidak hanya dalam penanganan kawasan kumuh saja, namun telah menambahkan luas kawasan yang berpotensi kumuh dan perlu dicegah menjadi kawasan kumuh, sehingga luas kawasan kumuh pada tahun 2020 menjadi 461,48 Ha. Dengan adanya intervensi penanganan kawasan kumuh berupa kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh setiap tahunnya sehingga pada tahun 2024 tersisa luas kawasan kumuh sebesar 369,41 Ha.

Pembangunan kawasan permukiman kumuh yang perlu ditekankan adalah pada pembangunan sarana prasarana dasar permukiman seperti jalan, drainase, pengelolaan sampah dan lampu jalan. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kebutuhan dasar dari sarana prasarana permukiman merupakan hal utama terkait dengan kegiatan sehari-hari masyarakat, yaitu meningkatnya akses masyarakat dari kawasan permukiman ke pusat aktivitas perekonomian berupa pertokoan dan pasar.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Penegakan Perda

Dalam rangka mewujudkan ketenteraman, dan ketertiban umum salah satu yang dilakukan Satuan Polisi & Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) adalah penegakan peraturan daerah (Perda)/Qanun. Persentase penegakan Perda/Qanun dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 pada Tabel 2.53 sebagai berikut:

Tabel 2. 53 Persentase Penegakan Perda Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyelesaian penegakan perda (kasus)	762	421	436	535	350	
2	Jumlah pelanggaran perda (kasus)	920	421	436	535	350	
3	Persentase penegakan perda (persen)	82,83	100	100	100	100	

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Tabel 2.53 di atas menunjukkan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 persentase penegakan Perda/Qanun Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mengami peningkatan. Persentase penegakan perda yang terbesar terjadi di tahun 2020 hingga tahun 2023 yang mencapai 100 persen. Sedangkan persentase terkecil terjadi tahun 2019 sebesar 82,83 persen dimana dari 920 jumlah pelanggaran perda yang dapat diselesaikan sebanyak 762 penegakan perda.

Pada tahun 2023 Satpol PP dan WH mengalami penurunan jumlah pelanggaran Perda/Qanun dari tahun – tahun sebelumnya sejumlah 350 kasus,

penurunan kasus tersebut menjadi indikator bahwa hampir seluruh warga Kota Banda Aceh maupun warga yang dating dari luar Kota Banda Aceh telah menaati Perda/Qanun yang berlaku di Kota Banda Aceh. Adapun rician jumlah pelanggaran dan cara penyelesaiannya sebagai berikut:

Tabel 2. 54 Jumlah Perkara Syariat, Trantibum, Pajak dan Retribusi Daerah, dan Cara Penyelesaiannya

NO	PERKARA SYARIAT	2023			
		Jlh Kasus	Penyelesaian		Belum Selesai
			Pembinaan	Cambuk	
1	Khalwat	31	31	-	-
2	Ikhtilath	42	32	10	
3	Khamar	4	2	2	-
4	Maisir	4	-	4	-
5	Liwath	2	2	-	-
	Jumlah	**83**	**67**	**16**	-

NO	PERKARA TRANTIBUM	2023			
		Jlh Kasus	Penyelesaian		Belum Selesai
			Non Yutisi	Yutisi/Tipiring	
1	Bangunan Gedung	13	13	-	-
	Jumlah	**13**	**13**	-	-

NO	PERKARA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2023			
		Jlh Kasus	Penyelesaian		Belum Selesai
			Non Yutisi	Yutisi	
1	Pajak Restoran	5	-	5	-
	Jumlah	**5**	**-**	**5**	-

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

2. Cakupan Perlindungan Masyarakat

Satuan Perlindungan Masyarakat (satlinmas) dibentuk sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2017. Satlinmas merupakan garda terdepan dalam pemeliharaan kantrantibmas di masing-masing gampong. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota banda Aceh Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.55 di bawah ini:

Tabel 2. 55 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	5	5,72	5,27	5,47	5,68	

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Tabel 2.55 di atas menunjukkan cakupan petugas perlindungan masyarakat tahun 2019 Kota Banda Aceh telah merekrut dan mengukuhkan sebanyak 450 personil Satlinmas yang berasal dari 90 gampong yang ada di Kota Banda Aceh.

Seiring dengan berjalannya waktu jumlah Satlinmas Gampong terus mengalami peningkatan melebihi standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Dikota Banda Aceh dimana sebutkan dalam pasal 10 ayat 4 dimana disebutkan bahwa "anggota regu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong", hingga tahun 2023 Jumlah Linmas gampong telah mengalami peningkatan sebanyak 512 personil yang tersebar di masing – masing gampong dengan rata 5,68 orang/gampong atau dalam 1 gampong berjumlah 5 hingga 6 orang per gampong.

3. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3)

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Pelanggaran terhadap perda/ qanun yang mengandung unsur pidana, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh melalui PPNS meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih terperinci tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.56 berikut:

Tabel 2. 56 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam Persen)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penyelesaian pelanggaranK3 (kasus)	241	66	163	322	249	
2.	Jumlah pelanggaran K3 (kasus)	273	66	163	322	249	
3.	Persentase penyelesaian K3 (%)	88,28	100	100	100	100	

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Tabel 2.56 di atas menunjukkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 meningkat dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Pada tahun 2023 Satpol PP dan WH memiliki 249 kasus pelanggaran K3 dengan tingkat realisasi sebanyak 249 kasus telah berhasil diselesaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Tingkat penyelesaian kasus K3 pada Tahun 2023 sebesar 100 persen dari total kasus. Adapun rician jumlah pelanggaran K3 dan cara penyelesaiannya sebagai berikut:

Tabel 2. 57 Jumlah Pelanggaran K3 Dan Cara Penyelesaiannya

NO	PERKARA K3	2023			
		Jlh Kasus	Penyelesaian		Belum Selesai
			Non Yutisi	Yutisi	
1	PKL	227	227	-	-
4	PMKS	22	22	-	-
	Jumlah	**249**	**249**	-	-

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

a. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam menjalankan urusan tersebut, Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), BPBD dan DPKP Kota Banda Aceh memberikan pelayanan dasar dengan menjamin dan memastikan perda/ qanun dan peraturan walikota dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.58 dibawah ini:

Tabel 2. 58 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Aceh		Banda Aceh	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	95 %	%	80%	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				100 %
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				85%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				85%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			86,56%	100%

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, BPBD Kota Banda Aceh dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

4. Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Kota

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya. WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman, perindustrian/ pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pda kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak dan atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Rumus Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran yaitu:

$$\frac{\Sigma \text{ Luas WMK (luas lingkaran)}}{\Sigma \text{ luas potensi kebakaran}} \times 100\ \%$$

$$\frac{6 \text{ WMK } (7.5)}{61{,}36} \times 100\ \%$$

$$= 73,\ 34\ \%$$

Oleh Karena itu Kota Banda Aceh harus membentuk 2 (dua) WMK lagi untuk Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran 100 %.

$$\frac{8 \text{ WMK } (7{,}5)}{61{,}36} \times 100\ \%$$

$$= 97{,}78\ \%$$

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.60 berikut ini:

Tabel 2. 59 Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Wilayah Manajemen Kebakaran (km²)			Luas Kota Banda Aceh (km²)	Persentase (%)
2019	19,64	5	Pos	59,00	166,00
2020	19,64	5	Pos	59,00	166,00
2021	19,64	5	Pos	59,00	166,00
2022	19,64	5	Pos	59,00	166,00
2023	19,64	5	Pos	59,00	166,00
2024					

Sumber : DPKP Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.59 di atas, Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Banda Aceh sejak 2019 sampai dengan 2023 masih memiliki 5 pos Kebakaran Kota, merupakan daerah-daerah yang terproteksi dari bencana kebakaran yang ditandai dengan telah terbangun/pemanfaatan pos-pos pembantu, di samping Pos Induk Geuceu Meunara, yaitu: Pos Pembantu Pango, Pos Pembantu Simpang Mesra, Pos Pembantu Keudah, Pos Pembantu Pelangi dan Pos Pembantu Assoe Nanggroe (tutup karena kurang personil).

5. Tingkat Waktu Tanggap *(Renponse Time Rate)* Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* Daerah Layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan risiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/ penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda. Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/ industri yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tabel 2. 60 Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan

Tahun	Kasus di WMK yang Tanggap 15 Menit	Kasus Kebakaran Dalam WMK	Persentase(%)
2019	26	26	100
2020	48	48	100
2021	50	50	100
2022	63	66	100
2023	67	67	100
2024			

Sumber : DPKP Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan data diatas tingkat waktu tanggap darurat layanan untuk kebakaran Kota Banda Aceh sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 terus membaik. Seluruh kasus kebakaran yang terjadi di Kota Banda Aceh, pelayanan DPKP sudah memenuhi waktu tanggap darurat mencapai 100 persen.

Jumlah kasus Kebakaran yang terjadi di Provinsi Aceh paling banyak terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah kasus mencapai 289 kasus. Sedangkan Jumlah kasus kebakaran yang terjadi di Kota Banda Aceh sejak tahun 2019–2023 adalah 340 kasus, yang didominasi oleh perumahan/permukiman sebanyak 118 kasus, kemudian kebakaran Hutan/Ilalang/Semak Belukar sebanyak 114 kasus, dan Bangunan Perkantoran sebanyak 108 kasus.

Tabel 2.61 Jumlah Kasus Kebakaran Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2024

Jenis Kebakaran	Aceh						Banda Aceh					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bangunan Perkantoran Pemerintah/ Swasta							7	20	43	19	19	
Perumahan/ Pemukiman Penduduk							30	17	24	27	20	
Hutan Ilalang Semak/Belukar							59	3	7	17	28	
Jumlah	285	289	269				96	40	74	63	67	

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, DPKP Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Jika dilihat trend kasus setiap tahunnya untuk tahun 2019-2024, jumlah kasus kebakaran di tahun 2019 adalah 96 kasus, kemudian tahun 2020 turun menjadi 40, pada tahun 2021 kasus kebakaran kembali naik. Jumlah kasus kebakaran yang banyak ditangani dari tahun 2019 sampai dengan 2024 adalah kebakaran Perumahan/Pemukiman Penduduk sebanyak 118 kasus.

F. Sosial

Aspek sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 tahun 2012 dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Sedangkan PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat memang terdapat masalah sosial tetapi perlu diakui bahwa potensi penyelesaiannya juga berasal dari masyarakat. Oleh karena itu perlu pembinaan yang baik dan tepat dari pemerintah sebagai pengayom masyarakat. Tabel 2.62 berikut menyajikan jenis PMKS dan jumlah penyandangnya di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024:

Tabel 2.62 Penyandang Masalah Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Jenis Permasalahan Sosial	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak dengan Kecacatan	98	98	104	104	13	
2	Anak Yatim, Piatu, dan Anak Yatim Piatu	2.080	2.080	2.700	2.700	2810	
3	Anak Terlantar	13	21	23	21	36	
4	Anak Bermasalah Hukum	108	51	59	70	68	

No	Jenis Permasalahan Sosial	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Anak Jalanan	55	50	24	24	31	
6	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	930	930	-	932	9	
7	Lanjut Usia Terlantar	3	11	6	10	26	
8	Lanjut Usia	2.495	2.471	2.455	2.394	113	
9	Penyandang Disabilitas	477	389	202	379	340	
10	Pengemis	103	132	95	115	47	
11	Gelandangan	3	47	17	17	47	
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	3	NA	NA	NA	NA	
13	Korban Penyalahgunaan NAPZA	15	NA	NA	NA	NA	
14	Keluarga Fakir Miskin	12.777*	12.253*	24.250	27.044	28054***	
14	Keluarga Rentan	2.044	2.044	3.214**	3.298**	2734****	

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2024

*) *Data tahun 2018-2020 digunakan data bantuan sosial masyarakat miskin seperti* PKH, BPNT, BST dan PBI, sedangkan Data tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI dari desil 1 sampai dengan desil 4 tingkat kesejahteraan keluarga.

**) Data Diperoleh Dari DTKS Kota Banda Aceh dari desil Ke IV/ Tingkat Kesejahteraan Keluarga Rentan Miskin.

***) Data diperoleh dari DTKS

****) Data diperoleh dari data DTKS yang telah di verifikasi dan validasi

Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.62 di atas dapat dilihat dari 26 kategori PMKS sesuai Permensos Nomor 8 Tahun 2012, hanya teridentifikasi 15 kategori saja yang ada di Kota Banda Aceh. Tabel diatas menunjukkan adanya penambahan kasus pada beberapa kategori jenis permasalahan sosial seperti kategori anak yatim, piatu dan yatim piatu, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar dan gelandangan.

1) PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Bantuan Sosial (Bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan bersifat selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. PMKS sesuai karakteristiknya merupakan kelompok masyarakat terbawah yang dalam penanganannya sangat ketergantungan dengan dan perlu diberikan bantuan sosial untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Penanganan PMKS adalah melalui proses rehabilitasi yang terdiri dari rehabilitasi dasar dan rehabilitasi lanjutan. Rehabilitasi dasar lebih kepada pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan rehabilitasi lanjutan memberikan peningkatan kapasitas sebagai modal dasar memenuhi kebutuhannya sendiri.

Secara Nasional, pemerintah memberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Kementerian Sosial, diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta model bantuan lainnya. PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan pendampingan program-program tersebut, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kondisi sejahtera dalam keluarga. Dalam jangka pendek bantuan sosial ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan

modal manusia). Tabel 2.63 berikut memberikan gambaran jumlah KPM di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh beserta jumlah total bantuan yang diterima pada Tahun 2019-2024:

Tabel 2. 63 Jangkauan KPM dan Jumlah Bantuan Diterima Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Aceh		Banda Aceh			
	Jumlah KPM	Jumlah Bantuan (Rupiah)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah KPM	Jumlah Bantuan (Rupiah)
2019	370.269	488.755.080.000	9	90	4.521	2.392.300.000
2020	451.940	90.388.000.000	9	90	6.968	34.340.705.000
2021	388.854	1.062.153.200.000	9	90	12.282	25.849.750.000
2022	3.323.087	1.146.184.400.000	9	90	13.846	34.644.665.000
2023			9	90	12.846	21.364.400.000
2024						

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Jumlah Penerima KPM di Provinsi Aceh pada tahun 2019 adalah 370.269 keluarga dan meningkat menjadi 451.940 keluarga pada tahun 2020. Di tahun 2021 jumlah penerima KPM menurun sebanyak 62.086 keluarga dibandingkan tahun 2020. Jumlah penerima KPM Provinsi Aceh paling banyak terjadi pada tahun 2022 yakni mencapai 3.323.087 keluarga dengan jumlah bantuan yang diterima Rp.1.146.184.400.000. Di Tahun 2023 jumlah KPM penerima bantuan PKH dan BPNT adalah sebanyak 12.846 KPM dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 21.364.400.000,-.

Data Tabel 2.64 diatas menunjukkan pada adanya peningkatan cakupan (*coverage*) dari jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tahun 2019-2022. Jumlah KPM tertinggi pada Tahun 2022 sebanyak 13.846 Kepala Keluarga dari 90 gampong selaku penerima bantuan PKH. Jumlah bantuan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 34.644.665.000,-.

Adapun pada Tahun 2023 Kota Banda Aceh memiliki Kegiatan Pemberian Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kepada 192 KPM dengan total realisasi keuangannya sebesar Rp. 795.235.000,-. Dan Kegiatan Pemberian Bansos Barang Pada Subkeg Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang diperuntukkan kepada keluarga miskin yang masuk didalam empat klaster diDTKS di Kota Banda Aceh sebanyak 8.148 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.265.056.400,-.

2) PMKS yang Mendapat Pembinaan Dalam dan Luar Panti

Berkaitan dengan PMKS penanganan yang sifatnya dalam panti sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lebih pada penanganan PMKS di luar panti. Hal ini berdampak pada kondisi nyata dimana banyak Kota/Kabupaten yang harus mengubah model dan sistem pelayanannya kepada pelayanan luar panti.

Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki Panti Asuhan Nirmala yang pada Tahun 2019 berubah menjadi Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang melayani dampingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sedangkan

untuk penanganan dan rehabilitasi PMKS di Kota Banda Aceh adalah tersedianya Rumah Singgah.

Jumlah penanganan untuk anak yang termasuk kedalam kategori PMKS dalam wilayah Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kategori permasalahan sosial PMKS Permensos Nomor 8 Tahun 2012 adalah :

- Anak Dengan Kecacatan ditahun 2023 sebanyak 13 orang,
- Anak Yatim, Piatu, dan Anak Yatim Piatu ditahun 2023 sebanyak 2.810 orang,
- Anak Terlantar ditahun 2023 sebanyak 36 orang,
- Anak Bermasalah Hukum ditahun 2023 sebanyak 68 orang,
- Anak Jalanan ditahun 2023 sebanyak 31 orang.

3) Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Dalam konteks bencana, pertama kali yang harus dilakukan setelah evakuasi adalah melakukan upaya tanggap darurat yang salah satunya menyediakan dukungan permakanan, sandang dan penampungan sementara. Penanganan terhadap korban bencana dilakukan Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial dengan cara memberikan bantuan untuk meringankan kemalangan yang diderita masyarakat. Tabel 2.64 di bawah ini menunjukkan penerima bantuan sosial dalam masa tanggap darurat dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023:

Tabel 2. 64 Penerima Bantuan Sosial dalam Masa Tanggap Darurat Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jenis Bencana	Banjir	Kebakaran dan Banjir	Kebakaran dan Angin Kencang	Bantuan Logistik Keluarga Kurang Mampu, Kebakaran dan Angin Kencang	Kebakaran dan Angin Kencang	
Penerima	18 KK	95 KK	20 KK	94 KK	28 KK	
Sumber Dana	APBK	APBK	APBK	APBK	APBK	

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2024

Kebakaran	= 27 KK	94 JIWA
Angin Kencang	= 1 KK	2 JIWA

Proses Kompilasi dari OPD

Tabel 2.64 di atas menunjukkan Dinas Sosial sejak Tahun 2019-2024 telah memberikan bantuan tanggap cepat darurat untuk korban kebakaran dan angin kencang yang dananya berasal dari APBK melalui kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota. Banda Aceh rawan terhadap ancaman bencana kebakaran, angin kencang/puting beliung dan banjir, sehingga sebagian besar penerima bantuan adalah korban bencana kebakaran dan angin kencang.

4) Jumlah Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dukungan pemerintah baik berupa kebijakan maupun upaya langsung dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung terciptanya kemandirian bagi penyandang disabilitas sangat diperlukan. Pada tingkatan yang berat, yang dapat diupayakan adalah adanya dukungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yakni suatu proses untuk meningkatkan fungsi sosial penyandang disabilitas secara optimal dan membantu proses integrasi sosial penyandang disabilitas di masyarakat. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2024 pada Tabel 2.65 sebagai berikut

Tabel 2. 65 Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Jenis Kecacatan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cacat Fisik	234	133	285	278	123	
Cacat Mental	135	38	138	138	63	
Cacat Ganda	127	152	158	164	36	
Jumlah	**496**	**323**	**581**	**580**	**222**	

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Tabel 2.65 di atas menunjukkan jumlah penyandang disabilitas baik cacat fisik, cacat mental dan cacat ganda dari Tahun 2019 hingga Tahun 2024 bersifat fluktuatif. Tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas meningkat dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 496 orang. Pada tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 323 orang penyandang disabilitas dengan berbagai jenis kecacatan. Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 581 jumlah penyandang disabilitas dan ditahun 2022 jumlah penyandang disabilitas sebanyak 580 orang. Untuk Tahun 2023 jumlah penyandang disabilitas yang tertangani yaitu sebanyak 222 Orang.

2.1.3.3 Fokus layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Dengan bekerja, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sesuai kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki, selain itu bekerja juga melibatkan aspek sosial seperti aktualisasi diri, melakukan kontak sosial, serta pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu yang bersangkutan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh sebagai Dinas yang berhubungan langsung dengan pengangguran telah melakukan usaha-usaha pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja setiap tahunnya melalui BLK Kota Banda Aceh. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan setiap tahun nya adalah pada Tabel 2.66 sebagai berikut :

Tabel 2. 66 Jenis pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 (dalam Orang)

Kejuruan Pelatihan	Tahun					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Menjahit	80	32	32	48	16	208
Teknisi Cooling System	16	0	0	32	16	64
Teknisi Sepeda Motor	32	16	16	16	0	80
Las Listrik	32	36	16	32	16	132

Kejuruan Pelatihan	Tahun					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kewirausahaan Membuat Kue	32	32	32	32	16	144
Tata Rias dan Kecantikan	0	0	32	32	32	96
English for Tour Guides	0	0	0	16	0	16
Penggambaran Auto CD	0	16	0	0	0	16
Estimator Bangunan Gedung	0	0	16	16	16	48
Juru Gambar Arsitektur	0	0	16	16	0	32
Pengolahan Ikan	0	0	16	16	16	48
Front Office kejuruan pariwisata	0	0	0	16	0	16
Jumlah	**192**	**132**	**176**	**272**	**128**	**900**

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Tabel 2.66 menunjukkan menjahit merupakan jenis pelatihan yang paling banyak dilakukan sebesar 208 orang pada tahun 2024. Kewirausahaan membuat Kue menjadi urutan kedua pelatihan yang banyak diminati. English for tour guides, penggambaran Auto CD, dan front office kejuruan pariwisata menempati jumlah terendah di tahun 2024.

Dalam kurun waktu tahun 2024, Pemerintah Kota Banda Aceh secara rata-rata hanya mampu memberikan pelatihan untuk pengangguran/pencari kerja sebanyak 128 orang. Kendala utamanya adalah keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh. Walaupun demikian Dinas Tenaga Kerja berupaya mencari sumber-sumber dana lain seperti dari APBN dan APBA untuk membiayai pelaksanaan pelatihan agar dapat melatih lebih banyak pengangguran lagi

1) Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja dan Pengusaha Kota Banda Aceh Tahun

Hubungan antara pengusaha dan pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam suatu hubungan industrial. Undang-undang tersebut mendefinisikan bahwa “Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu perselisihan maka telah diatur pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

Kota Banda Aceh sebagai kota yang terus berkembang juga menjadi pemangku kepentingan dalam hal ini. Dimana dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pemerintah merupakan mediator dalam penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di lakukan pada Dinas Tenaga Kerja melalui peran serta Mediator dan Konsiliator. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh memiliki tenaga Mediator sebanyak 1 (satu) orang dan tenaga Konsiliator sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan konsiliator Provinsi Aceh diperbantukan di Kota Banda Aceh.

Pada periode 2019–2023 sebanyak 754 kasus. Metode penyelesaian kasus perselisihan dapat dilakukan dengan bipartit atau tripartit yang melibatkan mediator dan konsiliator bahkan jika tidak selesai maka dapat diselesaikan pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Jumlah penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha di Kota Banda Aceh sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023 adalah pada Tabel 2.67 berikut ini:

Tabel 2. 67 Jumlah Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja dan Pengusaha Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Jenis Kasus/Perkara yang Masuk	Tahun						Total
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Perselisihan hubungan Kerja	21	631	52	35	83		
Mediator	19	30	30	28	10		
Konsiliator	0	0	0	0	0		
Pengadilan PHI	2	10	29	7	60		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kasus yang sangat besar yaitu 631 kasus. Hal ini terjadi karena pandemi telah menyebabkan perusahaan harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun demikian Sebagian besar masalah dapat diselesaikan secara bipartit di tingkat perusahaan dan pekerja sehingga jumlah kasus yang harus dimediasi oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja hanya 32 kasus dan hanya 60 kasus yang perlu anjuran untuk diselesaikan melalui pengadilan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2023 terdapat 108 kasus yang harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

2) Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kota Banda Aceh

Kesempatan kerja adalah memanfaatkan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan ekonomi di masyarakat membutuhkan tenaga kerja. Semakin meningkat pembangunan, semakin besar pula kesempatan kerja yang tersedia. Salah satu upaya pemerintah dalam melihat besaran tenaga kerja yang tersedia adalah dengan melibatkan dinas tenaga kerja di daerah untuk melakukan pendaftaran pencari kerja melalui mekanisme antar kerja. Tenaga kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja diidentifikasi melalui Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu AK 1). Para pencari kerja ini kemudian akan difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan melalui pengantar kerja atau pun Job Fair yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Pencari kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh yang ditempatkan selama 5 (Lima) tahun dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.68 beriku:

Tabel 2. 68 Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tenaga Kerja Terdaftar	582	255	222	107	131	
2	Tenaga Kerja Ditempatkan	332	105	116	48	56	
	Persentase	**57,04**	**41,17**	**52,25**	**45,00**	**42,75**	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2024

Proses Kompilasi dari OPD

Dari Tabel 2.68 di atas dapat dilihat bahwa persentase penempatan tenaga kerja sangat berfluktuasi, hal ini tergantung pada factor tenaga kerja yang terdaftar dan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Kondisi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 42,75 persen pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh telah berhasil mendapatkan pekerjaan dan ditempatkan, hal ini mengalami penurunan sebesar sebesar 5 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan

ini salah satu disebabkan jumlah lowongan kerja yang terbatas dan tidak adanya laporan lowongan kerja dari perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

3) Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial

Selama kurun waktu 2019 – 2023, perselisihan antara Buruh dan Pengusaha dengan pemerintah di sebut dengan perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini timbul dalam hubungan kerja karena kondisi ekonomi yang memburuk akibat pendemi yang menyebabkan perusahaan harus melakukan PHK terhadap pekerja. Perselisihan ini telah dapat diselesaikan baik melalui metode penyelesaian bipartite, melalui mediator dan hanya sedikit yang diselesaikan pada tingkat pengadilan hubungan industrial. Jumlah sarana hubungan industrial yang telah mendapatkan pengesahan dan pencatatan di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.69 berikut ini:

Tabel 2. 69 Jumlah Sarana Hubungan Industrial yang Telah Mendapatkan Pengesahan dan Pencatatan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PKWT/PKWTT	864	217	1565	40	1418	
2	PP/PKB	54	23	25	39	43	
3	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	4	25	23	13	3	
4	LKS Bipartit	1	1	4	16	3	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.69 diatas, secara garis besar terlihat adanya kecenderungan peningkatan pengesahan dan pencatatan sarana hubungan industrial mulai dari Tahun 2019 sampai Tahun 2021 dan menurun di Tahun 2022 serta di Tahun 2023 terjadi kenaikan kembali. Sementara itu untuk pengesahan dan pencatatan sarana Serikat Pekerja/Serikat Buruh jumlahnya berfluktuasi dan sarana LKS Bipartit jumlahnya meningkat di tahun 2022 dan menurun pada Tahun 2023.

Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan pengesahan dan pencatatan sarana hubungan industrial dan sudah terdata pada database Aplikasi SINAKER (Sistem Informasi ketenagakerjaan). Guna tertibnya kelangsungan dan suasana bekerja dalam hubungan industrial, maka perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kerja yang harmonis dan kondusif.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Banda Aceh dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja DP3AP2KB Kota Banda Aceh.

1. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keseimbangan dan pemerataan peran serta akses antara pria dan wanita dalam suatu masyarakat. IPG mencakup beberapa dimensi kunci, termasuk partisipasi ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, dan keputusan politik. Nilai IDG mencerminkan sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Semakin tinggi nilai IDG, semakin merata pula pemberdayaan gender dalam suatu komunitas. Perkembangan nilai IDG di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2. 52 .

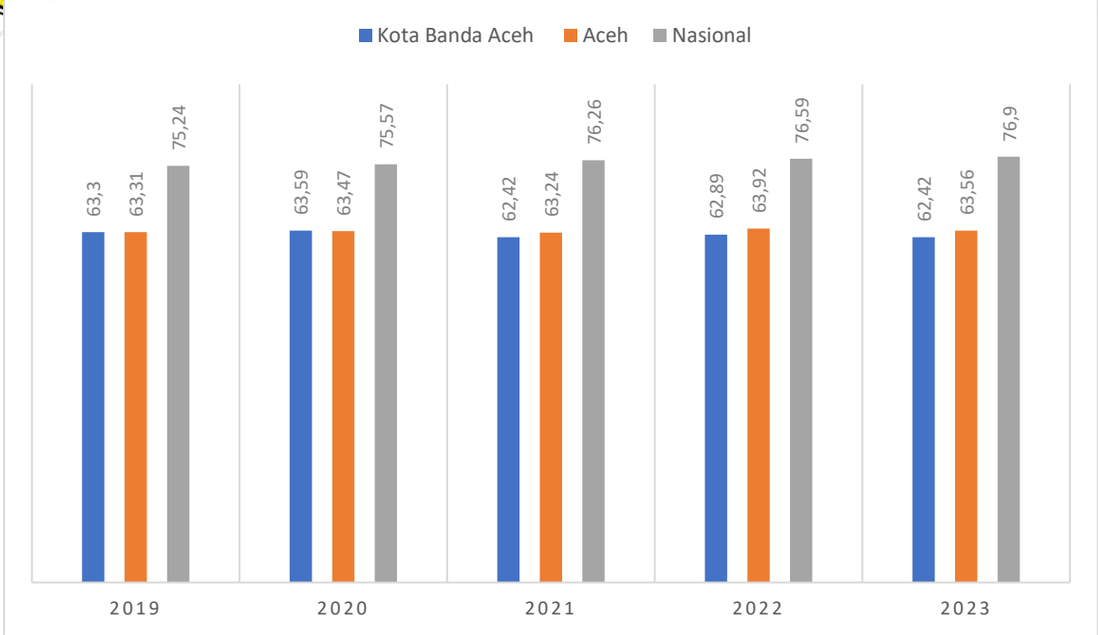

Sumber: BPS, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 552 Indeks Pemberdayaan Gender Banda Aceh

IDG di Kota Banda Aceh menunjukkan tren yang relatif stabil namun sedikit tertinggal dibandingkan dengan tingkat Provinsi Aceh dan Nasional. Pada tahun 2019, IDG Banda Aceh tercatat sebesar 63,3, hampir sama dengan provinsi Aceh yang sebesar 63,31 tetapi jauh di bawah indeks nasional yang mencapai 75,24. Tren ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana IDG Banda Aceh sebesar 62,42, lebih rendah dari Provinsi Aceh yang sebesar 63,56 dan jauh tertinggal dari indeks Nasional yang terus meningkat hingga mencapai 76,9. Hal ini disebabkan salah satu indikator penunjang IDG yaitu sumbangan pendapatan perempuan sedikit menurun 0,24 dari tahun 2022 sebesar 28,5 menjadi 28,26 pada tahun 2023. Meskipun Banda Aceh menunjukkan beberapa fluktuasi kecil, perbedaannya dengan indeks provinsi dan nasional menandakan perlunya upaya lebih besar dalam pemberdayaan gender di kota ini. Untuk tahun 2024 belum diperoleh angka IDG yang dirilis oleh BPS.

Secara keseluruhan, Kota Banda Aceh menunjukkan kinerja yang konsisten dalam IDG namun tetap berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pemberdayaan gender, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik. Upaya lebih besar diperlukan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan di Banda Aceh. Dengan memperhatikan dan menangani faktor-faktor yang mempengaruhi IDG, diharapkan Banda Aceh dapat mengejar ketertinggalannya dan berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan keseluruhan IDG di tingkat provinsi dan nasional.

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan merupakan indikator penting dalam mengukur kesetaraan gender dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan politik. Meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan tidak hanya penting untuk kesetaraan indeks , tetapi juga untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan perempuan terwakili dalam kebijakan publik. Upaya yang berkelanjutan, termasuk kebijakan afirmatif dan program pengembangan kapasitas, diperlukan untuk meningkatkan representasi

perempuan dalam pemerintahan. Persentase ASN laki-laki dan perempuan di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada

Tabel 2. 70 Persentase Pegawai Negeri Sipil Laki-laki dan Perempuan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)	4.255	4.204	4.585	4.138	4.618
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Laki-laki	1.400	1.338	1.294	1.259	1.218
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan	2.855	2.752	2.663	2.573	2.532
Jumlah PPPK Laki-laki	-	22	142	65	597
Jumlah PPPK Perempuan	-	92	486	241	271
Persentase Laki-laki	32,9	32,35	31,31	31,99	39,30
Persentase Perempuan	67,1	67,64	68,68	68	60,69

Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh, 2024

Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah ASN mengalami perubahan, dengan jumlah keseluruhan meningkat dari 4.255 pada tahun 2020 menjadi 4.618 pada tahun 2024. Selama periode ini, persentase ASN perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2020, persentase PNS perempuan mencapai 67,1% dan menurun menjadi 60,69% pada tahun 2024. Meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun 2023. Sebaliknya, persentase ASN laki-laki meningkat dari 32,9% pada tahun 2020 menjadi 39,30% pada tahun 2024.

Selain itu, data menunjukkan adanya penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam statistik sejak tahun 2024, di mana jumlah PPPK laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, terdapat 597 PPPK laki-laki dan 271 PPPK perempuan. Hal ini memperkuat tren dominasi partisipasi perempuan dalam ASN. Meskipun jumlah ASN laki-laki berkurang, peran perempuan dalam pemerintahan semakin kuat, mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan kesetaraan gender dalam lingkungan kerja pemerintahan.

2) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah indikator penting yang mengukur prevalensi dan tingkat kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Pemantauan rasio ini memberikan wawasan mengenai kondisi keamanan dan kesejahteraan keluarga, serta efektivitas kebijakan perlindungan dan pencegahan KDRT. Data mengenai rasio KDRT membantu mengidentifikasi kelompok yang rentan, mengevaluasi program dukungan bagi korban, dan mengembangkan strategi untuk mengurangi insiden kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah undang-undang yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia

Rasio KDRT dihitung dengan membagi jumlah kasus KDRT dengan jumlah populasi atau jumlah rumah tangga yang terpapar risiko tersebut, kemudian kalikan dengan 100 untuk mendapatkan rasio dalam bentuk persentase. Rasio KDRT di Kota Banda Aceh tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2. 71.

Tabel 2. 71 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Perempuan	0,05	0,07	0,07	0.11	0.06
Anak	0,04	0,05	0,06	0.05	0.02

Sumber : DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2025

KDRT terhadap perempuan dan anak-anak dari tahun 2020 hingga 2024 berfluktuasi. Untuk rasio KDRT terhadap perempuan dewasa, berfluktuasi dengan rentang 0,05% sampai dengan 0,11%. Rasio tertinggi dilaporkan terjadi pada Tahun 2023 yakni sebesar 0,11%. Penurunan yang signifikan terlihat terjadi pada Tahun 2024 yaitu sebesar 0,06%. Akan tetapi masih ada rasio terendah yang pernah dilaporkan yaitu sebesar 0,05 pada tahun 2020. Penurunan rasio KDRT pada perempuan dewasa tahun 2024 diduga terkait dengan penurunan jumlah pengaduan kasus yang juga mengalami penurunan dari tahun 2023.

Sedangkan pada anak, rasio KDRT cenderung berfluktuasi secara stabil antara rentang 0,02% sampai dengan 0,10%. Penurunan paling rendah juga dilaporkan terjadi pada tahun 2024 dan laporan paling tinggi terjadi pada tahun 2022. Penurunan ini diharapkan terjadi sebagai akibat adanya peningkatan kesadaran dan upaya perlindungan terhadap anak, meskipun tantangan masih ada dalam memastikan bahwa semua anak terlindungi dari kekerasan. Perubahan dalam rasio KDRT ini menegaskan perlunya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam melindungi kelompok rentan, dengan fokus pada pendidikan, advokasi, dan penegakan hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak.

Sepanjang periode 2020 – 2024, rasio KDRT pada perempuan dewasa terlihat lebih tinggi daripada anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok rentan untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan bisa saja karena perempuan sebagai ibu yang mengalami KDRT akan merembet pada anak yang ikut melihat kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Data yang tersaji menunjukkan bahwa, meskipun ada upaya yang signifikan untuk menekan terjadinya kasus kekerasan, namun upaya pencegahan KDRT harus terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli dan mau terlibat dalam upaya pencegahan KDRT.

3) Peserta KB Aktif

Keluarga berencana (KB) merupakan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dengan pengendalian kelahiran dan jarak antar kehamilan. KB bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menyesuaikan jumlah anak sesuai dengan kondisi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan keluarga. Keberhasilan program KB sangat tergantung dari persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan). Persentase pasangan usia subur/rasio akseptor KB dapat dilihat dalam gambar gambar di bawah ini.

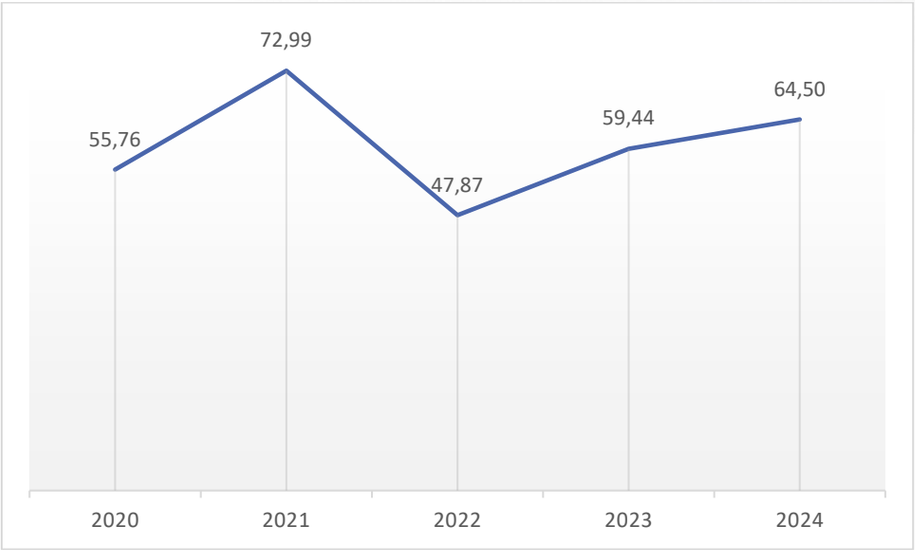

Sumber: DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 2. 553 Peserta KB Aktif (%)

Grafik menunjukkan persentase peserta KB aktif di Banda Aceh dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah akseptor tercatat sebesar 55,76%, kemudian meningkat signifikan menjadi 72,99% pada tahun 2021. Namun, setelah itu terjadi penurunan jumlah akseptor menjadi 47,87% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah akseptor kembali menunjukkan peningkatan, naik menjadi 59,44%. Peningkatan ini berlanjut di tahun 2024 menjadi 64.50%. Data ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah akseptor KB di Banda Aceh selama lima tahun terakhir.

4) Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Indikator KLA terbagi dalam 1 (satu) klaster Penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Pemenuhan Hak Anak yaitu Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, & Kegiatan Budaya dan Klaster V : Perlindungan Khusus. Pencapaian yang diraih Kota Banda Aceh periode 2019-2023 diperlihatkan pada Tabel 2. 72 berikut:

Tabel 2. 72 Indikator Kota Layak Anak yang Dicapai Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator KLA yang dicapai	664	664	693	788	766	Belum ada Data

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh, 2024
**) Data 2019 sampai 2021 disesuaikan*

Berdasarkan Tabel 2. 72 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator KLA dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, di tahun 2020 tidak dilakukan evaluasi KLA akibat pandemi Covid-19. Tahun 2021, Kota Banda Aceh kembali memperoleh penghargaan KLA dalam kategori Madya dengan skor 693 untuk evaluasi tahun 2020 dan 2021. Tahun 2022 Kota Banda Aceh memperoleh penghargaan Kota Layak Anak dengan kategori yang lebih tinggi, yaitu Nindya. Dan di tahun 2023 penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya kembali diperoleh dengan skor 766. Skor KLA untuk tahun 2024 belum diperoleh, karena masih dalam tahapan verifikasi oleh Propinsi Aceh dan evaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Peningkatan peringkat dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh yang kuat untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai KLA. Namun demikian, masih diperlukan upaya, kebijakan, dan program yang lebih konsisten untuk mencapai hasil maksimal sehingga mendapatkan kategori Kota Layak Anak (KLA), untuk terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA).

5) Perluasan Jaringan Khususnya Untuk Panti dan Pusat Rehabilitasi

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh stakeholder dari berbagai institusi. Kerjasama lintas sektoral ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang komprehensif dan maksimal bagi penyelesaian permasalahan perempuan dan anak. Oleh karena itu, UPTD PPA menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar penanganan kasus yang dilakukan dapat berlangsung secara optimal.

Mitra kerja UPTD PPA tahun 2024 terdiri dari sektor pemerintah kota, provinsi dan pusat serta sektor swasta dan lembaga penyedia layanan lainnya yang terdapat di Kota Banda Aceh. Mitra kerja sangat berperan untuk membantu penyelesaian kasus yang diadukan ke UPTD PPA Kota Banda Aceh. Layanan yang diberikan oleh UPTD PPA pada prinsipnya mengedepankan konsep manajemen kasus yang kuncinya adalah koordinasi. Dalam pemberian layanan maka UPTD PPA akan melakukan koordinasi, rujukan dan pelimpahan kepada lembaga mitra sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga mitra tersebut.

Jaringan kerja UPTD PPA semakin luas karena sesuai kebutuhan korban /survivor yang memerlukan berbagai layanan. Karena kasus semakin beragam dan persoalan yang kompleks dituntut adanya pengembangan mitra kerja, sehingga sistem layanan lebih solid dan tidak tumpang tindih.

6) Cakupan Penegakan Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasasn Terhadap Perempuan dan Anak Penyelesaian Kasus Melalui Litigasi dan Non Litigasi

Dalam upaya menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan bentuk penanganan kasus melalui proses hukum di pengadilan, baik untuk kasus perdata maupun pidana. Sebaliknya, jalur non-litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, yang sering kali bersifat lebih fleksibel dan mengedepankan pendekatan kekeluargaan. Pada tahun 2024, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Banda Aceh menangani 50 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan layanan bantuan hukum. Dari jumlah tersebut, 30 kasus melibatkan perempuan, sementara 20 kasus melibatkan anak. Sebagian besar kasus, sebanyak 39 kasus, diselesaikan melalui jalur litigasi, yang terdiri atas 26 kasus perempuan dan 17 kasus

anak. Sementara itu, 7 kasus lainnya diselesaikan melalui jalur non-litigasi, terdiri dari 4 kasus perempuan dan 3 kasus anak.

Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan ketika kasus yang dilaporkan bersifat berat dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, seperti kekerasan fisik berat, rudapaksa, atau kasus yang menimbulkan ancaman serius terhadap korban. Proses litigasi biasanya melibatkan pengadilan negeri atau mahkamah syar'iyah, tergantung pada jenis kasus dan yurisdiksinya. Sementara itu, jalur non-litigasi digunakan untuk kasus yang memungkinkan penyelesaian secara damai demi kemaslahatan semua pihak. Kasus-kasus yang sering diselesaikan melalui jalur ini mencakup kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa penelantaran nafkah, serta kekerasan fisik atau psikis ringan terhadap anak. Dalam proses ini, UPTD PPA melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga korban dan pelaku, aparatur desa, serta instansi terkait untuk mencapai solusi terbaik.

Pendekatan non-litigasi tidak hanya bertujuan menyelesaikan kasus, tetapi juga untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menjadi penting dalam konteks keluarga, terutama ketika pihak-pihak yang bersengketa masih memiliki hubungan dekat, seperti orang tua dan anak, guru dan murid, sesame tetangga. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, pendamping hukum, dan mediator profesional, proses penyelesaian non-litigasi memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan hubungan sosial.

Meski kedua jalur ini memiliki kelebihan masing-masing, ada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pada jalur litigasi, proses hukum sering kali memakan waktu yang lama dan memerlukan sumber daya yang besar. Hal ini bisa menjadi beban tambahan bagi korban, terutama jika mereka harus menghadiri persidangan secara berkala. Di sisi lain, jalur non-litigasi menghadapi tantangan dalam membangun kesepakatan yang dapat diterima semua pihak, terutama ketika emosi atau konflik sudah memuncak. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak dalam penyelesaian non-litigasi memerlukan koordinasi yang baik. Aparatur desa, tokoh masyarakat, dan instansi terkait harus memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan korban.

UPTD PPA Kota Banda Aceh terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan mengoptimalkan kedua jalur penyelesaian, baik litigasi maupun non-litigasi, diharapkan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Selain itu, UPTD PPA juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kasus kekerasan dan mendukung korban agar tidak merasa sendiri dalam menghadapi masalah mereka. Melalui pendekatan yang humanis, profesional, dan berbasis kolaborasi, UPTD PPA berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, penyelesaian kasus kekerasan tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga memastikan pemulihan dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan bagi korban.

C. Pangan

1) Pola Pangan Harapan

Pangan merupakan satu-satunya kebutuhan dasar manusia yang bersifat hayati agar manusia dapat hidup sehat dan produktif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dengan perorangan,

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan. PPH adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan kompisisi atau ketersediaan pangan. Skor Pola Pangan Harapan adalah merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan. Skor Pola Pangan Harapan maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

Adapun jenis pangan atau kelompok pangan dalam Pola Pangan Harapan adalah :

1. Padi-padian (beras, jagung, tepung terigu, gandum, dan lain-lain)
2. Umbi-umbian (ubi jalar, kentang, singkong, talas, wortel dan lain-lain)
3. Pangan Hewani (daging rumenansia, daging unggas, telur, susu, ikan dan lain-lain)
4. Minyak dan Lemak (minyak kelapa, minyak sawit, minyak jagung dan lain-lain)
5. Buah/ Biji Berminyak (kelapa, kemiri, dan lain-lain)
6. Kacang -kacangan (kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah)
7. Gula (gula aren, gula pasir, dan lain-lain)
8. Sayur dan Buah (sayur-sayuran dan buah-buahan)
9. Lain-lain (minuman, bumbu, dan lain-lain)

Tabel 2. 73 Skor Pola Pangan Harapan Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	253,3	1.006	53,4	47,9	0,5	26,7	24,0	25,0	24,0
2	Umbi-umbian	37,1	31	1,6	1,5	0,5	0,8	0,7	2,5	0,7
3	Pangan Hewani	162,9	293	15,5	13,9	2,0	31,1	27,9	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	31,4	283	15,0	13,5	0,5	7,5	6,7	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	4,2	23	1,2	1,1	0,5	0,6	0,6	1,0	0,6
6	Kacang-kacangan	17,5	47	2,5	2,3	2,0	5,0	4,5	10,0	4,5
7	Gula	13,8	54	2,9	2,6	0,5	1,4	1,3	2,5	1,3
8	Sayur dan Buah	211,9	98	5,2	4,7	5,0	26,0	23,3	30,0	23,3
9	Lain-lain	94,0	50	2,7	2,4	-	-	-	-	-
	Total		**1.885**	**100,0**	**89,7**		**99,1**	**89,0**	**100,0**	**83,3**

Sumber : DP2KP Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan penyediaan pangan penduduk disuatu wilayah diperlukan parameter, jumlah, keragaman, dan mutu gizi pangan. Secara sederhana dapat diamati dari suatu susunan atau pola ketersediaan

dan konsumsi penduduk. Salah satu parameter sederhana yang dapat dipakai untuk menilai Tingkat keragaman dan mutu gizi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk adalah Pola Pangan Harapan (PPH) yang di analisis menggunakan data Susenas yang diterbikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Skor Pola Pangan Harapan di Kota Banda Aceh pada tahun 2023 adalah 83,3%, kecukupan Energi (% AKE) 89,7%, sedangkan Kecukupan Protein 106,6%.

D. Lingkungan hidup

1. Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Banda Aceh

Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi air yang dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu. capaian indeks kualitas air (IKA) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 74 Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Indeks Kualitas Air (IKA)	Target dan Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Target	Tercemar Ringan	Baik	N/A	N/A	45,66	45,71
2	Realisasi	Tercemar Ringan	Tidak Teruji Karena *Covid*-19	N/A	N/A	56,67	65,29
3	Persentase Capaian	100 %	0 %	N/A	N/A	124,11%	143%

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.74 di atas dapat dilihat bahwa pengukuran IKA pada Tahun 2019 menggunakan 4 metode yakni metode STORET, metode Indeks Pencemaran (IP), metode IKA Existing dan metode IKA-INA. Hasil akhir dari metode IKA Existing menunjukkan angka 65,29 hal ini berarti kualitas air di Kota Banda Aceh saat ini termasuk dalam kategori “Cemar Ringan”. Pelaksanaan pengukuran IKA di Kota Banda Aceh Tahun 2019 sangat baik dan telah mencapai realisasi 100 persen. Pada tahun 2019 pengukuran IKA dilakukan pada 5 buah sungai dengan 20 titik lokasi yang berbeda. Namun di tahun 2020 pengujian kualitas air sungai tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. Sedangkan untuk tahun 2021, berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2019 No. 700/193 oleh inspektorat Kota Banda Aceh, merekomendasikan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2018 -2022. Oleh karena itu, DLHK3 Banda Aceh telah merevisi renstra tahun 2018 – 2022 sehingga Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) tidak termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3 2018-2022. Oleh karena itu, data Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia.

Pada renstra 2023-2026 Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3. Pada Tahun 2024 Persentase capaian untuk Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 143 %. Nilai IKLH ini diperoleh berdasarkan data hasil uji dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang dipublikasikan pada Aplikasi IKLH.

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi Data dari OPD

Gambar 2. 54 Aplikasi IKLH

Tahun 2023 Perhitungan nilai IKA dilakukan melalui Aplikasi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Nilai IKA diperoleh dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh KLHK RI, sedangkan Kota Banda Aceh tidak melakukan pemantauan karena refocusing anggaran.

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersedian dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi. Selain itu setiap metode dalam mengukur kualitas air juga dapat menunjukkan hasil yang berbeda karena perbedaan tingkat sensitivitas setiap metode dalam menggambarkan kualitas suatu badan perairan, yakni melalui tingkat toleransi setiap indeks tersebut terhadap kualitas suatu badan perairan.

2. Capaian Menurunnya TPS Liar

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya membuat beberapa tempat menjadi tempat penampungan sementara (TPS) liar yang berserakan di Kota Banda Aceh. DLHK3 Banda Aceh telah menyediakan wadah sampah yang tersebar di beberapa lokasi untuk tempat penampungan sampah sementara dari masyarakat. Namun masyarakat masih saja membuang sampahnya di TPS liar yang seringkali terlihat berserakan di sepanjang jalan raya, terminal, pasar, jembatan, halte, perbatasan dan tempat-tempat umum lainnya. Secara keseluruhan terdapat 140 titik TPS Liar yang ada di Kota Banda Aceh. Persentase capaian menurunnya TPS liar Tahun 2018 sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 75 Persentase Capaian Menurunnya TPS Liar Tahun 2019-2024

No	Menurunnya TPS Liar	Target dan Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Target	20 titik	65 titik	0	0	0
2	Realisasi	47 titik	65 titik	18 Titik	12 Titik	21 Titik
3	Persentase Capaian Menurunnya TPS Liar	235%	100%	100%	100%	100%

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian menurunnya TPS liar dari tahun 2020-2024. Tahun 2020 target menurunnya TPS liar sebanyak 20 titik. Realisasi yang dicapai pada tahun yang sama sebanyak 47 titik. Atas dasar ini dapat diketahui persentase capaian menurunnya TPS Liar pada tahun 2020 sebesar 235%. Pada tahun 2021, target menurunnya TPS liar sebanyak 65 titik. Realisasi yang dicapai sebanyak 65 titik. Dapat diketahui pada tahun 2021, persentase capaian menurunnya TPS liar sebesar 100%. Pada Tahun 2022 dan 2023 persentase capaian menurunnya TPS liar sebanyak 100%. Tahun 2024 realisasi menurunnya TPS liar yang dicapai sebanyak 21 titik dengan persentase capaian sebesar 100%.

Adapun strategi-strategi yang dilakukan DLHK3 diantaranya, melakukan pemembersihan TPS liar yang dijumpai walaupun itu berada di tanah warga.Tidak hanya itu, selain membersihkan TPS liar, para petugas juga mengsosialisasikan langsung kepada pemilik tanah dan warga disekitar lokasi TPS liar agar tidak lagi membuang sampah ditempat tersebut. Selain itu, DLHK3 Banda Aceh juga menyediakan sarana dan prasarana seperti ketersediaan armada, ketersediaan wadah kontainer dan komunal, ketersediaan wadah sampah pemilah dan lain sebagainya guna mewujudkan Kota Banda Aceh bebas sampah tahun 2025.

3. Capaian Pengurusan dan Pengawasan izin Dokumen Lingkungan

Dalam melakukan usaha ataupun kegiatan, terdapat peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Dalam konteks peraturan lingkungan hidup, terdapat beberapa jenis dokumen yang harus dibuat oleh pelaku usaha/kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang dilakukan. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Hal serupa juga diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jumlah izin/rekomendasi lingkungan hidup pada Tahun 2018-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

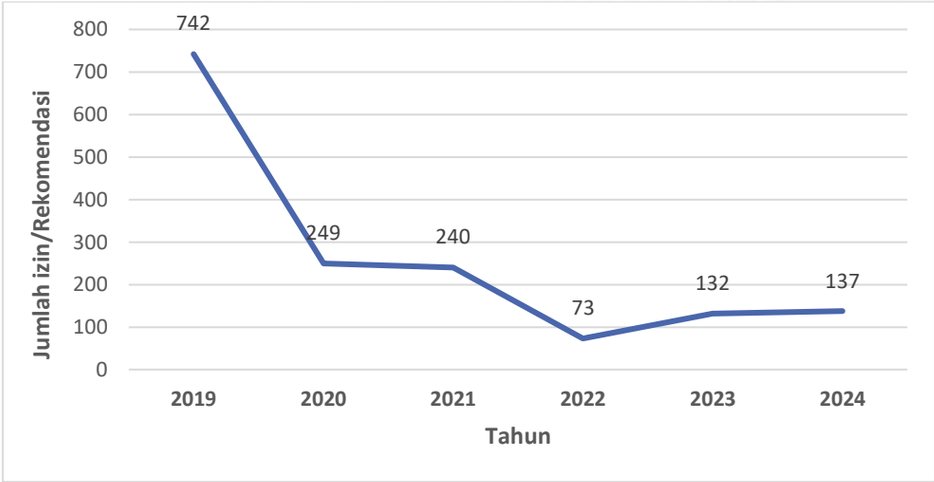

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 2. 54 Jumlah Izin/ Rekomendasi Lingkungan Tahun 2018-2024

Capaian izin/rekomendasi lingkungan hidup pada tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 76 Capaian Izin/Rekomendasi Lingkungan Hidup pada Tahun 2019-2024

No	Dokumen	Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SPPL	229	226	270	67	110	127
2	UKL-UPL/DPLH	20	14	15	6	23	10
Total		742	249	240	73	132	137

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2.55 dan Tabel 2.76 terlihat bahwa jumlah penerbitan Persetujuan Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL dan DPLH/DELH pada Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam tertib perizinan. Upaya kontrol bersama antara pelaku usaha dan/atau kegiatan, masyarakat dan Pemerintah harus terus ditingkatkan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan optimal dan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan.

4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan penduduk

Daya Tampung TPS per satuan penduduk tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena alokasi dana yang kecil untuk pembelian kontainer dam komunal, juga sulitnya mendapatkan lokasi kontainer/wadah komunal di dalam wilayah gampong karena warga belum bersedia meminjamkan lahan mereka untuk penempatan wadah tersebut. Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 77 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk (persen) Tahun 2020-2024

Indikator	Target dan Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	Target	40	44	45	50	31
	Realisasi	34,75	32,01	31,51	30,57	

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025

Tabel 2.77 menyesuaikan dengan indikator pengelolaan sampah terbaru yang ditetapkan secara nasional yaitu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dimana pada tahun 2020 target TPS sebesar 20, sedangkan realiasasi yang dicapai pada tahun yang sama yaitu 34,75.

Berdasarkan hal tersebut maka realisasi sampah terkelola pada tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 78 Realisasi Sampah terkelola Tahun 2018-2024

Indikator	Target dan Capaian	Target Capaian setiap Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Sampah yang terkelola	Target	91 %	90 %	97%	98%	99%	99%	97,75
	Realisasi	95,94 %	92,87 %	93,12 %	97,78 %	97,97 %	98,48 %	97,61

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Banda Aceh telah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah melalui Peraturan Walikota No. 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penetapan kebijakan tersebut berlaku sejak 2018 hingga 2025, yang menetapkan target penanganan dan pengurangan sampah. Jumlah volume sampah dalam penanganan dan pengurangan sampah tersebut merupakan jumlah sampah terkelola. Sampah yang terkelola pada tahun 2018 sebesar 95,54 % menurun 92,87 % pada tahun 2019, akibat pemisahan data antara sampah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang masuk di TPA Gampong Jawa. Namun pada tahun 2022 persentase sampah terkelola naik signifikan menjadi 97,97 % akibat pemberantasan TPS Liar yang berasal dari gampong-gampong di wilayah Kota Banda Aceh. Di Tahun 2023 persentase sampah terkelola meningkat menjadi 98,48%, dan mengalami penurunan di Tahun 2024 sebesar 97,61%

5. Pemanfaatan Gas Metana dari TPA Gampong Jawa

TPA Kota Banda Aceh menerima sampah yang masuk setiap harinya sebesar 160 - 170 ton diperkirakan mampu menghasilkan gas metan dengan kapasitas 4.000 m3/hari bila pengumpulannya dilakukan secara optimal. Di tahun 2015 pemerintah kota Banda Aceh melalui DK3 telah melakukan upaya pengumpulan dan pemanfaatan gas metan di TPA dengan memasang 12 pipa pengumpul gas vertikal tambahan dimana sebelumnya sudah terpasang 6 pipa pengumpul, sehingga saat ini gas metan sudah

dapat dikumpulkan dari 18 pipa pengumpul vertikal yang ada. Untuk tahap pertama DK3 telah mengumpulkan gas metan TPA dari 4 pipa pengumpul vertikal dan telah berhasil disalurkan melalui 2 unit compressor yang dihidupkan secara bergantian ke 23 rumah penduduk yang ada di sekitar TPA yaitu masyarakat Gampong Jawa. DK3 menargetkan pada tahun 2022 gas metan yang dihasilkan TPA Kota Banda Aceh dapat disalurkan 99% ke rumah warga Gp. Jawa sebagai salah satu bentuk kompensasi Pemerintah Kota Banda Aceh bagi masyarakat yang tinggal di dekat lokasi TPA.

Hal yang membedakan program pemulihan gas metan TPA yang dilakukan oleh Kota Banda Aceh dengan daerah lainnya adalah pengumpulan gas metan TPA Kota Banda Aceh dilakukan pada lahan TPA yang masih aktif dengan tetap memperhatikan faktor-faktor keamanan dan kemudahan operasional alat berat pada lahan urug. Masyarakat Gp. Jawa penerima gas methan gratis dari TPA Kota Banda Aceh sangat senang dan merasakan manfaat yang cukup besar dari gas metan yang mereka terima. Bahkan salah seorang masyarakat mengatakan bahwa sejak adanya gas metan dari TPA, penggunaan elpiji 3 kg di rumahnya dapat dihemat dari 3 tabung/bulan menjadi hanya 1 tabung /bulan. Pemakaian elpiji masih dilakukan untuk mengantisipasi keperluan memasak pada saat jadwal distribusi harian dihentikan. Selama ini jadwal penyaluran gas metan dari TPA mulai pukul 08.00 s/d 12.000 dan 15.00 s/d 17.30.

Sejak tahun 2021 penyaluran gas methan kepada masyarakat sudah terhenti dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk operasional dan pemeliharaan jaringan, sehingga banyak jaringan perpipaan distribusi yang putus tidak dilakukan perbaikan.

6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pengelolaan ruang terbuka hijau mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dimana ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Pada Tabel 2.79 rincian pencapaian RTH publik Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 berdasarkan jenis komponen RTH.

Tabel 2. 79 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Jenis RTH Publik	2020	2021	2022	2023	2024
RTH Taman Kota	58,59	58,59	58,46	58,46	58,46
RTH Hutan kota	33	33	32,95	32,95	32,95
RTH Lapangan Olah Raga	58,56	58,56	58,56	58,56	58,56
RTH Jalur Hijau Jalan	43,86	43,86	43,86	43,86	43,86
RTH Makam	22,77	22,77	21,58	21,58	21,58
RTH Sabuk Hijau/RTH-Pengaman	183,58	183,58	183,76	183,63	183,63
Hutan Bakau	445,48	445,48	446,19	446,19	446,19
Jumlah luasan RTH Total	845,84	845,84	845,36	845,43	845,43
Luas Kota Banda Aceh	5.900,00	5.900,00	5.901,00	5.900	5.900
Presentase luas RTH terhadap Luas Kota Banda Aceh	14,34	14,34	14,34	14,33	14,33

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan Tabel 2. 79 Ketersediaan kawasan RTH Kota Banda Aceh hanya 14 persen sejak 2019 sampai tahun 2023. Kondisi ini memerlukan kebijakan yang lebih agresif dan bijaksana apabila ingin mencapai target yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Gambar 2. 56 menunjukkan target dan realisasi RTH publik dari Tahun 2019 hingga 2024.

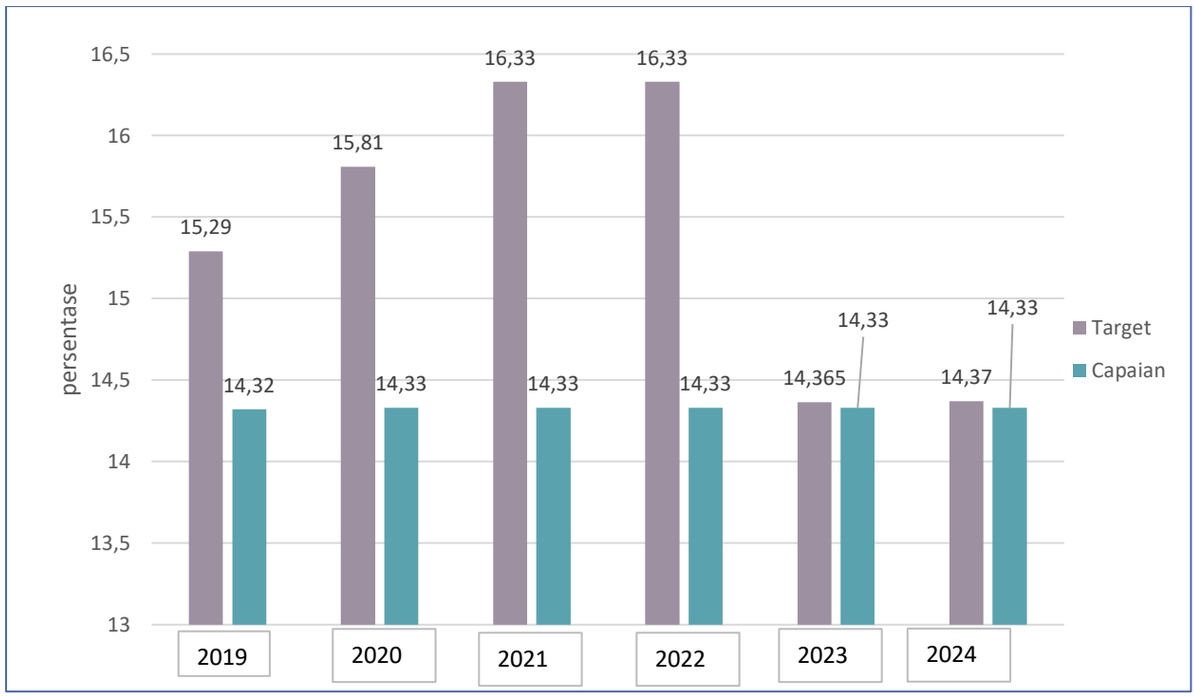

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 56 Pencapaian Persentase Luas RTH Publik Kota Banda Aceh Periode 2019-2024

Gambar di atas menunjukkan penambahan jalur hijau masih belum memenuhi target yang ditetapkan dari periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 target seluas 15,29 persen dengan realisasi 14,32 persen. Tahun 2021 realisasi meningkat menjadi 14,33 persen, walaupun masih dibawah target. Hal ini disebabkan belum tersedianya anggaran untuk peruntukan pembebasan lahan, yang ditargetkan seluas 5.8 Ha untuk mencapai 16,33 persen dari luas wilayah Kota Banda Aceh pada tahun 2021. Pada Tahun 2021 DLHK3 lebih fokus pada pemeliharaan RTH dan penataan RTH yang sudah ada yang memerlukan sarana dan prasarana penunjang dan pemenuhan RTH Ramah Anak. Pada Tahun 2022 capaian realisasi masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 14,33 pada tahun 2021 dan masih belum mampu untuk mencapai target yaitu sebesar 16,33. Tahun 2023 capaian realisasi sebesar 14,33 mampu mencapai target sebesar 14,365%. Tahun 2024 capaian realisasi sebesar 14,33.

7. Penghargaan Adipura

Penghargaan Adipura adalah penghargaan untuk kota yang berhasil mengelola kebersihan dan lingkungan hidup. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk memacu pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Kriteria pemilihan meliputi kriteria fisik dan non fisik. Tabel 2.63 berikut adalah target dan capaian penghargaan Adipura Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Tabel 2. 80 Penghargaan Adipura Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Meraih Adipura	Tidak diperlombakan (Covid-19)	Tidak diperlombakan (Covid-19)	Berhasil	Berhasil	Berhasil

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa target meraih Adipura pada tahun 2022 berhasil direalisasikan. Begitu juga pada tahun 2023 dan 2024 Kota Banda Aceh berhasil meraih kembali penghargaan adipura.

8. Survey Kepuasan Masyarakat

Pada Tahun 2008 DLHK3 membuka 10 (sepuluh) pelayanan yang terdiri dari; (1) pelayanan sewa alat berat; (2) pelayanan sedot tinja; (3) pelayanan sampah medis; (4) pelayanan kebersihan; (5) pelayanan pemasangan lampu jalan; (6) pelayanan pemangkasan pohon; (7) pelayanan sewa taman sari; (8) pelayanan rekomendasi lingkungan; (9) pelayanan retribusi sampah; dan (10) pelayanan izin magang penelitian.

Pelayanan DLHK3 mengenai pelayanan sampah medis dihapuskan sehingga jumlah layanan pada Tahun 2019 hanya ada 9 (sembilan) pelayanan. Penghapusan pelayanan sampah medis dikarenakan pelayanan sampah medis sudah ditangani oleh pihak ketiga. DLHK3 tidak lagi melakukan pemusnahan sampah medis. Pada Tahun 2023 untuk Pelayanan sewa alat berat sudah dihapuskan dikarenakan kondisi alat berat sudah rusak berat sehingga pada Tahun 2023 jumlah pelayanan pada DLHK3 terdiri dari 8 (delapan) pelayanan. Kinerja dari 8 pelayanan DLHK3 Banda Aceh tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan. Capaian survey kepuasan masyarakat terhadap layanan DLHK3 Tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.81:

Tabel 2. 81 Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2024

No	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Target dan Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Target	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2	Realisasi	Baik	Sangat Baik	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Persentase Capaian	100 %	100 %	-	100%	100%	100%

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025

Tabel di atas menunjukkan pada Tahun 2018 dan 2019 melalui pengisian kuisioner yang dilakukan oleh masyarakat yang menerima layanan DLHK3 diperoleh nilai kepuasan terhadap pelayanan DLHK3 adalah “Baik” dan pada tahun 2020 menjadi “Sangat Baik”. Sedangkan untuk tahun 2022 juga sangat baik dengan indeks survey Kepuasan masyarakat sebesar 89,46. Pada Tahun 2023 indeks survey kepuasan masyarakat sebesar 83,82. Tahun 2024 indeks survey kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 85,32.

Rincian skor hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DLHK3 Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 82 Rincian Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja			%
	Uraian	Target	Realisasi	
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (IKM = 81,26-100)	Sangat Baik (IKM = 81,26-100)	85,32

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan tabel 2. 82 Survey kepuasan masyarakat dilakukan kepada 155 responden secara random terhadap semua masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dari DLHK3 Banda Aceh. Berikut penjabaran jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaannya.

Survey kepuasan masyarakat dilakukan kepada 155 responden secara random terhadap semua masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dari DLHK3 Banda Aceh. Berikut penjabaran jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaannya.

Tabel 2. 83 Rincian Jumlah Responden Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DLHK3 Tahun 2024

JK (Jenis Kelamin)		PT (Perguruan Tinggi)		PU (Pekerjaan Utama)	
Laki - Laki	95	1. SD Kebawah	0	1. PNS/TNI/Polri	25
Perempuan	60	2. SMP	10	2. Pegawai Swasta	30
JUMLAH	**155**	3. SMA	45	3. Wiraswasta/ Usahawan	20
		4. D1-D2-D3	20	4. Pelajar/ Mahasiswa	20
		5. S-1	80	5. lainnya	60
		6. S-2 Keatas	0		
JUMLAH	**155**	**JUMLAH**	**155**	**JUMLAH**	**155**

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025

Berikut penjabaran hasil perolehan nilai survey terhadap mutu kinerja pelayanan DLHK3 Banda Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 84 Nilai Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DLHK3 Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Nilai Konversi Ikm Per Unit	Kinerja Unit Pelayanan	Mutu Kinerja
1	Pelayanan Rekomendasi Lingkungan	61,67	KURANG BAIK	C
2	Pelayanan Sedot Tinja	64,67	KURANG BAIK	C
3	Pelayanan Kebersihan	58,67	TIDAK BAIK	D
4	Pelayanan Pemasangan Lampu Jalan Umum	74,11	BAIK	B
5	Pelayanan Pemangkasan Pohon	75,33	BAIK	B

No	Jenis Pelayanan	Nilai Konversi Ikm Per Unit	Kinerja Unit Pelayanan	Mutu Kinerja
6	Pelayanan Sewa Taman Sari	61,33	KURANG BAIK	C
7	Pelayanan Retribusi Sampah	55,00	TIDAK BAIK	D
8	Pelayanan Izin Magang Penelitian	76,89	BAIK	B
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan DLHK3			85,32	B
			Sangat Baik	

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Sedangkan untuk tahun 2021, berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2019 No. 700/193 oleh inspektorat Kota Banda Aceh, merekomendasikan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2017 -2022. Oleh karena itu, DLHK3 Banda Aceh telah merevisi renstra tahun 2017-2022 sehingga Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat tidak termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3 2017 - 2022. Oleh karena itu, tidak dilakukan survey terhadap 10 (sepuluh) pelayanan yang terdiri dari; (1) pelayanan sewa alat berat; (2) pelayanan sedot tinja; (3) pelayanan sampah medis; (4) pelayanan kebersihan; (5) pelayanan pemasangan lampu jalan; (6) pelayanan pemangkasan pohon; (7) pelayanan sewa taman sari; (8) pelayanan rekomendasi lingkungan; (9) pelayanan retribusi sampah; dan (10) pelayanan izin magang penelitian.

Dari 8 (delapan) jenis pelayanan yang disurvei, pelayanan Izin Magang Penelitian (76,89 : Baik) memiliki skor yang paling tinggi sedangkan skor yang paling rendah diperoleh oleh pelayanan Retribusi Sampah (55,00 : tidak baik).

9. Persentase Penerangan Jalan Umum

Seiring berjalannya waktu kebutuhan akan penerangan jalan umum terus meningkat. Data jumlah LPJU di Kota Banda Aceh hingga 2019 adalah sebanyak 11.481 Unit. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah lampu PJU yang dipasang di Kota Banda Aceh, sehingga pada tahun 2022, jumlahnya menjadi 11.856 unit. Tahun 2024 jumlah LPJU sebanyak 12.030 unit meningkat dibandingkan dengan Tahun 2023 yang berjumlah 11.980 unit Untuk lebih jelasnya persentase capaian penerangan jalan umum dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

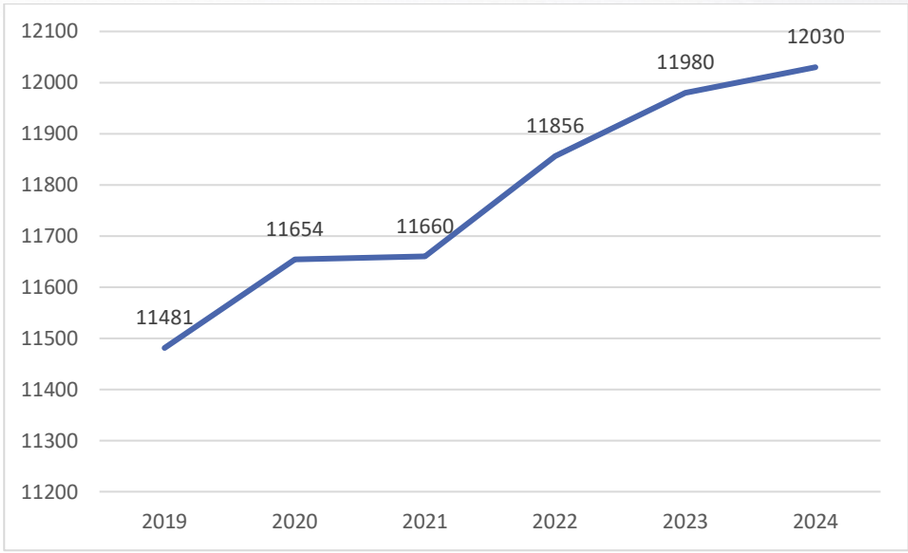

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 57 Peningkatan Jumlah Lampu PJU Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tabel 2.85 menunjukkan persentase capaian Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Banda Aceh tahun 2019-2024:

Tabel 2. 85 Persentase Penerangan Jalan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Persentase Cakupan Penerangan Jalan Umum	Target dan Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Target	81,38 %	82,79 %	84,20 %	85,61%	86	86,25
2	Realisasi	81,16 %	82,38 %	82,42 %	83,81%	84,68%	85,04
3	Persentase Capaian	99,72 %	99,50 %	97,88 %	97,90%	97,56%	98,88%

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2. 85 di atas menunjukkan persentase capaian penerangan jalan umum hampir seratus persen dari yang ditargetkan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020, namun pada tahun 2021 persentase capaian menurun sebesar 97,88% dan tahun 2022 naik sedikit menjadi 97,90%. Tahun 2023 persentase capaian sebesar 97,56%. Tahun 2024 persentase capaian meningkat dibandingkan Tahun 2023 sebesar 98,88%.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi bagi warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Kartu indentitas ini dapat dimiliki apabila warga sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah menikah. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) diproses secara komputerisasi dan

dilengkapi cip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan. Rasio kepemilikan KTP di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.86 di bawah ini:

Tabel 2. 86 Rasio Kepemilikan KTP Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	Aceh						Kota Banda Aceh					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan	3.309.145	3.382.639	3.504.900	3.589.857			139.640	165.307	167.922	169.083	173.912	
Jumlah Wajib KTP Elektronik	3.554.143	3.682.029	3.692.292	3.750.429			3072	165.415	169.097	174.140	174.799	
Rasio	**93,12**	**91,87**	**94,92**	**95,72**			99,48	99,93	99,31	97,10	99,76	

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Dari tahun 2019 sampai dengan 2022 rata-rata penduduk di Aceh yang memiliki KTP mencapai angka 94 persen, hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP. Penduduk Aceh yang memiliki KTP Elektronik di tahun 2022 berjumlah 3.750.429 atau 95,72 persen dari jumlah wajib KTP Elektronik. Tabel 2.89 di atas menunjukkan Kota Banda rasio kepemilikan KTP dari Tahun 2019-2023 mencapai 99,76 persen, capaian tersebut sudah berada diatas target nasional kepemilikan KTP-el yang dicantumkan dalam perjanjian kinerja antara kadisdukcapil seluruh Indonesia dengan target 99,40 persen.

2) Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk

Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya percepatan dan perluasan cakupan pencatatan kelahiran melalui sosialisasi, upaya proaktif, pelayanan yang terjangkau dan bekerjasama dengan klinik serta tenaga pembantu kelahiran baik medis maupun non medis. Pelayanan dilakukan dengan menyediakan pelayanan melalui aplikasi online untuk pencatatan kelahiran yang menjangkau tingkat gampong dan semua layanan yang disediakan tidak dipungut biaya (gratis).

Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Disamping itu Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif KHA, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur lebih lanjut tentang pemberian akta kelahiran. Menurut UU tersebut setiap bayi yang lahir, 60 hari setelah itu harus dicatat dan diberikan akta kelahiran. Untuk mewujudkan ini, Pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan berbagai upaya percepatan dan perluasan cakupan pencatatan kelahiran, antara lain: sosialisasi, upaya proaktif dengan pelayanan yang menjangkau dan bekerjasama dengan klinik serta tenaga pembantu kelahiran, terakhir melakukan kemudahan pelayanan melalui

inovasi berupa aplikasi online untuk pencatatan kelahiran yang menjangkau hingga tingkat gampong yakni Pelita Hati (Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi). Semua layanan yang disediakan tidak dipungut biaya (gratis). Jumlah kepemilikan akte kelahiran dan jumlah kelahiran di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.87 di bawah ini:

Tabel 2. 87 Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun.	131.173	139.640	146.878	160.513		
Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun.	2.845	3.072	2.713	3.574		

Sumber : Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2023
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.87 di atas dapat dilihat jumlah akte kelahiran yang diterbitkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Jumlah Kutipan akta kelahiran yang diterbitkan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 160.513. Sementara itu angka kelahiran cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan jauh melebihi dari jumlah angka kelahiran. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang belum memiliki akta kelahiran membuat akta kelahiran.

Pada Provinsi Aceh Sepanjang tahun 2018– 2022, persentase kepemilikan akte kelahiran terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, hanya 75,58 persen bayi yang memiliki akta kelahiran, meningkat menjadi 96,63 persen di tahun 2022. Kepemilikan akte lahir pada kabupaten/kota di Aceh dapat dilihat pada tabel 2.73.

E. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah proses peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui partisipasi dan komitmen masyarakat sebagai sebuah komunitas. Pembangunan desa menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa. Pentingnya model pembangunan yang berbasis masyarakat (community based development) didasari oleh pengalaman bahwa model pembangunan yang bersifat top down sering gagal dalam menuntaskan kemiskinan dan mengabaikan aspek partisipasi masyarakat.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu: (i) Indeks Ketahanan Sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan permukiman, (ii) Indeks Ketahanan Ekonomi yang meliputi keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, dan keterbukaan wilayah, dan (iii) Indeks Ketahanan Ekologi/lingkungan yang meliputi kualitas lingkungan hidup, bencana alam, dan tanggap bencana.

IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi pembangunan dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat dan karakteristik wilayah desa, terutama dari segi tipologi dan modal sosial. Berikut perkembangan status desa di Kota Banda Aceh:

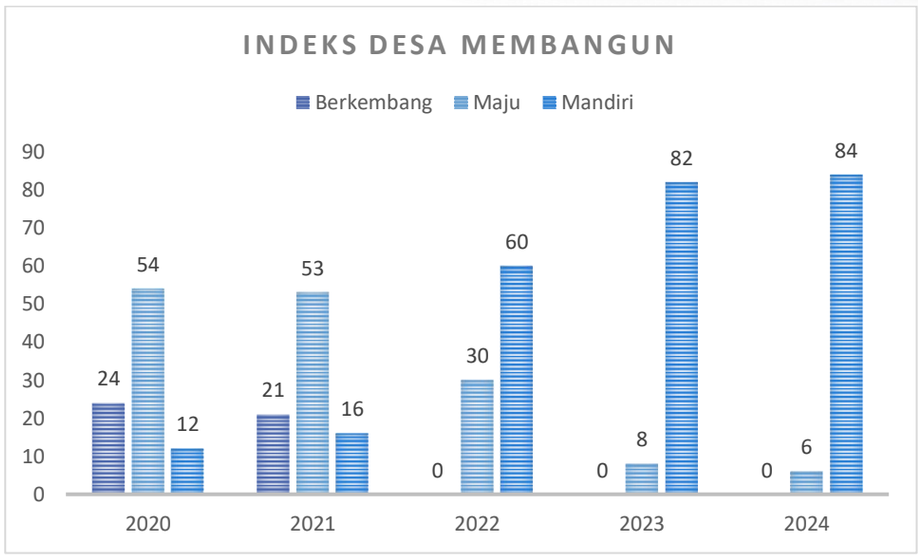

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, 2024

Gambar 2. 58 Perkembangan IDM Tahun 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam periode 2020-2021, Kota Banda Aceh didominasi oleh desa yang berstatus "maju" disusul dengan yang berstatus "berkembang" dan "mandiri". Selain itu, tidak ada status desa yang "tertinggal", dan "sangat tertinggal". Jumlah desa berstatus "maju" menurun dari 53 desa pada 2021 menjadi 6 desa pada 2024. Sementara jumlah desa yang berstatus "berkembang" juga menurun dari 21 menjadi 0 desa periode tersebut. Sementara desa yang berstatus "mandiri" mengalami trend peningkatan dari 4 desa pada 2019 menjadi 84 desa pada 2024. Dengan demikian, persentase desa mandiri mencapai 93 %. Jadi, penurunan jumlah desa berkembang dan maju sejalan dengan naiknya jumlah desa mandiri. Peningkatan jumlah desa mandiri diikuti dengan kecenderungan peningkatan dalam rerata IDM, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut:

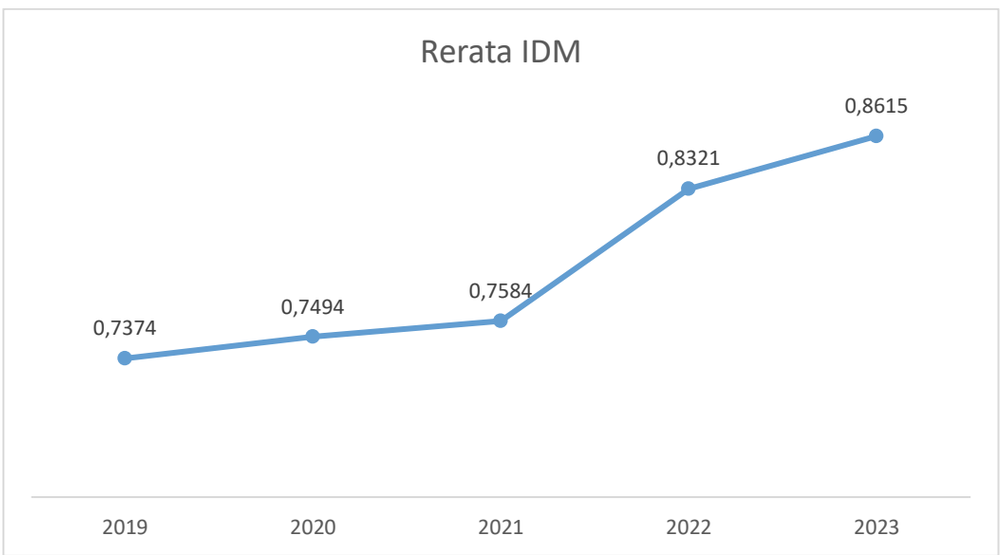

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2024

Gambar 2. 59 Rerata IDM

Rerata IDM Kota Banda Aceh terus menunjukkan peningkatan dari 0,7374 pada 2019 menjadi 0,8676 pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya indikasi positif dari

pembangunan desa di Kota Banda Aceh. Jadi, perubahan status desa menjadi desa mandiri menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pembangunan desa. Lonjakan pertumbuhan desa mandiri di periode tersebut menandakan adanya dampak positif dari berbagai upaya pembangunan menuju kemandirian desa. Hal ini berarti ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat desa di Kota Banda Aceh sudah cukup baik.

IDM telah meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa, dengan fokus pada upaya penguatan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa itu sendiri.

1) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Banda Aceh mengalihkan dana Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Al-Qardhul Hasan dari PT. BPRS Baiturrahman menjadi Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Kota Banda Aceh dan disalurkan oleh PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah milik Pemerintah Kota Banda Aceh bertujuan untuk mewujudkan sistim penyaluran dana PUEM lebih efektif dan efisien serta bermanfaat bagi masyarakat. Penempatan Dana Awal Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Kota Banda Aceh sebesar Rp. 2.436.000.000,- (Dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang ditempatkan pada rekening angsuran pokok nomor : 121.01.00587 an. Pemerintah Kota Banda Aceh pada PT. LKMS Mahirah Muamalah dan rekening jasa bagi hasil nomor : 121.01.00590 untuk penyetoran jasa mengendap serta jasa bagi hasil dari debitur PUEM.

Tabel 2. 88 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Program PUEM Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyaluran Dana Bergulir (Rp)	227.000.000	187.000.000	203.000.000	170.000.000	179.000.000	
2	Jumlah Penerima (orang)	48	40	35	26	33	

Sumber : Diskop, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Adapun Jumlah permohonan yang diterima dari masyarakat pada DPMG Kota Banda Aceh sejak bulan Agustus 2019 s/d Desember 2023 jumlahnya sebanyak 204 debitur. Permohonan para debitur tersebut diproses dalam tahap 01 s/d 48, tahap pencairan tersebut terbagi dalam wilayah domisili pada 90 Gampong 9 Kecamatan dalam Kota Banda Aceh. Dana yang di salurkan dari tahun 2019 s/d 2023 sebesar Rp. 966.000.000,-

Penyaluran Dana Revolving Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Kota Banda Aceh diperuntukan kepada pedagang, sektor perikanan, industri kecil, jasa dan usaha rumah tangga khususnya masyarakat kurang mampu dan memiliki usaha. Jumlah plafon pembiayaan awal yang dapat diberikan adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah,-) s/d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah,-) per anggota kelompok atau per orangan dan jumlah plafon pembiayaan tahap selanjutnya dapat diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah,-) s/d Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah,-) per anggota kelompok atau per orangan adapun masyarakat mengajukan permohonan bantuan modal usaha kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh, dengan mengisi

fomulir yang telah disediakan oleh DPMG dengan melampirkan foto copy KTP, Kartu Keluarga (KK) dan foto copy surat jaminan/borok serta jasa pembiayan kepada debitur ditetapkan setara 6 (enam) % per tahun dengan pembagian 3 (tiga) % sebagai modal PUEM yang disetor ke rekening jasa bagi hasil dan 3 (tiga) % untuk pendapatan pihak penyalur. Jangka waktu pembiayaan adalah 40 (empat puluh) minggu dengan akad pembiayaan dalam bentuk murabahah/ mudharabah.

Setiap permohonan tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong bersangkutan guna menghindari terjadinya tumpang tindih dengan dana PUEM-G dan dana lain yang telah disalurkan di masing–masing gampong. Permohonan tersebut diteliti dan diseleksi keabsahan dokumennya pada DPMG Kota Banda Aceh, kemudian disampaikan ke LKMS Mahirah Muamalah. Setelah menerima permohonan, petugas LKMS Mahirah Muamalah meninjau langsung ke lokasi di gampong dan menganalisa kelayakan usahanya. Petugas LKMS Mahirah Muamalah mengadakan pertemuan dengan calon debitur di gampong sebanyak tiga kali pertemuan serta meninjau kelayakan usaha dan mengambil keputusan nama-nama yang layak menjadi debitur dan jumlah dana yang harus diberikan untuk penambahan modal usahanya.

Nama-nama debitur tersebut disampaikan kepada DPMG, kemudian DPMG membuat Surat Keputusan jumlah plafon dana yang ditandatangani oleh Walikota Banda Aceh untuk dicairkan kepada para debitur PUEM Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Penetapan Plafon dan Debitur Penerima Dana Bergulir Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, nama-nama debitur dan jumlah dana yang layak diberikan, SK tersebut dikirim kepada LKMS Mahirah Muamalah untuk proses pencairan dana. Petugas LKMS Mahirah Muamalah kemudian mencairkan dana sesuai dengan dana yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Banda Aceh.

2) Persentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong

Definisi asset desa yang diuraikan dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Oleh karena itu kemampuan aparat gampong dalam mengelola asset desa menjadi indikator penting dalam pembangunan di gampong. Presentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.89 berikut:

Tabel 2. 89 Capaian Pengelolaan Aset Gampong Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Pengelolaan Aset Gampong (%)	37	40	44,44	46,67	47,78	

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Aset gampong sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari dan kekayaan gampong sebagai barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah,

perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat membutuhkan data yang akurat, sehingga aset gampong dapat dikelola dengan baik.

Tabel diatas menggambarkan prosentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik masih rendah. Untuk itu perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur gampong di bidang pengelolaan aset gampong serta fasilitasi inventarisasi aset gampong perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.

3) Persentase Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong yang baik

Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan mukim/gampong. Penyusunan perencanaan gampong, pengelolaan keuangan dan aset gampong, penyusunan profil gampong, pembuatan produk hukum gampong dan pelaksanaan administrasi pemerintahan mukim/gampong akan dapat berjalan baik bila gampong memiliki SDM yang baik. Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik dapat dilihat pada Tabel 2.90 berikut :

Tabel 2. 90 Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong (%)	38	45	59,81	60,75	63,55	

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan mukim/gampong. Penyusunan perencanaan gampong, pengelolaan keuangan dan aset gampong, penyusunan profil gampong, pembuatan produk hukum gampong dan pelaksanaan administrasi pemerintahan mukim/gampong akan dapat berjalan baik bila gampong memiliki SDM yang baik.

Tabel diatas menggambarkan Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik dari Tahun 2019 s/d 2023. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian penataan administrasi pemerintahan mukim/gampong yang baik masih rendah. Untuk itu perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur mukim/gampong dalam penataan administrasi pemerintahan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan

4) Jumlah Desa berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus

menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM dapat dilihat pada tabel 2.91 di bawah ini.

Tabel 2. 91 Jumlah Desa berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Status IDM	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	MANDIRI	4	12	16	60	82	
2	MAJU	54	54	53	30	8	
3	BERKEMBANG	32	24	21	0	0	
4	TERTINGGAL	0	0	0	0	0	
5	SANGAT TERTINGGAL	0	0	0	0	0	
Jumlah		**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2023
Proses Kompilasi dari OPD

Data IDM ini merupakan salah satu dasar bagi Kementerian Keuangan dalam pengalokasian Dana Desa. Dalam pemutakhiran data Status Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terjadi peningkatan status desa di Kota Banda Aceh yang awalnya pada tahun 2019 terdiri dari 4 Desa Mandiri, 54 Desa Maju dan 32 Desa Berkembang. Pada tahun 2023 menjadi 82 Desa Mandiri dan 8 Desa Maju. Tidak ada desa yang berstatus berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal.

5) Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kota Banda Aceh

Meningkatnya jumlah BUMG pada Tahun 2020 dikarenakan BUMG menjadi Prioritas terhadap penggunaan dana desa. Sedangkan pada tahun 2021 BUMG menurun dikarenakan ada beberapa BUMG yang bubar akibat pandemi Covid 19. Pada Tahun 2023 Jumlah BUMG yang sudah terbentuk adalah 71 BUMG dengan Rincian 26 BUMG sudah berbadan hukum dan 45 BUMG lainnya sudah terverifikasi nama resmi (lima diantaranya sedang dalam proses badan hukum). Data BUMG Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.92 di bawah ini

Tabel 2. 92 Data BUMG Kota Banda Aceh tahun 2019 - 2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Data BUMG Kota Banda Aceh	28 BUMG	47 BUMG	43 BUMG	43 BUMG	71 BUMG	

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

F. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah sebuah indikator demografi yang menggambarkan jumlah anak yang rata-rata lahir di setiap keluarga dalam suatu populasi atau wilayah tertentu. Angka ini memainkan peran penting dalam perencanaan kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan karena mempengaruhi struktur keluarga, kebutuhan masyarakat akan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta tingkat pertumbuhan penduduk. Perubahan dalam rata-rata jumlah anak per keluarga dapat mencerminkan perubahan budaya, ekonomi, dan sosial dalam masyarakat, sehingga memahami dan memantau tren ini penting untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan keluarga. Tabel 2. 93 menunjukkan rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2024.

Tabel 2.93 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Jumlah Anak Per-Keluarga	1,57	2,68	2,30	2,14	2,02

Sumber : DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2025
**) Data 2018 dan 2019 disesuaikan*

Rata-rata jumlah anak per-keluarga dari tahun 2020 hingga 2024 bervariasi. Mulai dari 1,57 anak per-keluarga pada tahun 2020, meningkat menjadi 2,68 pada tahun 2021,kemudian menurun menjadi 2,30 pada tahun 2022 dan 2,14 pada tahun 2023. Tahun 2024 jumlah anak per keluarga 2,02 sesuai dengan target nasional TFR 2,1 anak per keluarga. Perubahan ini mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan keluarga dalam merencanakan jumlah anak. Peningkatan atau penurunan ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan keluarga, pendidikan kesehatan reproduksi, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi preferensi dan kapasitas keluarga untuk membesarkan anak-anak.

1. **Ratio Akseptor KB**

Program Keluarga Berencana sudah berjalan cukup baik di Kota Banda Aceh, hal ini karena dalam pelaksanaan program dan kegiatan didukung pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik/BOKB. Saat ini secara prasarana telah tersedia 8 (delapan) Balai Penyuluh KB yang dibangun dari dana tersebut, secara sarana telah sangat baik yakni tersedianya berbagai kelengkapan operasional yang mendukung kader dalam pelayanan KB hingga ke tingkat gampong.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB (laki-laki dan perempuan) dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2. 94 berikut ini.

Tabel 2. 94 Rasio Akseptor KB Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PUS/Rasio Akseptor KB	55,76	72,99	47,87	59,44	64,50

Sumber : DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan Tabel 2. 94 di atas menunjukkan data akseptor KB di Kota Banda Aceh mengalami trend yang positif atau meningkat. Kondisi ini menunjukkan peningkatan jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi akseptor KB dimana pada tahun 2019 hanya 45,21 persen menjadi 72,99 persen di tahun 2021. Namun pada pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali. Penurunan ini disebabkan beberapa hal, yaitu :

- Keberhasilan capaian cakupan peserta KB aktif di tahun 2021 yang melebihi 100%, menyebabkan dinaikkannya angka target jumlah PUS namun tidak diikuti dengan kenaikan jumlah akseptor;
- Data kepesertaan KB yang belum maksimal karena ada peralihan aplikasi dari SIGA ke New Siga; dan
- Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dimana akseptor akan berganti kontrasepsi setelah 5 s/d 7 tahun sehingga tidak ada penambahan jumlah akseptor KB baru.

Rasio akseptor KB kembali menunjukkkan peningkatan di tahun 2024 sebesar 64.50%. Secara target Provinsi Aceh untuk mCPR tahun 2024 sebesar 51.09 dan target nasional 63.41%, Kota Banda Aceh sudah melampaui dari target dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023.

G. Perhubungan

1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum merujuk kepada pengangkutan orang dan atau barang oleh kendaraan umum baik berupa mobil/bis penumpang ataupun kapal/pesawat. Layanan angkutan ini diperlukan untuk memperlancar aktifitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan sektor ekonomi dan non ekonomi. Penggunaan jasa angkutan umum oleh masyarakat di Kota Banda Aceh pada periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.60 dibawah ini:

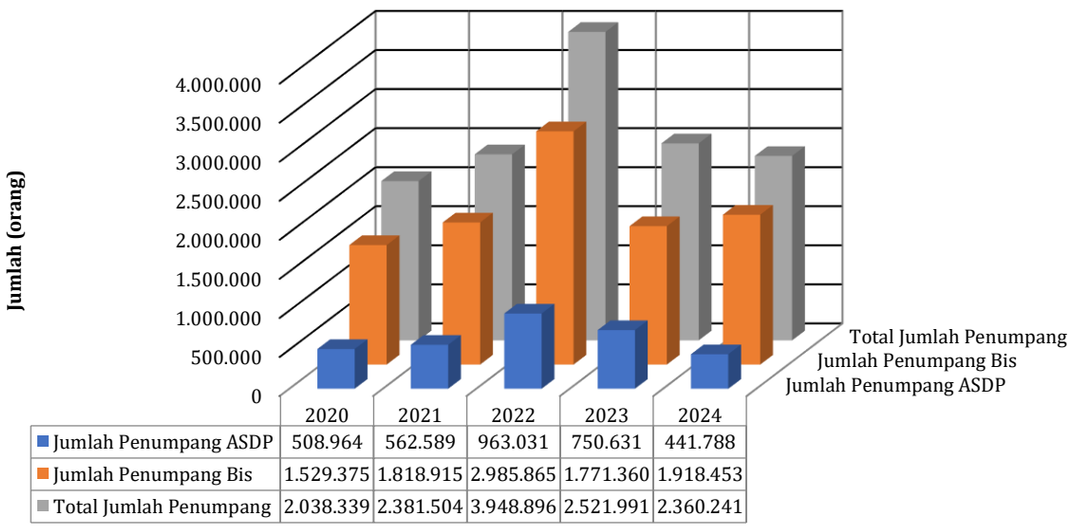

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penumpang ASDP	508.964	562.589	963.031	750.631	441.788
Jumlah Penumpang Bis	1.529.375	1.818.915	2.985.865	1.771.360	1.918.453
Total Jumlah Penumpang	2.038.339	2.381.504	3.948.896	2.521.991	2.360.241

Sumber: Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 60 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Gambar 2.60 atas menunjukkan jumlah penumpang angkutan umum di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat kecuali tahun 2020 dan 2021 dimana pandemi terjadi. jumlah penumpang pada angkutan bis dan juga ASDP yang terbesar terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 3.948.896, pada tahun 2023 sebesar 2.521.991 dan pada tahun 2024 sebesar 2.360.241.

2) Rasio Izin Trayek

Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada badan atau perorangan untuk menyediakan layanan penumpang umum. Pemberian izin trayek angkutan umum oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan dilakukan agar masyarakat mendapatkan angkutan umum yang layak dan aman untuk dinaiki. Rasio izin trayek di Kota Banda Aceh dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.95 berikut ini:

Tabel 2. 95 Rasio Izin Trayek Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Izin Trayek perkotaan (jlh kendaraan)	210	22	12	12	12
2.	Izin Trayek perdesaan	-		-	-	
3.	Izin Trayek (KPS)	24	22	12	12	12
4.	Jumlah penduduk	275.800	255.029	255.409	259.538	265.019
5.	Rasio Izin Trayek	0,08	0,01	0,005	0,005	0,005

Sumber :Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah izin trayek perkotaan pada tahun 2024 memiliki nilai yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 12 kendaraan saja. Penurunan yang terjadi dari tahun 2021 dikarenakan izin trayek yang diberikan telah berakhir dan tidak diperpanjang. Izin trayek dikeluarkan untuk masa 5 tahun, jika sudah habis masa berlaku maka dapat diajukan kembali. Sementara itu, Izin trayek KPS merupakan izin trayek yang masa berlakunya adalah 6 bulan sampai dengan 1 tahun dan melekat pada kendaraan

3) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji Kir adalah rangkaian pengujian kelayakan bagi kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjamin keselamatan pengguna kendaraan bermotor terutama bagi angkutan umum. Peraturan uji KIR tertuang dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) secara khusus menyebutkan pada Pasal 53 ayat 1 yaitu "Uji berkala wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum dan mobil barang, bus, mobil berkereta gandengan dan berkereta tempelan yang beroperasi di jalan". Untuk lebih jelasnya jumlah uji Kir angkutan umum di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.96:

Tabel 2. 96 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Angkutan Umum	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1	Mobil penumpang umum	74	30	20,27	74	14	9,46	22	14	31,82	29	16	27,59	29	16	27,59	29	12	20,69
2	Mobil bus	1.637	2.150	65,67	1.817	1.581	43,51	1.532	2044	66,71	1.711	1.709	49,94	1841	1743	47,34	1976	1784	45,14
3	Mobil barang	5.958	7.353	61,71	6.348	4.871	38,37	4.971	7.835	78,81	5.667	4.597	40,56	6144	5217	42,46	6650	5528	41,56
4	Kereta gandengan	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
5	Kereta tempelan	-	-	-	28	63	112,50	54	110	101,85	66	93	70,45	78	135	86,54	81	164	101,23
	Jumlah	7.669	9.533	62,15	8.267	6.529	39,49	6.579	10.003	76,02	7.473	6.415	42,92	8092	7111	43,94	8736	7488	42,86

Sumber : Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Pada Awal Tahun 2024 biaya uji KIR Kendaraan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) telah ditiadakan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dimana dalam undang-undang ini untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor sudah tidak termasuk dalam kategori objek retribusi umum. Sehingga diharapkan dengan dibebaskan biaya uji kir berkala ini diharapakan pemilik kendaraan lebih patuh dalam memeriksakan kendaraan bermotor di unit pengujian kendaraan bermotor

4) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pada Tahun 2019 sampai Tahun 2024 jumlah pelabuhan ASDP berjumlah 1 (satu) unit yaitu berada di Kecamatan Meuraxa bernama Pelabuhan Ulee Lheue. Pelabuhan ini juga sebagai pelabuhan penyeberangan yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.Jumlah terminal bus adalah 3 (tiga) unit yaitu:
Terminal Penumpang Tipe A (Batoh)
Terminal Penumpang Tipe B (Lueng Bata)
Terminal Penumpang Tipe C (APK Keudah)
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 97 Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pelabuhan ASDP	1	1	1	1	1
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3
	Jumlah	4	4	3	3	4

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

5) Angkutan Darat

Jumlah angkutan darat dan penumpang menjadi data penting untuk melihat arus penumpang di Kota Banda Aceh. Jumlah angkutan darat dan penumpang di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.112 berikut ini:

Tabel 2. 98 Persentase Angkutan Darat Tahun 2019-2024

Uraian	Aceh						Kota Banda Aceh					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Angkutan darat							796	901	1.554	1.717	1.764	1832
Jumlah penumpang Angkutan Darat	12.762.542	633.082	612.980	2,964,869	602.784		1.408.808	1.529.375	1.825.977	2.985.865	1.771.360	1.918.453
Persentase (%)							0,06	0,06	0,09	0,06	0.10	0,10

Sumber :Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan persentase angkutan darat dengan jumlah penumpang dari Tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 persentase angkutan darat sebesar 0,10% . Jumlah angkutan darat dan jumlah penumpang darat pada tahun 2024 masing-masing sebesar 1.832 dan 1.918.453.

6) Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kir merupakan prasyarat yang penting dalam penyediaan armada angkutan umum. Persentase kepemilikan Kir angkutan umum dihitung berdasarkan jumlah angkutan umum yang memiliki Kir dibagi dengan jumlah angkutan umum dikali 100 persen. Persentase angkutan umum yang melakukan uji Kir di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.99 berikut ini:

Tabel 2. 99 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah angkutan umum yg memiliki KIR	4.767	7.171	10.003	6.415	7.111	7.488
2	Jumlah angkutan umum	7.669	7.797	6.579	7.473	8.092	8.736
Persentase (%)		62,16	91,97	152,04	85,84	87,88	85,71

Sumber : Bidang LLAJ dan UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.99 di atas, Persentase kepemilikan KIR angkutan umum mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2024. Pada tahun 2019 jumlah angkutan umum yang memiliki KIR sebesar 4.767, pada tahun 2021 sebesar 10.003, jumlah angkutan umum yang memiliki KIR pada tahun 2022 menurun menjadi sebesar 6.415, tahun 2023 sebesar 7.111. dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7.488.
Setiap angkutan umum wajib melakukan uji KIR sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, namun tidak semua angkutan umum di Kota Banda Aceh yang melakukan uji KIR sebanyak 2 (dua) kali, hal ini disebabkan oleh:

1. Angkutan Kota sebagian besar sudah tidak beroperasi lagi
2. Kendaraan dalam keadaan rusak/tidak jalan lagi
3. Kendaraan melakukan numpang uji pada daerah lain
4. Kendaraan yang telah di mutasi tidak mencabut berkas uji
5. Kendaraan yang beroperasi di jalan tidak melakukan pengujian tepat waktu dan perpanjangan uji bagi yang telah mati KIR nya.

Beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah:

1. Melakukan Pengawasan/razia terhadap kendaraan wajib uji
2. Menyurati kepada setiap perusahaan angkutan umum untuk melakukan pengujian kendaraan tepat waktu dan perpanjangan uji bagi yang telah mati KIR nya.
3. Mensosialisasikan persyaratan mutasi dan numpang uji.

7. Rambu-rambu lalu lintas

Rambu-rambu lalu lintas berguna untuk mengatur arus lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara. Ketersediaan rambu-rambu menjadi hal yang penting bagi warga kota dan penghuninya. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dihitung berdasarkan jumlah fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) yang sudah ada dibagi dengan jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) dikali dengan 100 persen. Tabel 2.114 berikut ini memperlihatkan persentase ketersediaan rambu-rambu di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2024:

Tabel 2. 100 Persentase Pemasangan Rambu Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pemasangan Rambu	2.324 Unit	2.424 Unit	2.527 Unit	2.261 Unit	2.345 Unit
2.	Jumlah Rambu yang seharusnya tersedia	2.360 Unit	2.360 Unit	2.540 Unit	2.590 Unit	2.590 Unit
Persentase (%)		98,5	102,7	99,5	87,30	90,54

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Dari Tabel 2. 100 di atas dapat dilihat bahwa fasilitas perlengkapan jalan Tahun 2023 telah mencapai 87,30 persen, terjadinya penurunan jumlah rambu pada tahun 2023 daripada tahun sebelumnya disebabkan banyaknya jumlah rambu yang rusak setelah dilakukan survei ke lokasi pemasangan rambu sehingga diperlukan perawatan/pemeliharaan, peremajaan dan pergantian fasilitas perlengkapan jalan secara berkala dan berkesinambungan. Adapun pada tahun 2024 jumlah pemasangan rambu mengalami peningkatan mencapai 90,54 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

8.Jumlah Orang/Barang (Penumpang) yang Terangkut Angkutan Umum

Perkembangan wilayah ditandai dengan semakin tingginya aktivitas pergerakan/mobilitas orang/barang yang terangkut angkutan umum. Adapun jumlah orang/barang (penumpang) yang terangkut angkutan umum melalui terminal di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Pada perhubungan jalur darat dapat dibedakan menjadi angkutan darat dalam provinsi (AKDP) dan angkutan darat antar provinsi (AKAP). Jumlah angkutan umum yang tersedia mencerminkan jumlah penumpang yang dimobilisasi. Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah orang yang terangkut angkutan umum oleh angkutan darat yaitu 2.964.869 orang. Dimana jumlah tersebut menurun jika dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai 15.288.280, namun nilai tersebut lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun jumlah orang cenderung menurun pada tahun 2020-2021 dibandingkan jumlah orang sebelum tahun 2019, hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sedangkan pada Kota Banda Aceh, jumlah angkutan dari tahun ke tahun meningkat dari 965 unit angkutan umum pada tahun 2019 bertambah menjadi 1.705 angkutan umum pada tahun 2023 dengan jumlah penumpang yang dipindahkan dari 704.961 penumpang pada tahun 2022 menjadi 355.931 penumpang pada 2023 dan jumlah penumpang yang Terangkut Angkutan Umum pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 962.369

9. Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal

Fasilitas transportasi serta aliran orang/ barang (penumpang) melalui dermaga/bandara/terminal menunjukkan interaksi antar wilayah yang tercermin dari keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang dan barang. Jaringan transportasi antar daerah yang memungkinkan bagi pemindahan barang dan jasa atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya merupakan indikator konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah lain. Tabel 2.100 di bawah ini menunjukkan jumlah orang/ barang (penumpang) melalui dermaga/bandara/terminal dari Tahun 2019-2024 di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh:

Tabel 2. 101 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/Terminal Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Aceh			Kota Banda Aceh		
	Jumlah Penumpang Bis	Jumlah penumpang ASDP	Total Jumlah Penumpang	Jumlah Penumpang Bis	Jumlah penumpang ASDP	Total Jumlah Penumpang
2019	1.689.953	1.103.034	2.792.987	1.829.375	859.982	2.689.357
2020	1.153.344	566.099	1.719.443	1.529.375	508.964	2.038.339
2021	1.154.013	729.669	2.257.047	1.818.915	562.589	2.381.504
2022	5.797.404	1.083.553	6.527.073	2.985.865	963.031	3.948.896
2023				1.771.360	750.631	2.521.991
2024				.918.453	4 1.788	360.241

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.101 diatas menunjukkan bahwa untuk jumlah orang melalui terminal pada tahun 2022 sebesar 5.797.404 cenderung mengalami peningkatan positif dibandingkan dengan persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2021 sebesar 1.154.013. Namun pada kondisi tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah orang melalui bandara/derma turun secara signifikan akibat pandemi Covid-19.

Sedangkan perkembangan jumlah orang/barang (penumpang) melalui dermaga/bandara/terminal di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kecuali tahun 2020 dan 2021 dimana pandemi terjadi. Penambahan jumlah penumpang terjadi pada angkutan bus dan juga ASDP tahun 2018-2019, ketika PPKM diberlakukan untuk mencegah penularan pada tahun 2020-2021 maka tingkat mobilitas penduduk juga berkurang yang terlihat dari berkurangnya jumlah penumpang angkutan umum baik di darat (bus) maupun di air (ASDP). Dan pada tahun 2022 jumlah penumpang angkutan bus dan ASDP meningkat sejumlah 3.948.896, terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 2.521.991 dan pada tahun 2024 menjadi 2.360.241.

Sampai dengan tahun 2019 Provinsi Aceh memiliki 36 terminal dan Kota Banda Aceh juga saat ini telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan yaitu sebanyak 4 unit terminal. Rincian jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang ada di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek provinsi dan kota dapat dilihat pada Tabel 2. 102 berikut:

Tabel 2. 102 Jumlah Terminal Angkutan Penumpang/Barang Kota Banda Aceh yang Telah Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	Aceh						Kota Banda Aceh					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Terminal Penumpang AKAP Tipe-A	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1

Uraian	Aceh						Kota Banda Aceh					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Terminal Penumpang AKDP Tipe-B	9	9	10	11	11	11	1	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang AKDP Tipe-C	22	22	21	20	20	20	1	1	1	1	1	1
Terminal Barang (Mobar)							1	1	1	1	1	1
Jumlah	36	36	36	36	36	36	4	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2025

Dari Tabel 2.102 diatas terlihat jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Provinsi Aceh dari Tahun 2019-2024 berjumlah 36 terminal, yang terdiri dari 5 tipe A, 9 tipe B dan 22 tipe C. Di tahun 2022 terdapat penambahan status terminal tipe B B Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sehingga jumlah terminal tipe B menjadi 11 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 20 terminal.

Adapun di Kota Banda Aceh jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 adalah berjumlah 4 (empat) terminal, yaitu Terminal Penumpang Type-A di Batoh ; Terminal AKDP Type-B L-300 Lueng Bata; Terminal Type-C APK Keudah dan Terminal Mobil Barang (Mobar) di Santan. Khusus untuk Terminal Tipe A Kota Banda Aceh, dimana mulai Tahun 2017 telah diserahkan ke Pusat yang pengelolaannya telah menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan RI, sehingga dengan sendirinya terjadi penurunan pendapatan untuk Kota Banda Aceh.

H. Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di sektor komunikasi, informatika dan statistik, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh merujuk pada indikator yang ingin dicapai yaitu pemeringkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Penilaian Indeks SPBE Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN-RB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman Menteri PAN-RB No. 3/2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penilaian tersebut diikuti oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang ada di Indonesia.

Evaluasi SPBE dilakukan setiap tahunnya yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan SPBE telah diterapkan di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan yaitu:

1. **Rintisan**

   Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc

2. **Terkendala**
   Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
3. **Terstandarisasi**
   Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.
4. **Terintegrasi dan Terukur**
   Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
5. **Optimum**
   Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Dimana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut. Untuk Domain dan aspek penilaian, serta bobot nilai dan predikat indeks SPBE dapat dilihat sebagaimana berikut:

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Gambar 2.61 Domain dan Aspek penilaian indeks SPBE

Dimana:
a. Domain adalah merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
b. Aspek merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai, dan
c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada Lokus tertentu), dan hasil penilaian Indeks SBPE

Hasil penilaian indeks SPBE Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2024 sebagai mana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 mendapatkan indeks 3,7 dengan predikat Sangat Baik, detail nilai dapat dilihat

pada gambar berikut:

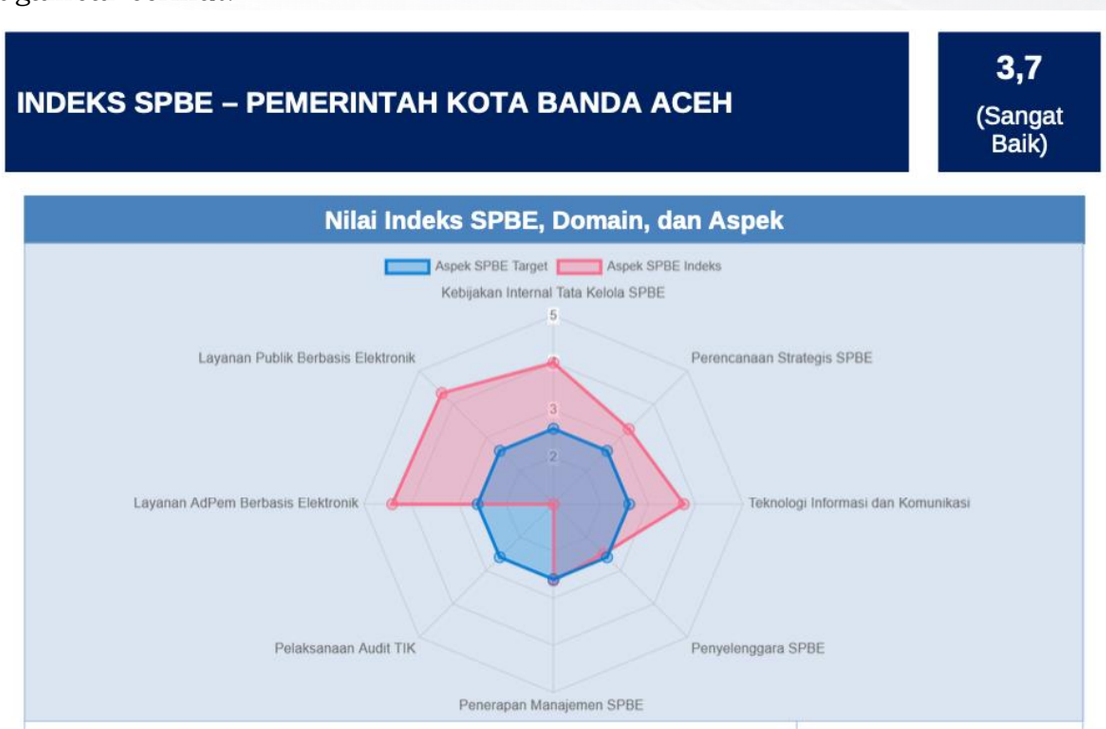

Gambar 2.62 Indeks SPBE Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2024

Berdasarkan Gambar tersebut terdapat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki pada setiap Domain, aspek dan indikatornya, yang dapat dilihat nilai terendah adalah pala penerapan manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK, serta pada perencanaan strategis SPBE. Nilai capaian indikator tersebut sejak Tahun 2019 sampai 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.115 di bawah ini:

Tabel 2. 103 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai pemeringkatan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,24 (Cukup)	2,87 (Baik)	2,62 (Baik)	3,15 (Baik)	3,54 (Sangat Baik)	3,7 (Sangat Baik)

Sumber : Diskominfotik Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.103 di atas dapat dilihat bahwa indeks SPBE Pemerintah Kota Banda Aceh mengalami peningkatan pemeringkatan yang cukup signifikan. Nilai Indeks SPBE Kota Banda Aceh pada tahun 2023 sebesar 3,54 (Sangat Baik), naik menjadi 3,70 (Sangat Baik) pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan di berbagai sektor domain dan aspek penilaian terutama pada bidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan memanfaatkan strategi yang lebih komprehensif dan matang dalam upaya peningkatan nilai pemeringkatan SPBE tersebut. Beberapa keunggulan dari pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah di aspek Kebijakan Internal dalam penerapan SPBE beserta dengan Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, aspek Perencanaan Strategis, Aspek TIK yang dimiliki dan Kualitas Penyelenggara.

Pencapaian Indeks SPBE ini selaras dengan capaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) Diskominfotik yaitu Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 yaitu sebesar 59%. Tercapainya target kinerja pada indikator sasaran Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan pada Tahun 2024 dikarenakan perbandingan dari jumlah SKPD/SKPK yang memiliki aplikasi mampu dilayani dibandingkan dengan jumlah seluruh SKPD/SKPK yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh oleh Diskominfotik. Oleh karena itu diharapkan Diskominfotik mampu untuk terus mengelola dan melayani setiap SKPD/SKPK yang memiliki aplikasi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Diskominfotik selain mengelola semua aplikasi pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu melengkapi dokumen pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Banda Aceh seperti masterplan/blue print SPBE Pemko, dokumen arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Banda Aceh, dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), aspek manajemen SPBE dan aspek Audit TIK yang dimiliki serta dokumen Proses Bisnis aplikasi-aplikasi yang digunakan pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan komponen penilaian oleh Pemerintah Pusat dilakukan terhadap setiap indikator SPBE, penetapan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE, penetapan Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dan Aplikasi Umum yang digunakan di dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD/SKPK lainnya di dalam mendukung peningkatan penilaian SPBE dengan memaksimalkan peran Tim Koordinasi SPBE Kota Banda Aceh. Tim Koordinasi SPBE ini diharapkan dapat berperan untuk merencanakan, menerapkan serta mengevaluasi pelaksanaan SPBE khususnya terkait dengan capaian dari setiap Domain, Aspek dan Indikator SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satu aspek lainnya di dalam pencapaian Cakupan Layanan E-Government adalah proses integrasi aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Diharapkan kedepannya Diskominfotik mampu untuk terus bekerja sama dengan seluruh OPD/SKPD/SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan terus bersinergi dan berkoordinasi di dalam pendataan dan survey agar jumlah aplikasi yang ada tetap terdata dengan baik sehingga proses integrasi keseluruhan aplikasi yang ada bisa dilakukan dengan baik sehingga target Persentase Cakupan Layanan E-Government dapat tercapai. Nilai capaian indikator tersebut sejak Tahun 2019 sampai 2024 dapat dilihat pada Tabel 2. 104 di bawah ini.

Tabel 2. 104 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan $\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	0	45	50	55	57	59

Berdasarkan Tabel 2. 104 di atas pada tahun 2024 jumlah SKPD yang memilliki aplikasi adalah sebanyak 13 SKPD dengan total aplikasi sebanyak 53 yang dikelompokkan menjadi 2 kategori, yakni layanan publik sebanyak 24 aplikasi dan layanan administrasi pemerintah sebanyak 29 aplikasi. Pengelompokkan kategori tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berikut secara rinci akan dibahas kedua aspek

kategori tersebut, yaitu:

a. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sebagian besar penerapan pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan di Kota Banda Aceh sudah cukup baik, yaitu dengan penerapan aplikasi Srikandi, Simpeg dan i-Ren yang memperlihatkan adanya fitur transaksional berupa mekanisme persetujuan dan validasi
b. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik
Secara umum, penerapan pada aspek Layanan Publik Pemerintahan di Kota Banda Aceh sudah terpenuhi, yakni dengan pengelolaan *whistle blowing system* (WBS) yang menggunakan aplikasi WBS dan proses perizinan yang menggunakan aplikasi sicantik dan penerapan MPP Digital, ketiganya telah memiliki fitur transaksional.

Selain program, kegiatan dan sub kegiatan yang menyangkut pelaksanaan e-government, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Banda Aceh juga melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk melaksanakan penyebaran/diseminasi informasi ke pemerintahan kepada masyarakat melalui situs daring (website) organisasi perangkat daerah (OPD) yang diwujudkan dengan indikator kinerja utama (IKU) Persentase Website OPD yang Aktif. IKU Persentase Website OPD yang Aktif di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 2. 105 di bawah ini.

Tabel 2. 105 Persentase website OPD yang aktif Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase website OPD yang aktif (%) $\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	65	70	75	80	82	84

Sumber : Diskominfotik Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan Tabel 2.105 di atas persentase OPD yang situsnya (website-nya) aktif dari tahun ke tahun menunjukkan adanya fluktuasi capaian persentase website OPD yang Aktif dari tahun 2019-2024. Tercapainya target kinerja pada Indikator Sasaran Persentase Website OPD yang Aktif dikarenakan oleh perhitungan jumlah website SKPD atau OPD yang aktif di dalam memberikan dan melakukan update berita dibandingkan dengan jumlah seluruh website SKPD yang dikelola pada lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh sudah mencapai target yang diharapkan. Bahkan di tahun 2024 realisasi capaian mencapai 100% yang berarti telah melampaui target 84% yang telah ditetapkan. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang dikelola oleh Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) dan dapat dipantau secara langsung oleh publik melalui aplikasi sinergi di alamat: sinergi.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya agar semua OPD memiliki situs/website dan mengaktifkan situs/website OPD tersebut sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui situs/ website informasi publik kepada masyarakat dapat disampaikan. Melalui situs/website OPD yang aktif dapat dinilai keseriusan pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan city branding kepada masyarakat luas, bukan hanya level kota, namun juga pastinya akan menyentuh level provinsi, nasional bahkan dunia

internasional. OPD juga mulai melirik pemanfaatan media sosial yang memiliki segmentasi pembaca/pengikut (followers) yang menyasar kaum muda secara luas.

Komitmen dalam Keterbukaan Informasi Publik ditandai dengan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui PPID Kota Banda Aceh berhasil meraih Predikat INOFORMATIF pada penilaian Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se Provinsi Aceh Tahun 2024 yang digelar oleh Komisi Informasi Aceh.

Selain itu pada tahun 2024, Media Center Kota Banda Aceh juga berhasil menduduki peringkat ke 8 untuk kategori Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagai Kontibutor Berita Daerah terbaik untuk Portal Info Publik (infopublik.id) milik Kementerian Komdigi Republik Indonesia

Kendala dan tantangan terbesar dalam mencapai target aktivasi website setiap tahunnya adalah tingkat respon keaktifan OPD dalam mengupdate website yang masih beragam, oleh karenanya Diskominfotik terus berupaya untuk mampu mencapai target salah satunya dengan cara menerbitkan secara rutin Surat Edaran Wali Kota Banda Aceh tentang Update Data dan Berita Website OPD yang didistribusikan ke seluruh OPD dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Selain itu Diskominfotik melalui Bidang PIP diupayakan untuk terus memonitor, mengelola dan berkoordinasi dengan SKPD/OPD pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga informasi publik dapat rutin diperbaharui atau diupdate dan dibagikan melalui website SKPD/OPD sehingga jumlah persentase website SKPD/OPD yang aktif pada tahun berikutnya tercapai dan diharapkan semakin naik. Selain itu koordinasi dan inisiasi serta keaktifan dari setiap SKPD/OPD di Kota Banda Aceh juga sangat diharapkan di dalam menunjang pencapaian target sasaran kinerja.

Selain melakukan diseminasi informasi kepemerintahan secara daring (online), Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik juga melaksanakan desiminasi dan pemberdayaan komponen masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat gampong atau yang lebih dikenal dengan KIM. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dimasukkan ke dalam RPD Diskominfotik Kota Banda Aceh berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Diskominfotik Kota Banda Aceh Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Capaian Indikator ini dihitung berdasarkan Jumlah KIM dibagi dengan Jumlah kecamatan yang ada pada kabupaten/kota dikali 100%. Cakupan pelaksanaan KIM di Kota Banda Aceh dapat dilihat melalui Tabel 2. 106 dibawah ini

Tabel 2. 106 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kecamatan Kota Banda Aceh, 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Diskominfotik Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2. 106 di atas menunjukkan bahwa realisasi cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat gampong di tingkat kecamatan hingga dari tahun 2019-2024 mencapai 100 persen berdasarkan formulasi target yang telah

ditetapkan. Selain itu penerapan kebijakan yang disampaikan dalam KIM perlu didukung oleh semua stakeholder. Kebutuhan pengembangan website gampong dan tenaga IT di gampong sudah selayaknya didukung oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Saran dari permasalahan yang timbul yaitu harus adanya alokasi dana untuk pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat secara tatap muka untuk menjalin kordinasi yang lebih efektif.

I. Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil. Koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Perkembangan persentase koperasi aktif ditunjukkan dalam gambar berikut:

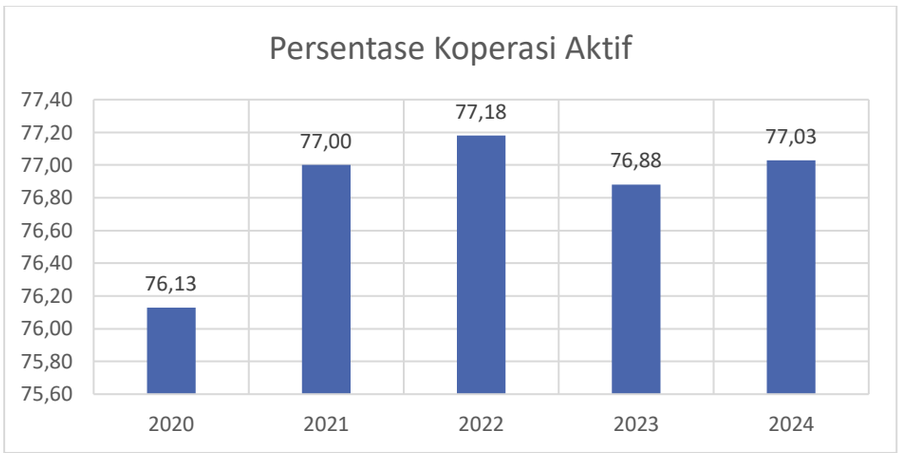

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, 2024

Gambar 2. 63 Persentase Koperasi Aktif

Gambar di atas menunjukkan bahwa persentase koperasi yang aktif di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu 76,13 % menjadi 77,03% pada 2024. Meskipun perkembangannya baik, tetapi laju pertumbuhan koperasi aktif terlihat cukup lambat bahkan menurun ditahun 2024. Persentase koperasi aktif tertinggi pada tahun 2022. Untuk mendukung keuangan syariah, Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Menurut Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh, hanya 60 unit koperasi yang berbasis syariah yang ada di Kota Banda Aceh sampai akhir tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah koperasi syariah di Banda Aceh masih terbatas sehingga perannya dalam pengembangan ekonomi syariah maupun ekonomi secara umum di Kota Banda Aceh masih belum optimal. Koperasi tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, tetapi juga memajukan sektor ekonomi dan sosial diberbagai daerah. Salah satu kontribusi koperasi dalam pemberdayaan masyarakat adalah melalui penyediaan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

J. Penanaman Modal

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)

Pada Tahun 2023 Capaian realisasi investasi meningkat sebesar 32% dibandingkan tahun 2022 sejumlah Rp.433.879.479.095. Dan jika dibandingkan dengan capaian tahun dasar target pada RPJMD 2021 terjadi peningkatan sebesar 5% (4.68%) dari jumlah realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 547.882.169.707 ,-

Pada Tahun 2023 jumlah total investor baik PMDN maupun PMA meningkat sebesar 227% dibandingkan Tahun dasar 2021 berjumlah 1078 Investor yang melaporkan realisasi investasinya. Banyak investor kelas menengah yang ikut mendongkrak pertumbuhan perekonomian di Wilayah Kota Banda Aceh, namun investor dari kelas besar masih sedikit sehingga mengakibatkan capaian realisasi investasi agak melamban, dikarenakan tidak adanya investasi yang besar yang tumbuh di Wilayah Kota Banda Aceh. Adapun jumlah investor yang berinvestasi di Provinisi Aceh dan Kota Banda Aceh pada Tahun 2019 s/d 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.106 di bawah ini:

Tabel 2.106 Jumlah Investor yang Berinvestasi Provinsi Aceh dan Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Aceh		Banda Aceh	
	PMDN	PMA	PMDN	PMA
2019	376	70	74*	13*
2020	2.241	61	798	8
2021	1.003	51	804	15
2022	786	58	640	8
2023			3474	52
2024				

Sumber : DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024
**) Data tahun 2016-2019 disesuaikan*
RANWAL RKPA, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan tabel 2.106 di atas pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) jumlah investor dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Provinsi Aceh mengalami peningkatan yaitu sebanyak 376 investor hingga 2241 pada tahun 2020, namun pada tahun 2020 mulai mengalami penurunan yakni sebanyak 1.033 investor menjadi 786 investor pada tahun 2022. Dan untuk jumlah investor yang berinvestasi di Kota Banda Aceh baik yang berasal dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun yang berasal dari PMA (Penanaman Modal Asing). Pada investasi yang berasal dari PMDN, pada tahun 2023 sebesar 3474 investor. Jumlah investor yang berasal dari PMA sebesar 52 investor.

2) Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi adalah indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan variable yang dapat merefleksikan besarnya aktifitas ekonomi saat ini dan di masa hadapan. Berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan yang kondusif bagi

investor untuk melakukan investasi, apalagi untuk wilayah Aceh yang pernah mengalami masa konflik dan bencana alam besar. Kota Banda Aceh yang juga merupakan ibu kota provinsi Aceh menjadai wajah keamanan investasi bagi Aceh secara keseluruhan, keberhasilan investasi di Kota Banda Aceh akan mencerminkan keamanan dan profitibalitas yang tinggi bagi para investor. Tabel 2.107 berikut menyajikan nilai realiasi investasi PMDN dan PMA di Kota Banda Aceh selama lima tahun sejak Tahun 2019:

Tabel 2. 107 Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Jumlah PMDN dan PMA (Rp)	Jumlah Investor
2019	185.577.364.240	380.740.108.449	566.317.472.689	87
2020	257.206.290.684	2.000.000.000	259.206.290.684	806
2021	227.945.665.191	156.381.146.842	384.326.812.033	1081
2022	375.577.559.829	58.301.919.266	433.879.479.095	648
2023	536.425.559.412	37.109.995.756	573.535.555.168	3526
2024	72.839.100.000	120.216.047.866	193.055.147.866	

Sumber : DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024

Pada Tahun 2023 Capaian realisasi investasi meningkat sebesar 32% dibandingkan tahun 2022 sejumlah Rp.433.879.479.095. Dan jika dibandingkan dengan capaian tahun dasar target pada RPJMD 2021 terjadi peningkatan sebesar 5% (4.68%) dari jumlah realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 547.882.169.707 ,-

L. Kepemudaan dan Olahraga

1) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Organisasi Kepemudaan (OKP) adalah organisasi kepemudaan yang beranggotakan para pemuda dan pemudi yang menghimpun segenap potensi anak muda sebagai wadah pembinaan calon pemimpin masa depan melalui pembentukan mental dan karakter yang berkualitas serta turut ikut serta dalam mengisi pembangunan. Organisasi kepemudaan ini berdiri bersama dengan visi dan struktur kepemimpinan, budaya dan model untuk mengaktualisasikan ide dan gagasannya. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2023 terdapat 54 OKP di Kota Banda Aceh. Berikut dibawah ini jumlah OKP yang aktif di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.108 di bawah ini:

Tabel 2.108 Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	Aceh	Kota Banda Aceh
		Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah Organisasi Pemuda
1	2019	70	53
2	2020	71	53
3	2021	66	54
4	2022	68	54

No	Uraian	Aceh	Kota Banda Aceh
		Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah Organisasi Pemuda
5	2023	68	54
6	2024		

Sumber : RANWAL RKPA, 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.108 tersebut dapat dilihat bahwa di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah organisasi kepemudaan berjumlah 68 (OKP) dan tidak mengalami kenaikan jumlah OKP pada tahun 2023. Keseluruhan organisasi kepemudaan Aceh tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Keberadaan KNPI Aceh sejatinya merupakan bentuk kewenangan pemerintah Aceh dalam merespon permasalahan aktual kepemudaan dalam kehidupan masyarakat dan untuk mempersiapkan kader-kader penerus kepemimpinan bangsa. Dan jumlah OKP yang terdaftar di Dispora Banda Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang berjumlah 53 OKP, hingga di tahun 2023 berjumlah 54 OKP.

2) Pembinaan Atlet dan Pelatih

Olahraga sebagai sarana untuk mencapai prestasi tentu harus direncanakan dan dibina dengan baik. Pembinaan olahraga adalah sistem pembibitan yang melibatkan individu atlet dalam membangun keprofesionalan diri melalui sistem yang telah ditetapkan dengan tujuan prestasi. Pada tahun 2023 Kota Banda Aceh sudah memiliki 11 cabang olah raga yang dibina secara khusus dengan para pelatih yang berlisensi. Berikut data cabang olah raga dan atlet yang dibina Kota Banda Aceh tahun 2023.

Tabel 2. 109 Data Cabang Olahraga dan Atlit Binaan Dispora Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Cabang olahraga	Jumlah atlit	Jumlah pelatih		
			Memiliki lisensi	Belum memiliki lisensi	Total
1	Atletik	11	4	1	5
2	Sepak bola	22	4	1	5
3	Bola voly	20	4	2	6
4	Bola basket	20	4	2	6
5	Pencak silat	15	4	1	5
6	Bulu tangkis	8	2	1	3
7	Tenis lapangan	8	3	-	3
8	Tenis meja	8	3	-	3
9	Karate	13	3	2	5
10	Taekwondo	13	3	2	5
11	Panahan	18	2	3	5
Total		156	36	15	51

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.109 di Kota Banda Aceh sudah memiliki 11 cabang olahraga yang dibina khusus dengan para pelatih yang berlisensi hingga tahun 2023, yang didalamnya terdapat atlet binaan berjumlah 156 atlet dengan 51 pelatih. Atlet terbanyak adalah dari cabang olah raga Voly dan Basket sebanyak 20 orang dan yang paling sedikit adalah bulutangkis, tenis lapangan dan tenis meja masing-masing hanya sebanyak 8 orang atlet.

Sedangkan saat ini di Provinsi Aceh terdapat 66 cabang olahraga yang terdaftar dan terhimpun dalam wadah KONI Aceh. Yang terdiri dari 14 cabang olahraga binaan pada tahun 2023 diantaranya yaitu: 1) Atletik; 2) Pencak Silat; 3) Karate; 4) Panahan; 5) Anggar; 6) Tarung Derajat; 7) Sepakbola; 8) Bola Voly; 9) Kempo; 10) Bulutangkis; 11) Sepak Takraw; 12) Tenis Meja; 13) Angkat Besi; dan 14) Taekwondo. Dan 14 cabor yang dibina 6 cabang olahraga binaan menyumbang medali yaitu: 1) Sepakbola; 2) Taekwondo; 3) Pencak Silat; 4) Karate; 5) Tarung Derajat; dan 6) Atletik. Meskipun demikian, terdapat cabang olahraga yang juga menyumbangkan medali meskipun bukan binaan yaitu: 1) Para- Cycling; 2) Tinju; 3) Petanque; 4) Drum Band; 5) B-Boyindo; dan 6) Fotografi. Saat ini jumlah pelatih yang mengukir prestasi di Provinsi Aceh berjumlah 15 orang. Hadirnya pelatih yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas olahraga Aceh di masa yang akan sehingga perstasi olahraga Aceh menjadi lebih baik. Hingga tahun 2023 jumlah gedung pemuda yang telah dibangun sebanyak 5 (lima) unit. Sementara lapangan olahraga 19 unit yang tersebar di seluruh kab/kota di Aceh.

3) Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Pemuda

Secara umum, Pembinaan Kepemudaan terdiri dari penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Penyadaran kepemudaan berupa perlindungan pemuda dari peyalahan narkoba dan zat adiktif lainnya, perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas, perlindungan pemuda dari penyakit menular (HIV/AIDS), perlindungan pemuda dari tindak kekerasan, serta perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme sedangkan pemberdayaan pemuda berupa partisipasi pemuda dalam pendidikan formal dan informal, tumbuh kembangnya dialog pemuda yang inkulsif, dan tumbuh kembangnya kreatitifas dan inovasi pemuda. Adapun pengembangan kepemudaan berupa tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda, tuumbuh kembangnya kepeloporan pemuda, tumbuh kembangnya kesukarelawan pemuda, tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan serta tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda.

Pembinaan organisasi kepemudaan dilaksanakan melalui pembinaan manajemen kepemimpinan, manajemen rekruitmen keanggotaan, dan manajemen kinerja organisasi melalui pelatihan bagi pemimpin, pengurus dan anggota organisasi kepemudaan (OKP) yang ada di Kota Banda Aceh. Adapun organisasi kepemudaan yang ada di Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 berjumlah 54 OKP dengan data pada Tabel 2.110 sebagai berikut:

Tabel 2. 110 Data Organisasi Kepemudaan Di Banda Aceh Tahun 2023

No	Organisasi Kepemudaan (OKP)
1	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
2	Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Ansor (PD GP Ansor)
3	Pimpinan Daerah Fatayat Nahdlatul Ulama (PD Fatayat NU)
4	Pimpinan Daerah Ikatan Putra Nahdlatul Ulama (PD IPNU)
5	Pimpinan Daerah Fatayat Nahdlatul Ulama(PD Fatayat NU)
6	Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah(PD PM)
7	Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PD NA)
8	Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PD GPA)
9	Pimpinan Daerah Ikatan Putra Putri Al Washliyah (PD IPA)

10	Pimpinan Daerah Angkatan Putri Al Washliyah (PD APA)
11	Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharan Indonesia (DPD AMPI)
12	Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Kosgoro 1957 (DPD BMK '57)
13	Dewan Pimpinan Daerah Wira Karya Indonesia (Depidar WKI)
14	Dewan Pimpinan Daerah Baladhika Karya (DPD BK)
15	Pimpinan Daerah Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PD AM-MDI)
16	Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Organisasi Kemasyarakatan syawarah Kekeluargaan Gotong Royong (DPD ORMAS GEMA MKGR)
17	Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah (DPD IPTI)
18	Dewan Pengurus Daerah Gabungan Pemuda Pembangunan Indonesia (DPD GPPI)
19	Dewan Pengurus Daerah Ikatan Putra Putri Indonesia (DPD IPPI)
20	Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Kosgoro (DPD GM Kosgoro)
21	Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Gabungan Karya Rakyat donesia (DPD GM GAKARI)
22	Dewan Pengurus Daerah Generasi Muda TRIKORA (DPD GM TRIKORA)
23	Pimpinan Daerah Srikandi Pemuda Pancasila (PD Srikandi PP)
24	Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Islam (DPD PI)
25	Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Ka'bah (PD GPK)
26	Pimpinan Daerah Generasi Muda Persaudaraan Muslimin Indonesia (PD GM PARMUSI)
27	Pimpinan Daerah Angkatan Muda Ka'bah (PD AMK)
28	Pimpinan Daerah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PD GMPI)
29	Pimpinan Daerah Generasi Muda Pembangunan (PD GMP)
30	Pimpinan Daerah Pemuda Bulan Bintang (PD PBB)
31	Dewan Pimpinan Daerah Benteng Muda Indonesia (DPD BMI)
32	Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (DPD BM PAN)
33	Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Muda Persaudaraan Pemuda Keadilan (DPD GEMA GARDA Keadilan)
34	Dewan Pengurus Daerah Gerakan Pemuda Indonesia (DPD GPI)
35	Markas Daerah Pemuda Panca Marga (MD PPM)
36	Pimpinan Daerah-I Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI (PD-I GM FKPPI)
37	Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia (DPD PPAPRI)
38	Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI)
39	Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI)
40	Pimpinan Daerah Pemuda Muslimin Indonesia (PD PMI)
41	Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Islam Indonesia (DPD AMII)
42	Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Mathla'ul Anwar (DPD GEMA MA)
43	Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (DPD AMPG)

44	Pemuda Reformasi Indonesia (PD PRI)
45	Dewan Pengurus Daerah Purna Prakarya Muda Indonesia (DPD PPMI)
46	Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Demokrat Indonesia (DPD PDI)
47	Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nasional Indonesia (DPD BPNI)
48	Dewan Pimpinan Daerah Kossi Dunia Pemuda (DPD KDP)
49	Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Demokrat (DPD BM Demokrat)
50	Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Iskandar Muda (DPD IPIM)
51	Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Cinta Bangsa (DPD IPEUTABA)
52	Dewan Pimpinan Daerah Forum Bersama Pemuda Cinta Bangsa (DPD FORBES PEUCINSA)
53	Komite Sentral Organisasi Pemuda Kongres (KSO Pemuda Kongres)
54	Persatuan Pemuda Gemilang (PPG)

Sumber: Data dari Bidang Layanan Kepemudaan Dispora Kota Banda Aceh Tahun 2024
Proses Kompilasi dari OPD

2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

1) Kunjungan Wisata

Kota Banda Aceh memiliki posisi yang sangat strategis untuk pengembangan kepariwisataan karena sebagai ibukota, Pemerintah Provinsi Aceh sangat giat mempromosikan kepariwisataan Kota Banda Aceh dan merupakan tempat penyelenggaraan event pariwisata baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Gambar 2. 64 di bawah ini menunjukkan rangkuman data statistik kepariwisataan pada Tahun 2024:

Sumber: Kota Banda Aceh dalam Angka, 2024

Gambar 2. 64 Rangkuman Data Statistik Kepariwisataan Kota Banda Aceh Tahun 2024

Berdasarkan data pada Gambar 2.64 di atas dapat dilihat bahwa jumlah hunian pada tahun 2024 adalah 420.637 meningkat dibanding tahun 2023 yaitu 382.029. Hal ini menunjukkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Banda Aceh baik wisatawan nusantara maupun mancanegara sudah mulai membaik pasca terjadinya pandemi Covid-19. Destinasi wisata yang yang dikunjungi yaitu kunjungan ke Objek Wisata di Kota Banda Aceh seperti PLTD Apung, Boat diatas Rumah, Monumen KM 0, Mesjid Baiturrahim Ulee Lheue. Pada tahun 2024 wisatawan semakin meningkat dimana pengunjung domestik berjumlah 392.501 orang dan pengunjung mancanegara berjumlah 28.136 orang. Tingginya minat wisatawan Malaysia berkunjung di Kota Banda Aceh disebabkan antara lain karena persamaan budaya antara Malaysia dan Aceh, faktor keamanan yang sudah lebih baik, banyaknya situs sejarah, tersedianya destinasi yang bernuansa islami dan kuliner yang halal.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Banda Aceh tahun 2024 didominasi oleh wisatawan dari negara tetangga Malaysia diurutan pertama, disusul Tahiland, RRC, Singapura, Jerman, Perancis, Australia, dan negara lainnya. Gambar berikut menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2024

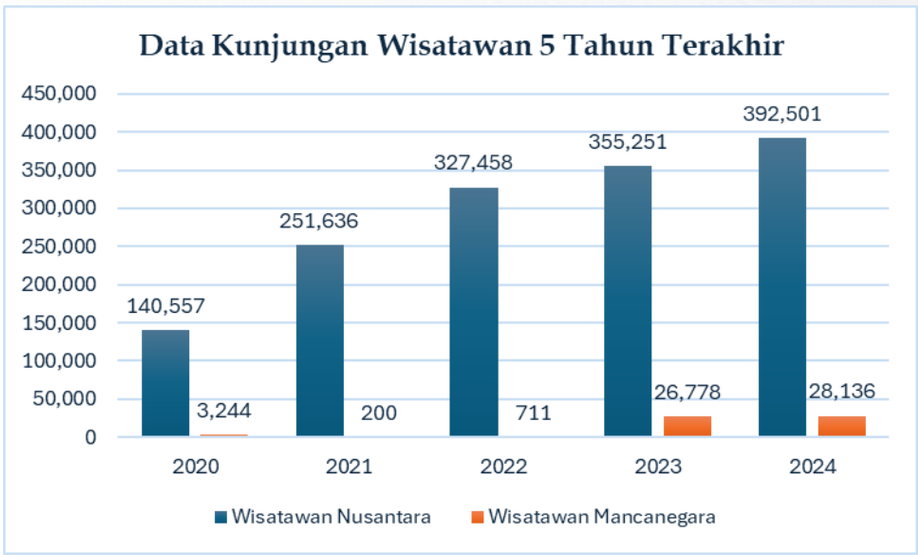

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 2. 65 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Gambar 2. 65 diatas menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara mengalami trend peningkatan hingga tahun 2024. Pencapaian ini menunjukkan kota Banda Aceh sudah menjadi salah satu kota kunjungan wisatawan yang diminati. Pencapaian ini terwujud karena adanya berbagai event-event promosi wisata yang diselenggarakan sepanjang tahun maupun diselenggarakan oleh stakeholder lainnya di Banda Aceh. Promosi wisata yang berkesinambungan dan pembenahan destinasi wisata akan lebih mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor ekonomi kreatif. Meningkatnya kunjungan wisatawan telah dapat menambah investasi disektor pariwisata, seperti pembangunan Transmart Studio, Hotel Kyriad 2, Mes Sabang menjadi Hotel Sabang, BSSD Keudah, dan Hotel Trans Kita.

Pada tahun 2020, jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara mengalami penurunan yang signifikan masing-masing sebesar 140.557 orang dan 3.244 orang. Penurunan wisatawan tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19. Pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara mengalami penurunan drastis. Meskipun kondisi pandemi Covid-19 belum reda di Kota Banda Aceh, namun kunjungan wisatawan nusantara tercatat meranjak naik kembali pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, sementara di tahun 2022 angka kunjungan wisatawan jauh lebih meningkat dari pada tahun 2021, dan pada tahun 2023 angka kunjungan wisatawan juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2022.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke kota Banda Aceh, maka pemerintah kota terus memaksimalkan dan meningkatkan infrastruktur dan pelayanan kepariwisataan melalui segala aspek. Kerja sama lintas sektoral telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan stakeholder lainnya untuk melakukan sinergisitas kegiatan pembangunan yang dapat mendukung perkembangan kepariwisataan di kota Banda Aceh. Dinas Pariwisata juga melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan pengembangan pariwisata. Pengembangan ekonomi kreatif ini akan mendukung berkembangnya UMKM, pegiat seni, pelaku usaha kecil, pengusaha kuliner, sanggar dan komunitas, perfileman dan musik, percetakan, dan pengrajin tradisional. Tabel dibawah ini

menunjukkan jenis dan jumlah unit usaha ekonomi kreatif di Banda Aceh Tahun 2024.

Tabel 2.111 Jenis dan Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif Kota Banda Aceh Tahun 2024

Jenis Ekonomi Kreatif	Jumlah Unit Usaha
Kuliner	2.105
Fashion	197
Kriya	140
Seni Pertunjukan	77
Seni Rupa	8
Seni Musik	17
Televisi dan Radio	0
Aplikasi dan Game	25
Desain Komunikasi Visual	6
Periklanan	10
Penerbitan dan Percetakan	63
Desain Produk	11
Film, Animasi dan Video	9
Fotografi	10
Arsitektur	0
Desain Interior	1
Pengembang Permainan	17
Total Unit Usaha	2.696

Sumber: Dinas Pariwisata Banda Aceh, 2025
Catatan: Tahun 2020 tidak dilakukan pendataan Jenis dan Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif Kota Banda Aceh

Tabel tersebut menunjukkan pada tahun 2024 terdapat 17 jenis ekonomi kreatif yang berkembang di Kota Banda Aceh dengan jumlah unit usaha berjumlah 2.696. Kuliner, Fashion, Kriya menempati jumlah unit usaha terbesar, masing-masing 2.105, 197 dan 140 unit usaha, sedangkan jumlah unit usaha terkecil adalah Televisi & Radio, Arsitektur, dan Desain Interior. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan kegiatan pendataan jenis dan jumlah usaha ekonomi kreatif disebabkan pandemi Covid-19.

B. Peternakan

Populasi peternakan di Kota Banda Aceh banyak berada di Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Lueng Bata dan Kecamatan Syiah Kuala. Pengembangan peternakan di Kota Banda Aceh masih bersifat semi tradisional, sedangkan lahan peternak di Kota Banda Aceh semakin menurun karena telah terjadi konversi lahan atau telah diperuntukkan untuk pembangunan lain. Perkembangan jumlah populasi ternak di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.112 di bawah ini:

Tabel 2.112 Populasi Ternak Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	Aceh			Kota Banda Aceh		
		Sapi/Kerbau	Kambing /Domba	Unggas	Sapi/Kerbau	Kambing /Domba	Unggas
1	**2020**	435.376	634.759	4.977.749	501,86	61,21	1.711,52
2	**2021**	455.177	649.962	4.275.940	282,65	23,40	1.819,04
3	**2022**	481.605	531.126	4.361.460	324,56	14,74	1,329,50

No	Uraian	Aceh			Kota Banda Aceh		
		Sapi/Kerbau	Kambing /Domba	Unggas	Sapi/Kerbau	Kambing /Domba	Unggas
4	**2023**				1.064	1.714	14.921
5	**2024**				1.175	2.051	14.802

Sumber : Kota Banda Aceh Daam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.112 diatas, menunjukkan bahwa jumlah populasi ternak yang ada di Provinsi Aceh maupun Kota Banda Aceh dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami penurunan. Berikut dibawah ini permasalahan yang sering terjadi dalam perkembangan populasi hewan ternak.

- Permasalahan
  Kita ketahui bahwa Kota Banda Aceh bukan kawasan produsen ternak, lahan-lahan di Kota Banda Aceh sudah berubah fungsi sehingga lahan semakin lama semakin berkurang dan apabila populasi ternak di Kota Banda Aceh semakin meningkat maka akan terjadi pencemaran lingkungan dan juga konflik sosial.
- Tingginya harga daging
  Masalah tingginya harga daging bukan terjadi di Kota Banda Aceh saja akan tetapi telah meluas bahkan seluruh Indonesia. Salah satu tingginya harga daging karena permintaan sangat meningkat apalagi di Kota Banda Aceh pada hari-hari besar keagamaan. Lebih lanjut pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya untuk membangun destinasi makanan halal untuk menjamin ketenangan masyarakat Kota Banda Aceh. Dan kendala yang dihadapi saat ini belum tersedianya RPH dan RPU yang representatif di Kota Banda Aceh yang menyebabkan meningkatnya pencemaran lingkungan. Dalam hal ini pemerintah perlu membangun Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang presentatif sesuai ketentuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di Kota Banda Aceh menuju destinasi makanan yang ASUH.

Sedangkan terkait jumlah produksi daging di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2020-2024, terlihat perubahan, seperti ditunjukkan Tabel 2.113 di bawah ini.

Tabel 2.113 Jumlah Produksi Daging Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	Aceh			Kota Banda Aceh		
		Sapi/Kerbau	Kambing /Domba	Unggas	Sapi/Kerbau	Kambing /Domba	Unggas
1	2019				668,779	53.216	1.639.529
2	2020	12.927.761	1.946.250	10.436.548	1,021.00	59.100	1.572.00
3	2021	12.943.976	1.984.425	8.965.106	2.278	1.377	716.842
4	2022	12.014.962	2.046.425	9.144.408	293.712	10.368	1.58
5	2023	15.644.467	2.120.525	8.693.708	249.377	15.950	1.228
6	2024						

Sumber : DP2KP Kota Banda Aceh, 2024
** Data per oktober 2022*
Proses Kompilasi dari OPD

Dari Tabel 2.113 di atas bisa dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2019-2023 terjadi fluktuasi produksi daging di Provinsi Aceh untuk ketiga

jenis ternak dengan produksi terbesar berasal dari unggas dan produksi daging sapi/kerbau dan terendah berasal dari kambing/domba. Sedangkan di Kota Banda Aceh dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2019-2023 juga terjadi fluktuasi produksi daging untuk ketiga jenis ternak dengan produksi terbesar berasal dari unggas dan produksi daging sapi/kerbau dan terendah berasal dari kambing/domba. Untuk kambing/domba, produksi dagingnya paling fluktuatif dibanding ternak lainnya. Sedangkan untuk unggas, selama Tahun 2019 sampai Tahun 2022 terus mengalami peningkatan produksi, sedangkan pada tahun 2022 jumlah produksi daging di Kota Banda Aceh mengalami penurunan. Secara umum, jumlah produksi daging dari ketiga jenis golongan hewan tersebut meningkat setiap tahunnya.

Pengembangan peternakan dalam hal budidaya ternak di Kota Banda Aceh sangat tergantung pada ketersediaan lahan, sedangkan lahan makin lama makin berkurang akibat alih fungsi lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung dan lainnya.

Populasi ternak di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun juga semakin berkurang, hal ini bisa dilihat dari tabel data populasi ternak, khususnya sapi yang agak banyak di Kecamatan Ulee Kareng, Lueng Bata dan Banda Raya dengan sistem pemeliharaan bersifat semi tradisional dan merupakan usaha sampingan untuk pemeliharaan ternak.

c. Perdagangan

Pasar-pasar di kota Banda Aceh masih berfungsi dengan sangat baik. Namun, perkembangan zaman dan pembangunan ekonomi menuntut perubahan terutama dari sisi tata ruang dan keindahan kota. Dengan sebab itu maka beberapa lokasi pasar perlu dipindahkan atau diremajakan sehingga menimbulkan beberapa pasar yang tertunda untuk berfungsi dengan baik. Berikut kondisi pasar di Kota Banda Aceh yang sudah berfungsi dengan baik dan belum. Untuk lebih jelasnya, kondisi pasar di kota Banda Aceh dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.114 Kondisi Pasar Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Nama Pasar	Pasar yang sudah berfungsi optimal					Pasar yang belum berfungsi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasar Aceh	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
2	Pasar Gp. Baru	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
3	Pasar Seutui	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
4	Pasar Peuniti	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
5	Pasar Kartini	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pasar Ikan	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pasar Daging	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pasar Bumbu	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pasar Unggas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pasar Nasabe	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Nama Pasar	Pasar yang sudah berfungsi optimal					Pasar yang belum berfungsi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
11	Pasar Rex	V	-	-	-	-	-	V	V	-	-
12	Pasar Ulee Kareng/ Lamgapang	-	-	-	-	-	V	V	V	V	-
13	Pasar Newtown	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V
14	Pasar Pusat Kuliner dan Souvenir	-	-	-	-	-	V	V	V	-	-
15	Pasar Kuliner Ulee Lheue	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V
16	Pasar Al-Mahirah Lamdingin	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
17	Pasar Rakyat - Batoh	V	-	-	-	-		V	V	V	V
18	Pasar Rakyat Ulee Lheu				-	-		V	V	-	-
19	Pasar Rakyat Lamgugob				-	-					V
Total		**14**	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**7**	**7**	**3**	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, 2025

Tabel 2. 114 tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 ada 7 pasar yang belum berfungsi secara optimal yaitu Pasar Rex, Pasar Ulee Kareng/ Lamgapang, Pasar Newtown, Pasar Pusat Kuliner dan Souvenir, Pasar Kuliner Ulee Lhee, Pasar Rakyat-Batoh dan Pasar Rakyat Ulee Lheu. Pasar Kuliner Ulee Lheue yang dibangun dengan sumber dana APBN, pada Tahun 2019-2021 kondisi sudah kosong (tidak berfungsi).

Pasar Newton yang dibangun dengan dana bantuan dari Dana Otsus dan hibah Pertamina, terdiri dari 2 bangunan gedung. Pada Tahun 2018 Gedung A difungsikan sebagai tempat wisata kuliner dan gedung B khusus lantai 2 sudah dimanfaatkan menjadi kantor PDAM Kota Banda Aceh. Sedangkan Tahun 2019-2021 gedung ini sudah kosong. Pasar pusat kuliner dan souvenir di Pango yang dibangun atas bantuan dana Otsus pada Tahun 2018 sudah dimanfaatkan menjadi wisata kuliner dan souvenir, sedangkan pada tahun 2019-2021 pasar ini sudah kosong. Pasar Aceh berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, bukan sebagai pasar tradisional.

Berdasarkan SK Walikota Banda Aceh no. 474 tahun 2023 tentang Penetapan Pasar Rakyat dalam wilayah Kota Banda Aceh yang dikelola oleh Pemerintah Kota banda Aceh melalui UPTD Pasar Kota Banda Aceh pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh terdapat 8 pasar di Kota Banda Aceh yaitu: Pasar Atjeh, Pasar Gampong Baru, Pasar Seutui, Pasar Peuniti, Pasar Al Mahirah Lamdingin, Pasar Rex Penayong, Pasar Rakyat Ulee Lheue, Pasar Rakyat Lamgugop, Pasar Rex sudah disewakan ke pihak ketiga difungsikan sebagai pusat kuliner, Pasar Newton belum berfungsi secara optimal. Pasar Kuliner dan Souvenir Pango sudah dijadikan café Paopia Garden. Pasar Rakyat Batoh sebagian kiosnya sudah dimanfaatkan, sebagian lagi belum termanfaatkan. Pasar rakyat Ulhee lheu dikelola oleh pihak ketiga (Desiana) sebagai pusat permainan anak.

D.Perindustrian

1) Jumlah IKM yang Mendapatkan Bantuan Perbankan

Jumlah unit usaha di Kota Banda Aceh terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Banda Aceh telah berkembangan dengan sangat baik. Selain itu kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sebagai pusat kota jasa di Provinsi Aceh yang tidak mempunyai lahan pertanian dan perkebunan, Kota Banda Aceh lebih berfokus kepada industri yang mengandalkan ide-ide kreatif dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Perkembangan IKM dari tahun 2019 hingga 2023 di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.115 di bawah ini:

Tabel 2.115 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2019-2024

No	Sektor	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sektor Pangan	835	849	867	869	889	
2	Sektor Sandang	689	694	699	704	704	
3	Sektor Kimia	329	329	330	336	337	
4	Sektor Logam	213	228	228	230	233	
5	Sektor Kerajinan Umum	248	248	250	256	253	
6	Sektor Jasa Lainnya	246	246	246	251	256	
	Jumlah	**2.560**	**2.594**	**2.620**	**2.646**	**2.672**	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Dari Tabel 2.115 di atas terlihat bahwa industri Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh didominasi oleh sektor pangan pada peringkat pertama kemudian diikuti oleh sektor sandang dan kimia. Pada tahun 2023 ini, jumlah IKM sektor pangan sebesar 889 IKM, sektor sandang sebanyak 704 dan sektor kimia sebesar 337. Ketiga sektor ini merupakan lahan utama perkembangan industri di Kota Banda Aceh sejak 2019 sampai dengan 2023.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan IKM adalah persaingan usaha, pemasaran, modal, situasi ekonomi dan situasi politik. Peranan dan kebijakan pemerintah juga ikut mempengaruhi perkembangan IKM di Kota Banda Aceh karena kebijakan pemerintah merupakan penggerak jalannya IKM. Pemerintah serta lembaga terkait diharapkan bekerjasama dan menjalankan program-program pembangunan khususnya terkait dengan pengembangan IKM.

Industri Kecil Menengah memegang peranan penting dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi Kota Banda Aceh terutama dalam penampungan tenaga kerja, dimana sektor Industri merupakan salah satu penggerak peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Seiring dengan bertambahnya jumlah IKM dari tahun ke tahun juga menambah penyerapan tenaga kerja pada setiap unit usaha industri. Perkembangan jumlah dan nilai IKM di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.131 dibawah ini.

Tabel 2. 116 Perkembangan Industri Kecil dan Nilai Investasi Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	Aceh						Kota Banda Aceh					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Unit Usaha	38.827	41.672	46.286				2.560	2.594	2.620	2.646	2.672	
Tenaga Kerja (Org)	108.225	111.216	126.378				8.272	8.373	8.434	8.460	8.528	
Nilai Investasi (Rp)	1.284.418.039	4.316.270.654	1.649.196.388				175.066.033.000	176.696.533.000	189.240.055.000	190.870.555.000	185.275.055.000	
Nilai Produksi (Rp)	10.751.674.843	17.992.842.392	11.757.557.251				155.691.240.000	158.009.768.000	162.349.118.000	166.598.468.000	166.113.368.000	
Nilai Tambah	7.899.307.767	7.900.555.231	8.431.718.749				112.022.700.000	113.478.292.000	116.348.950.000	119.219.608.000	117.916.250.000	

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2024, Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.116 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Aceh tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Jumlah industri kecil menengah (IKM) pada tahun 2019 sebesar 32.156 unit, jumlah tenaga kerja sebanyak 98.778 orang, dengan nilai investasi sebesar 4.440.271.128 rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah IKM sebesar 46.286 unit dan tenaga kerja sebanyak 126.378 orang mengalami peningkatan. Sedangkan untuk nilai investasi tahun 2021 sebesar 1.649.196.388 rupiah.

Adapun di Kota Banda Aceh dalam peningkatan jumlah IKM dan nilai investasi dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 diikuti dengan peningkatan nilai tambah investasi pada periode yang sama. Nilai tambah investasi pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp. 117.916.250.000 dari keadaan Tahun 2022 yang berjumlah Rp. 116.219.608.000.

2) Jumlah Produk yang Menunjang Program *One Village One Product* (OVOP)

Kota Banda Aceh memiliki produk unggulan daerah sebagai gambaran kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik dan /atau menembus pasar ekspor. Salah satu untuk pengembangan produk unggulan daerah pendekatannya adalah melalui penetapan produk One Village One Product (OVOP). Hal ini sesuai dengan langkah kebijakan yang diambil Kementerian Perindustrian dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product) di Sentra.

Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Banda Aceh secara konsisten dan fokus dalam pembinaan produk OVOP dengan melakukan kerjasama dengan pihak Akademisi dari Universitas Syiah Kuala melalui Pusat Ekonomi Kreatif Unsyiah. Tahap awal dengan melakukan survei produk unggulan ke 90 (sembilan puluh) gampong di Kota Banda Aceh. Dari hasil survei, didapatkan 435 produk unggulan Kota Banda Aceh. Namun demikian, tidak semua produk/komoditi tersebut dapat dikategorikan sebagai produk OVOP. Untuk dapat disebut sebagai produk OVOP, suatu produk harus memenuhi kriteria sebagai produk OVOP seperti yang telah ditetapkan pada petunjuk teknis OVOP pada Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/2007. Seleksi dilakukan untuk menjaring produk-produk IKM di Kota Banda Aceh yang akan dikembangkan menjadi produk OVOP. Persyaratan produk yang akan diseleksi mencakup batasan produk, produsen, jenis produk, dan jumlah produk. Tabel 2.117 menjelaskan cakupan jenis produk IKM yang diseleksi sebagai produk OVOP Kota Banda Aceh:

Tabel 2.117 Cakupan jenis produk IKM yang akan diseleksi sebagai produk OVOP Kota Banda Aceh sesuai dengan petunjuk teknis OVOP pada Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/2007 : (Tahun 2022)

No	Nama Produk	Nama Gampong
1	Makanan ringan	Gp.Lampulo, Gp.Lambung, Gp.Lhong cut
2	Minuman sari buah dan sirup buah	Gp.Lambaro skep, Gp.Lamdingin, Gp.Pango raya, Gp.Lamteh Gp.Ulee kareng
3	Kain tenun	Gp.Lamgugop, Gp.Lamteumen
4	Batik	Gp.Lueng Bata
5	Kerajinan anyaman	Gp.Neusu, Gp.Pangoe raya, Gp.Lamteumen
6	Kerajinan gerabah	Gp.Penjeurat

Sumber : Dinas tenaga kerja, 2023
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.117 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 6 golongan produk yang dapat dijadikan atau diseleksi sebagai produk OVOP yang tersebar di 15 gampong yang ada di Kota Banda Aceh. Pada Tahun 2023 IKM batik yang di lamboro skep tidak beroperasional lagi, dan IKM batik sekarang ada di Lueng Bata yang bernama IKM Hi Batik.

C. Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Kota Banda Aceh merupakan sentra perikanan terbesar pendaratan ikan yang terdapat di Provinsi Aceh. Produksi perikanan di Kota Banda Aceh terdiri dari

perikanan tangkap, perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan. Produksi perikanan Provinisi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.118 dibawah ini:

Tabel 2.118 Produksi Ikan di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 (Dalam Ton)

Tahun	Aceh	Kota Banda Aceh
	Produksi Ikan	Produksi Ikan
2020	307.359	28.499,33
2021	239.934	18.094,89
2022		23.548.00
2023		28.106,65
2024		29.728,8

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, DP2KP Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.118 diatas, menunjukkan bahwa produksi ikan di Provinsi Aceh dari tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan. Jumlah produksi ikan di tahun 2020 sebesar 307.359 ton, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 239.934 ton. Sedangkan di Kota Banda Aceh produksi ikan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi sempat mengalami penurunan. Produksi ikan terendah pada tahun 2021 yaitu 18.094,89 ton. Kenaikan tertinggi pada atahu 2024 yaitu 29.728,8 ton

Produksi perikanan budidaya dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.66 dibawah ini:

Sumber: DP2KP Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2.66 Produksi Ikan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 (dalam Ton)

Untuk perikanan budidaya, seperti terlihat pada Gambar 2.66 produksi perikanan budidaya di Kota Banda Aceh kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena sejumlah lahan yang ada di Kota Banda Aceh

belum direhab pasca tsunami dan berkurangnya daya dukung lingkungan (kualitas air dan tanah) untuk perikanan tambak.

Untuk perikanan budidaya di Kota Banda Aceh tahun 2024 turun drastis mencapai angka 805,3 ton, hal ini disebabkan karena daya dukung lingkungan (kualitas air dan tanah) masih belum stabil pasca tsunami meskipun telah dilakukan rehabilitasi.

2.1.3.5 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Pengawasan

Penyelesaian Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari Pengawas Eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Inspektorat Aceh, maupun Pengawas internal (Inspektorat Kota Banda Aceh) sangat tergantung pada komitmen SKPK dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan. Penjelasan lebih lanjut terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh dijelaskan pada Tabel 2.119berikut ini:

Tabel 2.119 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh	6340	6827	7045	7479	774
2	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh yang ditindak lanjuti	5836	6027	6324	6644	6821
3	Persentase Tindak Lanjut (%)	92,05	88,28	89,77	88,84	87,74

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan Tabel 2.119 di atas, jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang ditindaklanjuti meningkat dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan tertinggi adalah pada Tahun 2020 sebesar 92,05 persen dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan. Persentase tindak lanjut terendah terjadi pada Tahun 2024 yaitu sebesar 87,74 persen dari 6827 rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti. Di tahun 2024 terdapat sedikit penurunan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat dikarenakan rekomendasi-rekomendasi lama yang sulit ditindaklanjuti.

Selain Inspektorat Kota Banda Aceh, pengawasan juga dilakukan oleh BPK-RI (Badan Pengawas Keuangan). Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan tindaklanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.120 berikut:

Tabel 2.120 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan BPK	885	923	983	1054	1140
2	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan BPK yang ditindaklanjuti	755	785	857	966	1062
3	Persentase Tindak Lanjut (%)	85,31	85,05	87,18	91,65	93,15

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan Tabel 2.120 di atas, Tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang telah diselesaikan secara umum sudah mencapai 93,15 persen pada tahun 2024, hal ini didorong oleh komitmen Pimpinan SKPK dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi tersebut.

B. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Kapasitas Aparatur Pemerintah

Peningkatan kapasitas aparat pemerintah merupakan salah satu upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dilakukan utamanya melalui peningkatan pendidikan baik secara formal ataupun kegiatan pendidikan lainnya yang berhubungan dengan kapasitas struktural-fungsional. Bentuk dukungan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk PNS yang mengikuti pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel 2. 121.

Tabel 2. 121 Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan formal di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

Tahun	Izin Belajar	Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan	Izin Belajar Politeknik	Tugas Belajar	Total
2020	70	14	84	33	201
2021	61	25	74	21	181
2022	22	6	74	21	123
2023	-	31	-	101	132
2024	-	17	-	84	101

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

Peningkatan kapasitas pegawai menunjukkan upaya berkelanjutan dalam mendukung pendidikan dan pengembangan profesional pegawai Pemerintah Kota Banda Aceh. Pada tahun 2020 total pegawai yang mengikuti pendidikan formal sebesar 201 pegawai, dengan izin belajar meningkat menjadi 70, dan surat keterangan menyelesaikan pendidikan sebesar 14. Izin belajar politeknik di angka 84, sedangkan tugas belajar sedikit meningkat menjadi 33. Faktor-faktor seperti kebijakan internal, perubahan anggaran, atau dampak pandemi dapat mempengaruhi capaian indikator tersebut pada periode ini . Pada tahun 2021, jumlah total pegawai yang mendapatkan dukungan pendidikan kembali menurun menjadi 181, dengan izin belajar menurun menjadi 61, surat keterangan menyelesaikan pendidikan naik menjadi 25, izin belajar politeknik turun menjadi 74, dan tugas belajar menurun signifikan menjadi 21. Pada tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat PNS di Kota Banda Aceh yang mendapatkan izin belajar dan izin belajar politeknik.

Namun, penurunan berturut-turut ini menunjukkan perlunya evaluasi program peningkatan kapasitas pegawai untuk memastikan bahwa dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pegawai. Upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif dan efisien.

2. Pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural

Bentuk pendidikan yang juga diselesaikan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh adalah pendidikan dan pelatihan struktural. Berikut jumlah aparatur yang dikirimkan selama periode tahun 2020 – 2024;

Tabel 2.122 Pejabat Struktural yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

Tahun	Jumlah Total Jabatan	Jumlah Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Diklat Struktural	Target (%)	Realisasi (%)
2020	655	356	54	54,35
2021	642	349	60	54,36
2022	376	143	40	38,03
2023	367	136	40	37,06
2024	387	161	40	41,6

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

Pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan dalam jumlah pejabat yang mengikuti diklat struktural dan realisasi target. Pada tahun 2020, hanya 356 pejabat dari 655 jabatan yang mengikuti diklat, dengan target sebesar 54% dan realisasi 54,35%. Pada tahun 2021, jumlah tersebut sedikit menurun menjadi 349 pejabat dari 642 jabatan, dengan target 60% dan realisasi 54,36%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebijakan anggaran, pandemi COVID-19 pada periode ini, atau perubahan prioritas. Namun demikian, upaya-upaya untuk pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan Kota Banda Aceh harus terus dilakukan agar Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Pada tahun 2022 dan 2023 target pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural turun dari tahun sebelumnya karena terjadi pengurangan jumlah pejabat struktural sebanyak 270 orang pejabat pengawas beralih menjadi pejabat fungsional, imbas dari kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Pada tahun 2024, realisasi yang tercapai adalah 41,6%, berhasil melampaui target yang ditetapkan, karena pada tahun 2024, Pemerintah Kota Banda Aceh mengirimkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 20 orang dan Pelatihan Kepemimpinan nasional Tk.II sebanyak 5 orang ke Puslatbang KHAN LAN RI, setelah 5 Tahun sebelumnya tidak ada penyelenggaraan diklat struktural.

3. Standar Kompetensi Administrator dan Pengawas

Berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan selain untuk meningkatkan kemampuan pribadi aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka peningkatan pelayanan publik, juga merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah kota, misalnya administrator dan pengawas. Fungsi administrator dan pengawas ini harus diakui secara nasional sebagai bentuk perwujudan standarisasi pelayanan publik di Indonesia. Sampai saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh terus meningkatkan jumlah administrator dan pengawas sesuai dengan kebutuhan (Tabel 2. 96).

Tabel 2. 123 Jumlah Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi

Tahun	Jumlah Persentase Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi *(Assessment)*	Jumlah Total Administrator dan pengawas	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2019	95	628	15	15,13	100,08
2020	118	589	23	20,03	87,08
2021	130	607	23	21,42	93,12
2022	-	339	-	-	-
2023	-	328	-	-	-
2024	-	331	-	-	-

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

Kondisi pemenuhan standar kompetensi bagi administrator dan pengawas di Kota Banda Aceh menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, sebanyak 95 dari total 628 administrator dan pengawas telah memenuhi standar kompetensi melalui assessment, mencapai target 15% dengan realisasi sebesar 15,13%. Capaian kinerja mencapai 100,08%, menunjukkan bahwa target yang ditetapkan berhasil dicapai sepenuhnya. Hal ini mengindikasikan komitmen yang kuat dari pemerintah kota dalam memastikan bahwa para administrator dan pengawas memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pada tahun 2020, jumlah administrator dan pengawas yang memenuhi standar kompetensi meningkat menjadi 118 dari total 589, dengan target sebesar 23% dan realisasi 20,03%. Meskipun ada peningkatan dalam jumlah dan persentase realisasi, capaian kinerja sedikit menurun menjadi 87,08%, menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan, target yang ditetapkan tidak sepenuhnya tercapai. Pada tahun 2021, jumlah tersebut terus meningkat menjadi 130 dari total 607, dengan target 23% dan realisasi 21,42%, menghasilkan capaian kinerja sebesar 93,12%. Ini menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dalam upaya mencapai target kompetensi, meskipun masih belum mencapai target penuh. Data untuk tahun 2022 dan 2023 belum tersedia, sehingga tren lebih lanjut perlu diamati untuk membuat evaluasi yang lebih komprehensif dan perencanaan strategis ke depan.

C. Keuangan

Dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Kota Banda Aceh memperoleh opini wajar tanpa pengecualian terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK. Opini WTP diberikan oleh BPK ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dengan mempertimbangkan empat hal. Pertama adalah kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua, yakni kecukupan pengungkapan (full disclosure). Ketiga,

adalah kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan. Serta keempat, adalah efektivitas sistem pengendalian internal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion (skala 4)***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion (Skala 3)***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion (Skala 2)***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Skala 1)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Pemeriksaan laporan keuangan merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa rencana kerja dan anggaran pemerintah disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Prestasi kali ini adalah keenam belas kalinya Pemerintah Kota Banda Aceh meraih WTP secara berturut-turut.

Strategi percepatan tindak lanjut rekomendasi, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian penting dalam rangkaian proses pelaksanaan pemeriksaan. BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga dan pihak yang bertanggung jawab. Tujuan pemantauan tindak lanjut ini adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu lembaga perwakilan dan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banda Aceh tahun 2023 mendapat Opini WTP dari BPK-RI dengan tanpa Penekanan Suatu Hal (PSH). Sedangkan pada LKPD Tahun 2021 dan 2022 Opini WTP yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terdapat Penekanan Suatu Hal (PSH). Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI. Dan di harapkan untuk selanjutnya Pemerintah Kota Banda Aceh masih tetap dapat mempertahankan Opini WTP dari BPK-RI.

Tabel 2.124 Opini BPK Tahun 2019 – 2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OPINI	WTP (LKPD 2018)	WTP (LKPD 2019)	WTP (LKPD 2020)	WTP (LKPD 2021)	WTP (LKPD 2022)	WTP (LKPD 2023)

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2025

Tabel 2.125 Persentase SiLPA Terhadap APBD

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase SiLPA Terhadap APBK	2,22%	0,90%	1,45%	0,74%	2,17%	1,04%

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2025

Rasio SiLPA Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 terhadap total belanja mengalami penurunan bila dibandingkan Rasio SiLPA tahun sebelumnya sebesar 1,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah telah optimal dilakukan.

Tabel 2. 126 Persentase Belanja Pendidikan

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase belanja pendidikan (20%)	20,55%	20,27%	21,15%	20,72%	23,73%	21,28%

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan Peraturan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diterbitkan setiap tahunnya bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Dari tabel diatas Pemerintah Kota Banda Aceh telah secara konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dan pada tahun 2024 mencapai 21,28%.

Tabel 2. 127 Persentase Belanja Kesehatan

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase belanja kesehatan (10%)	18,77%	15,96%	17,93%	20,04%	21,18%	29,46%

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan Peraturan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diterbitkan setiap tahunnya dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD diluar gaji. Pada tahun 2024, belanja bidang kesehatan tidak lagi menjadi bagian dari Anggaran Mandatory Spending. Namun Pemerintah Kota Banda Aceh tetap mengalokasikan belanja untuk bidang kesehatan pada APBK Pemko Banda Aceh sebesar 29,46% meningkat 8,28% dari tahun 2023. Peningkatan yang terjadi pada kurun waktu tahun 2019-2024 disebabkan oleh adanya penambahan pendapatan pada BLUD RSU Meuraxa yang diiringi belanja pada BLUD tersebut juga menjadi meningkat.

Tabel 2. 128 Persentase Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	9,03%	6,99%	6,82%	3,31%	1,56%	0,71%

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2025

Sesuai dengan peraturan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Namun Pemerintah Kota Banda Aceh dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 belum dapat memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan dari hasil analisis untuk realisasi dari pendapatan retribusi daerah masih sangat rendah.

Tabel 2. 129 Penetapan APBD Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Penetapan APBD	Tepat Waktu 27 Des 2019	Tepat Waktu 30 Des 2020	Tepat Waktu 28 Des 2021	Tepat Waktu 30 Des 2022	Tepat Waktu 28 Des 2023

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2024

Penetapan APBK yang tepat waktu mempunyai dampak terhadap kelancaran realisasi anggaran pada tahun tersebut. Oleh sebab itu, ketepatan waktu penetapan APBD menjadi hal penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Kota Banda Aceh setiap tahunnya dari 2019 - 2024 selalu berhasil untuk menetapkan APBK tepat waktu, hal ini menunjukkan sinkronisasi dan harmonisasi antara eksekutif dan yudikatif dalam proses perencanaan sampai dengan penetapan APBK.

2.1.3.6 Fokus Otonomi Daerah

A. Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

1) LSM, Ormas dan OKP Terdaftar

Badan lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat luas untuk menyebut organisasi yang bergerak di bidang sosial (tidak berorientasi profit) dan secara institusi tidak terikat dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) bagi LSM sejak Tahun 2009 hingga Tahun 2017.

Pada Tahun 2018, pengurusan SKT dilakukan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, pendaftaran dan verifikasi tetap dibawah Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan

Umum. Jumlah LSM yang terdaftar, LSM tidak aktif dan LSM aktif di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.130 berikut ini:

Tabel 2.130 Jumlah LSM Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah LSM Terdaftar	63*	64*	20*	17	17	
2	Jumlah LSM Tidak Aktif	0*	48*	9*	0	0	
3	Jumlah LSM Aktif	63*	16*	11*	17	17	

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.130 di atas dapat dilihat bahwa tidak ada LSM yang mendaftar pada tahun 2023 sebesar 17 LSM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh tidak lagi mengeluarkan surat keterangan terdaftar tetapi hanya memverifikasi dokumen dan yang mengeluarkan Menteri dalam negeri, namun demikian kegiatan sebagaimana yang tercantum diatas tetap terlaksana.

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk beperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi Kemasyarakat dapat berbentuk LSM, yayasan dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Jumlah Ormas yang terdaftar, Ormas yang tidak aktif dan Ormas yang aktif terdapat pada Tabel 2.131 berikut:

Tabel 2.131 Jumlah Ormas yang Terdaftar, Ormas Tidak Aktif dan Ormas Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ormas yang terdaftar	97*	99*	100*	104	17	
2	Jumlah Ormas yang tidak aktif	0*	0*	0*	92	0	
3	Jumlah Ormas yang aktif	97*	99*	100*	12	17	

Sumber: Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, 2024
**) Data tahun 2018-2021 disesuaikan*
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.131 di atas dapat dilihat jumlah Ormas yang terdaftar pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 17 Ormas, sedangkan pada tahun 2021 hanya 1 ormas yang terdaftar. Pada tahun 2022 jumlah ormas yang aktif sebesar 104 ormas, dan pada tahun 2023 sejumlah 17 Ormas.

Organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) memegang peranan penting dalam pembinaan mental dan potensi calon pemimpin (leadership) anggotanya. OKP juga merupakan mitra pemerintah yang mendukung pelaksanaan pembangunan, memberi masukan dan kritik membangun kepada pemerintah. Tabel 2.137 dibawah ini menunjukkan jumlah organisasi kepemudaan (OKP) yang terdaftar, OKP tidak aktif dan OKP aktif di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023.

Tabel 2.132 Jumlah OKP yang Terdaftar, OKP Tidak Aktif dan OKP Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	Aceh						Kota Banda Aceh					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah OKP yang terdaftar	70	71	66	68			24*	25*	3*	6	7	
Jumlah OKP yang tidak aktif							0*	24*	0*	0	0	
Jumlah OKP yang aktif							24*	1*	3*	6	7	

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, 2024

Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.132 di atas dapat dilihat bahwa di Kota Banda Aceh jumlah OKP yang terdaftar setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2020 terdapat OKP yang tidak aktif, ini dikarenakan OKP tersebut sudah habis masa berlaku SKT nya dan tidak melaporkan kembali keberadaannya. dan pada tahun 2023 ada 7 OKP yang mendaftar dan aktif.

LSM, Ormas dan OKP merupakan mitra kerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang perlu dipastikan legalitasnya dan terdaftar di Badan Kesbangpol. Oleh karena itu, Badan kesbangpol harus memastikan SKT yang telah ditetapkan oleh pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dilaporkan ke Badan Kesbangpol untuk pembinaan, memastikan LSM, Ormas dan OKP menjalankan organisasinya sesuai dengan fungsinya dan sebagai bahan klarifikasi apabila diperlukan terkait legalitas LSM, Ormas dan OKP bersangkutan. Badan Kesbangpol perlu memberi pemahaman kepada LSM, Ormas dan OKP terkait peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2) Kegiatan Pembinaan Politik daerah

Dalam rangka peningkatan pemahaman hak dan kewajiban masyarakat, Badan Kesbangpol melaksanakan kegiatan pembinaan politik daerah dengan sasaran generasi muda dan merupakan pelopor perkembangan politik kedepan. Target dan realisasi kegiatan pembinaan politik daerah dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.133 di bawah ini:

Tabel 2.133 Target dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	Target/ Realisasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Target	100	-	-	100	200	
	Realisasi	100	-	-	100	0	

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.133 pada tahun 2020-2021 tidak ada peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan politik daerah tidak dapat dilaksanakan disebabkan kondisi daerah dalam masa pandemi *Covid* 19 dan terjadinya Refocusing Anggaran dan kegiatan kembali diadakan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kegitan tidak dapat dilaksanakan karena tidak keluarnya SPD.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh telah melakukan kegiatan pembinaan politik di daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010

tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Politik melalui sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat, parpol, ormas , LSM, Tokoh pemuda untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam berpolitik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh setiap tahunnya menyalurkan bantuan Hibah Kepada Partai Politik sebesar Rp. 2.896.560.000,-.

3) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat mengakibatkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Dalam kenyataan tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Menanggapi hal tersebut Badan Kesbangpol melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkotika di sekolah-sekolah wilayah Kota Banda Aceh. Kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba adalah program kegiatan yang ada pada badan kesatuan bangsa dan politik Kota Banda Aceh sesuai dengan Undang -undang nomor 35 tahun 2006 tentang narkotika kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan.

Tabel 2.134 menunjukkan target dan realisasi penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba di Kota Banda Aceh Tahun 2019 hingga Tahun 2023:

Tabel 2. 134 Target dan Realisasi Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	Target/ Realisasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Target	11	11	5	11	6	
	Realisasi	18	11	-	2	0	

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Perkembangan Restoran di Kota Banda Aceh cukup menjanjikan, dilihat dari segi pertumbuhan yang terus bertambah setiap tahunnya, dengan pengelolaan yang semakin modern mengikuti perkembangan jaman dengan mengikuti arah kemanjuan tehnologi yang dapat membantu operasional restoran seperti sekarang ini sudah menggunakan barkode dalam menggunakan buku menu untuk sebuah layanan dalam melakukan pilihan untuk bertransaksi, Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi tentu hal tersebut harus diupayakan dalam daya saing usaha, untuk memajukan usahanya dalam daya saing, tentunya akan berdampak dengan penerimaan asli daerah. Jumlah restoran, rumah makan dan cafe di Kota Banda Aceh sejak Tahun 2018 hingga 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.135 di bawah ini:

Tabel 2.135 Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Cafe Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah usaha	Jumlah Kursi	Jumlah usaha	Jumlah Kursi	Jumlah usaha	Jumlah Kursi		
1	Restoran	35	3,381	36	3,450	38	3,495	35	3,875	43	4,090		
2	Rumah Makan	211	10,339	211	10,339	211	10,339	211	10,339	211	10,339		
3	Café	562	27,538	624	30,018	624	32,572	624	35,814	656	36,230		
Jumlah		**808**	**41,258**	**871**	**43,807**	**873**	**46,406**	**870**	**50,128**	**910**	**50,659**		

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.135 di atas jumlah restoran, rumah makan dan café terus meningkat selama periode Tahun 2019 hingga Tahun 2023 mengalami peningkatan. Jumlah usaha pada Tahun 2023 sebesar 910 dengan jumlah kursi 50.659 dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 808 usaha dan jumlah kursi 41,258.035. Hal ini terjadi karena jumlah usaha restoran, rumah makan dan café yang juga meningkat.

2) Jenis Kelas dan Jumlah Hotel dan Penginapan

Perkembangan usaha sektor hotel di Kota Banda Aceh berperan dalam meningkatkan PAD. Untuk lebih jelasnya, kelas dan jumlah penginapan/hotel di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.136:

Tabel 2.136 Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Kelas	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
		Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur			
1	Bintang 4	1	159	270	1	159	270	1	159	270	1	162	270	1	162	270			
2	Bintang 3	7	839	763	7	919	763	7	919	763	6	612	763	7	612	763			
3	Bintang 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Bintang 1	12	460	778	14	522	928	15	558	991	12	556	778	13	566	787			
5	Melati 3	10	350	420	10	350	420	10	468	565	10	470	502	10	470	502			
6	Melati 2	6	190	345	6	190	345	7	252	272	6	190	345	6	190	342			
7	Melati 1	13	370	701	13	421	805	14	478	913	15	690	890	17	725	948			
8	Penginapan	34	361	721	34	361	721	36	506	761	34	662	853	36	681	861			
Jumlah		**83**	**2729**	**3998**	**85**	**2922**	**4252**	**90**	**3340**	**4535**	**84**	**3342**	**4401**	**90**	**3396**	**4473**			

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.136 di atas dapat dilihat jumlah hotel/penginapan di Kota Banda Aceh sejak Tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan penambahan pada jumlah usaha penginapan. Pada Tahun 2019 jumlah hotel yang ada di Kota Banda Aceh sebanyak 83 hotel, meningkat menjadi 90 hotel pada Tahun 2023. Pada Wilayah Kota Banda Aceh terdapat 21 Unit Hotel Bintang dari bintang 4 sampai dengan bintang 1. Untuk Bintang 4 dari Tahun 2019-2023 hanya terdapat 1 (satu) hotel, sedangkan kelas Melati/Penginapan sebanyak 69 unit.

Jumlah kamar hotel/penginapan meningkat dari 2019 hingga 2023. Jumlah kamar hotel/penginapan pada Tahun 2023 sebanyak 3.396 kamar meningkat dari Tahun 2019 sebanyak 2.729 kamar. Hal ini bertanda adanya hunian yang bertambah pada layanan inap di Kota Banda Aceh. Sejak berakhir masa covid pertumbuhan hunian sudah mulai bertambah karena tidak adanya pembatasan dalam keramaian dan dapat dilihat pada Laporan kunjungan wisata pada Tahun 2022 sebanyak 328.169 dan pada Tahun 2023 sebanyak 382.029 di Kota Banda Aceh (Data bersumber dari Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh).

Dengan adanya peningkatan pada jumlah kunjungan wisata dan kegiatan pemerintahan maka akan meningkatkan penerimaan PAD di Kota Banda Aceh. Selain itu upaya yang dilakukan untuk penerimaan PAD antara lain kerja sama antar pihak selaku penegak aturan dan juga kegiatan intensifikasi dan ektensifikasi dalam peningkatan penerimaan PAD seperti melatih SDM dalam pemeriksaan pajak, penigkatan sosialisasi dan penambahan alat monitoring pajak online.

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Lama Proses Perizinan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik, sejak Agustus 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh telah melakukan proses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan proses perizinan non berusaha dilakukan melalui Aplikasi Si Cantiku. Untuk perizinan berusaha DPMPTSP hanya memproses berkas pemenuhan komitmen agar izin yang diterbitkan OSS dapat berlaku efektif.

Tabel 2.137 berikut menggambarkan lama proses pemenuhan komitmen dan perizinan berusaha yang diproses melalui Aplikasi Si Cantiku:

Tabel 2.137 Lama Proses Pemenuhan Komitmen dan Proses Perizinan Non Berusaha di DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2023

No.	Uraian	Lama Pengurusan (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata Maks Rp)
Proses Pemenuhan Komitmen				
1	-	-	-	-
Izin Lingkungan				
2	- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL)	Izin lingkungan sudah berubah menjadi Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh fDLHK3		

No.	Uraian	Lama Pengurusan (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata Maks Rp)
	'- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)			
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG))	3 Hari kerja (Setelah mendapatkan rekomendasi dari PUPR)	-	-
4	Sertifikat Layak Fungsi (SLF)	Diproses melalui SIMBG oleh Dinas Teknis (PUPR)		
Proses Perizinan Non Berusaha				
5	Izin-izin di Bidang Kesehatan	3 Hari Kerja (Setelah mendapatkan persetujuan teknis Dinas)	-	-
6	Izin Kegiatan Seni dan Budaya	3 Hari Kerja (Setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata)	07 item Persyaratan	-
7	Izin-izin di Bidang Pendidikan	3 Hari Kerja (Setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan)	-	-
	1. TK (Taman Kanak-Kanak)	1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2. Masa Berlaku 6 Bulan bagi Izin Baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan	8 item persyaratan	-
	2. KB/TPA/SPS	1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2. Masa Berlaku 6 Bulan bagi Izin Baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan	7 item persyaratan	-

No.	Uraian	Lama Pengurusan (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata Maks Rp)
	3. SD (Sekolah Dasar)	1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2. Masa Berlaku 6 Bulan bagi Izin Baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan	22 item persyaratan	-
	4. SMP (Sekolah Menengah Pertama)	1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2. Masa Berlaku 6 Bulan bagi Izin Baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan	Untuk Persyaratan Izin Pendirian dan pembukaan SMP memiliki 14 item persyaratan dan untuk Perpanjangan izin operasioanl memiliki 9 item persyaratan	-
	5. Izin Penyelenggara Pendidikan Non Formal (Kursus/LKP/PKBM/Sejenisnya)	1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2. Masa Berlaku 6 Bulan bagi Izin Baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan	Untuk Persyaratan Izin Pendirian dan pembukaan operasional 12 item persyaratan administratif + 3 item persyaratan tehnis dan Untuk persyaratan izin operasioanl lanjutan 9 item persyaratan administratif + 2 item persyaratan tehnis	-

Sumber: DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024
Proses kompilasi dari OPD

Untuk nomor 3 dan 4 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Beberapa penghargaan yang diperoleh DPMPTSP dapat dilihat pada tabel 2.138 antara lain:

Tabel 2.138 Prestasi yang telah diraih DPMPTSP Kota Banda Aceh

No	Tahun	Keterangan
1	2010	Kemenpan & RB
		Piala Citra Pelayanan Prima
2	2012	Gubernur Aceh
		Peringkat ke I atas Prestasi, Komitmen, Kontinuitas dan Konsistensinya dalam Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah
4	2013	Walikota Banda Aceh
		Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
5	2014	Ombudsman
		Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
6	2016	Ombudsman
		Peran Aktif mewujudkan pelayanan publik prima dengan Zona Hijau Kategori Kepatuhan Pemenuhan Standar Layanan Sektor Perizinan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7	2016	Kemenpan & RB
		Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “A”
8	2017	Markplus, Inc dan Majalah Marketeers
		WOW Public Service Excellence
9	2017	Gubernur Aceh
		Aceh Invesment Award
10	2018	Kemenpan& RB
		Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Baik dengan Catatan”
11	2018	Walikota Banda Aceh
		Self Assesment Quesioner (SAQ) Pemeringkatan Pengelola Website & PPID Pembantu Kategori PPID Pembantu Kota Banda Aceh

No	Tahun	Keterangan
12	2018	Kemenpan & RB
		Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik
13	2019	Kemenpan & RB
		Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” (A-)
14	2020	Harian Serambi Indonesia
		Inovasi Pelayanan Publik
15	2020	Kemenpan & RB
		Kinerja Pelayanan Publik Terbaik Kategori “A-“
16	2021	BKPM RI
		Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah Kategori Sangat Baik
17	2021	DPMPTSP Aceh
		Aceh Investment Award Terbaik I
18	2022	Kemenpan & RB
		Predikat A untuk unit penyelenggara pelayanan public kategori pelayanan prima lingkup pemerintah daerah Tahun 2021 (*8 Maret 2022)*
19	2022	DPMPTSP Aceh
		Aceh Investment Award Terbaik I – Kategori Indeks Daya Saing Daerah *(31 Oktober 2022)*
20	2022	Kemenpan & RB
		Predikat A untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup DPM-PTSP Kabupaten/Kota Tahun 2022 (06 Desember 2022)
21	2022	Ombudsman
		Kategori A (KualitasTertinggi) dengan Nilai 90.52 (Zona Hijau) dalam Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 *(22 Desember 2022)*

No	Tahun	Keterangan
22	2022	KEJARI (MPP)
		Stand Terbaik pada Adhyaksa Expo 2022 – Kategori Pelayanan Publik *(11 Desember 2022)*
23	2023	Ombudsman
		Penilaian Kepatuhan - Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) Tahun 2023 *(25 januari 2024)*
24	2024	**Ombudsman**
		Penilaian Kepatuhan - Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024 (total nilai 91,78 dengan opini kualitas tertinggi) ***(21 januari 2025)***

Sumber: DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024

Sumber: DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 2.67 DPMPTSP Banda Aceh Raih Penghargaan Penilaian Kepatuhan - Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024 (opini kualitas tertinggi) (21 Januari 2025)

2) Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha dimaksud adalah perda terkait perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa dan perda terkait dengan ketenagakerjaan yang memberikan kemudahan-kemudahan berinvestasi di Kota Banda Aceh. Tabel 2.139 berikut menunjukkan qanun yang mendukung iklim investasi di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.139 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perda Terkait Perizinan	0	0	0	0	0	

Sumber : DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Tabel 2.139 di atas belum adanya Perda terkait perizinan dan Investasi yang mendukung Iklim Investasi, karena tidak tesedianya anggaran untuk Penyusunan Perda yang mendukung Iklim investasi.

3) Perbandingan jumlah proyek dan nilai investasi tahun 2021 – 2021 (yoy)

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh, dengan visi : PENANAMAN MODAL YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Untuk mendorong masuknya investasi ke Kota Banda Aceh, pemerintah kota telah mempersiapkan sektor-sektor strategis guna menarik minat pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.

Fokus pengembangan investasi di Kota Banda Aceh sebagai berikut :

1. Pengembangan sektor Perdagangan, Jasa dan Koperasi;
2. Pengembangan sektor Industri;
3. Pengembangan sektor Infrastruktur;
4. Pengembangan sektor Energi;
5. Pengembangan sektor Pariwisata;
6. Pengembangan sektor Perikanan dan Kelautan.

Tabel 2.140 Perbandingan jumlah proyek dan nilai investasi tahun 2021 - 2024(yoy)

No.	Sektor Usaha	TAHUN 2021					TAHUN 2022					TAHUN 2023					TAHUN 2024
		JUMLAH PROYEK		NILAI INVESTASI		TOTAL INVESTASI PMA + PMDN	JUMLAH PROYEK		NILAI INVESTASI		TOTAL INVESTASI PMA + PMDN	JUMLAH PROYEK		NILAI INVESTASI		TOTAL INVESTASI PMA + PMDN	
		PMA	PMDN	PMA	PMDN		PMA	PMDN	PMA	PMDN		PMA	PMDN	PMA	PMDN		
1	Kehutanan, Perikanan, Pertambangan, Perkebunan dan Peternakan	0	50	Rp -	Rp 774.500.001	Rp 774.500.001	0	39	Rp -	Rp 1.814.500.000	Rp 1.814.500.000	3	176	Rp -	Rp 4.460.000.000	Rp 4.460.000.000	
2	Jasa lainnya	6	130	Rp 28.098.797.384	Rp 227.178.707.017	Rp 255.277.504.401	2	99	Rp 22.000.000	Rp 39.180.149.325	Rp 39.202.149.325	4	467	Rp 67.600.000	Rp 196.289.138.879	Rp 196.356.738.879	
3	Konstruksi	0	296	Rp -	Rp 36.341.500.000	Rp 36.341.500.000	0	152	Rp -	Rp 157.244.067.006	Rp 157.244.067.006	0	1572	Rp -	Rp 82.658.930.974	Rp 82.658.930.974	
4	Listrik, Gas dan Air	0	71	Rp -	Rp 3.834.333.000	Rp 3.834.333.000	0	22	Rp -	Rp 3.493.676.755	Rp 3.493.676.755	1	38	Rp -	Rp 5.909.340.542	Rp 5.909.340.542	
5	Perdagangan dan Reparasi	1	455	Rp -	Rp 51.056.688.246	Rp 51.056.688.246	0	290	Rp -	Rp 70.922.746.782	Rp 70.922.746.782	16	1056	Rp 5.041.668.804	Rp 121.792.060.513	Rp 126.833.729.317	
6	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	10	226	Rp 170.797.553.311	Rp 29.425.090.748	Rp 200.222.644.059	3	17	Rp 57.160.603.920	Rp 56.346.371.450	Rp 113.506.975.370	6	98	Rp 31.745.789.578	Rp 117.536.677.960	Rp 149.282.467.538	
7	Industri	6	27	Rp -	Rp 375.000.000	Rp 375.000.000	3	21	Rp 1.119.315.346	Rp 46.576.048.511	Rp 47.695.363.857	22	67	Rp 254.940.374	Rp 7.779.407.544	Rp 8.034.347.918	
	Total	**23**	**1255**	**Rp 198.896.350.695**	**Rp 348.985.819.012**	**Rp 547.882.169.707**	**8**	**640**	**Rp58.301.919.266**	**Rp 375.577.559.829**	**Rp 433.879.479.095**	**52**	**3474**	**Rp 37.109.998.756**	**Rp 536.425.556.412**	**Rp 573.535.555.168**	

Sumber : DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Untuk tahun 2021, jumlah proyek PMA yang melaporkan LKPMnya sebanyak 23 investor, sedangkan tahun 2022 terjadi penurunan jumlah investor PMA yang melaporkan LKPM-nya yaitu hanya sebanyak 8 PMA. Penurunan ini disebabkan karena tidak semua PMA ini melakukan kegiatan pelaporan LKPMnya, sementara BKPM telah mempersyaratkan kewajiban untuk melaporkan LKPM-nya secara triwulan,sehingga dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi ke lapangan terutama kepada investor-investor yang mencantumkan nilai rencana investasinya diatas 1 M. Selain itu, penyebab terjadinya penurunan jumlah investor PMA dan PMDN antara tahun 2021 dengan tahun 2022, dikarenakan untuk tahun 2022, DPMPTSP tidak lagi menambahkan jumlah investor ke dalam perhitungan apabila nilai pelaporan LKPMnya 0 (nihil), sehingga menyebabkan terjadinya penurunan jumlah proyek investor baik PMA maupun PMDN. Terkait dengan jumlah PMA yang hanya 8 investor di tahun 2022, bukan mengindikasinya kita mengalami penurunan jumlah investor di Kota Banda Aceh, melainkan hanya 8 investor asing yang melaporkan LKPMnya ke dalam sistem OSS RBA. Perbandingan jumlah proyek dan nilai investasi tahun 2021 dan 2022 terlihat dari capaian realisasi investasi per sub sektor yang menunjukkan secara global bahwa jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Kota Banda Aceh 'yang menyampaikan realisasi investasi sejumlah 23 PMA lebih banyak dibandingkan tahun 2022 hanya sebanyak 8 PMA yang menyampaikan realisasi investasi. Capaian realisasi investasi dari PMA ini sangat mendorong pertumbuhan investasi di Kota Banda Aceh, baik secara peningkatan perekonomian maupun penyerapan tenaga kerja, dan untuk tetap terus menambah dan meningkatan jumlah proyek dan nilai realisasi investasi dibutuhkan campur tangan pemerintah terutama terkait adanya regulasi atau kebijakan yang mendukung kenyamanan dan kemudahan dalam berinvestasi di Kota Banda Aceh. Per tanggal 3 Maret 2023, jumlah investor PMA yang menanamkan modalnya di Kota Banda Aceh sebanyak 35 investor, dengan nilai rencana investasi diatas 1 Milyar.

Adapun tiga besar sub-sektor usaha pada tahun 2023, menunjukkan bahwa sektor jasa masih sangat mendominasi tingkat realisasi investasi di Kota Banda Aceh, yaitu sebesar 34%, kemudian diikuti oleh sektor transportasi gudang dan telekomunikasi sebesar 26% serta perdagangan sebesar 22%. Sedangkan sektor yang paling rendah capaian nilai realisasi investasi berdasarkan data Pelaporan LKPM OSS RBA adalah pada sektor kehutanan, perikanan, pertambangan, perkebunan dan peternakan yang masih perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan terutama hadirnya regulasi yang berpihak pada kedua belah pihak yaitu pemerintah dan pelaku usaha pada sektor ini serta dibutuhkan penciptaan inovasi oleh pemerintah sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan sektor usaha ini, terutama sektor perikanan.

4) Data Pengunjung MPP Kota Banda Aceh

Dari Soft Launching MPP Kota Banda Aceh pada akhir 2019, pengunjung MPP Kota Banda Aceh dari tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2020 jumlah masyarakat yang mengunjungi MPP Kota Banda Aceh ada 45.630 orang yang terdiri dari 60% pria dan 40% wanita. Tahun 2021 jumlah masyarakat yang mengunjungi MPP Kota Banda Aceh ada 41.291 orang yang terdiri dari 55% pria dan 45% wanita, lebih sedikit 4.339 orang dari tahun sebelumnya atau berkurang 10%. Tahun 2022 jumlah masyarakat yang mengunjugi MPP Kota Banda Aceh ada 59.164 orang yang terdiri dari 54% pria dan 46% wanita, lebih banyak 17.873 orang dari tahun sebelumnya atau meningkat 43%. Tahun 2023, jumlah pengunjung MPP Kota Banda Aceh sebanyak 98.229 orang yang terdiri dari 55 % pria dan 45 % wanita, lebih banyak 39.065 orang dari tahun sebelumnya. atau meningkat sebanyak 66 %. Tahun 2023 MPP kota banda aceh juga terpilih sebagai salah satu dari 21 daerah provinsi/kabupaten/kota di seluruh indonesia yang menjadi pilot project implementasi MPP Digital. Untuk saat ini MPP Digital telah diimplementasikan. Pada Tenaga Kesehatan yang mengurus Perizinan Nonberusaha di MPP Kota Banda Aceh. Data Pengunjung MPP Kota Banda Aceh berdasarkan Gender dari tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.141 Data Pengunjung MPP Kota Banda Aceh berdasarkan Gender dari tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Pengunjung	Pria	Wanita	rata²/bln	Jumlah kenaikan (penurunan) pengunjung	Kenaikkan dari Tahun Sebelumnya	Keterangan
2020	45.630	60%	40%	3.803			
2021	41.291	55%	45%	3.441	(4.339)	-10%	
2022	59.164	54%	46%	4.930	17.873	43%	
2023	98.229	55%	45%	8.186		66%	
2024							

Sumber: Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi DPMPTSP, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Rasio panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh

Penggunaan moda angkutan darat sangat diperngaruhi oleh jalan yang tersedia di wilayah Kota Banda Aceh. Sebagai barang publik yang merupakan bagian dari layanan publik pemerintah Kota Banda Aceh, jalan raya mempunyai kapasitas tertentu agar dapat dilalui dengan nyaman. Berikut perkembangan panjang jalan dan kendaraan yang dapat dilihat pada Tabel 2.147 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang ada di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dibawah ini:

Tabel 2.142 Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Aceh			Kota Banda Aceh		
	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio
2019	23.650,05	2.179.295	1,04	765,66	280.967	0,27
2020	23.650,50	3.058.000	773,40	765,66	281.698	0,27
2021	23.650,50	3.544.000	667,30	620,96	294.244	0,26
2022				620,96	295,94	0,21
2023						
2024						

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2023
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.142 diatas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Aceh cenderung tetap pada periode tahun 2019-2021, walaupun jumlah kendaraan yang melintas dijalan semakin meningkat. Sedangkan di Kota Banda Aceh untuk jumlah kendaraan yang melalui jalan-jalan di semakin bertambah dari tahun ke tahun sementara penambahan jalan sulit dilakukan

mengingat luas area kota tidak mungkin bertambah. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan di jalan-jalan utama dalam kota. Oleh karena itu, kemacetan manjadi permasalahan yang mempunyai urgensi tinggi untuk diselesaikan dalam urusan perhubungan di Kota Banda Aceh.

2) Jumlah Orang/Barang (Penumpang) yang Terangkut Angkutan Umum

Perkembangan wilayah ditandai dengan semakin tingginya aktifitas pergerakan/mobilitas orang/barang yang terangkut angkutan umum. Adapun jumlah orang/barang (penumpang) yang terangkut angkutan umum melalui terminal di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dapat diliat pada Tabel 2.143 di bawah ini:

Tabel 2.143 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2019-2024

No	Uraian	Aceh												Kota Banda Aceh											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg					Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg		
1	AKDP													796	1.463.613	901	1.097.859	1.316	665.184	1.643	426.750	1.498	184.907		
2	AKAP													169	365.762	157	431.512	219	173.944	57	210.626	207	171.024		
	Jumlah	12.672.542		633.082		612.980		2.964.869		602.784				965	1.829.375	1.058	1.529.375	1.535	839.128	1.700	637.376	1.705	355.931		
	Jumlah Angk./Pnp X 100%													0,05		0,06		0,18		0,27		0,48			

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Pada perhubungan jalur darat dapat dibedakan menjadi angkutan darat dalam provinsi (AKDP) dan angkutan darat antar provinsi (AKAP). Jumlah angkutan umum yang tersedia mencerminkan jumlah penumpang yang dimobilisasi. Berdasarkan Tabel 2.143 di atas menunjukkan bahwa jumlah orang yang terangkut angkutan umum oleh angkutan darat yaitu 2.964.869 orang. Dimana jumlah tersebut menurun jika dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai 15.288.280, namun nilai tersebut lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun jumlah orang cenderung menurun pada tahun 2020-2021 dibandingkan jumlah orang sebelum tahun 2019, hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Sedangkan pada Kota Banda Aceh, jumlah angkutan dari tahun ke tahun meningkat dari 965 unit angkutan umum pada tahun 2019 bertambah menjadi 1.705 angkutan umum pada tahun 2023 dengan jumlah penumpang yang dipindahkan dari 704.961 penumpang pada tahun 2022 menjadi 355.931 penumpang pada 2023.

3) Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal

Fasilitas transportasi serta aliran orang/ barang (penumpang) melalui dermaga/bandara/terminal menunjukkan interaksi antar wilayah yang tercermin dari keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang dan barang. Jaringan transportasi antar daerah yang memungkinkan bagi pemindahan barang dan jasa atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya merupakan indikator konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah lain. Tabel 2.144 di bawah ini menunjukkan jumlah orang/ barang (penumpang) melalui dermaga/bandara/terminal dari Tahun 2019-2023 di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh:

Tabel 2.144 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/Terminal Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Aceh			Kota Banda Aceh		
	Jumlah Penumpang Bis	Jumlah penumpang ASDP	Total Jumlah Penumpang	Jumlah Penumpang Bis	Jumlah penumpang ASDP	Total Jumlah Penumpang
2020	1.153.344	566.099	1.719.443	1.529.375	508.964	2.038.339
2021	1.154.013	729.669	2.257.047	1.818.915	562.589	2.381.504
2022	5.797.404	1.083.553	6.527.073	2.985.865	963.031	3.948.896
2023				1.771.360	750.631	2.521.991
2024				1.918.453	441.788	2.360.241

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.144 diatas menunjukkan bahwa untuk jumlah penumpang bis pada tahun 2024 sebesar 1.918.453 cenderung mengalami peningkatan positif dibandingkan dengan persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2023 sebesar 1.771.360. Namun pada kondisi tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah orang melalui bandara/derma turun secara signifikan akibat pandemi Covid-19.

Sedangkan perkembangan jumlah penumpang ASDP pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 jumlah

penumpang ASDP sebesar 441.788 orang, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 750.631 orang.

Sampai dengan tahun 2022 Provinsi Aceh memiliki 36 terminal dan Kota Banda Aceh juga saat ini telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan yaitu sebanyak 4 unit terminal. Rincian jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang ada di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek provinsi dan kota dapat dilihat pada Tabel 2.145 berikut:

Tabel 2. 145 Jumlah Terminal Angkutan Penumpang/Barang Kota Banda Aceh yang Telah Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	Aceh					Banda Aceh				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Terminal Penumpang AKAP Tipe-A	5	5	5			1	1	1	1	1
Terminal Penumpang AKDP Tipe-B	9	10	11			1	1	1	1	1
Terminal Penumpang AKDP Tipe-C	22	21	20			1	1	1	1	1
Terminal Barang (Mobar)						1	1	1	1	1
Jumlah	36	36	36			4	4	4	4	4

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Dari Tabel 2.145 diatas terlihat jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Provinsi Aceh dari Tahun 2019 berjumlah 36 terminal, yang terdiri dari 5 tipe A, 9 tipe B dan 22 tipe C. Di tahun 2022 terdapat penambahan status terminal tipe B B Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sehingga jumlah terminal tipe B menjadi 11 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 20 terminal.

Adapun di Kota Banda Aceh jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 adalah berjumlah 4 (empat) terminal, yaitu Terminal Penumpang Type-A di Batoh ; Terminal AKDP Type-B L-300 Lueng Bata; Terminal Type-C APK Keudah dan Terminal Mobil Barang (Mobar) di Santan. Khusus untuk Terminal Tipe A Kota Banda Aceh, dimana mulai Tahun 2017 telah diserahkan ke Pusat yang pengelolaannya telah menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan RI, sehingga dengan sendirinya terjadi penurunan pendapatan untuk Kota Banda Aceh

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Secara umum, daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Banda Aceh tergolong relatif rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Indonesia. Salah satu yang menjadi penyebab hal ini adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah, dimana pendidikan terbanyak dari tenaga kerja di Banda Aceh ialah Sekolah Menengah Atas (SMA). Rasio lulusan S1/S2/S3 per satuan penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.146 Rasio ini menggambarkan jumlah lulusan S1/S2/S3 per satuan penduduk.

Tabel 2.146 Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3 per-satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	36.220	37.827	38.630	40.432		
2	Jumlah penduduk	245.779	248.892	251.288	255.409		
3	Rasio lulusan S1/S2/S3	1 : 6,7	1 : 6,6	1 : 6,5	1 : 6,3		

Sumber: Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2023
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.146, rasio jumlah lulusan S1/S2/S3 per-satuan penduduk menurun selama periode Tahun 2018 hingga 2022. Walaupun rasio ini menurun, namun secara kuantitatif jumlah lulusan S1/S2/S3 pada Tahun 2022 ini merupakan angka kelulusan terbesar pada periode lima tahun tersebut. Pada Tahun 2022 jumlah lulusan S1/S2/S3 sebesar 40.432.

2.1.4.4.2 Ketergantungan Penduduk Produktif Terhadap Penduduk Tidak Produktif

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/ tidak produktif lagi. Disisi lain, semakin rendah angka rasio menunjukkkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/ tidak produktif lagi. Tanggungan yang dimaksud dalam hal ini dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun, serta fasilitas lainnya yang didapatkan oleh penduduk non-produktif meskipun mereka tidak bekerja. Rasio ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 secara lebih jelas terdapat pada Tabel 2.147 di bawah ini:

Tabel 2.147 Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif terhadap Penduduk Tidak produktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Usia < 15 Tahun	167.582	75.845	75.667	76.207	72.162	
2	Penduduk Usia > 64 Tahun	9.969	9.873	10.051	10.601	12.317	
3	Penduduk Usia Tidak Produktif (< 15 tahun dan > 64 Tahun)	88.166	85.718	85.718	86.808	84.479	
4	Penduduk Usia 15 – 64 Tahun	151.201	163.174	165.570	168.601	177.490	
5	Rasio Ketergantungan	58,31	52,53	52,83	51,49	47,60	

Sumber: Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.147, rasio ketergantungan penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 sampai dengan 2023, jumlah ini mengalami fluktuatif. Jika dilihat dari struktur piramida penduduk di Kota Banda Aceh, diperkirakan Kota Banda Aceh akan mendapatkan bonus demografi dimana peduduk usia 15-64 tahun menjadi lebih banyak. Bonus demografi ini tentunya memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai daya saing melalui berbagai keahlian dan ketrampilan.

2.1.4.5 Capaian Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM atau Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Dalam upaya percepatan penerapan SPM, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan berbagai kegiatan dan strategi yang telah ditetapkan secara nasional sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan dasar yang merupakan hak dari setiap warga negara. Adapun yang menjadi urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara urusan pemerintah bidang pendidikan melaksanakan penerapan SPM dengan jenis pelayanan dasar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Target pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan untuk Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.148 dibawah ini:

Tabel 2.148 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

CAPAIAN SPM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023						
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Satuan**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			96.13 %
1 .	**Pendidikan Dasar Usia Dini**					95.44 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		10386	10386	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**15.44 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	77.21 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	60.71	**39.29**	**60.71 %**
	2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	100	83.33	**16.67**	**83.33 %**
	3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	100	81.44	**18.56**	**81.44 %**
	4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	31.60	**68.4**	**31.60 %**
	5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	6 . Indeks distribusi guru	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	60.61	**39.39**	**60.61 %**
	8 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	100	**0**	**100.00 %**

CAPAIAN SPM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023						
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Satuan**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
	JUMLAH	**900**	**627**	**273**	**617.69 %**	
2 .	**Pendidikan Dasar**					97.02 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		46834	46834	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**17.02 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	85.09 %
	SD					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	95.02	**4.98**	**95.02 %**
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	65.63	**34.37**	**65.63 %**
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	42.43	**57.57**	**42.43 %**
	6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	100	100	**0**	**100.00 %**
	7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	100	100	**0**	**100.00 %**
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	82	**18**	**82.00 %**
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	100	79.33	**20.67**	**79.33 %**
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	91.7	**8.3**	**91.70 %**
	13 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	76.4	**23.6**	**76.40 %**
	SMP					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.05	**0.95**	**99.05 %**
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	86.53	**13.47**	**86.53 %**
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	70.25	**29.75**	**70.25 %**
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	45.03	**54.97**	**45.03 %**
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	30.71	**69.29**	**30.71 %**
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	95.67	**4.33**	**95.67 %**
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	87.33	**12.67**	**87.33 %**
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	%	100	83.33	**16.67**	**83.33 %**
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	92.9	**7.1**	**92.90 %**
	13 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	88.9	**11.1**	**88.90 %**
	JUMLAH	**2,8**	**2,252**	**548**	**2,212.21 %**	
3 .	**Pendidikan Kesetaraan**					95.94 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		58177	58177	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**15.94 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	79.72 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	45.26	**54.74**	**45.26 %**

CAPAIAN SPM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	45.26	**54.74**	**45.26 %**
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	70	**30**	**70.00 %**
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	73.33	**26.67**	**73.33 %**
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	73.33	**26.67**	**73.33 %**
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	95.67	**4.33**	**95.67 %**
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	87.33	**12.67**	**87.33 %**
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	100	66.45	**33.55**	**66.45 %**
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	12 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**1,4**	**959**	**441**	**956.63 %**	

Sumber : E-SPM Bangda Kemendagri, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Indikator SPM Pendidikan Dasar Usia Dini sebasar 95,44 %. Pada indikator Pendidikan Dasar sebesar 97,02, sedangkan pada pendidikan kesetaraan sebesar 95,94%. Berdasarkan data diatas dapat dilihat pemenuhan pelayanan SPM bidang Pendidikan Tahun 2023 sudah baik dan hampir mencapai 100%. Sementara itu, dari sisi mutu pelayanan masih banyak yang perlu ditingkatkan seperti pemenuhan jumlah dan mutu pendidik dan kepala sekolah, penyediaan biaya personil, dan akreditasi satuan pendidikan khususnya pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini.

b. Bidang Kesehatan

SPM bidang urusan kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun yang menjadi jenis pelayanan dasar pada SPM urusan kesehatan di provinsi dan kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.149 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan	Aceh		Banda Aceh	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		100%	94,87%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%		100%	91,16%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		100%	94,77%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100%		100%	74,69%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%		100%	98,18%
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%		100%	66.7 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%		100%	93,22%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%		100%	68.3 %
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%		100%	100%

10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%		100%	100%
11.	Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%		100%	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%		100%	100%
13.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	100%	100%
14.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar baisa (KLB)	100%	98,57%	100%	100%

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.149 diketahui realisasi penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023 di Provinsi Aceh untuk jenis pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi sudah mencapai 100 persen yang ditargetkan. Sebaliknya untuk jenis Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Provinsi mencapai 98,57 persen yang direncanakan.

Sedangkan di Kota Banda Aceh terdapat realisasi penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023 yang sudah mencapai 100 persen yaitu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency.

c. Bidang Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun yang menjadi jenis pelayanan dasar pada SPM urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh antara lain dapat dilihat pada Tabel 2.150 berikut:

Tabel 2.150 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Aceh		Banda Aceh	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	0%	100%	80,03%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	0%	100%	94,85%

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.150 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerapan SPM Sub pada Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Provinsi Aceh belum ada, hal ini mengingat belum adanya SPAM Regional yang dibangun di Aceh. Dan realisasi pada Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik juga belum ada, hal ini disebabkan karena tidak adanya SPALD-S/T di Aceh.

Sedangkan di Kota Banda Aceh realisasi capaian penerapan SPM pada Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari masih 80,03 persen, dan realisasi pada Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik mencapai 94,85 persen.

d. Bidang Perumahan Rakyat

Indikator kinerja SPM urusan perumahan rakyat adalah tolok ukur untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang perumahan. SPM urusan perumahan rakyat di provinsi dan kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, yang terdiri atas:

Tabel 2.151 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Aceh			Banda Aceh		
		Target	Realisasi	Keterangan	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	0	Tidak Ada kejadian bencana	100%	1	Tidak Ada kejadian bencana
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100%	0	Tidak ada relokasi program Pemerintah Provinsi	100%	1	Tidak ada relokasi program Pemerintah Daerah

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.151 dapat dilihat bahwa realisasi Pencapaian Layanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Aceh belum ada. Sedangkan untuk Kota Banda Aceh realisasi Pencapaian Layanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat hanya 1 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak ada bencana dan tidak ada masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah baik skala provinsi maupun kota.

e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam menjalankan urusan tersebut, Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), BPBD dan DPKP Kota Banda Aceh memberikan pelayanan dasar dengan menjamin dan memastikan perda/ qanun dan peraturan walikota dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.157 dibawah ini:

Tabel 2.152 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Aceh		Banda Aceh	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	95 %	%	80%	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				100 %
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				85%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				85%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			86,56%	100%

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, BPBD Kota Banda Aceh dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

f. Bidang Sosial

SPM bidang urusan Bidang Sosial mencakup kedalam beberapa jenis pelayanan dasar, yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.153 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Aceh		Banda Aceh	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti			100%	133,33%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti skala			100%	100%
3.	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			100%	129%
5.	Perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kab/Kota			100%	100%
6.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%			
7.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti skala	100%			
8.	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	100%			
9.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	100%			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Aceh		Banda Aceh	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
10.	Perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	100%			

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.153 tersebut diatas dapat dilihat bahwa kewenangan Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota adalah Rehabilitasi Sosial Dasar kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta korban bencana (alam dan sosial). Perbedaan utama kewenangan antara Dinas Sosial provinsi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota adalah di dalam panti sosial dan di luar panti sosial. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2019 s.d 2023 Dinas Sosial Aceh telah memberikan pelayanan yang optimal untuk pelaksanaan kegiatan SPM Bidang Sosial kewenangan provinsi. Semua jenis pelayanan rehabilitasi dasar yang diberikan untuk disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial dilaksanakan melalui sistem di dalam panti.

Di Kota Banda Aceh bidang urusan sosial masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota saat ini. Banyaknya gelandangan dan pengemis dari luar Kota Banda Aceh yang terbukti dengan seringnya pada saat dilakukan razia dan pendataan dan ditemukan banyaknya warga yang memiliki kartu identitas diluar Kota Banda Aceh. Salah satu alasannya adalah Kota Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi Aceh. Anggapan dan harapan sangat bergantung di Kota Banda Aceh, sehingga ini terus akan terjadi dan diperlukan berbagai cara dan sinergi dari semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini.

2.1.4.6 Statistik Sektoral Daerah

Kebijakan Satu Data Indonesia didasari dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral pada lingkup daerah masing-masing. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

Pelaksanaan Satu Data Kota Banda Aceh didukung dan diperkuat oleh Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Satu Data Banda Aceh.

Keberadaan Statistik sektoral daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat data dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dari berbagai bidang kegiatan. Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Banda Aceh tahun 2022 sebesar 1,81 dan tahun 2023 sebesar 1,83 dengan kategori Cukup. Untuk itu dibutuhkan perhatian yang lebih besar dan serius agar bisa meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik Kota Banda Aceh.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan P-RKPD Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan P-RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025. P-RKPD Kota Banda Aceh dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan tahunan. Program pembangunan yang disusun dilakukan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan yang ada dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja atau pelaksanaan pembangunan daerah melalui RKPD. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai triwulan 1 tahun 2025 per Dinas ditunjukkan oleh Tabel 2.154 berikut:

Tabel. 2.154 Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD sampai Triwulan I Tahun 2025 Per OPD

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (N-1)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Tahun 2025			OPD Penanggung Jawab
															I		II										
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja	Rp			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	
1				2	3	4			10= 5+ 9						7			8				9			10= 5+ 9			
1	**01**			**DINAS PENDIDIKAN DAYAH**				**33.113.236.862**			**9.404.228.174**			**21.754.300.829**			**18.394.643.304**										**Dinas Pendidikan Dayah**
1	**01**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah**	**100**	**%**	**14.967.743.376**	**100**		**4.261.053.164**			**3.608.807.343**			**249.149.818**										**Dinas Pendidikan Dayah**
1	**01**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100**	**%**	**99.819.872**	**-**		**4.305.750**			**80.910.000**			**4.305.750**										**Dinas Pendidikan Dayah**
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	99.819.872	-	dokumen	4.305.750	11	dokumen	80.910.000													Dinas Pendidikan Dayah
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**13.673.907.672**	**-**	**0**	**4.112.591.530**			**2.776.237.964**			**82.964.068**										**Dinas Pendidikan Dayah**
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	13.082.307.672	26	bulan	3.895.246.530	18	Orang/bulan	2.776.237.964			82.964.068										Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	591.600.000	24	dokumen	217.345.000															Dinas Pendidikan Dayah
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**55.000.000**	**-**	**%**	**-**			**55.000.000**			**55.000.000**										**Dinas Pendidikan Dayah**
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	101	Paket	55.000.000	-	paket	-															Dinas Pendidikan Dayah
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**513.122.060**	**-**	**%**	**23.863.095**			**190.972.379**			**-**										**Dinas Pendidikan Dayah**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	46	Paket	9.611.484	11	paket	2.626.000	4	paket	6.337.000													Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	66	Paket	195.763.672	-	paket	-	12	paket	63.708.100													Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	Paket	40.746.904	8	paket	16.517.095	6	paket	20.927.000													Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	42	Laporan	267.000.000	6	laporan	4.720.000	10	Laporan	100.000.279													Dinas Pendidikan Dayah
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**80.000.000**	**-**	**0**	**-**			**80.000.000**			**80.000.000**										**Dinas Pendidikan Dayah**
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	Unit	80.000.000	-	unit	-															Dinas Pendidikan Dayah
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**100**	**%**	**332.014.428**	**-**	**%**	**91.830.486**			**161.640.000**			**26.880.000**										**Dinas Pendidikan Dayah**
1	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	48	Laporan	159.800.000	18	laporan	42.498.986	12	Laporan	56.930.000													Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	48	Laporan	172.214.428	16	laporan	49.331.500	12	Laporan	104.710.000			26.880.000										Dinas Pendidikan Dayah
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang**	**100**	**%**	**213.879.344**	**-**	**%**	**28.462.303**			**264.047.000**			**-**										**Dinas Pendidikan Dayah**
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	8	Unit	73.544.000	1	unit	22.985.800	2	Unit	164.047.000													Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	4	Unit	120.000.000	-	unit	-	1	Unit	100.000.000													Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	98	Unit	20.335.344	12	Unit	5.476.503															Dinas Pendidikan Dayah
1	**01**	**07**		**PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH**	**Persentase dayah yang terakreditasi sesuai dengan Standar**	**100**	**%**	**18.145.493.486**	**-**	**%**	**5.143.175.010**			**18.145.493.486**			**18.145.493.486**										**Dinas Pendidikan**
1	**01**	**07**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Dayah**	**Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai dengan Standar**	**38**	**Dayah**	**18.145.493.486**	**-**	**dayah**	**5.143.175.010**			**5.028.301.500**			**-**										**Dinas Pendidikan**
1	01	07	2.01	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun	38	Unit	7.910.041.221	4	Unit	1.674.609.000	11	Unit	2.834.620.000													Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	02	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi	38	Unit	411.760.240	4	Unit	569.422.000	1	Unit	56.387.600													Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	03	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang	180	Orang	2.899.150.108	-	Orang	-	50	Orang	92.798.800													Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	660	Peserta	4.535.025.567	151	Peserta Didik	1.872.903.010	150	peserta didik	925.012.300													Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	05	Pembinaan Manajemen Dayah	Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	38	Dayah	169.347.104	4	Satuan Pendidikan	284.419.000	40	Satuan Pendidikan	500.759.800													Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	06	Penelitian dan Pengembangan Dayah	Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	23	Dayah	95.544.616	-	Dayah	-															Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	07	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	Jumlah Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan	23	Dayah	165.344.616	-	Satuan Pendidikan	-	40	Satuan Pendidikan	487.827.800													Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	08	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	1000	Buku	220.360.272	-	Buku	-	5	Buku	53.630.000													Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	09	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang	8	Dayah	732.436.046	3	Unit	467.222.000	1	Unit	57.530.000													Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Kependidikan Dayah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan	10	Dokumen	168.544.616	-	Dokumen	-															Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	12	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian	23	Dayah	168.271.016	-	Satuan Pendidikan	-	40	Satuan Pendidikan	19.735.200													Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	13	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan	Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan	23	Dayah	170.007.816	-	Dayah	-															Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	14	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah	Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun	23	Dayah	165.344.616	-	Dayah	75.000.000															Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	15	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil	Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi	200	Peserta	168.971.016	-	Peserta Didik	-															Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	16	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren	Jumlah Supervisi dan Fasilitasi Satuan	23	Dokumen	165.344.616	-	Dokumen	199.600.000															Dinas Pendidikan Dayah
1	**01**			**SEKRETARIAT MPD**		**9.575.116.562**			**-**	**0**	**3.310.992.729**			**2.887.139.346**			**514.604.930**										
1	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat**	**100**	**%**	**8.725.858.853**	**-**	**%**	**3.171.896.329**			**2.574.042.546**			**375.508.530**										**Sekretariat MPD**
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan**	**100**	**%**	**59.050.965**	**-**	**%**	**9.766.060**			**78.808.000**			**-**										**Sekretariat MPD**
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	59.050.965	-	Dokumen	9.766.060	11	Dokumen	78.808.000													Sekretariat MPD
1	**01**	**02**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan**	**100**	**%**	**7.857.645.288**	**-**	**%**	**2.923.557.304**			**1.445.938.346**			**189.565.130**										**Sekretariat MPD**
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	bulan	4.414.845.288	18	Bulan	1.847.522.304	10	Orang/bulan	1.445.938.346			189.565.130										Sekretariat MPD
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	48	bulan	3.442.800.000	18	dokumen	1.076.035.000															Sekretariat MPD
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**100**	**%**	**35.200.000**	**-**	**%**	**-**			**8.250.000**			**-**										**Sekretariat MPD**
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	35.200.000	-	Paket	-	1	Paket	8.250.000													Sekretariat MPD
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi**	**100**	**%**	**251.170.600**	**-**	**%**	**91.021.845**			**105.522.200**			**2.389.200**										**Sekretariat MPD**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4	Paket	9.904.000	2	Paket	2.895.000	4	Paket	4.985.000													Sekretariat MPD
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	120.000.000	2	Paket	30.000.000	10	Paket	26.600.000													Sekretariat MPD
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	41.266.600	2	Paket	12.684.605	4	Paket	13.937.200			2.389.200										Sekretariat MPD
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	16	Laporan	80.000.000	1	Laporan	45.442.240	8	Laporan	60.000.000													Sekretariat MPD
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**			**-**			**-**										**Sekretariat MPD**
1	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1	Unit	-	-	0	-															Sekretariat MPD
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**100**	**%**	**355.640.000**	**-**	**%**	**82.121.260**			**782.340.000**			**179.200.000**										**Sekretariat MPD**
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	4	Laporan	146.400.000	2	Laporan	26.713.260	12	Laporan	27.600.000			179.200.000										Sekretariat MPD
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	4	Laporan	209.240.000	2	Laporan	55.408.000	12	Laporan	754.740.000													Sekretariat MPD
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang**	**100**	**%**	**167.152.000**	**-**	**%**	**65.429.860**			**153.184.000**			**4.354.200**										**Sekretariat MPD**
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	24	Unit	114.420.000	9	Unit	60.517.300	4	Unit	149.194.000			4.354.200										Sekretariat MPD
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	4	Unit	-	-	Unit	-															Sekretariat MPD
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	48	Unit	52.732.000	12	Unit	4.912.560	12	Unit	3.990.000													Sekretariat MPD
1	**01**	**08**		**Program Penyelenggara Sekretariat Majelis Pendidikan**	**Persentase kebijakan yang dihasilkan terkait penganugerahan**	**100**	**%**	**849.257.709**	**-**	**0**	**139.096.400**			**313.096.800**			**139.096.400**										**Sekretariat MPD**
1	**01**	**08**	**7.01**		**Penyelenggaraan kebijakan Pendidikan Aceh**	**Persentase kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang**	**100**	**%**	**42.802.064**	**-**	**0**	**-**			**-**			**-**										**Sekretariat MPD**
1	01	08	7.01	01	Penetapan Standar Pendidikan Aceh	Jumlah Standar Pendidikan Aceh Tersusun	4	Dokumen	21.401.032	-	Dokumen	-	-															Sekretariat MPD
1	01	08	7.01	02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem	2	Satuan	21.401.032	-	Satuan Pendidikan	-	-															Sekretariat MPD
1	**01**	**08**	**7.03**		**Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan**	**Persentase Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran**	**100**	**%**	**150.262.111**	**-**	**%**	**-**			**201.786.800**			**-**										**Sekretariat MPD**
1	01	08	7.03	01	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang	Jumlah Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan	4	Dokumen	115.066.929	-	Dokumen	-	-															Sekretariat MPD
1	01	08	7.03	02	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama	4	Dokumen	35.195.182	-	Dokumen	-	1	Dokumen	201.786.800													Sekretariat MPD
1	01	08	7.03	03	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Aceh	2	Satuan	-	-	0	-															Sekretariat MPD
1	**01**	**08**	**7.04**		**Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan**	**100**	**%**	**112.788.366**	**-**	**0**	**-**			**49.090.000**			**-**										**Sekretariat MPD**
1	01	08	7.04	01	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan	80	Orang	112.788.366	-	0	-	40	Orang	49.090.000													Sekretariat MPD
1	01	08	7.04	02	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan	40	Orang	-	-	0	-															Sekretariat MPD
1	**01**	**08**	**7.05**		**Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu**	**Persentase Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan**	**100**	**%**	**543.405.168**	**12**	**%**	**139.096.400**			**62.220.000**			**-**										**Sekretariat MPD**
1	01	08	7.05	01	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil	Jumlah Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang	80	Peserta	26.401.032	-	Peserta Didik	-	-		0,00													Sekretariat MPD
1	01	08	7.05	02	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang	2	Satuan	463.202.072	2	Satuan Pendidikan	139.096.400	2	Satuan Pendidikan	62.220.000													Sekretariat MPD
1	01	08	7.05	03	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap	Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian	2	Satuan	30.401.032	-	Satuan Pendidikan	-	-		0,00													Sekretariat MPD
1	01	08	7.05	04	Pemilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar	Jumlah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah	2	Satuan	23.401.032	-	Satuan Pendidikan	-	-		0,00													Sekretariat MPD
1	**01**			**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**				**1.206.796.281.014**	**-**	**0**	**374.589.712.164**			**294.703.161.725**			**54.867.414.812**										**Dinas Pendidikan dan**
1	**01**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat**	**100**	**%**	**899.373.153.084**	**-**	**%**	**287.153.770.392**			**212.858.726.721**			**53.378.823.400**										**Dinas Pendidikan dan**
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan**	**100**	**%**	**192.491.684**	**-**	**%**	**13.995.135**			**122.210.000**			**-**										**Dinas Pendidikan dan**
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	192.491.684	-	Dokumen	13.995.135	11	Dokumen	122.210.000													Dinas Pendidikan dan
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**890.145.864.043**	**-**	**%**	**285.746.452.814**			**208.851.200.281**			**52.936.199.056**										**Dinas Pendidikan dan**
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	885.405.944.043	12	Bulan	282.430.256.437	1.880	Orang/bulan	208.851.200.281			52.936.199.056										Dinas Pendidikan dan
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	48	Bulan	4.739.920.000	12	Bulan	3.316.196.377															Dinas Pendidikan dan
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**100**	**%**	**4.479.000.000**	**-**	**%**	**-**			**1.135.980.000**			**-**										**Dinas Pendidikan dan**
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8076	paket	4.479.000.000	-	Paket	-	7	Paket	1.135.980.000													Dinas Pendidikan dan
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum**	**100**	**%**	**806.595.238**	**-**	**%**	**254.005.415**			**227.361.940**			**-**										**Dinas Pendidikan dan**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	60	paket	17.813.816	-	Paket	4.557.300	4	Paket	21.656.000													Dinas Pendidikan dan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	paket	122.132.140	-	Paket	17.248.400	4	Paket	40.164.800													Dinas Pendidikan dan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	60	laporan	666.649.282	-	Laporan	232.199.715	15	Laporan	165.541.140													Dinas Pendidikan dan
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**777.146.676**	**-**	**%**	**160.333.000**			**36.000.000**			**-**										**Dinas Pendidikan dan**
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	4	unit	20.000.000	-	Unit	-	1	unit	36.000.000													Dinas Pendidikan dan
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	40	unit	757.146.676	-	Unit	160.333.000															Dinas Pendidikan dan
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**100**	**%**	**1.816.878.303**	**-**	**%**	**704.404.678**			**2.250.087.500**			**442.624.344**										**Dinas Pendidikan dan**
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	48	laporan	1.314.750.535	7	Laporan	524.072.378	12	Laporan	459.630.000			54.484.344										Dinas Pendidikan dan
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	48	laporan	502.127.768	3	Laporan	180.332.300	12	Laporan	1.790.457.500			388.140.000										Dinas Pendidikan dan
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang**	**100**	**%**	**1.155.177.140**	**-**	**%**	**274.579.350**			**235.887.000**			**-**										**Dinas Pendidikan dan**
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	28	unit	310.811.200	1	Unit	140.223.150	2	Unit	194.934.000													Dinas Pendidikan dan
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	unit	125.205.940	1	Unit	102.555.200	40	Unit	40.953.000													Dinas Pendidikan dan
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	8	unit	719.160.000	-

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan	26	dokumen	1.200.900.000	0	699.152.000	1	kegiatan	537.138.300																			Dispora
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan	764	orang	2.365.553.152	0	33.019.000																						Dispora
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat**	**Persentase pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan**	**100**	**%**	**1.459.650.310**	**0**	**300.000.000**			**1.459.650.310**																			**Dispora**
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	1430	orang	200.000.000	0	-																						Dispora
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan	830	orang	1.214.650.310	0	300.000.000																						Dispora
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan	8	dokumen	45.000.000	0	-																						Dispora
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan**	**100**	**%**	**4.095.600.000**	**0**	**3.000.000.000**			**1.003.820.000**																			**Dispora**
2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	4	dokumen	45.000.000	0	-																						Dispora
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan	8	dokumen	4.005.600.000	0	3.000.000.000																						Dispora
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi	4	dokumen	45.000.000	0	-	2	dokumen	1.003.820.000																			Dispora
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan**	**100**	**%**	**712.200.000**	**0**	**343.596.050**			**453.920.000**																			**Dispora**
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan	11	dokumen	401.100.000	0	343.596.050	1	lembaga	310.890.000																			Dispora
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	11	dokumen	311.100.000	0	-	1	dokumen	143.030.000																			Dispora
2	**19**	**04**			**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas**	**100**	**%**	**1.605.600.000**	**0**	**794.334.545**			**1.605.600.000**																			**Dispora**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan dan pengembangan Organisasi**	**100**	**%**	**1.605.600.000**	**0**	**794.334.545**			**203.630.000**																			**Dispora**
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat daerah	4	laporan	1.605.600.000	0	794.334.545	1	laporan	203.630.000																			Dispora
2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang			-	0	-																						Dispora
4	**01**				**Sekretariat Daerah**				**205.703.228.592**	**0**	**70.248.484.836**			**70.302.452.790**																		**10.920.312.421**		**Sekda**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat**	**100**	**%**	**182.258.627.203**	**0**	**65.108.756.478**			**46.857.851.401**																		**10.920.312.421**		**Bag. Umum**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan**	**100**	**%**	**215.721.436**	**0**	**5.419.085**			**47.537.000**																				**Bag. Adm.**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	215.721.436	0	5.419.085	8	Dokumen	47.537.000																			Bag. Adm. Pembangunan
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat**	**100**	**%**	**105.252.989.792**	**0**	**33.608.002.532**			**20.856.771.889**																		**6.378.897.034**		**Bag. Umum**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	bulan	89.004.989.792	0	27.880.240.071	173/12	org/bulan	20.842.836.889																		6.378.897.034	Bag. Umum
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	48	bulan	16.248.000.000	0	5.727.762.461	2	Dokumen	13.935.000																			Bag. Umum
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian**	**100**	**%**	**1.334.900.000**	**0**	**54.200.000**			**207.150.000**																				**Bag. Umum**
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2568	Paket	1.314.900.000	0	54.200.000	391	paket	207.150.000																			Bag. Umum
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	40	Orang	20.000.000	0	-																						Bag. Umum
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat**	**100**	**%**	**15.360.525.218**	**0**	**8.178.002.762**			**3.819.338.285**																		**858.145.542**		**Bag. Umum**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2	Paket	163.442.000	0	163.442.000	2	Paket	359.963.000																		68.299.100	Bag. Umum
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	800	Paket	5.741.467.404	0	2.507.889.780	12	Paket	1.440.591.285																		156.291.900	Bag. Umum
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	400	Paket	406.825.334	0	234.063.000																						Bag. Umum
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	Paket	1.165.608.800	0	552.817.803	11	paket	258.600.000																		39.645.500	Bag. Umum
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4000	Paket	666.161.480	0	247.452.955	3	paket	103.387.000																		9.511.000	Bag. Umum
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	17	Dokumen	80.462.200	0	53.887.200	7	Dokumen	116.760.000																			Bag. Prokopim
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi da Konsultasi	480	Laporan	7.300.000.000	0	4.418.450.024	560	Laporan	1.900.000.000																		652.697.142	Bag. Umum
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**4.732.799.394**	**0**	**137.962.000**			**5.280.567.475**																		**2.998.000.000**		**Bag. Umum**
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	3	Unit	4.000.000.000	0	65.800.000	2	unit	3.000.000.000																		2.998.000.000	Bag. Umum
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	80	Unit	532.799.394	0	35.802.000	34	unit	65.970.000																			Bag. Umum
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	200	Unit	200.000.000	0	36.360.000	3	unit	706.418.000																			Bag. Umum
4	01	01	2.07	xx	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya					0		65	unit	1.508.179.475																			
4	01	01	2.08	xx	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan	100	%	18.413.269.552	0	7.764.120.146			8.859.900.012																				Bag. Umum
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4000	Laporan	32.000.000	0	6.000.000	12	Laporan	7.500.000																			Bag. Umum
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	48	Laporan	6.548.400.000	0	2.785.655.379	12	Laporan	1.985.000.000																		400.316.311	Bag. Umum
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	48	Laporan	1.751.084.000	0	784.076.567	12	Bulan	219.000.000																			Bag. Umum
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	48	Laporan	10.081.785.552	0	4.188.388.200	12	Laporan	6.648.400.012																		971.263.123	Bag. Umum
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang**	**100**	**%**	**16.278.477.200**	**0**	**6.115.993.556**			**2.262.944.000**																		**328.999.000**		**Bag. Umum**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	400	Unit	6.669.115.492	0	2.902.271.706	22	Unit	595.000.000																		154.966.000	Bag. Umum
4	01	01	2.09	xx	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas				0		12	unit	1.300.000.000																		138.093.400	
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	200	Unit	100.000.000	0	20.076.000	45	unit	30.540.000																			Bag. Umum
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40	Unit	690.000.000	0	262.885.000	200	unit	837.404.000																		13.951.000	Bag. Umum
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di	16	Unit	6.729.361.708	0	1.981.827.450	4	unit	800.000.000																		160.082.000	Bag. Umum
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	120	Unit	2.090.000.000	0	949.733.400																						Bag. Umum
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan**	**100**	**%**	**3.803.608.104**	**0**	**1.044.552.500**			**984.078.140**																		**197.531.845**		**Bag. Umum**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	8/48	Orang/Bula	936.408.104	0	11.512.500	2/12	org/bulan	192.278.140																		15.431.845	Bag. Umum
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	40	Paket	347.200.000	0	154.000.000	3	paket	141.800.000																		82.100.000	Bag. Umum
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah	8	Orang	120.000.000	0	29.040.000	8	orang	50.000.000																			Bag. Umum
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional	8/48	Orang/Bula	2.400.000.000	0	850.000.000	2/12	ORANG/BULAN	600.000.000																		100.000.000	Bag. Umum
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Fasilitasi**	**100**	**%**	**10.643.400.000**	**0**	**4.362.696.147**			**2.357.160.000**																		**158.739.000**		**Bag. Umum**
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang	48	Paket	9.062.200.000	0	3.789.861.000	2	Paket	1.492.920.000																		118.751.000	Bag. Umum
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	48	Paket	178.800.000	0	57.700.000	2	Paket	742.120.000																		39.988.000	Bag. Umum
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang	48	Paket	1.402.400.000	0	515.135.147	1	paket	122.120.000																			Bag. Umum
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Persentase Pemenuhan Penataan Organisasi**	**100**	**%**	**2.527.633.408**	**0**	**482.794.000**			**539.289.600**																				**Bag. Organisasi**
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8	Dokumen	890.721.616	0	227.794.000	4	Dokumen	195.559.600																			Bag. Organisasi
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata	8	Laporan	1.015.766.276	0	255.000.000	3	Laporan	320.560.000																			Bag. Organisasi
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	8	Dokumen	621.145.516	0	-	2	Dokumen	23.170.000																			Bag. Organisasi
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian				0		2	Dokumen	172.688.000																			
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja				0																							
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100**	**%**	**3.695.303.099**	**0**	**3.355.013.750**			**1.643.115.000**																				**Bag. Prokopim**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	330	Laporan	65.090.000	0	28.700.000	200	Laporan	185.120.000																			Bag. Prokopim
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	330	Laporan	113.823.000	0	136.975.000	200	Laporan	207.420.000																			Bag. Prokopim
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3080	Laporan	3.516.390.099	0	3.189.338.750	200	Laporan	1.250.575.000																			Bag. Prokopim
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN**	**Persentase Implementasi Kebijakan Pemerintahan dan**	**100**	**%**	**14.438.539.364**	**0**	**3.563.631.917**			**14.438.539.364**																				**Bag. Pemerintahan,**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**2.003.312.112**	**0**	**195.212.115**			**367.567.300**																				**Bag. Pemerintahan**
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	8	Dokumen	424.882.200	0	8.037.865	3	Dokumen	65.877.800																			Bag. Pemerintahan
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	8	Dokumen	812.631.092	0	12.072.385	2	Dokumen	87.033.200																			Bag. Pemerintahan
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	8	Dokumen	765.799.820	0	175.101.865	3	Dokumen	214.656.300																			Bag. Pemerintahan
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**%**	**6.730.062.368**	**0**	**2.000.154.000**			**2.409.930.000**																				**Bag. Keistimewaan**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	8	Dokumen	1.594.746.832	0	495.925.000	1	Dokumen	1.208.330.000																			Bag. Keistimewaan
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	8	Dokumen	1.054.534.040	0	562.030.000	1	Dokumen	1.027.680.000																			Bag. Keistimewaan
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja	8	Dokumen	4.080.781.496	0	942.199.000	1	Dokumen	173.920.000																			Bag. Keistimewaan
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**100**	**%**	**5.434.083.676**	**0**	**1.227.218.760**			**1.559.430.600**																				**Bag. Hukum**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang Disusun	180	Dokumen	1.751.306.660	0	327.309.260	45	Dokumen	664.231.000																			Bag. Hukum
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20	Kasus	2.393.938.484	0	892.029.500	5	Kasus	768.250.600																			Bag. Hukum
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang	180	Dokumen	1.288.838.532	0	7.880.000	45	Dokumen	126.944.000																			Bag. Hukum
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase Implementasi Kerjasama Dalam Negeri**	**100**	**%**	**271.080.208**	**0**	**141.047.042**			**175.297.400**																		**40.000.000**		**Bag. Pemerintahan**
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	60	Dokumen	271.080.208	0	79.680.092	15	Dokumen	175.297.400																		40.000.000	Bag. Pemerintahan
4	01	02	2.04	02	fasilitasi Kerja sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				0	61.366.950	2	Dokumen	174.373.614																			
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				0		1	Laporan	3.276.000																			
4	**01**				**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian dan**	**100**	**%**	**9.006.062.025**	**0**	**1.576.096.441**			**9.006.062.025**																				**Bag. Perekonomian,**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**1.801.576.560**	**0**	**75.312.373**			**245.229.900**																				**Bag. Perekonomian**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan	4	Dokumen	555.095.564	0	7.561.716	3	Dokumen	15.652.500																			Bag. Perekonomian
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Laporan	836.974.668	0	67.750.657	3	Laporan	185.679.000																			Bag. Perekonomian
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi	4	Dokumen	409.506.328	0	-	2	Dokumen	43.898.400																			Bag. Perekonomian
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah dilaksanakan**	**100**	**%**	**6.367.086.872**	**0**	**737.641.300**			**703.312.450**																				**Bag. Adm. Pemb.**
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program	4	Dokumen	1.628.000.000	0	325.874.000	1	Dokumen	144.080.000																			Bag. Adm. Pemb.
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program	8	Laporan	2.148.800.000	0	381.325.000	2	Laporan	376.675.000																			Bag. Adm. Pemb.
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan	68	Laporan	2.590.286.872	0	30.442.300	12	Laporan	182.557.450																			Bag. Adm. Pemb.
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Tersedianya Jasa Layanan Pengadaan Barang**	**100**	**%**	**837.398.593**	**0**	**763.142.768**			**1.183.671.445**																		**54.000.000**		**Bag. PBJ**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	440	Dokumen	460.593.162	0	397.274.922	110	Dokumen	765.746.400																			Bag. PBJ
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	8	Dokumen	125.005.601	0	12.873.016	1	Dokumen	111.002.960																			Bag. PBJ
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi	44	Orang	251.799.830	0	352.994.830	52	Orang	306.922.085																	54.000.000		Bag. PBJ
4	**02**				**Sekretariat DPRK**				**181.134.056.344**	**0**	**90.674.983.937**			**38.819.412.755**																		**10.148.457.014**		**Set. DPRK Banda**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat**	**100**	**%**	**157.941.771.881**	**0**	**58.412.624.419**			**32.844.876.555**																		**10.148.457.014**		**Set. DPRK Banda**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan**	**100**	**%**	**32.572.704**	**0**	**4.630.860**			**61.810.800**																				**Set. DPRK Banda**
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang Disediakan	20	Dokumen	32.572.704	0	4.630.860	8	dokumen	61.810.800																			Set. DPRK Banda

| | | |

| | | |

| | | |

7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	40	Laporan	27.279.680	0	5.689.200	10	Lembaga Kemasyarakatan	7.829.000																			Kec. Banda Raya
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	8	Laporan	161.667.216	0	-	2	Laporan	19.864.000																			Kec. Banda Raya
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan**	**Persentase Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan**	**100**	**%**	**33.000.000**	**0**	**-**			**33.000.000**																			**Kec. Banda Raya**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di	4	Dokumen	33.000.000	0	-																					Kec. Banda Raya
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100**	**%**	**78.441.728**	**0**	**-**			**78.441.728**																			**Kec. Banda Raya**
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	200	Keluarga	78.441.728	0	-																					Kec. Banda Raya
7	**01**	**03**	**7.04**		**Pemberdayaan Mukim**	**Persentase Pemberdayaan Mukim**	**100**	**%**	**8.453.053**	**0**	**23.400.000**			**57.600.000**		**11.700.000**																	**Kec. Banda Raya**
7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	1	Dokumen	5.000.000	0	23.400.000			57.600.000		11.700.000															Kec. Banda Raya
7	01	03	7.04	04	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim	1	Laporan	3.453.053	0	-																					Kec. Banda Raya
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	**PERSENTASE PELAKSANAAN KOORDINASI**	**100**	**%**	**32.000.000**	**0**	**44.841.840**			**32.000.000**																			**Kec. Banda Raya**
7	**01**	**04**	**7.03**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan**	**100**	**%**	**32.000.000**	**0**	**44.841.840**			**32.000.000**																			**Kec. Banda Raya**
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	12	Laporan	32.000.000	0	44.841.840																					Kec. Banda Raya
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN**	**100**	**%**	**32.000.000**	**0**	**7.500.000**			**43.755.000**		**3.000.000**																	**Kec. Banda Raya**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**%**	**32.000.000**	**0**	**7.500.000**			**43.755.000**		**3.000.000**																	**Kec. Banda Raya**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	4	Dok	32.000.000	0	7.500.000	12	Dokumen	43.755.000		3.000.000															Kec. Banda Raya
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	**PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN**	**100**	**%**	**385.432.676**	**0**	**7.471.550**			**120.313.000**																			**Kec. Banda Raya**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**	**Persentase fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan**	**100**	**%**	**385.432.676**	**0**	**7.471.550**			**120.313.000**																			**Kec. Banda Raya**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi	40	Dokumen	67.098.761	0	-																					Kec. Banda Raya
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan	40	Dokumen	187.591.491	0	-	10	Dokumen	56.580.000																	Kec. Banda Raya
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	40	Dokumen	33.075.144	0	7.471.550	5	Dokumen	32.015.000																	Kec. Banda Raya
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	4	Dokumen	32.134.484	0	-																					Kec. Banda Raya
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian	4	Dokumen	18.490.820	0	-																					Kec. Banda Raya
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan	8	Dokumen	47.041.976	0	-	10	Dokumen	31.718.000																	Kec. Banda Raya
9	**01**	**02**			**PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**Persentase Syariat Islam di kecamatan**	**83**	**%**	**17.000.000**	**0**	**-**			**17.000.000**																			**Kec. Banda Raya**
9	**01**	**02**	**7.02**		**Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan**	**Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan**	**100**	**%**	**17.000.000**	**0**	**-**			**17.000.000**																			**Kec. Banda Raya**
9	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	180	Orang	17.000.000	0	-																					Kec. Banda Raya
7	**01**				**Kecamatan Kuta Raja**				**11.198.804.676**	**0**	**3.330.473.292**			**3.391.367.196**		**950.845.438**																	**Kec. Kuta Raja**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**100**	**%**	**10.373.607.048**	**0**	**3.194.743.602**			**2.779.435.696**		**946.345.438**																	**Kec. Kuta Raja**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan**	**100**	**%**	**4.772.624**	**0**	**-**			**75.919.500**		**-**																	**Kec. Kuta Raja**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	8	Dokumen	4.772.624	0	-	7	Dokumen	75.919.500																	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat**	**100**	**%**	**9.733.390.776**	**0**	**3.044.587.663**			**2.174.103.658**		**721.004.343**																	**Kec. Kuta Raja**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	48	bln	9.087.070.776	0	2.847.552.663	15	Orang/Bulan	2.019.843.658		721.004.343															Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	48	Bulan	646.320.000	0	197.035.000	12	Dokumen	154.260.000																	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian**	**100**	**%**	**39.600.000**	**0**	**-**			**11.000.000**																	**Kec. Kuta Raja**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	92	Paket	39.600.000	0	-	20	Paket	11.000.000																	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat**	**100**	**%**	**101.994.888**	**0**	**19.607.685**			**60.731.000**																	**Kec. Kuta Raja**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	12	Paket	10.835.516	0	3.198.000	3	PAket	5.933.000																	Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	16	Paket	11.159.372	0	3.533.685	4	Paket	4.798.000																	Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	8	Laporan	80.000.000	0	12.876.000	2	Laporan	50.000.000																	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**17.778.668**	**0**	**-**			**173.750.000**																	**Kec. Kuta Raja**
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	1	Unit	-	0	-																					Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	0	-																					Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1	Unit	-	0	-																					Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	3	Unit	17.778.668	0	-	1	unit	173.750.000																	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**100**	**%**	**296.603.372**	**0**	**89.442.754**			**104.464.818**		**45.874.375**																	**Kec. Kuta Raja**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	48	Laporan	175.667.972	0	41.016.754	12	Laporan	43.954.318		5.514.375															Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	48	Laporan	120.935.400	0	48.426.000	12	Laporan	60.510.500		40.360.000															Kec. Kuta Raja
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang**	**100**	**%**	**179.466.720**	**0**	**41.105.500**			**179.466.720**		**179.466.720**																	**Kec. Kuta Raja**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	3	Unit	68.260.000	0	34.290.500					23.290.000															Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	20	Unit	13.782.412	0	6.815.000																					Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	97.424.308	0	-																					Kec. Kuta Raja
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**PERSENTASE PROGRAM**	**100**	**%**	**115.000.000**	**0**	**19.953.000**			**126.405.800**																	**Kec. Kuta Raja**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**	**100**	**%**	**74.600.000**	**0**	**11.608.000**			**74.600.000**																	**Kec. Kuta Raja**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	48	Dokumen	74.600.000	0	11.608.000																					Kec. Kuta Raja
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang**	**100**	**%**	**25.800.000**	**0**	**-**			**17.330.000**																	**Kec. Kuta Raja**
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelayanan kepada	48	Dokumen	25.800.000	0	-	12	Dokumen	17.330.000																	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang**	**100**	**%**	**14.600.000**	**0**	**8.345.000**			**34.475.800**																	**Kec. Kuta Raja**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	4	Dokumen	3.800.000	0	-	4	Laporan	34.475.800																	Kec. Kuta Raja
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16	Laporan	10.800.000	0	8.345.000																					Kec. Kuta Raja
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**100**	**%**	**214.011.316**	**0**	**51.626.690**			**122.632.200**																	**Kec. Kuta Raja**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**%**	**140.326.316**	**0**	**9.826.690**			**34.627.200**																	**Kec. Kuta Raja**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	6	LembagaKe	23.311.316	0	9.826.690	6	Lembaga Kemasyarakatan	6.635.200																	Kec. Kuta Raja
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	8	Laporan	117.015.000	0	-	2	Laporan	27.992.000																	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan**	**100**	**%**	**53.585.000**	**0**	**-**			**53.585.000**																	**Kec. Kuta Raja**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di	4	Dokumen	53.585.000	0	-																					Kec. Kuta Raja
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100**	**%**	**3.600.000**	**0**	**-**			**3.600.000**																	**Kec. Kuta Raja**
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	4	Dokumen	3.600.000	0	-																					Kec. Kuta Raja
7	**01**	**03**	**7.04**		**Pemberdayaan Mukim**	**Persentase Pemberdayaan Mukim**	**100**	**%**	**16.500.000**	**0**	**41.800.000**			**30.820.000**		**7.200.000**																	**Kec. Kuta Raja**
7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	4	Dokumen	8.250.000	0	41.800.000	12	Dokumen	30.820.000		7.200.000															Kec. Kuta Raja
7	01	03	7.04	04	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim	4	Laporan	8.250.000	0	-																					Kec. Kuta Raja
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	**PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI**	**100**	**%**	**9.600.000**	**0**	**29.950.000**			**9.600.000**																	**Kec. Kuta Raja**
7	**01**	**04**	**7.03**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan**	**100**	**%**	**9.600.000**	**0**	**29.950.000**			**9.600.000**																	**Kec. Kuta Raja**
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	12	Dokumen	9.600.000	0	29.950.000																					Kec. Kuta Raja
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**100**	**%**	**8.000.000**	**0**	**7.500.000**			**39.138.000**		**4.500.000**																	**Kec. Kuta Raja**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**%**	**8.000.000**	**0**	**7.500.000**			**39.138.000**		**4.500.000**																	**Kec. Kuta Raja**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	12	Dokumen	8.000.000	0	7.500.000	12	Dokumen	39.138.000		4.500.000															Kec. Kuta Raja
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	**100**	**%**	**278.586.312**	**0**	**26.700.000**			**114.155.500**																	**Kec. Kuta Raja**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi**	**100**	**%**	**278.586.312**	**0**	**26.700.000**			**114.155.500**																	**Kec. Kuta Raja**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi	12	Dokumen	37.850.000	0	-																					Kec. Kuta Raja
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan	4	Dokumen	38.000.000	0	14.025.000	1	Dokumen	64.503.000																	Kec. Kuta Raja
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	5	Dokumen	33.229.734	0	8.415.000	4	Dokumen	16.505.000																	Kec. Kuta Raja
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	4	Dokumen	32.256.578	0	-																					Kec. Kuta Raja
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian	4	Dokumen	33.450.000	0	-																					Kec. Kuta Raja
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan	4	Dokumen	103.800.000	0	4.260.000	3	Dokumen	33.147.500																	Kec. Kuta Raja
9	**01**	**02**			**PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**PERSENTASE PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**100**	**%**	**200.000.000**	**0**	**-**			**200.000.000**																	**Kec. Kuta Raja**
9	**01**	**02**	**7.02**		**Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan**	**Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan**	**100**	**%**	**200.000.000**	**0**	**-**			**200.000.000**																	**Kec. Kuta Raja**
9	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	12	Dokumen	200.000.000	0	-																					Kec. Kuta Raja
7	**01**				**Kecamatan Jaya Baru**				**12.679.966.884**	**0**	**3.856.371.627**			**3.293.714.313**		**700.186.659**																	**Kec. Jaya Baru**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Nilai**	**C**	**11.946.180.184**	**0**	**3.683.981.362**			**2.845.025.213**		**695.686.659**																	**Kec. Jaya Baru**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan**	**7**	**dok**	**56.347.936**	**0**	**-**			**55.170.000**		**1.347.000**																	**Kec. Jaya Baru**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	7	Dok	56.347.936	0	-	5	Dokumen	55.170.000		1.347.000															Kec. Jaya Baru
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat**	**100**	**%**	**11.322.424.624**	**0**	**3.413.181.622**			**2.281.841.213**		**621.836.952**																	**Kec. Jaya Baru**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	48	Bulan	10.541.224.624	0	3.196.526.622	20	Orang/Bulan	2.139.581.213		621.836.952															Kec. Jaya Baru
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	48	Bulan	781.200.000	0	216.655.000	12	Dokumen	142.260.000																	Kec. Jaya Baru
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian**	**100**	**%**	**50.600.000**	**0**	**-**			**11.550.000**																	**Kec. Jaya Baru**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	25	stel	50.600.000	0	-	25	Paket	11.550.000																	Kec. Jaya Baru
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat**	**100**	**%**	**94.294.352**	**0**	**69.101.089**			**60.055.000**		**4.058.200**																	**Kec. Jaya Baru**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	12	bln	3.043.996	0	3.980.000	12	paket	3.452.000		686.400															Kec. Jaya Baru
7	01	01	2.06	xx	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0						2.309.100															
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bln	31.773.244	0	22.191.175	12	Paket	6.603.000		1.062.700															Kec. Jaya Baru
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	48	Laporan	59.477.112	0	42.929.914	2	Laporan	50.000.000																	Kec. Jaya Baru
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**8.000.000**	**0**	**9.850.000**			**141.663.000**																	**Kec. Jaya Baru**
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	3	unit	2.000.000	0	-																					Kec. Jaya Baru
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	4	jenis	2.000.000	0	9.850.000	4	unit	141.663.000																	Kec. Jaya Baru
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1	Unit	2.000.000	0	-																					Kec. Jaya Baru
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	36	unit	2.000.000	0	-																					Kec. Jaya Baru
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**100**	**%**	**322.946.332**	**0**	**124.171.851**			**139.676.000**		**44.219.507**																	**Kec. Jaya Baru**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	Bln	215.624.000	0	74.786.851	12	Laporan	64.826.000		4.179.507															Kec. Jaya Baru
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	Bln	107.322.332	0	49.385.000	12	Laporan	74.850.000		40.040.000															Kec. Jaya Baru
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang**			**91.566.940**	**0**	**67.676.800**			**155.070.000**		**24.225.000**																	**Kec. Jaya Baru**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	3	unit	80.536.000	0	61.143.800	3	unit	123.382.000		24225000															Kec. Jaya Baru
7	01

| | | |

9	01	02	7.02		**Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan**	**Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan**	**100**	**%**	**397.520.000**		**0**	**-**			**397.520.000**																				**Kec. Ulee Kareng**
9	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	180	Orang	397.520.000		0	-																					Kec. Ulee Kareng
5	**02**				**Badan Pengelolaan Keuangan**				**699.557.008.038**		**0**	**263.452.953.365**			**329.392.012.516**		**28.899.668.581**																	**BPKK**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat**	**100**	**%**	**90.370.107.556**		**0**	**35.634.039.345**			**31.919.980.943**		**6.824.091.641**																				**BPKK**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan**	**100**	**%**	**410.922.026**		**0**	**63.150.000**			**82.719.800**		**7.174.000**																				**BPKK**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	24	Dokumen	271.448.496		0	63.150.000	7	Dokumen	82.719.800		7.174.000																		BPKK
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	72	Laporan	109.473.530		0	-																							BPKK
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	3	Laporan	30.000.000		0	-																							BPKK
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat**	**100**	**%**	**72.310.955.642**		**0**	**31.748.436.951**			**22.342.136.143**		**6.074.393.693**																				**BPKK**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	48	Bulan	59.362.946.512		0	27.670.610.702	113	orang/bulan	22.221.876.143		6.074.393.693																		BPKK
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	48	Bulan	12.735.505.600		0	4.077.826.249	12	Dokumen	1.100.000																				BPKK
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	2130	Dokumen	60.000.000		0	-	1	Dokumen	70.600.000																				BPKK
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28	Laporan	122.503.530		0	-	10	Laporan	48.560.000																				BPKK
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	54	Laporan	30.000.000		0	-																							BPKK
5	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**15.000.000**		**0**	**-**			**15.000.000**																				**BPKK**
5	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	3	Dokumen	15.000.000		0	-																							BPKK
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian**	**100**	**%**	**581.400.000**		**0**	**-**			**279.600.000**																				**BPKK**
5	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	6	Unit	30.000.000		0	-																							BPKK
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	532	Paket	421.900.000		0	-	151	paket	83.100.000																				BPKK
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16	Orang	54.500.000		0	-	27	Orang	196.500.000																				BPKK
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	12	Orang	75.000.000		0	-																							BPKK
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat**	**100**	**%**	**3.336.338.675**		**0**	**700.615.708**			**840.085.000**		**53.932.420**																				**BPKK**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	16	Paket	20.036.181		0	3.884.000	3	Paket	5.187.000		1.310.400																		BPKK
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	16	Paket	13.155.000		0	-	131	Paket	527.798.000		4.844.500																		BPKK
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	90	Paket	180.000.000		0	-																							BPKK
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	40	Paket	160.546.069		0	35.786.000	5	Paket	37.946.000		7.666.400																		BPKK
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	200	Paket	1.369.148.583		0	153.385.410	52	Paket	266.994.000																				BPKK
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	8	Dokumen	9.525.600		0	1.020.000	2	Dokumen	2.160.000																				BPKK
5	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30	Paket	30.000.000		0	-																							BPKK
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	Laporan	30.000.000		0	-																							BPKK
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	280	Laporan	1.328.927.242		0	506.540.298					40.111.120																		BPKK
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	300	Dokumen	150.000.000		0	-																							BPKK
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	3	Dokumen	45.000.000		0	-																							BPKK
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**4.324.058.758**		**0**	**720.135.000**			**2.619.022.000**																				**BPKK**
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	16	Unit	515.400.000		0	-	1	unit	240.000.000																				BPKK
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	12	Unit	1.094.400.000		0	-																							BPKK
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40	Unit	83.615.694		0	-	45	unit	192.376.000																				BPKK
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	160	Unit	2.570.643.064		0	720.135.000	27	unit	2.186.646.000																				BPKK
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	15	Unit	30.000.000		0	-																							BPKK
5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	15	Unit	30.000.000		0	-																							BPKK
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**100**	**%**	**4.268.193.969**		**0**	**1.204.207.665**			**2.793.377.000**		**603.094.228**																				**BPKK**
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	48	Laporan	32.500.000		0	12.501.000	12	laporan	16.000.000		3.000.000																		BPKK
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	48	Laporan	1.440.000.000		0	414.267.303	12	Laporan	347.460.000		48.458.887																		BPKK
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	48	Laporan	2.795.693.969		0	777.439.362	12	Laporan	2.429.917.000		551.635.341																		BPKK
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang**	**100**	**%**	**5.123.238.486**		**0**	**1.197.494.021**			**2.948.041.000**		**85.497.300**																				**BPKK**
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	128	Unit	1.294.152.000		0	472.151.500	31	unit	1.304.400.000		54.324.100																		BPKK
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	32	Unit	1.264.752.000		0	659.294.521	9	unit	686.576.000		31.173.200																		BPKK
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	Unit	30.837.794		0	10.000.000	26	unit	13.825.000																				BPKK
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	160	Unit	218.496.692		0	56.048.000	9	unit	37.240.000																				BPKK
5	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6	Unit	45.000.000		0	-																							BPKK
5	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6	Unit	45.000.000		0	-																							BPKK
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	Unit	2.150.000.000		0	-	1	unit	900.000.000																				BPKK
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3	Unit	75.000.000		0	-	1	unit	6.000.000																				BPKK
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase terlibnya pengelolaan keuangan sesuai dengan**	**100**	**%**	**589.275.160.938**		**0**	**229.728.334.715**			**288.774.007.673**		**21.792.717.940**																				**BPKK**
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran**	**Persentase Ketersediaan dokumen pelaksanaan APBK**	**100**	**%**	**19.803.881.159**		**0**	**4.348.436.725**			**4.366.063.073**		**426.811.000**																				**BPKK**
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	8	Dokumen	3.848.216.889		0	547.067.480	2	Dokumen	808.129.000		39.960.000																		BPKK
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan	8	Dokumen	893.231.420		0	263.074.100	2	Dokumen	305.520.000		15.100.000																		BPKK
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	176	Dokumen	577.138.500		0	160.340.000	44	Dokumen	181.420.000																				BPKK
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi	umlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	176	Dokumen	138.405.000		0	177.180.000																							BPKK
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPASKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	176	Dokumen	829.943.763		0	282.640.000	44	Dokumen	219.677.473																				BPKK
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	176	Dokumen	530.055.000		0	338.878.000	44	Dokumen	112.463.000																				BPKK
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan	8	Dokumen	4.081.227.512		0	722.064.225	2	Dokumen	868.799.000		95.765.000																		BPKK
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan	8	Dokumen	2.384.342.973		0	854.825.420	2	Dokumen	878.760.600		133.686.000																		BPKK
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Kegiatan serta	Jumlah Dokumen Kegiatan serta Kebijakan	4	Dokumen	4.164.154.939		0	1.002.367.500	5	Dokumen	735.430.000		142.300.000																		BPKK
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan	4	Dokumen	690.000.000		0	-																							BPKK
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan	4	Dokumen	690.000.000		0	-																							BPKK
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan	4	Dokumen	720.000.000		0	-																							BPKK
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	8	Orang	257.165.163		0	-	132	orang	255.864.000																				BPKK
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Penyelarasan Perundang-undaran**	**Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan**	**100**	**%**	**4.047.497.303**		**0**	**1.105.913.486**			**1.193.386.200**		**34.980.200**																				**BPKK**
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	48	Dokumen	479.872.354		0	127.334.096	4	Dokumen	113.000.000																				BPKK
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan	umlah Dokumen Hasil Pengendalian dan	2112	Dokumen	560.577.684		0	171.493.800	540	Dokumen	62.436.000																				BPKK
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan	48	Dokumen	7.887.006		0	-																							BPKK
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,	48	Dokumen	518.600.000		0	131.925.500	12	Dokumen	116.662.000																				BPKK
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Sosialisasi Sama dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan	3600	Dokumen	1.764.029.414		0	506.943.430	2	Dokumen	530.582.000		16.458.200																		BPKK
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan	4	Laporan	114.926.983		0	27.461.250	1	Laporan	19.055.400		18.522.000																		BPKK
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan	48	Dokumen	175.893.322		0	29.138.115	1	Laporan	2.100.000																				BPKK
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data	48	Dokumen	123.140.242		0	26.497.700	2	Dokumen	61.380.600																				BPKK
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	4	Dokumen	163.416.475		0	54.430.000	1	Dokumen	112.000.200																				BPKK
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	352	Orang	139.153.822		0	30.689.595	88	Orang	176.170.000																				BPKK
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan**	**Persentase dokumen pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan**	**100**	**%**	**3.707.739.651**		**0**	**558.893.030**			**142.563.093.700**																				**BPKK**
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan	8	Laporan	163.526.198		0	-	2	Laporan	14.830.000																				BPKK
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan	12	Dokumen	382.523.467		0	100.092.190	2	Dokumen	192.364.600																				BPKK
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban	4	Laporan	451.088.335		0	92.270.765	17	Laporan	286.186.000																				BPKK
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan	28	Laporan	832.253.703		0	173.813.575	7	Laporan	616.761.000																				BPKK
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang	8	Dokumen	482.106.091		0	162.264.000	2	Dokumen	377.585.500																				BPKK
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut	8	Dokumen	186.341.922		0	7.767.500	1	Dokumen	199.842.900																				BPKK
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	8	Dokumen	184.612.090		0	-	1	Dokumen	14.105.000																				BPKK
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan	4	Dokumen	520.495.322		0	-	1	Dokumen	84.821.000																				BPKK
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis	4	Dokumen	275.859.262		0	22.685.000	1	Dokumen	78.236.000																				BPKK
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan	4	Dokumen	48.211.306		0	-	1	Dokumen	80.950.000																				BPKK
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	176	Orang	22.174.112		0	-	88	Orang	138.032.000																				BPKK
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	8	Lembaga	65.032.862		0	-																							BPKK
5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan	Jumlah Laporan Statistik Keuangan	8	Laporan	93.514.983		0	-	2	Laporan	140.479.379.700																				BPKK
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan**	**Persentase Kelancaran Penunjang Urusan Pemerintah**	**100**	**%**	**561.518.418.504**		**0**	**214.314.361.474**			**140.479.379.700**		**21.330.926.740**																				**BPKK**
5	02	02	2.04	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana	3	Dokumen	45.000.000		0	-																							BPKK
5	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi	3	Laporan	45.000.000		0	-																							BPKK
5	02	02	2.04	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan	3	Laporan	45.000.000		0	1.588.950.040																							BPKK
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan	4	Laporan	14.044.000.000		0	705.969.064	1	laporan	2.000.000.000																				BPKK
5	02	02	2.04	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan	3	Laporan	45.000.000		0	-																							BPKK
5	02	02	2.04	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan	3	Laporan	45.000.000		0	-																							BPKK
5	02	02	2.04	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan	3	Laporan	45.000.000		0	-																							BPKK
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan	3	Laporan	45.000.000		0	-																							BPKK
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat	4	Laporan	6.000.000.000		0	51.717.019	1	Laporan	1.500.000.000																				BPKK
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi	4	Laporan	541.159.418.504		0	211.967.725.351	1	Laporan	136.979.379.700		21.330.926.740																		BPKK
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem**	**Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem**	**100**	**%**	**197.624.321**		**0**	**392.730.000**			**172.085.000**																						BPKK
5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan	3	Dokumen	45.000.000		0	-																							BPKK
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan	3	Dokumen	45.000.000		0	-																							BPKK
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem	4	Orang	107.624.321		0	392.730.000	88	Orang	172.085.000																				BPKK
5	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK**	**Persentase terlibnya pengelolaan barang milik daerah sesuai**	**100**	**%**	**11.953.146.948**		**0**	**4.025.949.995**			**3.977.517.300**		**150.745.000**																				**BPKK**
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Barang Milik**	**100**	**%**	**11.953.146.948**		**0**	**4.025.949.995**			**3.977.517.300**		**150.745.000**																				**BPKK**
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4	Dokumen	1.232.573.947		0	300.309.630	2	Dokumen	404.115.000		6.200.000																		BPKK
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan	3	Dokumen	15.900.000		0	104.600.000	2	Dokumen	119.230.200																				BPKK
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	4	Dokumen	713.089.838		0	119.250.000																							BPKK
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	4	Laporan	613.419.338		0	195.163.165	157	Laporan	185.544.000		82.565.000																		BPKK
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang	4	Laporan	455.396.

5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	4	Dokumen	1,423,873,658	0	437.390.000	1	Dokumen	727.218.000			70.000.000															BPKK
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan	1	Dokumen	172,500,000	0	60.000.000																					BPKK
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta	4	Dokumen	226,418,205	0	-	1	Dokumen	259.930.000			16.600.000															BPKK
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan	3	Laporan	255.000.000	0	-																					BPKK
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi	3	Laporan	255.000.000	0	-																					BPKK
2	09				**Dinas Pangan, Pertanian, Ketahan Dan Perikanan**				**98,845,949,684**	0	**21,505,509,976**			**21,478,388,477**			**3,691,683,858**															**Dp2KP**
2	09	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat**	**100**	**%**	**60,919,301,636**	0	**16,177,445,206**			**12,218,953,477**			**3,672,183,858**																**Dp2KP**
2	09	01	2.01		**Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan**	**100**	**%**	**27.642.000**	0	**4.024.825**			**4.909.200**																			**Dp2KP**
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	26.642.000	0	4.024.825	5	dokumen	4.909.200																	Dp2KP
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	1.000.000	0	-																					Dp2KP
2	09	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan**	**4**	**%**	**55,484,512,144**	0	**15,485,453,785**			**10,636,144,975**			**3,462,450,867**																**Dp2KP**
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Orang/bula	53,286,912,144	0	14.655.846.785	92	orang/bulan	10.081.144.975			3.462.450.867															Dp2KP
2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	48	Bulan	2.193.350.000	0	829.607.000	12	Dokumen	555.000.000																	Dp2KP
2	09	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi	48	Dokumen	4.250.000	0	-																					Dp2KP
2	09	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat**	**4**	**%**	**226.600.000**	0	-			**59.950.000**																			**Dp2KP**
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	460	Paket	226.600.000	0	-	111	paket	59.950.000																	Dp2KP
2	09	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi**	**4**	**%**	**527.407.160**	0	**135.457.243**			**212.555.200**			**12.501.393**																**Dp2KP**
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12	Paket	23.636.800	0	4.414.000	3	paket	2.954.000																	Dp2KP
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	600.000	0	-	1	paket																			Dp2KP
2	09	01	2.06	xx	Penyediaan Penalatan dan Perlengkapan Kantor					0							4.954.700															
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28	Paket	76.811.000	0	12.305.250	7	paket	9.601.200																	Dp2KP
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	4	Dokumen	1.000.000	0	-	12	Laporan	200.000.000																	Dp2KP
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	16	Laporan	425.359.360	0	118.737.993						7.546.693															Dp2KP
2	09	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah**	**4**	**%**	**15.910.400**	0	**37.265.698**			**500.000.000**																			**Dp2KP**
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	15.910.400	0	37.265.698	3	unit	500.000.000																	Dp2KP
2	09	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**4**	**%**	**875.944.412**	0	**233.700.514**			**320.471.000**			**158.297.598**																**Dp2KP**
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	48	Laporan	672.000.000	0	187.475.269	12	Laporan	282.405.000			31.743.598															Dp2KP
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	48	Laporan	203.944.412	0	46.225.245			38.066.000			126.554.000															Dp2KP
2	09	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang**	**4**	**%**	**3.761.285.520**	0	**281.543.141**			**484.923.102**			**38.934.000**																**Dp2KP**
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	220	Unit	848.661.520	0	279.536.141	55	unit	282.663.102			38.934.000															Dp2KP
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	Unit	10.442.000	0	2.007.000	20	unit	2.260.000																	Dp2KP
2	09	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	56.460.000	0	-	3	unit	200.000.000																	Dp2KP
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN		0		2.845.722.000	0	-																					Dp2KP
2	09	03			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN**	**Persentase Diversifikasi Jenis Pangan Baru**	**1,2**	**%**	**2.189.214.000**	0	**979.980.780**			**1.086.115.000**																			**Dp2KP**
2	09	03	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan**	**Penyediaan dan penyaluran pangan pokok**	**4**	**%**	**1.210.200.000**	0	**557.614.000**			**69.000.000**																			**Dp2KP**
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	8	Laporan	1.200.000	0	-																					Dp2KP
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	4	Laporan	1.204.000.000	0	486.550.000	1	Laporan																			Dp2KP
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi	4	Laporan	1.000.000	0	-	1	Laporan																			Dp2KP
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	4	Dokumen	1.000.000	0	-																					Dp2KP
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang	4	Unit	1.000.000	0	-	1	unit	69.000.000																			Dp2KP
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani	4	Unit	1.000.000	0	71.064.000																					Dp2KP
2	09	03	2.01	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	4000	Keluarga	1.000.000	0	-																					Dp2KP
2	09	03	2.01	16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					0		1	Dokumen	44.003.500																			
2	09	03	2.02	xx	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Jumlah Gampong yang	120	Gampong	807.400.000	0	422.366.780			807.400.000																			
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan	4	Laporan	1.000.000	0	-																					
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	4	Dokumen	1.200.000	0	-	1	Dokumen																			
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	87	Ton	801.200.000	0	422.366.780	50	Ton																			
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang	87	Ton	4.000.000	0	-	50	Ton																			
2	09	03	2.02	xx	Penyaluran cadangan pangan pemerintah kab/kot							50	Ton	295.312.000																			
2	09	03	2.03	xx	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang	Jumlah pangan lokal yang ditetapkan harga minimum	188	Bahan	1.600.000	0	-			1.600.000																			
2	09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum	4	Laporan	1.600.000	0	-			1.600.000																			
2	09	03	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan**	**Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan**	**4**	**%**	**170.014.000**	0	-			**208.115.000**																			**Dp2KP**
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4	Dokumen	1.200.000	0	-																					Dp2KP
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam	4	Laporan	167.814.000	0	-	1	Laporan	208.115.000																			Dp2KP
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi	4	Laporan	1.000.000	0	-																					Dp2KP
2	09	04			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Jumlah gampong lokasi rawan pangan yang ditangani sesuai**	**4**	**%**	**203.200.000**	0	**335.576.000**			**807.640.000**																			**Dp2KP**
2	09	04	2.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan**	**Laporan tahunan FSVA**	**4**	**Dokumen**	**1.200.000**	0	-			**1.200.000**																			**Dp2KP**
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang	4	Dokumen	1.200.000	0	-																					Dp2KP
2	09	04	2.01		**Penanganan kerawanan Pangan Kewenangan**	**Jumlah gampong Mandiri Pangan**	**120**	**Gampong**	**202.000.000**	0	**335.576.000**			**806.440.000**																			**Dp2KP**
2	09	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan	4	Laporan	1.000.000	0	-																					Dp2KP
2	09	04	2.01	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan	4	Dokumen	201.000.000	0	335.576.000	1	Dokumen	806.440.000																			Dp2KP
2	09	05			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Pangan yang memenuhi syarat**	**4**	**%**	**14.968.431.024**	0	**100.000.000**			**153.931.000**			**19.500.000**																**Dp2KP**
2	09	05	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar**	**Jumlah sarana pengujian yang tersedia**	**4**	**Unit**	**14.968.431.024**	0	**100.000.000**			**153.931.000**			**19.500.000**																**Dp2KP**
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	1.000.000	0	-																					Dp2KP
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah Sertifikat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	20	Sertifikat	1.000.000	0	-																					Dp2KP
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	20	Dokumen	1.000.000	0	-																					Dp2KP
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	20	Dokumen	1.000.000	0	-																					Dp2KP
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan	4	Dokumen	449.308.000	0	100.000.000	1	Dokumen	153.931.000			19.500.000															Dp2KP
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (Urusan		0		14.515.123.024	0	-																					Dp2KP
3	27	02			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase Pemanfaatan Sarana Pertanian**	**1,6**	**%**	**259.200.000**	0	**447.990.000**			**1.110.430.000**																			**Dp2KP**
3	27	02	2.01		**Penggawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah Sarana Pertanian**	**8**	**Kali**	**256.600.000**	0	**445.390.000**			**638.830.000**																			**Dp2KP**
3	27	02	2.01	01	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	8	Laporan	256.000.000	0	189.990.000	2	Laporan	638.830.000																			Dp2KP
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4	Laporan	600.000	0	-																					Dp2KP
3	27	02	2.02		**Pengelolan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,**	**Jumlah SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme**	**8**	**Jenis**	**1.200.000**	0	-			**1.200.000**																			**Dp2KP**
3	27	02	2.02	02	Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4	Laporan	600.000	0	-																					Dp2KP
3	27	02	2.02	03	Pemanfatan SDG hewan /tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4	Dokumen	600.000	0	-																					Dp2KP
3	27	02	2.05		**Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran**	**Persentase Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan**	**4**	**%**	**1.000.000**	0	**347.291.000**			**470.000.000**																			**Dp2KP**
3	27	02	2.05	05	Pengendalian peredaran benih/ bibit ternak dan hijauan pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang	80	Ton	600.000	0	347.291.000	3.750	ekor	470.000.000																			Dp2KP
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT,	4	Laporan	400.000	0	-																					Dp2KP
3	27	02	2.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan**	**Jumlah Produksi Benih/bibit ternak dan Hijauan pakan**	**4**	**kali**	**400.000**	0	-			**400.000**																			**Dp2KP**
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah	1575	0 Ekor	400.000	0	-																					Dp2KP
3	27	03			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase Prasarana Pertanian**	**1,2**	**%**	**13.920.846.024**	0	**235.605.800**			**2.070.807.000**																			**Dp2KP**
3	27	03	2.01		**Pengembangan prasarana pertanian**	**Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian**	**8**	**kegiatan**	**253.400.000**	0	-			**253.400.000**																			**Dp2KP**
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian	4	Dokumen	251.000.000	0	-																					Dp2KP
3	27	03	2.01	02	Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	4	Dokumen	1.200.000	0	-																					Dp2KP
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung	4	Laporan	1.200.000	0	-																					Dp2KP
3	27	03	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian**	**32**	**Unit**	**13.667.446.024**	0	**235.605.800**			**1.816.607.000**			**10.000.000**																	Dp2KP
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan dan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan	4	Unit	274.446.024	0	77.990.000	1	unit	1.816.607.000			10.000.000															Dp2KP
3	27	03	2.02	08	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Balai penyuluh di	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	12	Unit	7.285.200.000	0	33.925.000																					Dp2KP
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun,	8	Unit	6.107.800.000	0	123.690.800																					Dp2KP
3	27	04			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN**	**Persentase Penggendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet**	**2**	**%**	**304.677.000**	0	**4.500.000**			**304.677.000**																			**Dp2KP**
3	27	04	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan, dan**	**Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan**	**129104**	**Ekor**	**302.077.000**	0	**4.500.000**			**302.077.000**																			**Dp2KP**
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	4	Laporan	52.000.000	0	-																					Dp2KP
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Wilayah yang Mengalami penurunan Kasus Penyakit	4	Laporan	250.077.000	0	4.500.000																					Dp2KP
3	27	04	2.01	xx	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan							1	Laporan	74.294.000																			
3	27	04	2.04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis**	**Jumlah Dokumen yang diterbitkan**	**8**	**dokumen**	**2.600.000**	0	-			**2.600.000**																			**Dp2KP**
3	27	04	2.04	01	Pendampingan unit usaha hewan dan Produk hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	8	Laporan	1.600.000	0	-																					Dp2KP
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Mayarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	8	Laporan	1.000.000	0	-																					Dp2KP
3	27	05			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana**	**2**	**%**	**3.600.000**	0	-			**3.600.000**																			**Dp2KP**
3	27	05	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Jumlah Luas Areal Bencana yang terkendali**	**4**	**kali**	**3.600.000**	0	-			**3.600.000**																			**Dp2KP**
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	20	Ha	1.600.000	0	-																					Dp2KP
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman Pangan,	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,	20	Ha	2.000.000	0	-																					Dp2KP
3	27	06			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Perizinan Usaha Pertanian**	**2**	**%**	**800.000**	0	-			**800.000**																			**Dp2KP**
3	27	06	2.01		**Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya**	**Jumlah Izin Usaha Pertanian**	**60**	**Izin Usaha**	**800.000**	0	-			**800.000**																			**Dp2KP**
3	27	06	2.01	02	Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis	800	Dokumen	800.000	0	-																					Dp2KP
3	27	07			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Penyuluh Pertanian / Perkebunan**	**100**	**%**	**26.000.000**	0	-			**26.000.000**																			**Dp2KP**
3	27	07	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Kelompok Tani Binaan**	**36**	**Kecamata**	**26.000.000**	0	-			**26.000.000**																			**Dp2KP**
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan	12	Unit	20.000.000	0	-																					Dp2KP
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas kelembagaan Petani di Kecamatan dan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang	12	Unit	2.000.000	0	-																					Dp2KP
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4	Unit	2.000.000	0	-																					Dp2KP
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	120	Unit	2.000.000	0	-																					Dp2KP
3					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN					0	-																					Dp2KP
3	25	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Jumlah Wilayah Penangkapan**	**1,4**	**%**	**2.481.000.000**	0	**2.776.031.450**			**865.000.000**																			**Dp2KP**
3	25	02	2.01		**Pengelolaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,**	**Jumlah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**4**	**%**	**2.481.000.000**	0	**2.776.031.450**			**865.000.000**																			**Dp2KP**
3	25	02	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat	4	Dokumen	1.000.000	0	-																					Dp2KP
3	25	02	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	80	Unit	2.000.000.000	0	1.808.588.650	29	unit	865.000.000																			Dp2KP
3	25	02	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan

| | | |

| | | |

| | | |

8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang	100	Orang	164.624.548	0	-	100	orang	38.599.000																	Badan Kesbangpol
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas,	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran	1	Laporan	-	0	-																				Badan Kesbangpol
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	3	Laporan	25.000.000	0	-	1	Orang	34.800.140																	Badan Kesbangpol
8	**01**	**05**			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan**	**85**	**%**	**1.558.182.680**	**0**	**135.262.375**			**369.157.500**																			**Badan Kesbangpol**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan**	**85**	**%**	**1.558.182.680**	**0**	**135.262.375**			**369.157.500**																			**Badan Kesbangpol**
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang	100	Orang	174.049.480	0	-	1	Dokumen	25.020.000																	Badan Kesbangpol
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan	6	Laporan	1.240.852.540	0	135.262.375	100	Orang	344.137.500																	Badan Kesbangpol
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	3	Laporan	143.280.660	0	-																				Badan Kesbangpol
8	**01**	**06**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan**	**Persentase Terlaksananya Peningkatan Kewaspadaan**	**85**	**%**	**4.500.996.908**	**0**	**2.155.120.000**			**457.147.000**																			**Badan Kesbangpol**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan**	**Jumlah Dokumen Rekomendasi Kewaspadaan Dini, Serta**	**85**	**%**	**4.500.996.908**	**0**	**2.155.120.000**			**457.147.000**																			**Badan Kesbangpol**
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	100	Orang	3.744.723.598	0	880.870.000	1	Dokumen	131.140.000																	Badan Kesbangpol
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang	100	Orang	248.261.360	0	-	1	Dokumen	10.000.000																	Badan Kesbangpol
8	01	06	2.01	xx	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja							100	Orang	26247000																	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	2	Laporan	243.011.950	0	800.000.000	100	Orang	26.247.000																	Badan Kesbangpol
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan	2	Dokumen	265.000.000	0	474.250.000	2	Dokumen	28976000	26.000.000																Badan Kesbangpol
9	**01**				**Dinas Syariat Islam**				**58.706.847.923**	**0**	**21.935.274.958**			**20.522.500.117**	**1.526.185.195**																		**Dinas Syariat Islam**
9	**01**	**01**			**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat**		**%**	**20.978.186.502**	**0**	**6.789.973.490**			**5.243.404.867**	**1.347.130.995**																		**Dinas Syariat Islam**
9	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan**		**%**	**193.760.000**	**0**	**7.345.000**			**72.228.000,00**	**-**																		**Dinas Syariat Islam**
9	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	20	Dokumen	193.760.000	0	7.345.000	11	Dokumen	72.228.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat**		**%**	**18.313.588.364**	**0**	**6.200.219.170**			**4.173.720.867**	**1.253.016.787**																		**Dinas Syariat Islam**
9	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	17.367.268.364	0	5.862.994.170	29	Orang /bulan	4.173.720.867,00	1.253.016.787																	Dinas Syariat Islam
9	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	48	Bulan	946.320.000	0	337.225.000																				Dinas Syariat Islam
9	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian**	**100**	**%**	**82.280.000**	**0**	**-**			**19.250.000,00**																			Dinas Syariat Islam
9	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	82.280.000	0	-	1	Paket	19.250.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat**	**100**	**%**	**898.087.299**	**0**	**169.252.680**			**324.780.000**	**15.000.000**																		Dinas Syariat Islam
9	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4	Paket	15.629.496	0	1.941.000	1	Paket	5.511.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	302.868.000	0	73.153.000	6	Paket	76.974.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	129.589.803	0	54.357.000	3	Paket	92.295.000,00	15.000.000																Dinas Syariat Islam
9	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	24	Laporan	450.000.000	0	39.801.680	10	Laporan	150.000.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**102.000.000**	**0**	**-**				**102.000.000**																		**Dinas Syariat Islam**
9	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	12	Unit	102.000.000	0	-																				Dinas Syariat Islam
9	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**100**	**%**	**948.990.407**	**0**	**146.973.140**				**461.000.000**																		**65.461.208**	Dinas Syariat Islam
9	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	48	Laporan	701.141.347	0	93.786.140	12	Laporan	236.500.000,00																	18.761.208	Dinas Syariat Islam
9	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	48	Laporan	247.849.060	0	53.187.000	12	Laporan	224.500.000,00																	46.700.000	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang**	**100**	**%**	**439.480.432**	**0**	**266.183.500**				**90.426.000**																		**13.653.000**	Dinas Syariat Islam
9	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	28	Unit	264.816.000	0	127.835.500	5	Unit	64.048.000,00																	4.734.000	Dinas Syariat Islam
9	01	01	2.09	xx	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA																										8.919.000	
9	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3	unit	102.000.000	0	63.391.000																				Dinas Syariat Islam
9	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	180	Unit	72.664.432	0	74.957.000	74	Unit	26.378.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**02**			**PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**Indeks Kota Syariah (IKS)**	**82,77**	**%**	**37.728.661.421**	**0**	**15.145.301.468**				**15.279.095.250**																		**179.054.200**	**Dinas Syariat Islam**
9	**01**	**02**	**7.01**		**Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam**	**Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelatihan**		**%**	**424.837.400**	**0**	**-**				**194.567.000**																		**-**	**Dinas Syariat Islam**
9	01	02	7.01	01	Pelatihan Mawaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris	400	Orang	196.683.920	0	-	100	Orang	62.302.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.01	06	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah	Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang	240	Orang	228.153.480	0	-	114	Orang	132.265.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**02**	**7.02**		**Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan**	**Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Al-**		**%**	**10.424.934.350**	**0**	**2.495.490.010**	100	**%**	**5.214.732.259**	**170.554.200**																	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.02	01	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan	36	Lembaga	864.133.840	0	752.348.000	1	Lembaga	1.855.645.250,00																	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	1120	Orang	9.560.800.510	0	1.743.142.010	56	Orang	3.359.087.000,00	170.554.200																Dinas Syariat Islam
9	**01**	**02**	**7.04**		**Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam**	**Persentase Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam yang**		**%**	**18.860.408.581**	**0**	**11.156.629.028**	100	**%**	**8.280.486.000**	**8.500.000**																	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.04	01	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan	4	Dokumen	3.419.548.399	0	687.366.718	5	Dokumen	1.321.801.000,00	8.500.000																Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.04	03	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator	Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan	220	Orang	2.893.339.910	0	525.770.500	55	Orang	462.557.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.04	05	Pelatihan Takmir Mesjid	Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan	464	Orang	667.021.656	0	-	240	Orang	320.858.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.04	07	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat	Jumlah Gampong Percontohan Syariat yang Dibina	40	Gampong	216.375.000	0	-	10	Gampong	461.110.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.04	11	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana	Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan	200	Unit	232.225.000	0	1.400.410.600	25	Unit	1.021.415.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.04	13	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan	60	Unit	11.431.898.616	0	8.543.081.210	27	Unit	4.692.745.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**02**	**7.05**		**Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam**	**Persentase Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan**			**4.642.396.730**	**0**	**1.055.007.430**	100	**%**	**855.186.000,00**																	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.05	01	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi	4	Laporan	825.364.000	0	590.798.000	1	Laporan	524.450.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.05	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	4	Laporan	589.521.656	0	16.828.430	1	Laporan	200.000.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.05	04	Pembinaan Keluarga Islami	Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan	200	Keluarga	198.390.848	0	-																				Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.05	06	Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Penyelenggaraan Fardu	720	Orang	55.611.991	0	179.135.000	180	Orang	130.736.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.05	09	Pembinaan Hafizh Hafizhah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Hafizh Hafizhah	216	Orang	2.973.508.235	0	268.246.000																				Dinas Syariat Islam
9	**01**	**02**	**7.06**		**Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan**		**100**	**%**	**3.376.084.360**	**0**	**438.175.000**	100	**%**	**734.124.000,00**																			**Dinas Syariat Islam**
9	01	02	7.06	01	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	4	Laporan	486.456.968	0	-	1	Dokumen	50.000.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.06	06	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat	4	Laporan	2.889.627.392	0	438.175.000	2	Laporan	684.124.000,00																	Dinas Syariat Islam
9	**01**				**Sekretariat MPU**				**13.685.826.720**	**0**	**3.765.504.758**			**3.270.768.167**	**590.258.355**																		**Sekretariat MPU**
9	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat**	**100**	**%**	**11.573.992.340**	**0**	**3.719.547.758**	**100**	**%**	**2.787.339.167**	**590.258.355**																			**Sekretariat MPU**
9	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan**		**%**	**124.000.000**	**0**	**-**	**100**	**%**	**62.329.000,00**	**-**																			**Sekretariat MPU**
9	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	124.000.000	0	-	11	Dokumen	62.329.000,00																	Sekretariat MPU
9	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**10.225.879.120**	**0**	**3.211.501.814**	**100**	**%**	**1.364.865.567**	**339.031.975**																			**Sekretariat MPU**
9	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	6.541.879.120	0	1.881.675.814	12	Orang/bulan	1.364.865.567,00	339.031.975																	Sekretariat MPU
9	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	48	Dokumen	3.684.000.000	0	1.329.826.000																					Sekretariat MPU
9	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**100**	**%**	**39.600.000**	**0**	**-**	**100**	**%**	**8.800.000,00**																			**Sekretariat MPU**
9	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	72	Paket	39.600.000	0	-	1	Paket	8.800.000,00																	Sekretariat MPU
9	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi**	**100**	**%**	**452.513.220**	**0**	**136.112.385**			**96.118.600**	**2.609.200**																			**Sekretariat MPU**
9	01	01	2.05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12	Paket	12.000.000	0	11.762.000	2	Paket	2.676.000,00																	Sekretariat MPU
9	01	01	2.05	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	200.513.220	0	52.851.000	4	Paket	19.673.000,00	1.415.200																	Sekretariat MPU
9	01	01	2.05	05	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32	Paket	20.000.000	0	6.852.845	4	Paket	8.769.600,00	1.194.000																	Sekretariat MPU
9	01	01	2.05	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	20	Laporan	220.000.000	0	64.646.540	5	Laporan	65.000.000,00																	Sekretariat MPU
9	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**100.000.000**	**0**	**-**	**100**	**%**	**81.520.000**	**-**																			**Sekretariat MPU**
9	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	4	Unit	100.000.000	0	-	2	Unit	70.000.000,00																	Sekretariat MPU
9	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	0	Unit	-	0	-	2	Unit	11.520.000,00																	Sekretariat MPU
9	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**100**	**%**	**400.000.000**	**0**	**116.974.861**	**100**	**%**	**1.007.200.000**	**244.157.680**																			**Sekretariat MPU**
9	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120	Laporan	-	0	-																					Sekretariat MPU
9	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	48	Laporan	120.000.000	0	31.329.861	12	Laporan	26.000.000,00	3.777.680																	Sekretariat MPU
9	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	48	Laporan	280.000.000	0	85.645.000	12	Laporan	981.200.000,00	240.380.000																	Sekretariat MPU
9	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang**	**100**	**%**	**232.000.000**	**0**	**254.958.698**	**100**	**%**	**166.506.000**	**4.459.500**																			**Sekretariat MPU**
9	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	16	Unit	120.000.000	0	63.258.100	4	Unit	151.154.000,00	4.459.500																	Sekretariat MPU
9	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	4	Unit	32.000.000	0	179.659.393	1	Unit	15.352.000,00																	Sekretariat MPU
9	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	20	Unit	80.000.000	0	12.041.205																					Sekretariat MPU
9	**01**	**03**			**PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**	**Persentase Meningkatnya Kapasitas dan Peran Ulama**	**100**	**%**	**2.111.834.380**	**0**	**45.957.000**	**100**	**%**	**483.429.000**	**-**																			**Sekretariat MPU**
9	**01**	**03**	**7.01**		**Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama**	**Persentase meningkatnya peran serta ulama dalam**	**100**	**%**	**1.632.375.785**	**0**	**45.957.000**	**100**	**%**	**388.961.000**	**-**																			**Sekretariat MPU**
9	01	03	7.01	02	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Dokumen Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	40	laporan	-	0	-																					Sekretariat MPU
9	01	03	7.01	03	Pendidikan Kader Ulama	Jumlah kader ulama yang mengikuti pendidikan	160	orang	818.000.000	0	-	40	Orang	323.145.000,00																	Sekretariat MPU
9	01	03	7.01	04	Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi permusyawaratan ulama	1	laporan	95.000.000	0	45.957.000																					Sekretariat MPU
9	01	03	7.01	05	Muzakarah Masalah Keagamaan	Jumlah laporan hasil muzakarah masalah keagamaan	4	laporan	95.000.000	0	-	1	Laporan	33.343.000,00																	Sekretariat MPU
9	01	03	7.01	06	Pengkajian Aliran Sempalan	Jumlah dokumen hasil pengkajian aliran sempalan	4	Dokumen	100.000.000	0	-																					Sekretariat MPU
9	01	03	7.01	09	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Media Majelis Permusyawaratan Ulama yang Diterbitkan	8	Dokumen	105.000.000	0	-																					Sekretariat MPU
9	01	03	7.01	10	Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Jumlah Laporan Hasil Nadwah/Mubahasah Ilmiah	4	laporan	96.000.000	0	-																					Sekretariat MPU
9	01	03	7.01	11	Sosialisasi fatwa dan hukum Islam	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	240	Laporan	76.375.785	0	-	1	Laporan	32.473.000,00																	Sekretariat MPU
9	01	03	7.01	13	Kajian Pedoman Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Keserasian Pelaksanaan	200	Laporan	247.000.000	0	-																					Sekretariat MPU
9	**01**	**03**	**7.02**		**Silaturrahmi Ulama-Ulama**	**Persentase meningkatnya peran serta Ulama dalam**	**100**	**%**	**267.000.000**	**0**	**-**																							Sekretariat MPU
9	01	03	7.02	01	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamalah	Jumlah Ulama Umara Bidang Muamalah yang mengikuti	160	Orang	148.000.000	0	-	40	Orang	35.571.600,00																	Sekretariat MPU
9	01	03	7.02	02	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Jumlah ulama yang berperan dalam pembangunan Daerah	80	Orang	119.000.000	0	-	40	Orang	32.693.000,00																	Sekretariat MPU
9	01	03	7.02	03	Kunjungan Muhibah Ulama	Jumlah laporan kunjungan muhibbah ulama	4	Laporan	-	0	-																					Sekretariat MPU
9	**01**	**03**	**7.03**		**Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan**	**Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama,**	**100**	**%**	**212.458.595**	**0**	**-**	**100**	**%**	**94.468.000**																				**Sekretariat MPU**
9	01	03	7.03	01	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal	Jumlah dokumen hasil Sistem Jaminan Produk Halal	4	Dokumen	-	0	-																					Sekretariat MPU
9	01	03	7.03	02	Pelaksanaan, penataan dan pengawasan Produk halal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan	1	Dokumen	93.000.000	0	-																					Sekretariat MPU
9	01	03	7.03	03	Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal	Jumlah Dokumen Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal	4	Dokumen	-	0	-																					Sekretariat MPU
9	01	03	7.03	05	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Jumlah Peserta / Pelaku Usaha yang mengikuti Sosialisasi	200	Orang	119.458.595	0	-	40	Orang	94.468.000,00																	Sekretariat MPU

2	**22**	**07**	**7.01**		**Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat**	**Persentase Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat yang**		**%**	**512.404.691**		**0**	**29.885.000**						**-**																				**Sekretariat MAA**
2	22	07	7.01	01	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumasa/Narit Maja, Meunasib	4	Laporan	185.000.000		0	-	1	Laporan	97.735.000,00			-																				Sekretariat MAA
2	22	07	7.01	02	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	4	Lembaga	130.000.000		0	-	-	Lembaga	0,00																							Sekretariat MAA
2	22	07	7.01	03	Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat istiadat	360	orang	129.000.000		0	29.885.000	90	Orang	160.763.500,00																							Sekretariat MAA
2	22	07	7.01	04	Pembinaan Keluarga Meuadah dan Adat	Jumlah Keluarga Meuadah dan Adat Perkawinan	0	Keluarga	-		0	-																										Sekretariat MAA
2	22	07	7.01	05	Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	600	Buku	68.404.691		0	-																										Sekretariat MAA
2	**22**	**07**	**7.02**		**Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat**	**100**	**%**	**160.000.000**		**0**	**-**																												**Sekretariat MAA**
2	22	07	7.01	02	Penguatan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat	120	Orang	160.000.000		0	-																												Sekretariat MAA
2	**22**	**07**	**7.03**		**Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat**	**Persentase Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat yang**	**100**	**%**	**189.407.649**		**0**	**-**																												**Sekretariat MAA**
2	22	07	7.03	02	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan	46	Orang	91.953.085		0	-																												Sekretariat MAA
2	22	07	7.03	03	Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan hasil rapat kerja MAA	0	Dokumen	-		0	-																												Sekretariat MAA
2	22	07	7.03	05	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina	300	Orang	70.454.564		0	-	90	Orang	35.763.500,00																							Sekretariat MAA
2	22	07	7.03	07	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat	Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat	30	Unit	27.000.000		0	-																												Sekretariat MAA
9	**01**				**Sekretariat Baitul Mal**				**100.087.755.404**		**0**	**28.677.642.432**						**3.445.938.689**																				**3.133.948.237**		**Sekretariat Baitul Mal**
9	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat**	**100**	**%**	**12.164.875.404**		**0**	**4.393.709.388**	**100**	**%**	**3.445.938.689,00**			**711.728.237**																						**Sekretariat Baitul Mal**
9	**01**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan**	**100**	**%**	**13.757.484**		**0**	**1.298.540**	**100**	**Persen**	**3.169.371,00**			**-**																						**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	20	Dokumen	13.757.484		0	1.298.540	5	Dokumen	3.169.371,00																							Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian**	**100**	**%**	**11.297.882.480**		**0**	**4.019.423.926**	**100**	**Persen**	**2.612.896.089**			**443.567.911**																						**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	01	2.02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	48	Bulan	6.223.082.480		0	2.232.248.926	113	Orang/bulan	1.431.676.089,00			443.567.911																						Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.02	02		Jumlah Dokumen Hasil Penyedaan Administrasi	48	Bulan	5.074.800.000		0	1.787.175.000	4	Dokumen	1.181.220.000,00																							Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat**	**100**	**%**	**103.400.000**		**0**	**-**																												**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	50	Paket	103.400.000		0	-	50	Paket	25.300.000,00																							Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat**	**100**	**%**	**36.384.852**		**0**	**45.817.505**	**100**	**Persen**	**9.646.200**			**-**																						**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	48	Paket	10.964.952		0	2.511.000																											Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	48	Paket	25.419.900		0	20.108.255	12	Paket	9.646.200,00																							Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.07	02	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Kolsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan					0	23.198.250	5	Laporan	64.875.000,00																							Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**50.800.000**		**0**	**20.967.000**	**100**	**%**	**142.343.400,00**			**-**																						**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	48	Unit	50.800.000		0	20.967.000	17	Unit	142.343.400,00																							Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**100**	**%**	**169.750.588**		**0**	**75.453.117**	**100**	**Persen**	**70.688.292**			**242.777.426**																						**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	48	Laporan	134.904.000		0	52.752.734	12	Laporan	40.048.292,00			8.227.426																						Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	48	Laporan	34.846.588		0	22.700.383	12	Laporan	30.640.000,00			234.550.000																						Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang**	**100**	**%**	**492.900.000**		**0**	**230.749.300**	**100**	**Persen**	**300.756.000**			**25.382.900**																						**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	84	Unit	481.568.000		0	227.003.300	21	Unit	298.966.000,00			25.382.900																						Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.09	xx	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																																		
9	01	01	2.09	07	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	28	Unit	11.332.000		0	3.746.000	1	Unit	1.790.000,00																							Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**04**			**Program Baitul Mal**	**Persentase Pelaksanaan Baitul Mal**	**100**	**%**	**87.922.880.000**		**0**	**24.283.933.044**						**2.422.220.000**																						**Sekretariat Baitul Mal**
9	**01**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan ZISWAF**	**Persentase Jumlah Perencanaan ZISWAF yang disusun**	**100**	**%**	**162.020.150**		**0**	**-**	**100**	**Persen**	**50.605.050,00**																							**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	04	2.12	01	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun	48	Orang	162.020.150		0	-	1	Dokumen	50.605.050,00																							Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi**	**Persentase Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul**	**100**	**%**	**604.339.850**		**0**	**9.880.000**	**100**	**Persen**	**120.424.000,00**			**-**																						**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	04	2.02	01	Sosialisasi dan Edukasi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan	48	Orang	240.540.000		0	6.250.000	1.000	Orang	105.135.000,00																							Sekretariat Baitul Mal
9	01	04	2.02	03	Peningkatan Kapasitas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas	139	Dokumen	339.799.850		0	3.630.000	12	Dokumen	5.834.000,00																							Sekretariat Baitul Mal
9	01	04	2.02	04	Pengembangan Data dan	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data	40	Dokumen	24.000.000		0	-	12	Dokumen	6.000.000,00																							Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**04**	**7.03**		**Kegiatan Peningkatan Pendistribusian dan**	**Persentase Peningkatan Pendistribusian dan**	**100**	**%**	**87.156.520.000**		**0**	**24.274.053.044**	**100**	**%**	**21.823.230.000,00**			**2.422.220.000**																						**Sekretariat Baitul Mal**
5	02	02	2.03	01	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	48	Orang	22.380.800.000		0	5.936.500.000	3.688	Orang	5.320.000.000,00			704.800.000																						Sekretariat Baitul Mal
5	02	02	2.03	02	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin	48	Orang	28.050.400.000		0	10.319.800.000	4.635	Orang	7.059.300,00			1.370.200.000																						Sekretariat Baitul Mal
5	02	02	2.03	03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil	48	Orang	2.244.800.000		0	282.851.244	50	Orang	573.200.000,00																							Sekretariat Baitul Mal
5	02	02	2.03	04	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Mualllaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Mualllaf	48	Orang	80.000.000		0	17.000.000	30	Orang	320.000.000,00																							Sekretariat Baitul Mal
5	02	02	2.03	05	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin	48	Orang	120.000.000		0	67.515.000	45	Orang	90.000.000,00			54.000.000																						Sekretariat Baitul Mal
5	02	02	2.03	06	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah	48	Orang	27.340.000.000		0	5.804.511.800	7.000	Orang	6.691.500.000,00																							Sekretariat Baitul Mal
5	02	02	2.03	07	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Ibnu Sabil	48	Orang	80.000.000		0	18.550.000	40	Orang	20.000.000,00			1.050.000																						Sekretariat Baitul Mal
5	02	02	2.03	08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq	48	Orang	6.860.520.000		0	1.827.325.000	1.700	Orang	1.734.230.000,00			292.170.000																						Sekretariat Baitul Mal

Berdasarkan Tabel 2.154 di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja OPD Tahun 2025 Triwulan I sebahagian besar telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendorong keberhasilan yang menyebabkan tingginya capaian target kinerja anggaran disebabkan tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Hal tersebut juga tidak terlepas karena dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Namun demikian, masih terdapat beberapa OPD yang capaian target kinerja pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan masih belum optimal. Karena hal tersebut diharapkan setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja baik fisik maupun keuangan, serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sejak dini.

Dalam rangka mendapatkan hasil optimal dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan sinkronisasi antara Rencana kerja OPD, Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

2.3 Permasalahan Pembangunan

Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh yang sedang membangun, dihadapkan kepada permasalahan diberbagai bidang khususnya di bidang pembangunan baik sarana maupun prasarana. Permasalahan pembangunan yang dihadapi pada tahun pertama RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, merupakan Gap Expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Permasalahan ini muncul dari kekuatan (strengths) Kota Banda Aceh yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan (weaknesses) yang belum dapat diatasi, peluang (opportunities) yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dan ancaman (threats) yang belum dapat diantisipasi dan juga belum bisa dijadikan sebagai peluang.

Di samping itu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi menjadi penting untuk diperhatikan dan dianalisis agar di pembangunan periode selanjutnya hal yang menjadi kesenjangan antara kinerja pembangunan dengan rencana dapat ditutupi. Secara umum, yang menjadi masalah dan tantangan dalam pembangunan tercipta dari ketidakmampuan dan pemahaman dalam memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang/kesempatan, dan meminimalisir ancaman. Sumber daya yang dimiliki sebagai kekuatan dan peluang yang dapat mendorong pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal sehingga kelemahan dan ancaman yang dapat mengganggu pembangunan yang sudah direncanakan dapat dicegah dan diminimalisirkan efeknya.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Kota Banda Aceh yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun pertama RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 akan menjadi target kinerja yang akan diselesaikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun berjalan. Adapun permasalahan daerah yang berhubungan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.160 sebagai berikut:

Tabel 2.155 Permasalahan Pembangunan Kota Banda Aceh Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Permasalahan	Prioritas	Sasaran
1	Belum Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Optimalisasi Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
2	Belum Optimalnya Partisipasi Publik dalam Pemilu, Pilkada, dan Pilchiksung	Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketentraman Umum	Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketentraman Umum
3	Adanya Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan terhadap Ketentraman Umum		
4	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
5	Belum Optimalnya Optimalisasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	Optimalisasi Kualitas Pendidikan	Optimalnya Kualitas Pendidikan
6	Belum Optimalnya Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	Optimalisasi Kualitas Kesehatan	Optimalnya Kualitas Kesehatan
7	Berfluktuasinya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Peningkatan Penguatan Ekonomi dan Sosial	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial
8	Belum Optimalnya Pelayanan dan Penanganan Sosial		
9	Penurunan kunjungan wisatawan akibat pandemi	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
10	Belum Optimalnya Pelestarian Budaya	Optimalisasi Upaya Pelestarian Budaya	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya
11	Belum optimalnya akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Peningkatan Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman
12	Belum Optimalnya Penanganan Kerusakan Jalan		
13	Masih Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas		
14	Belum Optimalnya Penataan Kawasan Permukiman		
15	Adanya Kawasan Banjir Genangan		
16	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana
18	Terbatasnya Lahan RTH Perkotaan		
19	Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan RTH		
20	Belum optimalnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		
21	Belum optimalnya pengelolaan Mitigasi Bencana		
22	Belum Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Optimalisasi Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga

23	Menurunnya Sumber Dana OTSUS Aceh, DOKA Kabupaten/Kota, dan Realisasi PAD Akibat Pandemi	Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Sumber Pendapatan Daerah

Sumber : RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan Kota Banda Aceh pada bagian ini mengidentifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/ fungsi untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

1) Belum optimalnya optimalisasi peningkatan kualitas pendidikan;
2) Belum optimalnya optimalisasi prasarana dan sarana pendidikan;
3) Belum optimalnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
4) Belum optimalnya sistim pendidikan berbasis Islami dari jenjang PAUD sampai dengan SMP;
5) Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
6) Kecenderungan berkurangnya jumlah guru PNS.

2. Kesehatan

1) Belum optimalnya optimalisasi peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan;
2) Belum optimalnya optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan;
3) Belum optimalnya penanganan terhadap prevalensi gizi kurang pada balita;
4) Masih adanya stunting;
5) Belum optimalnya tenaga medis dan spesialis;

3. Pekerjaan Umum

A. Penyediaan Air Bersih

1) Belum optimalnya akses air minum jaringan perpipaan;
2) Terbatasnya sumber air baku yang sampai saat ini hanya memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Krueng Aceh;
3) Meningkatnya permintaan akan layanan air minum perpipaan akibat meningkatnya pembangunan permukiman baru di Kota Banda Aceh.

B. Drainase

1) Masih adanya kawasan banjir genangan;
2) Tingginya tingkat sedimentasi drainase;
3) Belum optimalnya pembangunan drainase baru ke wilayah-wilayah yang muncul permukiman-permukiman baru;
4) Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi drainase;
5) Masih adanya saluran drainase yang belum terkoneksi dengan sistem drainase primer kota.

C. Pemeliharan Jalan Kota

1) Belum optimalnya penanganan kerusakan jalan;
2) Belum optimalnya peningkatan jalan;
3) Belum optimalnya penanganan genangan air di atas badan jalan;

4) Masih adanya kendaraan bertonase tinggi yang melintasi ruas jalan yang tidak sesuai.

D. Permasalahan Tata Ruang

1) Terbatasnya alokasi ruang kota untuk pengembangan wilayah perkotaan;
2) Belum optimalnya pemberdayaan lahan terbangun untuk mendukung berbagai investasi pembangunan dan penguatan ekonomi perkotaan;
3) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan RTH perkotaan yang telah ditetapkan dalam RTRW;
4) Masih adanya penyimpangan dan pelanggaran aturan tata ruang di lapangan, seperti pelanggaran penataan bangunan, penyimpangan pemanfaatan pada jalur hijau jalan dan area Garis Sempadan Bangunan pada koridor kawasan perdagangan dan jasa (komersil).

4. Perumahan

1) Belum optimalnya penataan kawasan permukiman;
2) Belum optimalnya fasilitasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
3) Terbatasnya lahan untuk pembangunan perumahan;
4) Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
5) Meningkatnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak diimbangi dengan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) yang memadai.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah;
2) adanya potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ketentraman umum;
3) Belum memenuhinya jumlah personil Satpol PP dan WH (sesuai amanat Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja);
4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk operasional Satpol PP dan WH.

6. Sosial

1) Belum optimalnya pelayanan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
2) Belum optimalnya prasarana dan sarana sosial kemasyarakatan;
3) Belum optimalnya sarana dan prasarana umum yang ramah disabilitas;
4) Masih adanya penyandang masalah sosial yang tidak terdata dan tertangani.

Adapun kendala yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang tidak memenuhi adalah sebagai berikut :

a. Bidang Pemberdayaan Sosial

- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dimana Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan berupa usulan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), PKH (Program Keluarga Harapan), Bansos (Bantuan Sosial), BPJS Kesehatan, BPNT /Bansos Pangan, KIP sebanyak 673 Orang tidak tercapai target pada taghun 2023 dikarenakan sebagian masyarakat sudah melakukan pengaduan ke TKSK dan Fasilitator dan dikarenakan kondisonal bansos yang pada tahun 2023 tidak seperti tahun tahun sebelumnya dimana tahun tahun sebelumnya banyak bansos baik dari APBN dan ABPK dikarenakan kondisi seperti Program JKS yang mau dihapus

sehinggga banyak masyarakat yang melaukan pengaduan terkait BPJS Kesehatan, dan dikarenakan ada nya data data yang dikirim pusat melalui DTKS ada yang tidak layak penerima nya sehingga masyarakat banyak yang melakukan pengaduan dan protes ke Dinsos.

- Data DTKS sudah terupdate namun belum semua di verifikasi validasi dikarenakan ada nya masyarakat yang tidak bisa menerima hasil DTKS dimana masih ada masyarakat penerima bantuan yang dianggap masih mampu dimana pada saat didata KPM tersebut tidak mampu namun dikarenakan kehidupan ini bersifat dinamis pada saat data DTKS keluar dari pusat ternyata nama nya keluar sebagai penerima bantuan. Oleh karena itu ada masyarakat yang tidak menerima dan melakukan pengaduan dan kemudian tim dari Dinsos seperti TKSK, PKH, Fasilitator dan Pelayanan di Dinsos melakukan verivali data yang masuk termasuk aduan yang datang ke Dinsos sehingga banyak nya yang diverivali data selama tahun 2023 yaitu sebanyak 188.059 Orang dan yang layak mendapat kan bantuan sebanyak 187.399 Orang.

b. Bidang Rehabilitasi Sosial

- Untuk jumlah Klien pemerlu permakanan dan sandang serta bimbingan sosial dan fisik di rumah singgah menggambarkan masih banyaknya PMKS di Kota Banda Aceh sehingga melebihi target dimana sumber dana dari APBK tidak mencukupi dan selama tahun 2023 kekurangan dananya dikumpulkan dari bantuan dari Dinsos Aceh dan dari dana pribadi PPTK
- Untuk kebutuhan pemberian bimbingan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat dan sosial jumlah klien hasil data rumah singgah menggambarkan masih banyak PMKS di Kota Banda Aceh
- Untuk kebutuhan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial jumlah klien hasil data rumah singgah menggambarkan masih banyak PMKS di Kota Banda Aceh

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Permasalah dalam kegiatan UEP ini tidak tersedianya honor verifikasi lapangan, banyaknya jenis usaha yang belum tertampung dan ada beberapa jenis usaha lainnya yang belum terakomodir pada program dan kegiatan tahun 2023 tidak sesuai dengan program kegiatan ini.
- Pergeseran anggaran dari kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Pelayanan Dukungan Psikososial, Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan dikarenakan tidak cukupnya anggaran pada kegiatan lainnya.
- Pada kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan, tidak dijalankan karena kebutuhan pokoknya berupa permakanan dan sandang sudah diberikan, sedangkan pendampingan kelompok rentan tersebut tidak dapat dilakukan.
- Kebutuhan kelompok rentan mendapatkan pendampingann merupakan hak setiap korban bencana.

B. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

1. Tenaga Kerja

1) Masih tingginya tingkat pengangguran akibat terbatasnya lapangan pekerjaan dan urbanisasi penduduk;
2) Masih terbatasnya kesempatan kerja dan keterampilan pencari kerja;
3) Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja;
4) Masih terdapatnya ketidaksesuaian antara kualifikasi dan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;

5) Belum optimalnya peranan dan fungsi BLK dalam meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja.

2. Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Masih tingginya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak; dan
2) Maraknya eksploitasi anak dari luar wilayah kota Banda Aceh.

3. Ketahanan Pangan

1) Belum optimalnya sarana dan prasarana dan pemanfaatan perkarangan rumah untuk ketahanan pangan;
2) Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan bahan pangan secara rutin/ berkala guna mengetahui ketersediaan dan keamanannya;
3) Belum optimalnya budidaya tanaman organik oleh masyarakat;
4) Belum optimalnya penanganan hasil tangkapan ikan nelayan
5) Belum optimalnya budidaya perikanan darat.

4. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

1.1 Lingkungan Hidup

1) Menurunnya kualitas lingkungan hidup;
2) Belum optimalnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah;
5) Belum terpenuhinya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

1.2 Mitigasi Bencana

1) Belum optimalnya pengelolaan mitigasi bencana;
2) Belum tersedianya qanun pengurangan resiko bencana;
3) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas masyarakat sadar bencana untuk kesiapsiagaan bencana;
4) Masih rendahnya pemahaman masyarakat, aparatur pemerintah dan swasta dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana;
5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;

1.3 Pemadam Kebakaran

1) Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas dan kurangnya jumlah aparatur Damkar yang bersertifikasi;
2) Masih kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran oleh pemerintah kota;
3) Masih kurangnya anggaran untuk pemeliharaan kendaraan operasional yang rata-rata masa pemakaian 20 Tahun ke atas;
4) Masih kurangnya pemahaman tentang regulasi pemadam kebakaran pada masyarakat;

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Belum optimalnya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan gampong;
2) Belum optimalnya sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat gampong;
3) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui BUMG;
4) Belum tercapainya indek kemandirian desa;
5) Belum optimalnya pembinaan terhadap pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

6. Perhubungan

1) Masih terjadinya kemacetan lalu lintas;
2) Belum seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan jaringan jalan;
3) Masih kurangnya bus dan feeder angkutan untuk melayani semua koridor;
4) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas;
5) Belum optimalnya penerapan sistem perparkiran secara digital;
6) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan barang dan penumpang;
7) Kurangnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk melakukan uji kelayakan berkala kendaraan bermotor;
8) Belum tersedianya rencana induk transportasi perkotaan.

7. Komunikasi dan Informatika

1) Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfotik di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan;
2) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (*programmer,networker,analis*) yang dimiliki oleh Diskominfotik;
3) Masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Diskominfotik, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain;
4) Belum memadainya fasilitas desiminasi (penyebarluasan) informasi publik dimana fasilitas desiminasi atau penyebarluasan informasi publik yang dimiliki oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh masih minim pada sisi kualitas dan kuantitas unit siaran informasi berupa sarana peralatan audio dan video dan fasilitas siaran lainnya dimana saat ini Diskominfotik hanya memiliki satu mobil desiminasi informasi publik yang mobilitasnya masih terbatas;
5) Masih rendahnya kesadaran keamanan data dan informasi yang dimiliki terlebih dengan munculnya isu TIK baru dimana semakin pesatnya perkembangan TIK membuat kesadaran akan keamanan data dan informasi baik pribadi maupun publik sangat esensial untuk dijaga sehingga diperlukan fokus dan konsentrasi lebih;
6) Belum optimalnya pengelolaan data sektoral yang tervalidasi yang terkendala dengan sumber data yang berasal dari SKPD/OPD dimana hal tersebut disebabkan oleh proses penyerahan data belum dilakukan secara otomatis serta masih perlu dilakukan proses validasi yang baik dan terstruktur serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1) Belum optimalnya sarana dan prasarana koperasi dan usaha kecil menengah;
2) Belum berfungsinya pasar secara optimal dan belum tertibnya PKL;
3) Masih terbatasnya sumber daya pedagang dalam penerapan pemasaran secara *online*;
4) Lemahnya kualitas sumber daya usaha kecil dan menengah.

C. Urusan Pelayanan Pilihan

1. Industri

1) Belum optimalnya sarana dan prasarana industri;
2) Masih terbatasnya pembinaan industri kecil, usaha kecil menengah;
3) Belum tersedianya sentra industri yang dapat menjadi pusat produksi, promosi dan pemasaran produk industri kecil;
4) Terbatasnya pasar industri kecil dan menengah;
5) Masih rendahnya kualitas dan hilirisasi produk industri kecil dan menengah;

6) Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi barang industri.

2. Kelautan dan Perikanan

1) Terbatasnya prasarana dan sarana perikanan dan kelautan;
2) Hasil tangkap masih bergantung kepada musim;
3) Masih rendahnya kualitas sumber daya nelayan, perikanan dan kelautan;
4) Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan.
5) Terbatasnya peralatan untuk pengolahan
6) Kurangnya kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan perizinan

D. Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

1) Belum optimalnya ketersediaan dan keterpaduan data dalam perencanaan;
2) Masih terbatasnya tenaga perencana dan fungsional perencana;
3) Belum optimalnya sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4) Belum meratanya kualitas dan kompetensi sumber daya perencana;
5) Masih terbatasnya prasarana dan sarana dalam perencanaan.

2. Keuangan

1) Menurunnya sumber dana OTSUS Aceh dan DOKA;
Sejak tahun 2008, Aceh mendapatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) berupa transfer dana tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat selama 20 tahun sebagai tidak lanjut dari pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun, jumlah yang diterima menurun menjadi 1% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional terhitung mulai tahun 2023 dan akan berakhir pada tahun 2028. Penurunan jumlah serta berakhirnya Dana Otsus tentunya juga berdampak bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dalam rangka percepatan pembangunan seperti kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur, serta kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat dan penanganan kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.

2) Rendahnya realisasi PAD akibat pandemi;
Pandemi Covid 19 memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor PAD, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

a. Pembatasan aktifitas ekonomi; Pembatasan sosial yang diberlakukan selama Pandemi Covid 19 sangat berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat. Pembatasan jam operasional, pembatasan berkumpul ditempat-tempat umum, dan pembatasan berpergian mengakibatkan penurunan pendapatan terutama dari pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan.
b. Perubahan Kebiasan Konsumsi
Perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih cenderung berbelanja secara during/online dan mengurangi kunjungan langsung secara fisik ketempat-tempat yang menawarkan produk-produk barang dan jasa. Perubahan pola berbelanja masyarakat secara during juga berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah. Pelaku usaha yang menjual barang secara during jarang melaporkan kewajiban pajak daerah mereka.
c. Penurunan daya beli masyarakat
Penurunan daya beli masyarakat karena kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan, sehingga masyarakat cenderung membatasi atau mengurangi konsumsi dan permintaan terhadap barang dan jasa.
d. Keterbatasan Pemerintah melakukan Penagihan Pajak

Aturan Pembatasan Sosial yang diberlakukan pemerintah memberi keterbatasan petugas pajak dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan wajib pajak terutama menyelesaikan kewajiban pajak daerah.

Untuk mempermudah pelaku usaha yang telah menunggak pembayaran Pajak Daerah selama masa Covid-19, maka Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan kebijakan :

- Memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melunasi pajak daerah dengan cara pembayaran pajak secara cicilan.
- Memberi keringanan pengurangan denda pajak daerah.
- Mengubah target PAD

3) Belum optimalnya pengelolaan aset produktif;

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Aset Produktif Pemerintah Kota Banda Aceh yang belum optimal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.156 Daftar Aset produktif belum optimal Pemerintah Kota Banda Aceh

No	Nama Aset	Luas	Alamat	Status	Penguna
1.	Tanah Simpang Lamteh	603 m²	Gampong Blang Asoe Nanggroe	Hak Pakai	Pengelola
2.	Tanah Gp. Blang	315 m²	Jalan Samping Blang - Asoe nanggore	Hak Pakai	Pengelola
3.	Tanah Pasar Lamgapang	1.402 m²	Lamgapang	Hak Pakai	Diskop, UKM dan Perdagangan
4.	Tanah dan bangunan	727 m²	Jalan Rama setia, Gampong Deah Baro	Hak Pakai	Pengelola
5.	Tanah dan Bangunan	2.388 m²	Jalan ke pelabuhan Ulee Lheue	Hak Pakai	Diskop, UKM dan Perdagangan
6.	Tanah	14.000 m²	Gampong Lhang	Hak Pakai	Pengelola
7.	Tanah	10.169 m²	Alue Naga	Hak Pakai	Pengelola
8.	Tanah	6.955 m²	Lamsidaya	Hak Pakai	Pengelola
9.	Tanah Terminal Keudah	11.717 m²	Jalan Cut Mutia	Hak Pakai	Dinas Perhubungan
10.	Tanah Pasar New town	7.914 m²	Jalan Mr.T.Moh.hasan	Hak Pakai	Diskop, UKM dan Perdagangan

No	Nama Aset	Luas	Alamat	Status	Penguna
11.	Bangunan Eks. Gedung KONI Banda Aceh	68 m²	Peunayong	Hak Pakai	Sekretariat
12.	Bangunan Pasar Suvenir Ulee Lheue	±500 m²	Ulee Lheue	Hak Pakai	Diskop, UKM dan Perdagangan
13.	Tanah Belakang Mitigasi Bencana	±500 m²	Ulee Lheue	Hak Pakai	Pengelola
14.	Bangunan Kuliner Malam	230.85 m²	Jl.Tgk Daudsyah Peunayong	Hak Pakai	UPTD Pasar
15.	Bangunan Pertokoan Perbasi	1.579 m²	Jl. Mr Mohd Hasan Gp. Lamdom Kec. Lueng bata	Hak Pakai	UPTD Pasar
16.	Tanah Lapangan Bola	9.800 m²	Gp.lamjabat	Hak Pakai	Pengelola
17.	Tanah Hutan Kota	9956.0 m²	Gp.Tibang	Hak Pakai	Pengelola
18.	Tanah Kedai kopi Samping Stadion Harapan Bangsa	±500 m²	Lhong Raya	Hak Pakai	Dinas Pemuda dan Olah Raga
19.	Tanah belakang Min lhong raya	3.566 m²	Lhong Raya	Hak Pakai	Pengelola

Kendala dan Upaya:

Kendala yang di hadapi adalah belum adanya permohonan untuk pemanfaatan aset tersebut. BPKK melalui Bidang Aset terus melakukan komunikasi dengan Perangkat Gampong dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perangkat Gampong dan sejumlah tokoh masyarakat, pihak pimpinan BUMG serta mendatangkan para investor untuk kerja sama dalam pemanfaatan aset tanah dan bangunan tersebut. Untuk aset Tanah di belakang MIN Lhong Raya telah mengupayakan kepada melalui pihak Gampong agar melakukan pembebasan lahan sehingga terdapat akses jalan untuk aset dimaksud.

4) Belum optimalnya intensifikasi ekstensifikasi potensi PAD;

Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk komponen Pendapatan Asli Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan, yaitu kewenangan untuk memungut dan mendayagunakan Pajak dan Retribusi Daerah dan hak untuk mendapatkan mengelola kekayaan daerah.

Ada beberapa kendala dalam pemungutan PAD tersebut yang menyebabkan minimnya Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah :

1. Belum optimal upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang laksanakan oleh pemerintah daerah.

2. Kepatuhan dari wajib pajak dan restribusi yang relatif rendah
3. Kurangnya sarana dan prasarana pemungutan pajak dan Retribusi oleh petugas pemungut
4. Belum optimalnya sumber daya manusia pengelolaan Pendapatan
5. Kurangnya pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak dan restribusi;
6. Kurangnya kerjasama dengan para pihak seperti pihak pengacara negara, pihak penegakan aturan, pihak swasta/LSM dalam pemungutan pajak daerah dan;
7. Kurangnya penyelenggarakan sistem Komputerisasi Penerimaan Daerah

5) Tingginya ketergantungan keuangan kepada pemerintah provinsi dan pusat.

Komposisi pendapatan daerah pada Rancangan APBD dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan APBK Kota Banda Aceh TA. 2024 Pendapatan Transfer masih mendominasi sumber pendapatan daerah yaitu sebesar 76,40 persen atau Rp. 986.376.448.126,- disusul Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 22,34 persen atau Rp. 288.440.965.342,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu sebesar 1,26 persen atau Rp. 16.261.490.280,-.

Berdasarkan penjelasan diatas tingginya ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh kepada pemerintah Propinsi dan Pusat maka penting bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menaruh perhatian yang lebih besar pada sisi manajemen Pendapatan Asli Daerah agar ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer menjadi lebih kecil dan peningkatan kemandirian keuangan daerah menjadi lebih besar.

Manajemen Pendapatan Asli Daerah tidak berarti eksploitasi PAD, tetapi bagaimana Pemerintah Kota Banda Aceh mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga mampu untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dimasa yang akan datang dengan mengurangi ketergantung dana transfer dari pusat sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah juga menjadi lebih tinggi dan meningkat.

3. Pengawasan

1) Terbatasnya anggaran dan jumlah aparat pengawas;
2) Belum meratanya kualitas dan kompetensi pengawas internal;
3) Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan.

E. Otonomi Daerah

1. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Kepegawaian

1) Terbatasnya sumber daya Otonomi Daerah;
2) Belum efisiennya administrasi pemerintahan;
3) Belum maksimalnya pengelolaan keuangan daerah;
4) Masih rendahnya komitmen dan disiplin kepegawaian.
5) Jumlah sumber daya pemeriksa tidak sebanding dengan banyaknya objek pemeriksaan.

2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1) Persiapan pelaksanaan pemilu/pemilukada 2024;

2) Peningkatan Pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
3) Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG), terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
4) Penurunan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, miras di wilayah Kota Banda Aceh;
5) Peningkatan Peran Ormas dan LSM dalam Pembangunan.

F. Urusan Keistimewaan

1. Syariat Islam

1) Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan Syariat Islam;
2) Belum optimalnya sarana dan prasarana Syariat Islam;
3) Masih adanya pelanggaran terhadap Qanun Syariat syiar Islam;
4) Masih terbatasnya jumlah masjid yang memenuhi standar kebersihan dan masjid yang ramah disabilitas;
5) Belum optimalnya proses rekrutmen peserta MTQ mulai dari tingkat gampong kecamatan dan tingkat kota;
6) Belum optimalnya minat masyarakat masuk dayah;
7) Belum efektifnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Syariat Islam.

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. SDGs disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum PBB pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda Pembangunan global ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) secara inklusif, sistematis, dan transparan tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonsia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan

Tujuan ini menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperi infrastruktur, pariwisata, pangan, energi dan lain-lain.

Pertumbuhan sosial, ekonomi, dan pembangunan di kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan yang memperlancar, merangsang dan memacu aktifitas pembangunan. Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik,

pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah, hal ini disebabkan perannya dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia, dan barang. Saat ini panjang jalan di Kota Banda Aceh 620,960 km dengan kondisi baik 96,20 persen

2. Tanpa Kelaparan

Tujuan nomor dua dari SDGs adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang bekelanjutan. Kelaparan disebabkan karena kurangnya komsumsi pangan kronis. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan.

Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) untuk memastikan bahan pangan tersedia dengan cukup di Kota Banda Aceh. Ketersediaan pangan untuk penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 adalah 109,5 kg/tahun per jiwa dan pada tahun 2022 telah menjadi 112,12 kg/tahun per jiwa. Ketetapan terkini untuk Kota Banda Aceh adalah 102 ton per tahun yang dicadangkan oleh provinsi Aceh. Penggunaan cadangan ini dapat digunakan untuk keperluan seperti terjadinya kondisi rawan pangan atau bencana yang harus mendapatkan penanganan cepat tanggap. Cadangan pangan yang juga disediakan untuk keperluan tersebut selain beras antara lain berupa telur, minyak, gula, tepung dan mie instan.

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan ini menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Fokus dari tujuan ini mencakup berbagai hal mulai dari menjamin gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih.

Posyandu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita. Perkembangan rasio pelayanan posyandu di Kota Banda Aceh untuk per-satuan balita terus meningkat. Tahun 2022, 120 balita sudah dilayani oleh 1 posyandu. Jumlah ini sangat menggembirakan karena setiap gampong semakin sadar untuk berperan aktif untuk memantau dan menjaga terus kesehatana balita yang ada di lingkungannya melalui layanan Posyandu

4. Pendidikan Berkualitas

Pendidikan yang berkualitas dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang. Peningkatan pendidikan akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia.

5. Kesejahteraan Gender

Kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif.

Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Anak (Musrena) setiap tahunnya sebagai wadah penyaluran aspirasi bagi kaum perempuan, disabilitas dan perwakilan anak dalam penanganan perencanaan pembangunan di Banda Aceh. Metode perencanaan ini adalah untuk memperkuat posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan

kebijakan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Tujuan umum Musrena adalah untuk mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota yang ramah Gender. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu kesetaraan Gender khususnya dalam hal ini juga termasuk perlindungan sosial bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas secara berkelanjutan.

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan ini menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia.

Pemerintah Kota Bnda Aceh bekerjasama dengan kementerian PUPR hingga hingga saat ini telah merampungkan IPAL di lima gampong (desa) di Banda Acweh. Adapun gampong-gampong yang telah selesai dibangun IPAl Komunal tahun 2022 adalah Gampong Doy, Lampaseh Kota, Rukoh, Jeulingke, dan Gampong Blang Ke Camatan Meuraxa. Pembangunan sistem air limbah di lima gampong di Banda Aceh itu merupakan pembangunan IPAL baru skala pemukiman kombinasi MCK dan jaringan perpipaan. Tujuan pembangunan IPAL ini untuk sanitasi sesuai program pemerintah pusat untuk " Gerakan 100-0-100" yaitu 100 persen akses air minum yang layak, 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi yang layak.

7. Energi Bersih dan Terjangkau

Akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Energi dan cara menggunakannya harus efisien, berkelanjutan, dan sebisa mungkin terbarukan.

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan ini mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

10. Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan ini mengurangi ketimpangan didalam negara dan di antara negara-negara di dunia. Saat ini, kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan solusi. Diperlukan pendekatan terpadu untuk memecahkan masalah ini.

11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan ini membuat perkotaan dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan adalah tujuan utama. Sekaligus melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif.

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan berarti harus menyadari

pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara produksi, konsumsi makanan, dan sumber daya lainnya.

13. Penanganan Perubahan Iklim

Mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak mengalami dampak dari perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca terus meningkat dan pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada iklim global.

14. Ekosistem Lautan

Tujuan ini melestarikan dan memanfaatkan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjtan untuk pembangunan berkelanjutan. Segala sesuatu disamudra dan lautan adalah penggerak sistem global yang membuat bumi bisa dihuni oleh manusia. Cara mengelola samudra dan lautan sangat penting bagi kehidupan manusia secara keseluruhan.

15. Ekosistem Daratan

Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Selain itu mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelajutan, menyediakan keadilan untuk semua, dan membangun akses kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kerja sama global untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Tujuan ini membidik penguatan kerja sama Dunia Utara dengan Dunia Selatan dan Dunia Selatan dengan Dunia Selatan lewat mendukung rencana nasioanl untuk mecapai target.

Upaya pencapain target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*/ MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya pencapain target TPB/SDGs telah melaksanakan beberapa kebijakan diantaranya terus membangun infrastruktur yang ramah lingkungan secara berkelanjutan, mulai dari sektor emisi gas, pertanian, pengolahan limbah serta berbagai program lainnya.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, nasional, dan regional. Pertumbuhan ekonomi yang tetap positif pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja ekonomi daerah. Perkembangan ini merupakan hasil dari pelaksanaan berbagai program strategis pemulihan ekonomi yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Dalam menetapkan kebijakan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat. Perencanaan ini berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan serta program kerja yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh (RPJM) Tahun 2025–2029. Visi RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029 adalah "Banda Aceh Kota Kolaborasi". Visi ini mencerminkan arah pembangunan yang mengedepankan prinsip kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, maupun organisasi lainnya. Visi tersebut tidak hanya menunjukkan semangat kerja sama, tetapi juga menjadi strategi utama dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang berdaya saing, terbuka terhadap inovasi, serta mampu tumbuh secara berkelanjutan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan keberagamaan.

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, misi dirumuskan sebagai landasan umum dalam merancang tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan. Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan tujuh misi utama yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan dasar; penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif; pengembangan kemitraan pembangunan untuk mendorong daya saing daerah; optimalisasi potensi sumber daya demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota; penguatan nilai-nilai agama dan budaya; pemberdayaan generasi muda serta pengembangan olahraga; dan pelestarian lingkungan hidup. Seluruh misi tersebut telah diselaraskan dengan arah kebijakan dalam RPJM Provinsi Aceh dan RPJM Nasional agar pembangunan Kota Banda Aceh dapat terintegrasi secara vertikal dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara menyeluruh.

Target ekonomi makro Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan tingkat Nasional, serta perbandingan target ekonomi makro Kota Banda Aceh sebelum dan sesudah Perubahan RKPD Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Target Kebijakan Perekonomian Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Target Kota Banda Aceh	Target 2025 Prov. Aceh	Target 2025 Nasional
Pertumbuhan PDRB	%	4,8	3,85	5,3-5,6
Laju Inflasi	%	2,29	2,12	2,5±1,0
Indeks Gini	Indeks	0,327	0,301	0,379-0,382
Persentase Penduduk Miskin	%	6,89	14,03	7,0-8,0
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	20.723	821,77 (ribu)	

Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	7,74	5,24	4,50-5,00
IPM	%	87,47	72,98	71,07

Sumber: RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025, RPA Tahun 2023-2026, RKP Nasioal Tahun 2025, Ranwal RPJMN 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

Tabel 3. 2 Target Kebijakan perekonomian Kota Banda Aceh Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025 (RPD)	Target 2025 (RKPD)	Target 2025 (RKPD-P)
IPM	%	87,47	87,47	87,47
Persentase Penduduk Miskin	%	6,98	6,89	6,89
Tingkat Penganggurna Terbuka	%	7,74	7,45	7,45
Pertumbuhan PDRB	%	4,8	4,8	4,8
PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rupiah	86,16	86,16	86,16
Koefisien gini	Indeks	0,327	0,327	0,327

Sumber: RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, RKPD Kota Bana Aceh Tahun 2025

3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen. Meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini tetap mencerminkan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global dan momentum politik dalam negeri menjelang pelaksanaan Pemilu serentak.

Dari sisi harga, inflasi nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,16 persen (y-on-y), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,61 persen. Stabilitas harga ini berdampak positif terhadap daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi pertumbuhan konsumsi domestik. Selain itu, angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas terus meningkat menjadi 96,7 persen, menunjukkan perbaikan dalam aspek pembangunan manusia.

Di sektor tenaga kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 69,5 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 4,9 persen dari 5,3 persen pada tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan pemulihan kegiatan ekonomi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Dalam hal kesejahteraan sosial, jumlah penduduk miskin turun menjadi 25,2 juta jiwa atau 9,0 persen dari total penduduk, yang mencerminkan hasil dari berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dari sisi investasi, kinerja penanaman modal menunjukkan peningkatan. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp814 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar 60,0 miliar dolar Amerika Serikat. Kinerja ekspor dan impor juga mencerminkan pemulihan perdagangan internasional, masing-masing tercatat sebesar 78,6 miliar dan 233,7 miliar dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa nasional meningkat menjadi 155,7 miliar dolar Amerika Serikat, memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Sementara itu, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp22.139 triliun dengan PDB per kapita sebesar Rp78,6 juta. Kinerja ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang solid dengan kontribusi yang relatif seimbang dari sisi konsumsi, investasi, dan ekspor. Indeks Harga Saham

Gabungan (IHSG) mengalami penyesuaian menjadi 7.079,9 poin, yang mencerminkan dinamika pasar keuangan dalam negeri seiring sentimen global dan regional.

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi nasional tahun 2024 menunjukkan pemulihan dan konsolidasi yang kuat di berbagai sektor, menjadi fondasi penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, termasuk dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025.

3.1.2. **Kondisi Perekonomian Aceh**

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Aceh mencapai 5,5 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,32 persen, menunjukkan tren perlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, indikator kesehatan masyarakat mengalami peningkatan dengan angka harapan hidup yang naik menjadi 73,20 tahun. Tingkat literasi masyarakat tetap tinggi dengan angka melek huruf penduduk usia lima belas tahun ke atas bertahan di angka 98,34 persen.

Kondisi ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan yang positif. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya (meskipun data angka pastinya belum tersedia), seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang berada di angka delapan ratus ribu jiwa atau setara dengan 14,23 persen dari total penduduk. Persentase penduduk miskin ini terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini didukung pula oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh dari 74,70 pada tahun 2023 menjadi 75,36 pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat Aceh baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun daya beli. Dari sisi ekonomi, kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2024 mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp243,20 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 227,11 triliun. Pertumbuhan ekonomi tahunan (y-on-y) juga menunjukkan akselerasi, tumbuh sebesar 4,66 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,23 persen. Akselerasi pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah seiring dengan pelaksanaan agenda nasional seperti Pemilu dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024, serta semakin optimalnya belanja daerah melalui APBA.

Inflasi tahun 2024 tetap terkendali pada level 2,17 persen, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya namun tetap berada dalam batas yang stabil. Kondisi inflasi yang terjaga memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan konsumsi dan mendukung pemulihan ekonomi secara lebih luas.

Secara keseluruhan, kinerja sosial dan ekonomi Provinsi Aceh pada tahun 2024 menunjukkan arah perbaikan yang positif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan IPM menjadi indikasi bahwa fondasi pembangunan Aceh terus menguat menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.

3.1.3. Kondisi Perekonomian Kota Banda Aceh

Pada tahun 2024, kondisi sosial dan ekonomi Kota Banda Aceh menunjukkan kinerja yang relatif positif di tengah berbagai dinamika pembangunan. Jumlah penduduk mencapai 265,02 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,16 persen, yang menunjukkan tren perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan umur harapan hidup menjadi 75,25 tahun, mencerminkan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2024 tercatat sebesar 65,07 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil ditekan menjadi 7,55 persen dari sebelumnya 8,03 persen pada tahun 2023, menandakan membaiknya kondisi pasar tenaga kerja di Kota Banda Aceh.

Kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan. Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 6,95 persen atau sekitar 19,97 ribu jiwa. Penurunan ini terjadi meskipun garis kemiskinan meningkat menjadi Rp862.944 per kapita per bulan, mencerminkan kenaikan kebutuhan dasar hidup masyarakat. Di sisi lain, pembangunan manusia terus mengalami peningkatan yang stabil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebesar 88,85, naik dari 88,32 pada tahun sebelumnya, dan menegaskan posisi Banda Aceh sebagai kota dengan kualitas pembangunan manusia tertinggi di Provinsi Aceh. Dari aspek ekonomi, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp26,03 triliun, naik dari Rp23,77 triliun pada tahun 2023. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan meningkat menjadi Rp18,12 triliun. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,08 persen pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,23 persen. Peningkatan ini menggambarkan akselerasi aktivitas ekonomi masyarakat serta pemulihan ekonomi yang terus menguat.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku juga mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp98,20 juta per tahun, atau sekitar Rp8,18 juta per bulan per penduduk. Angka ini menunjukkan kenaikan daya beli dan produktivitas ekonomi masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, pengeluaran per kapita penduduk Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp2.402.736 per bulan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi inflasi tetap terkendali. Laju inflasi year-on-year pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,16 persen, masih dalam batas yang wajar dan lebih tinggi sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,53 persen. Inflasi yang terkendali turut mendukung kestabilan daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja ekonomi dan sosial Kota Banda Aceh pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan dan penguatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatnya IPM, merupakan indikator penting bahwa arah pembangunan Kota Banda Aceh berada pada jalur yang tepat menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh diproyeksikan akan kembali menunjukkan kinerja yang positif dan akan terus berlanjut di tahun 2026. Kondisi kesehatan yang terus membaik tentunya akan mendorong berkembangnya sektor jasa yang menjadi penopang perekonomian Kota Banda Aceh. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor yang paling besar memberikan kontribusi terhadap ekonomi Kota Banda Aceh. Disamping peningkatan konsumsi rumah tangga seiring membaiknya daya beli dan pendapatan masyarakat juga akan mendorong ekonomi Kota Banda Aceh kearah yang lebih baik.

Meningkatnya kinerja ekonomi yang lebih baik dapat terjadi dikarenakan telah dilaksanakanya program-program stratesis pemulihan ekonomi. Salah satu indikator makro ekonomi yang menunjukkan perbaikan yakni nilai PDRB Kota Banda Aceh, baik PDRB atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan.

Untuk lebih jelasnya Perkembangan perekonomian Kota Banda Aceh tahun 2023-2024 menurut lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024

Lapangan Usaha PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)			
	ADHB		ADHK	
	2023	2024	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	393,38	458,49	242,84	272,48
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	493,48	541,49	323,85	349,38
Pengadaan Listrik dan Gas	79,44	85,56	73,12	75,78
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35,10	43,21	18,55	19,40
Konstruksi	1.280,42	1.358,68	1.060,13	1.135,08
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.237,04	5.543,51	3.541,43	3.633,29
Transportasi dan Pergudangan	2.334,09	2.886,61	1.899,29	2.222,59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.220,85	1.313,40	692,61	732,39
Informasi dan Komunikasi	1.283,92	1.294,40	1.599,55	1.678,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	591,19	702,69	352,12	412,19
Real Estate	1.803,85	1.880,74	1.221,17	1.275,40
Jasa Perusahaan	551,75	577,47	372,33	393,86
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.121,50	5.741,91	3.427,18	3.576,10
Jasa Pendidikan	1.703,04	1.828,82	1.128,80	1.183,96
Jasa Kesehatan dan Kegiatan	1.047,41	1.106,84	749,45	758,32

Sosial				
Jasa lainnya	518,72	551,94	377,45	398,96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**23.773,42**	**26.025,15**	**17.079,85**	**18.117,78**

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2025

Berdasarkan Pada Tabel 3.3 terlihat bahwa perekonomian Kota Banda Aceh berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp. 26.025,15 miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah Rp. 23.773,42 miliar. Dari sisi sektoral, perekonomian Kota Banda Aceh didorong oleh hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi yang tertinggi bagi perekonomian Kota Banda Aceh sebesar Rp. 5.741,91 miliar. Lapangan usaha yang berkontribusi tinggi selanjutnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 5.543,51 miliar.

Selaras dengan peningkatan PDRB Kota Banda Aceh yang mengalami peningkatan, hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Pada Tabel 3.3 nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh pada tahun 2024 sebesar Rp. 18.117,78 miliar, jumlah ini lebih tinggi dari PDRB ADHK tahun 2023 sebesar Rp. 17.079,85 miliar. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan nilai PDRB kategori yang lainnnya, yaitu sebesar Rp. 3.633,29 miliar. Pada urutan berikutnya adalah Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 3.576,10 miliar, serta kategori Transportasi dan Pergudangan dengan nilai PDRB sebesar Rp. 2.222,59 miliar.

b. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa secara umum. Indikator ini dihitung menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu perbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi pada tahun dasar. Baik inflasi maupun IHK menjadi acuan penting dalam proses perencanaan pembangunan.

Selama tahun 2024, inflasi Kota Banda Aceh tercatat sebesar 2,2 persen, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,5 persen. Peningkatan ini ditandai oleh penurunan angka IHK, dari 116,75 pada bulan Desember 2023 menjadi 106,41 pada bulan Desember 2024, seiring dengan penyesuaian tahun dasar penghitungan IHK dari tahun 2018 menjadi 2022. Meski angka IHK tampak menurun, hal ini bukan mencerminkan deflasi, melainkan penyesuaian skala akibat perubahan tahun dasar.

Tingkat inflasi Kota Banda Aceh tahun 2024 sama dengan inflasi Provinsi Aceh yang juga sebesar 2,2 persen, dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,6 persen. Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, inflasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,7 persen dibandingkan tahun 2023, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 6,0 persen.

Perkembangan laju inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan nasional selama periode tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Banda Aceh	3,5	2,4	6,0	1,5	2,2
Provinsi Aceh	3,6	2,3	5,9	1,5	2,2
Nasional	1,7	1,9	5,5	2,6	1,6

Sumber: Kota Banda Aceh dalam angka 2025, Statistik Indonesia 2025, Provinsi Aceh dalam angka 2025

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kondisi ekonomi suatu daerah karena mencerminkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, terutama bagi kelompok berpenghasilan tetap. Selain itu, inflasi juga menjadi bagian dari indikator pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor pembangunan lainnya. Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu mencerminkan fluktuasi harga dari barang dan jasa konsumsi masyarakat. Pada tahun 2024, inflasi di Kota Banda Aceh tercatat sebesar 2,2 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 1,5 persen.

Peningkatan inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi sebesar 8,52 persen, diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar 4,76 persen, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,67 persen. Kenaikan juga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,35 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,99 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,58 persen, dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,49 persen.

Sementara itu, beberapa kelompok pengeluaran mengalami penurunan harga (deflasi), seperti kelompok pakaian dan alas kaki sebesar minus 2,42 persen, kelompok transportasi sebesar minus 1,69 persen, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar minus 0,30 persen. Di sisi lain, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami kenaikan harga sebesar 2,24 persen.

Secara keseluruhan, inflasi tahun 2024 mencerminkan adanya tekanan harga terutama pada kebutuhan rumah tangga dan jasa personal, meskipun sebagian kelompok pengeluaran menunjukkan penurunan harga. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas harga barang konsumsi utama untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mendukung arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

c. Tingkat Kemiskinan

Pemerintah terus memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan kemiskinan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi pembangunan di masa yang akan datang. Berbagai program telah dilaksanakan untuk menekan angka kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,00 persen, atau relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini juga lebih rendah

dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Aceh yang mencapai 14,20 persen, maupun tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kota Banda Aceh masih berada dalam kategori lebih baik secara relatif dibandingkan dengan capaian wilayah yang lebih luas.

Perkembangan persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 Persentase Penduduk Miskin
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Banda aceh	6,9	7,6	7,1	7,0	7,0
Provinsi Aceh	15,5	15,5	14,6	14,5	14,2
Nasional	9.8	10,1	9.5	9.4	9,0

Sumber: Kota Banda Aceh dalam angka 2025, Provinsi Aceh dalam angka 2025 Statistik Indonesia 2025

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,00 persen, yang menunjukkan kondisi stabil dibandingkan tahun sebelumnya yang juga sebesar 7,00 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh yang mencapai 14,20 persen dan nasional sebesar 9,00 persen, maka tingkat kemiskinan Kota Banda Aceh masih relatif lebih rendah.

Permasalahan utama kemiskinan di Kota Banda Aceh antara lain dipengaruhi oleh arus urbanisasi dari berbagai daerah ke Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi yang memiliki daya tarik tersendiri bagi pencari kerja. Meningkatnya jumlah penduduk pendatang yang mencari pekerjaan tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan kesempatan kerja, sehingga turut menyumbang pada peningkatan angka pengangguran terbuka. Selain itu, tantangan juga datang dari banyaknya lulusan SMA maupun perguruan tinggi yang belum dapat terserap oleh pasar kerja.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh selama tahun 2024 telah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan memberikan dukungan berupa fasilitas dan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat mengembangkan usahanya dan membuka lapangan kerja baru. Selain itu, peningkatan kualitas dan fungsionalisasi infrastruktur juga menjadi perhatian utama, guna mendorong tumbuhnya investasi serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi lokal.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Banda Aceh tercatat sebesar 7,60 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,03 persen. Meski menunjukkan tren penurunan, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Provinsi Aceh sebesar 5,80 persen dan TPT Nasional sebesar 4,90 persen.

Jika melihat data tahun 2023 terkait struktur pengangguran menurut tingkat pendidikan, mayoritas pengangguran di Kota Banda Aceh berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 4.058 orang atau sekitar 44,51 persen dari total pengangguran. Disusul oleh lulusan perguruan tinggi sebanyak 5.070 orang (sekitar 31,30 persen), SMP sebanyak 462 orang (4,62 persen), dan SD ke bawah

sebanyak 347 orang (3,81 persen). Data ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak hanya didominasi oleh lulusan berpendidikan rendah, tetapi juga cukup tinggi di kalangan lulusan menengah dan tinggi.

Tingginya pengangguran dari kalangan lulusan SMA dan perguruan tinggi mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dan peluang kerja yang tersedia di pasar. Selain itu, urbanisasi menuju Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi dengan daya tarik ekonomi juga menambah tekanan terhadap ketersediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya mengatasi pengangguran melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta mendorong pengembangan sektor informal dan UMKM agar mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh,Provinsi Aceh dan Nasional 2020-2024 (dalam %)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Banda aceh	9.5	8,9	8,6	8,0	7,6
Provinsi Aceh	6.6	6.3	6.2	6.0	5,8*
Nasional	7.1	6.5	5.9	5.3	4,9

Sumber: Kota Banda Aceh dalam angka 2025, Provinsi Aceh dalam angka 2025 Statistik Indonesia 2025, BPS Aceh (per agustus 2024)*

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menurunkan angka pengangguran. Strategi yang dijalankan mencakup pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, pengembangan jiwa kewirausahaan masyarakat, pemberian dukungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM), serta penguatan kemitraan antara dunia industri dan pendidikan. Pemerintah juga menyelenggarakan program magang dan praktik kerja, serta mendukung mobilitas tenaga kerja agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pelaksanaan program-program ketenagakerjaan juga terus diperkuat melalui berbagai inisiatif seperti Program Pembinaan Industri, Program Pelatihan Kerja, dan Program Magang dan Praktik Kerja. Khususnya, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) turut berkontribusi dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing, sehingga mampu membantu menekan angka pengangguran di Kota Banda Aceh.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebesar 88,94 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 88,33. Kenaikan sebesar 0,61 poin ini mencerminkan capaian positif dalam pembangunan manusia, khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. IPM Kota Banda Aceh masih menunjukkan posisi yang sangat kompetitif, lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Aceh yang sebesar 75,40 dan IPM Nasional sebesar 75,00.

IPM Kota Banda Aceh juga terus menempati peringkat tertinggi kedua secara nasional, setelah Kota Yogyakarta, dan merupakan yang tertinggi di luar Pulau Jawa. Capaian ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Banda Aceh memiliki akses yang baik terhadap hasil pembangunan, baik dalam bentuk pendapatan, kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan dasar lainnya yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Tingkat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh,Provinsi Aceh dan Nasional 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Banda aceh	85,4	85,7	87,9	88,3	88,9
Provinsi Aceh	72,0	72,2	74,1	74,7	75,4
Nasional	72,8	73,2	73,8	74,4	75,0

Sumber: Kota Banda Aceh dalam angka 2025, Provinsi Aceh dalam angka 2025 Statistik Indonesia 2025

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman strategis yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD Kota Banda Aceh merupakan dokumen rencana keuangan tahunan yang mencerminkan keseluruhan hak dan kewajiban daerah, serta sumber daya ekonomi lainnya, dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dapat dinilai dengan satuan uang.

Sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat akuntabilitas fiskal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan keuangan daerah diarahkan pada penguatan program-program prioritas pembangunan yang mencakup peningkatan kualitas infrastruktur, akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, serta sektor-sektor lainnya yang mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penyesuaian kebijakan fiskal yang adaptif dan berbasis kinerja juga menjadi fokus untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh

Pendapatan daerah mencakup seluruh penerimaan uang yang masuk melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, serta merupakan hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dikembalikan. Pendapatan daerah juga menjadi tolok ukur utama kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, setiap daerah dituntut untuk mampu membiayai pembangunan secara mandiri, terutama melalui optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya pemenuhan kebutuhan pendanaan daerah dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pemerintah daerah itu sendiri.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Mengoptimalkan pemungutan pajak daerah melalui pembaruan data wajib pajak dan penilaian (verifikasi) ulang terhadap usaha milik wajib pajak oleh petugas terkait.

2. Melaksanakan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak demi mendukung keberlangsungan pembangunan di Kota Banda Aceh.
3. Meningkatkan digitalisasi sistem perpajakan, serta membentuk tim terpadu untuk menangani penagihan pajak yang tertunggak.
4. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dengan mengirim petugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai juru sita, penilai pajak, penilai aset, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
5. Melakukan penagihan pajak secara persuasif**,** namun tetap disertai dengan penegakan hukum melalui tindakan tegas (upaya paksa) terhadap wajib pajak yang menunggak.
6. Mengintensifkan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**,** disertai dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta pembukaan layanan pembayaran PBB di sembilan kecamatan.

Namun demikian, kondisi ideal tersebut masih sulit untuk dicapai, mengingat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing wilayah tidak selalu memadai. Hal ini menyebabkan ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan data realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh hingga Triwulan I Tahun 2025:

Tabel 3. 8 Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.436.918.851.173,00**	**300.629.826.404,12**	**20,92**
Pajak Daerah	403.774.206.214,00	92.642.581.969,12	22,94
Retribusi Daerah	29.638.361.674,00	3.945.289.335,00	13,31
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.213.009.121,00	2.590.456.799,00	61,49
Lain-lain PAD yang Sah	169.322.864.163,00	46.236.686.609,12	27,31
PENDAPATAN TRANSFER	**1.016.883.154.679,00**	**204.116.937.457,00**	**20,07**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	989.937.227.000,00	191.439.351.290,00	19,34
Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.945.927.679,00	12.677.586.167,00	47,05
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**16,261,490,280.00**	**3.870.306.978,00**	**23,80**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.261.490.280,00	3.870.306.978,00	23,80
JUMLAH PENDAPATAN	**1.436.918.851.173,00**	**300.629.826.404,12**	**20,92**

Sumber: BPKK (Laporan Realisasi Anggaran 2025)

Berdasarkan Tabel 3.8 memperhatikan kinerja perekonomian nasional dan daerah terkini, serta hasil evaluasi terhadap realisasi pendapatan hingga Triwulan I Tahun 2025, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Kebijakan ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkiraan yang terukur secara rasional terhadap potensi pendapatan yang dapat dicapai dari berbagai sumber: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, yang menunjukkan capaian 20,92 persen dari target total pendapatan, menjadi indikator awal dalam mengevaluasi efektivitas strategi pemungutan pendapatan.
3. Penyesuaian Dana Transfer, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh, sesuai perkembangan kebijakan fiskal nasional dan alokasi antardaerah.
   Perubahan target pendapatan dilakukan sebagai bentuk respons atas capaian riil penerimaan, guna menjaga akurasi perencanaan anggaran dan menjamin stabilitas fiskal daerah.

Struktur Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hingga Triwulan I Tahun 2025, total realisasi Pendapatan Daerah mencapai 300.629.826.404 dari target sebesar 1.436.918.851.173 atau sebesar 20,92 persen.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   PAD merupakan sumber pendapatan yang berasal dari daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Sampai dengan Triwulan I, realisasi PAD sebesar 300.629.826.404 dari target 1.436.918.851.173 atau 20,92 persen. Rinciannya adalah sebagai berikut:
   - Pajak Daerah: realisasi sebesar 92.642.581.969 dari target 403.774.206.214 atau 22,94 persen
   - Retribusi Daerah: realisasi sebesar 3.945.289.335 dari target 29.638.361.674 atau 13,31 persen
   - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: realisasi sebesar 2.590.456.799 dari target 4.213.009.121 atau 61,49 persen
   - Lain-lain PAD yang Sah: realisasi sebesar 46.236.686.609 dari target 169.322.864.163 atau 27,31 persen
2. Pendapatan Transfer
   Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka perimbangan keuangan. Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasinya mencapai 204.116.937.457 dari target 1.016.883.154.679 atau sebesar 20,07 persen, terdiri dari:
   - Transfer dari Pemerintah Pusat: realisasi sebesar 191.439.351.290 dari target 989.937.227.000 atau 19,34 persen
   - Transfer Antar Daerah: realisasi sebesar 12.677.586.167 dari target 26.945.927.679 atau 47,05 persen
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
   Komponen ini mencakup hibah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasinya mencapai 3.870.306.978 dari target 16.261.490.280 atau sebesar 23,80 persen.

Target Perubahan Pendapatan Daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini:

Tabel 3. 9 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	TARGET RKPD SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	APBK (Rp)	PERGESERAN APBK (Rp)	TARGET RKPD SETELAH PERUBAHAN (Rp)	PENURUNAN/ KENAIKAN (Rp)	(%)	KET
1	2	3	3	4	5	6	7	8
	Pendapatan daerah	**1.485.532.848.935**	**1.469.160.993.273**	**1.436.918.851.173**	**1.442.498.036.173**	**5.579.185.000**	**0,39**	
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**452.894.910.529**	**403.774.206.214**	**403.774.206.214**	**403.774.206.214**	**-**	**-**	
1.1	Pajak Daerah	258.871.499.574	200.599.971.256	200.599.971.256	200.599.971.256	-	-	
1.2	Retribusi Daerah	42.848.929.143	29.638.361.674	29.638.361.674	29.638.361.674	-	-	
1.3	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.200.000.000	4.213.009.121	4.213.009.121	4.213.009.121	-	-	
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	144.974.481.812	169.322.864.163	169.322.864.163	169.322.864.163	-	-	
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.016.376.448.126**	**1.049.125.296.779**	**1.016.883.154.679**	**1.022.462.339.679**	**5.579.185.000**	**0,55**	
2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	921.155.707.000	1.022.179.369.100	989.937.227.000	991.414.412.000	1.477.185.000	0,15	
2.2	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	95.220.741.126	26.945.927.679	26.945.927.679	31.047.927.679	4.102.000.000	15,22	
3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**16.261.490.280**	**16.261.490.280**	**16.261.490.280**	**16.261.490.280**	**-**	**-**	

No	URAIAN	TARGET RKPD SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	APBK (Rp)	PERGESERAN APBK (Rp)	TARGET RKPD SETELAH PERUBAHAN (Rp)	PENURUNAN/ KENAIKAN (Rp)	(%)	KET
1	2	3	3	4	5	6	7	8
3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.261.490.280	16,261,490,280	16.261.490.280	16.261.490.280	-	-	

Sumber: Lampiran I Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, Berita Acara Kesepakatan Pagu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025

Pada Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan, tetap seperti yang dialokasikan dalam Pergeseran APBK Tahun Anggaran 2025. Perubahan hanya terjadi pada komponen Pendapatan Transfer.

Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar 1.477.185.000 rupiah bersumber dari Penambahan TDBH Migas T.A 2025, yaitu dari sebelumnya 989.937.227.000 rupiah menjadi 991.414.412.000 rupiah, atau naik sebesar 0,15 persen.

Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah juga mengalami kenaikan sebesar 4.102.000.000 rupiah bersumber dari Penambahan BOP Mukim Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur, yang semulanya 26.945.927.679 rupiah menjadi 31.047.927.679 rupiah, atau naik sebesar 15,22 persen.

Dengan demikian, secara keseluruhan Pendapatan Transfer meningkat dari 1.016.883.154.679 rupiah menjadi 1.022.462.339.679 rupiah, atau bertambah sebesar 5.579.185.000 rupiah, yang setara dengan 0,55 persen.

Secara total, Pendapatan Daerah juga mengalami peningkatan dari 1.436.918.851.173 rupiah menjadi 1.442.498.036.173 rupiah, atau naik sebesar 5.579.185.000 rupiah (0,39 persen). Kenaikan ini seluruhnya berasal dari peningkatan komponen Pendapatan Transfer, mengingat PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak berubah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBK Murni Tahun Anggaran 2024 semester pertama serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, maka arah kebijakan belanja dalam Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 diarahkan sebagai berikut:

1. Percepatan akselerasi pencapaian target program prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026, dengan melakukan penyesuaian program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi capaian program/kegiatan tahun berjalan (APBK TA 2024), agar tetap mendukung pencapaian visi dan misi Kota Banda Aceh.
2. Pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja, yang dilakukan sebagai dampak dari pengurangan atau penambahan beberapa kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.
3. Penyesuaian kebijakan belanja dilakukan untuk merespons permasalahan aktual di daerah, dengan tetap mempertimbangkan prioritas pembangunan Kota Banda Aceh.
4. Dukungan terhadap kegiatan strategis dan berdampak signifikan, terutama yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Penguatan alokasi anggaran untuk mendukung peran strategis Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh.

Adapun perubahan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 10 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Target RKPD Sebelum Perubahan (Rp)	APBK	PERGESERAN APBK (Rp)	TARGET RKPD SETELAH PERUBAHAN (Rp)	PENURUNAN/ KENAIKAN (Rp)	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6			
1	Belanja Operasi	1.207.069.399.189	1.173.900.119.279	1.132.042.861.996	1.133.520.046.996	1.477.185.000	0,13	
2	Belanja Modal	136.246.675.708	155.146.206.009	160.264.508.695	164.264.508.695	4.000.000.000	2,50	
3	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	-	
4	Belanja Transfer	148.416.774.038	146.814.667.985	151.311.480.482	151.413.480.482	102.000.000	0,07	
Jumlah		**1.492.732.848.935**	**1.476.360.993.273**	**1.444.118.851.173**	**1.449.698.036.173**	**5.579.185.000**	**0,39**	

Sumber : Lampiran I Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, Berita Acara Kesepakatan Pagu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025

Secara umum, pada Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025, Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp5.579.185.000 atau naik sebesar 0,39 persen, dari sebelumnya sebesar Rp1.444.118.851.173 menjadi Rp1.449.698.036.173. Peningkatan belanja ini berasal dari bertambahnya alokasi pada beberapa komponen belanja daerah. Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp1.477.185.000 atau naik 0,13 persen, yang bersumber dari tambahan Transfer Dana Bagi Hasil (TDBH) Migas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,47 miliar. Belanja Modal meningkat sebesar Rp4.000.000.000 atau sebesar 2,50 persen dibandingkan sebelumnya, peningkatan ini berasal dari adanya tambahan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Infrastruktur sebesar Rp 4 miliar. Belanja Tak Terduga tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp500.000.000. Sementara itu, Belanja Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp102.000.000 atau 0,07 persen, yang berasal dari penambahan Belanja Operasional Pemerintahan Mukim sebesar Rp102 juta.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 tidak mengalami perubahan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 11 Perubahan Pembiyaan Daerah Tahun Anggaran 2024

NO.	URAIAN	Target RKPD Sebelum Perubahan (Rp)	APBK	PERGESERAN APBK (Rp)	TARGET RKPD SETELAH PERUBAHAN (Rp)	PENURUNAN/ KENAIKAN (Rp)	(%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7		
I	**Pembiayaan Daerah**							
1.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**-**	**-**	**-**
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)		10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-
2.1	**Pengeluaran Pembiayaan**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**-**	**-**	**-**
2.1.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	-	-	-
Jumlah Pembiayaan Neto		**0**	**7.200.000.000**	**7.200.000.000**	**7.200.000.000**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Lampiran I Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, Berita Acara Kesepakatan Pagu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan Tahun 2025 ini merupakan tahun ketiga dari Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, mengacu pada RKP Tahun 2025 dan RKPA Tahun 2025 serta RPJMN Tahun 2025-2029 guna keselarasan antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi dengan Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah bertujuan agar proses pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah juga dipertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana tahunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan I tahun berjalan, sehingga beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi dan belum selesai dapat segera ditindaklanjuti.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2024 dijabarkan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan seluruh potensi yang ada. Hubungan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Hubungan Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Banda Aceh Berdasarkan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1. Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1. Peningkatan Indeks Kota Syariah (IKS)	1. Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
2. Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	1. Peningkatan Indeks Ketenteraman Umum	1. Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum
3. Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	1. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Peningkatan Nilai AKIP	1. Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
4. Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan	1. Peningkatan Indeks Kualitas Pendidikan	1. Optimalnya Kualitas Pendidikan
5. Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	1. Peningkatan Indeks Kualitas Kesehatan	1. Optimalnya Kualitas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
6. Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	1. Pesentase Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 2. Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3. Persentase Peningkatan Pemenuhan Layanan SPM Sosial.	1. Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial
7. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	1. Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
8. Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya	1. Peningkatan Indeks Pelestarian Budaya Daerah	1. Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya
9. Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	1. Persentase Peningkatan Rata-Rata Capaian Layanan Infrastruktur Perkotaan	1. Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman
10. Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Peningkatan Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	1. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Peningkatan Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota 3. Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana
12. Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	1. Peningkatan Indeks Pemberdayaan Pemuda Dan Pembinaan Olahraga	1. Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga
13. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber: RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Mengacu kepada RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2036, maka arah kebijakan Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah "Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata serta Perikanan". Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1.1	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1.1.1	Optimalisasi Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Optimalisasi Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
2	Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	2.1	Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	2.1.1	Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum
3	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	3.1	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	3.1.1	Optimalisasi Reformasi Birokrasidan Tata Kelola pemerintahan	Optimalisasi Reformasi Birokrasidan Tata Kelola pemerintahan
4	Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan	4.1	Optimalnya Kualitas Pendidikan	4.1.1	Optimalisasi Kualitas Pendidikan	Optimalisasi Kualitas Pendidikan
5	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	5.1	Optimalnya Kualitas Kesehatan	5.1.1	Optimalisasi Kualitas Kesehatan	Optimalisasi Kualitas Kesehatan
6	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	6.1	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial	6.1.1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial
7	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	7.1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	7.1.1	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata
8	Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya	8.1	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya	8.1.1	Optimalisasi Upaya pelestarian Budaya	Optimalisasi Upaya pelestarian Budaya
9	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	9.1	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman	9.1.1	Peningkatan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	Peningkatan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman
10	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.1	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.1.1	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	11.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	11.1.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana
12	Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	12.1	Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	12.1.1	Optimalisasi Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Optimalisasi Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga
13	Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah	13.1	Meningkatnya Sumber Pendapatan Daerah	13.1.1	Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Kota Banda Aceh menetapkan prioritas pembangunan Tahun 2025 yang dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan melanjutkan prioritas pembangunan yang belum tercapai pada tahun sebelumnya. Di samping itu, juga ditetapkan tema pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 yang diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Aceh.

Secara rinci, tema dan prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 3 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2025

Tema RKP Nasional Tahun 2025		**Tema RKP Aceh Tahun 2025**		**Tema RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025**	
"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"		"Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Sumber Daya Manusia serta Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan untuk Percepatan Pemerataan Pembangunan Wilayah"		"Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata serta Perikanan"	
Prioritas Pembangunan Nasional		**Prioritas Pembangunan Aceh**		**Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh**	
⇩		⇩		⇩	
PN1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia	PA1	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya Aceh, meningkatan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian	PBNA1	Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
PN8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur				
PN2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PA2	Memantapkan kemandirian pangan, energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PBNA2	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial
PN5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatan nilai	PA5	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat		

	tambah di dalam negeri		pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan		
PN6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan				
PN3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PA3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	PBNA3	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman
PN4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	PA4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi social dan penguatan peran pemuda	PBNA4	Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan
				PBNA5	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan
				PBNA6	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PBNA7	Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga
PN7	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PA6	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas	PBNA8	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah

Sumber: RKP Nasional Tahun 2025, RKPA Tahun 2025 dan RKP Kota Banda Aceh Tahun 2025

Keselarasan sasaran pembangunan daerah Kota Banda Aceh pada tahun 2025 dengan sasaran pembangunan daerah Provinsi Aceh dan sasaran pembangunan Nasional dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4. 4 Target Indikator Makro Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Nasional Tahun 2025

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kota Banda Aceh	Target Provinsi Aceh	Target Nasional
Pertumbuhan PDRB	%	6,08	4,8	3,85	5,3-5,6
Laju Inflasi	%	2,16	2,29	2,12	2,5 ±1,0 (yoy)

PDRB per kapita (ADHK)	Juta Rupiah	-	68,59	26,54	
PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rupiah	98,20	86,16		
Indeks Gini	Indeks	-	0,327	0,301	0,379-0,382
Persentase Penduduk Miskin	%	6,95	6,89	14,03	7,0-8,0
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	19.970	20.723	821,77 (ribu)	
IPM	%	88,85	87,47	72,98	71,07

Sumber: RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, RKPA Tahun 2025, dan RKPN Tahun 2025

4.3 Program Proritas Pembangunan

Penentuan program prioritas pembangunan dalam perubahan RKPD tahun 2025 selain berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan pada tahapan RPD Tahun 2023-2026, arah pembangunan Kota Banda Aceh pada perubahan RKPD tahun 2025 juga memperhatikan visi-misi Walikota Banda Aceh Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah diharapkan mampu menjawab permasalahan kebutuhan pembangunan daerah di Kota Banda Aceh.

Konektivitas prioritas pembangunan Kota Banda Aceh tidak terlepas dari prioritas Provinsi dan Nasional, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4. 5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2025 memperhatikan Visi Misi Tahun 2025-2029

Nasional		**Provinsi Aceh**	**Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025**	**Visi - Misi Wali Kota Banda Aceh 2025-2029**
PN	**Arah Kebijakan**			
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan				**Banda Aceh Kota Kolaborasi**
PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Belum dipublikasi	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera dan inklusif	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar
	Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi		Meningkatkan daya saing generasi Muda	Misi 6 : Memberdayakan Generasi Muda dan Memajukan Olahraga
	Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional			
	Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas			
	Meningkatkan Prestasi Olahraga			

Nasional		Provinsi Aceh	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi - Misi Wali Kota Banda Aceh 2025-2029
PN	**Arah Kebijakan**			
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan				**Banda Aceh Kota Kolaborasi**
PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi politik		Mewujudkan tata kelola pemerinathan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme	Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Adaptif, Inovatif, dan Responsif
	Reformasi hukum			
	Reformasi tata kelola pemerintahan yang didukung transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik			
	Tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045			
	Optimalisasi Pendapatan Negara ditujukan untuk penerimaan perpajakan dan non-perpajakan sehingga dapat menyediakan ruang fiskal yang lebih memadai untuk mencapai sasaran pembangunan			
	Peningkatan harmonisasi kebijakan moneter fiskal, sektor keuangan dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia			
	Pencegahan dan pemberantasan narkoba, penanggulangan			

Nasional		Provinsi Aceh	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi - Misi Wali Kota Banda Aceh 2025-2029
PN	**Arah Kebijakan**			
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan				**Banda Aceh Kota Kolaborasi**
	judi dan penyelundupan			
	Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, Tenaga Kerja Indonesia, dan keamanan insani			
	Penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara ditujukan untuk menciptakan Manajemen Badan Usaha Milik Negara yang profesional dan berintegritas serta bebas dari kepentingan politik praktis.			
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan pembangunan infrastruktur		Meningkatkan pembangunan dan daya saing daerah	Misi 3 : Memperkuat Kemitraan Pembangunan dalam Rangka meningkatkan daya saing daerah
	Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas- luasnya			
	Penguatan koperasi			
	Mengembangkan industri kreatif			
	Pendalaman sektor keuangan			
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan pertahanan negara		Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Kemajuan Kota	Misi 4 : Memanfaatkan Potensi Sumber Daya untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemajuan Kota
	Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan			
	Penguatan keamanan negara			
	Profesionalisme dan pelayanan kepolisian			
	Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi			
	Memperkuat keamanan siber, sandi, dan sinyal			

Nasional		Provinsi Aceh	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi - Misi Wali Kota Banda Aceh 2025-2029
PN	**Arah Kebijakan**			
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan				**Banda Aceh Kota Kolaborasi**
	Pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif			
	Penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy			
	Penguatan diplomasi ekonomi			
	Swasembada pangan, energi, dan air dicapai melalui pembangunan yang terintegrasi dan memprioritaskan sinergi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi trade off melalui pendekatan yang berkesinambungan (Food, Energy, Water Nexus)			
	Pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global			
	Pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pembangunan rendah karbon, pekerjaan hijau *(green jobs)*, dan ekonomi biru.			
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru			
	Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional			

Nasional		Provinsi Aceh	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi - Misi Wali Kota Banda Aceh 2025-2029
PN	**Arah Kebijakan**			
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan				**Banda Aceh Kota Kolaborasi**
	Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global			
PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Membangun desa dan membangun dari desa			
	Pemerataan ekonomi			
	Memberantas kemiskinan			
PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Memperkokoh ideologi Pancasila		Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya	Misi 5 : Meningkatkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya
	Penguatan demokrasi			
	Upaya penegakan hak asasi manusia			
PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Masyarakat adil, makmur, dan harmonis		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Kota Tangguh Bencana	Misi 7 : Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
	Melestarikan budaya			
	Penanganan bencana			

Sumber : RKPN Tahun 2025, RPJM Kota Banda Aceh 2025-2029

Perubahan RKPD Kota Banda Aceh telah diselaraskan dengan visi, misi serta prioritas pembangunan Kepala Daerah terpilih. Adapun program prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan Kepala Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Walikota untuk Tahun 2025

No.	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Unggulan	Aktivitas
1.	Percepatan penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar kota dan kesejahteraan sosial, serta pemenuhan pembangunan ramah gender dan disabilitas/kota inklusif serta optimalisasi penerimaan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah dan pembiayaan alternatif lainnya melalui penguatan kemitraan pembangunan	Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Inklusif	Cerdas (Ciptakan Generasi Pintar dan Berkualitas)	Program beasiswa dan peningkatan kualitas sarana pustaka sekolah
			Sehati (Sehat dan Peduli)	Mutu layanan medis, perluasan jangkauan layanan berbasis digital, serta penguatan program promotif dan preventif seperti imunisasi, deteksi dini penyakit, edukasi gizi
			Peduli (Perempuan, Disabilitas dan Anak untuk Lingkungan Inklusif)	Menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan sejahtera bagi seluruh warganya, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia.
2.	Penguatan kelembagaan yang tepat fungsi, penataan regulasi, memperkuat birokrasi dengan mindset dan culture set yang profesional, adaptif, inovatif dan responsif, penerapan manajemen risiko dalam perencanaan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Platform (satu aplikasi untuk beragam solusi)	Sebuah program yang mengedepankan aksesibilitas, Platform dirancang agar dapat digunakan oleh berbagai kalangan tanpa hambatan, baik melalui web maupun aplikasi mobile.
3.	Pengembangan sinergi pentahelix dalam rangka meningkatkan daya saing daerah peningkatan kolaborasi nasional dan internasional, pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, hilirisasi sumber daya, pengembangan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi kota, penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Meningkatkan Pembangunan dan Daya Saing Daerah	Cepat (Ciptakan Ekonomi yang Produktif, Akseleratif dan Tumbuh)	Kebijakan insentif dan keringanan pajak usaha UMKM, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, pendampingan digitalisasi usaha, serta promosi produk lokal berbasis ekonomi kreatif dan syariah
4.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kota, Penguatan Kemitraan Pembangunan, Optimalisasi Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Kapasitas SDM, Akses Pembiayaan Dan Pasar, Adopsi Teknologi, Serta Dukungan Perbankan Dan Lembaga Penjamin Kredit. Upaya Ini Diperkuat Dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Hilirisasi Industri Perikanan, Dan Penguatan Industri Halal.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Kemajuan Kota	Infrastruktur	Penyediaan air bersih melalui optimalisasi layanan PDAM, serta pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

No.	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Unggulan	Aktivitas
5.	Penguatan Pelaksanaan Regulasi Dan Internalisasi Nilai- Nilai Syariat Islam Dan Budaya, Penguatan Peran Keluarga Dalam Pembangunan Karakter Manusia Dan Menggerakan Modal Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat.	Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Beradab, dan Berbudaya	Branding	Program ini mengintegrasikan potensi wisata sejarah, alam, dan budaya Aceh dalam satu narasi yang kuat dan saling melengkapi.
6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Guna Membentuk Individu Yang Sehat, Cerdas, Produktif, Kreatif, Inovatif Dan Berprestasi, Menciptakan Ruang Kreatifitas Dan Pemberdayaan Generasi Muda, Pengembangan Kemajuan Olahraga, Peningkatan Peran Keluarga Dalam Pembinaan Generasi Muda	Meningkatkan Daya Saing Generasi Muda	Banda Aceh Academy	Pusat pelatihan, pengembangan keterampilan, inkubator bisnis dan kewirausahaan, memberikan akses ke dunia kerja serta mendorong partisipasi komunitas kreatif atau pekerja seni
7.	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkualitas, Ramah Lingkungan Dan Berbasis Mitigasi Bencana, Penguatan Ketangguhan Manusia Dan Masyarakat Dalam Menghadapi Berbagai Perubahan Iklim Dan Bencana, Penerapan Ekonomi Hijau, Dan Implementasi Kota Rendah Karbon	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Kota Tangguh Bencana	Asri (Aksi Solutif untuk Ramah Lingkungan)	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan sampah terpadu, mitigasi bencana, serta perwujudan konsep kota berkelanjutan.

Sumber : RPJM Kota Banda Aceh 2025-2029

Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat lebih rinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 7 Sasaran Pembangunan Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
Program prioritas Pendukung P-BNA 1: Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam							
1	Program Syariat Islam Aceh	Indeks Kota Syariah (IKS)	Indeks	76.77	81.27	15,279,095,250	Dinas Syariat Islam
2	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase meningkatnya kapasitas dan peran ulama	%	100	100	652,023,600	Sekretariat MPU
Program prioritas Pendukung P-BNA 2: Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial							

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	80	95	223,284,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Penidikan dan Latihan Perkoperasian	%	80	90	128,139,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	%	80	95	51,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
4	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Pengembangan UMKM	%	80	95	177,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penenaman Modal	%	0	100	495.602.710	DPMPTSP
6	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	0	100	181,845,000	DPMPTSP
7	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	0	100	180,685,960	DPMPTSP
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal	%	0	100	11,300,000	DPMPTSP
9	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase jumlah wilayah penangkapan	%	35	25	1,425,000,000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
10	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	%	35	25	325,000,000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Olahan Perikanan	%	25	25	2,505,035,000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
12	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase pemamfaatan sarana pertanian	%	40	20	1,108,830,000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
13	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian	%	30	30	1,816,607,000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
14	Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	%	80	95	5,154,400	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
15	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase meningkatnya sarana distribusi perdagangan	%	80	95	9,519,041,412	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
16	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Pengembangan Ekspor	%	80	95	119,999,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
17	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase gampong yang memiliki minimal satu produk industri kecil/menengah	%	100	100	6,080,172,000	Dinas Tenaga Kerja
18	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Penataan IKM	%	100	100	90,000,000	Dinas Tenaga Kerja
19	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase gampong yang memiliki tata kelola pemerintahan gampong yang baik	%	100	100	705,426,300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
20	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Deversifikasi Jenis Pangan Baru	%	30	100	616,430,500	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
21	Program penanganan kerawanan pangan	Jumlah Gampong lokasi rawan pangan yang ditangani sesuai FSVA	%	0	100	806,440,000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
22	Program pengawasan keamanan pangan	Pangan yang Memenuhi syarat	%	0	100	153,931,000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
Program prioritas Pendukung P-BNA 3: Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman							

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Meningkatnya Layanan Air Minum	%	91.27	93.47	9,381,267,600	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Meningkatnya Layanan Air Limbah	%	87.58	87.67	8,125,058,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Meningkatnya Kualitas Kontruksi Jalan sesuai Spesifikasi	%	93.12	96.15	27,688,824,191	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	%	100	100	6,856,470,000	Dinas Perhubungan
5	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Permukiman kumuh	%	100	100	9,426,611,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	%	100	100	3,057,847,600	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Meningkatnya Penataan Bangunan	%	81.07	85.07	11,180,365,945	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tertatanya Ruang yang Sesuai RTRW/RRTR	%	74.01	81.97	2,193,673,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Cakupan Luas Area Pengendalian Banjir	%	80	44.05	270,359,130	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program prioritas Pendukung P-BNA 4: Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan							
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	%	66.02	79.00	96,544,279,110	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4 dan bersertifikasi pendidik	%	39.86	100.00	35,633,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persetase peningkatan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan milik masyarakat	%	75.25	80.47	37,060,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
4	Program Pendidikan Dayah	Persentase Dayah yang Terakreditasi	%	68.42%	92.11%	5,028,301,500	Dinas Pendidikan Dayah
5	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase kebijakan yang dihasilkan terkait pengembangan mutu pendidikan Aceh	%	09.42	100	313,096,800	Dinas Pendidikan Dayah
Program prioritas Pendukung P-BNA 5: Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan							
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	79.20	90	51,241,279,935	Dinas Kesehatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	95	95	1,410,724,600	Dinas Kesehatan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	95	100	980,594,110	Dinas Kesehatan
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	%	100	100	51,241,279,935	RSUD Meuraxa

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
	Masyarakat	Kesehatan Masyarakat					
Program prioritas Pendukung P-BNA 6: Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	%	95.03	100	496,950,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	%	0	100	79,010,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Perlindungan Perempuan	%	100	100	380,314,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	%	100	100	448,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	%	69.03	100	537,218,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	%	100	100	381,801,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program prioritas Pendukung P-BNA 7: Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga							
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	100	100	614,699,000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	100	100	203,630,000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Program prioritas Pendukung P-BNA 8: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah							
1	Program hubungan industrial	Persentase pembinaan terhadap kelembagaan dan sarana hubungan industrial di perusahaan	%	25	40	308,396,000	Dinas Tenaga Kerja
2	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan Pengunjung MPP	%	100	100	766,310,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	100	100	100,966,000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	100	184,645,000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemenuhan dan Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan	%	0	100	72,270,000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	50,005,200	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pembinaan Perpustakaan	%	87.05	100	1,292,951,100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
8	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Dan Data Kepegawaian ASN	%	100	100	1,135,688,700	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	%	40	100	706,024,500	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	%	100	100	3,715,101,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
11	Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang menerapkan SPIP secara memadai minimal level 3 dari skala 5	%	100	100	39,290,000	Inspektorat
12	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	8,451,616,600	Sekretariat DPRK
13	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	1,146,451,000	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
14	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peresentase hasil penelitian dan pengembangan daerah	%	100	100	2,497,306,450	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
15	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tertibnya pengelolaan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	%	100	100	148,329,250,973	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
16	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	0	100	45,622,500	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
17	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database Statistik Sektoral Daerah	%	100	100	191,367,000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Sumber : RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dan Aplikasi SIPD RKPD Tahun 2025

Selain program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dalam pencapaian program-program pendukung pada tahun 2025 juga tetap menjadi perhatian dan dilaksanakan, berikut program pembangunan tahun 2025 yang disajikan dalam tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4. 8 Program Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2025	OPD
1	Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Program Syariat Islam Aceh	Indeks Kota Syariah (IKS)	81.27	Dinas Syariat Islam
		Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase meningkatnya kapasitas dan peran ulama	100	Sekretariat MPU
2	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	95	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Penidikan dan Latihan Perkoperasian	90	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	95	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Pengembangan UMKM	95	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penenaman Modal	100	DPMPTSP

No	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2025	OPD
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	100	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	100	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal	100	DPMPTSP
		Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase jumlah wilayah penangkapan	25	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	25	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Olahan Perikanan	25	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase pemamfaatan sarana pertanian	20	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian	30	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	95	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase meningkatnya sarana distribusi perdagangan	95	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Pengembangan Ekspor	95	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase gampong yang memiliki minimal satu produk industri kecil/menengah	100	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Penataan IKM	100	Dinas Tenaga Kerja
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase gampong yang memiliki tata kelola pemerintahan gampong yang baik	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong

No	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2025	OPD
		Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Deversifikasi Jenis Pangan Baru	100	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program penanganan kerawanan pangan	Jumlah Gampong lokasi rawan pangan yang ditangani sesuai FSVA	100	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program pengawasan keamanan pangan	Pangan yang Memenuhi syarat	100	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
3	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Meningkatnya Layanan Air Minum	93.47	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Meningkatnya Layanan Air Limbah	87.67	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Meningkatnya Kualitas Kontruksi Jalan sesuai Spesifikasi	96.15	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100	Dinas Perhubungan
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Permukiman kumuh	100	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	100	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Meningkatnya Penataan Bangunan	85.07	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tertatanya Ruang yang Sesuai RTRW/RRTR	81.97	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Cakupan Luas Area Pengendalian Banjir	44.05	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	79.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2025	OPD
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4 dan bersertifikasi pendidik	100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persetase peningkatan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan milik masyarakat	80.47	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pendidikan Dayah	Persentase Dayah yang Terakreditasi	92.11	Dinas Pendidikan Dayah
		Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase kebijakan yang dihasilkan terkait pengembangan mutu pendidikan Aceh	100	Dinas Pendidikan Dayah
5	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	95	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	RSUD Meuraxa
6	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2025	OPD
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Perlindungan Perempuan	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
7	Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	Dinas Pemuda Dan Olahraga
8	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Program hubungan industrial	Persentase pembinaan terhadap kelembagaan dan sarana hubungan industrial di perusahaan	40	Dinas Tenaga Kerja

No	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2025	OPD
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan Pengunjung MPP	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemenuhan dan Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pembinaan Perpustakaan	100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Dan Data Kepegawaian ASN	100	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	100	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
		Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang menerapkan SPIP secara memadai minimal level 3 dari skala 5	100	Inspektorat
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100	Sekretariat DPRK

No	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2025	OPD
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peresentase hasil penelitian dan pengembangan daerah	100	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tertibnya pengelolaan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	100	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database Statistik Sektoral Daerah	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Sumber : RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Tabel 4. 9 Realisasi SPM Tahun 2023 dan Target Capaian SPM Kota Banda Aceh Tahun 2025

NO	Bidang SPM	No	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2024	Capaian 2024	Target 2025
I	**BIDANG PENDIDIKAN**	1	Pendidikan Anak Usia Dini	100%		100%
	SKPD Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	Pendidikan Dasar (SD)	100%		100%
		3	Pendidikan Kesetaraan	100%		100%
II	**BIDANG KESEHATAN**	1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		100%
	SKPD Penangung Jawab : Dinas Kesehatan	2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%		100%
		3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		100%
		4	Pelayanan kesehatan balita	100%		100%
		5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan	100%		100%

NO	Bidang SPM	No	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2024	Capaian 2024	Target 2025
			dasar			
		6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%		100%
		7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%		100%
		8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%		100%
		9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%		100%
		10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%		100%
		11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%		100%
		12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manuasia (Human Immunodeficiency Virus)	100%		100%
		13	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%		100%
		14	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar baisa (KLB)	100%		100%
III	**BIDANG PEKERJAAN UMUM**	1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%		100%
	SKPD Penangung Jawab : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%		100%
IV	**BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%		100%
	SKPD Penangung Jawab : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100%		100%

NO	Bidang SPM	No	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2024	Capaian 2024	Target 2025
V	**BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100%		100%
	SKPD Penangung Jawab : Satpol PP, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	Pelayanan informasi rawan bencana	100%		100%
		3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		100%
		4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%		100%
		5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%		100%
VI	**BIDANG SOSIAL**	1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%		100%
	SKPD Penangung Jawab : Dinas Sosial	2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti	100%		100%
		3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%		100%
		4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	100%		100%
		5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota	100%		100%

Data Capaian 2024 masih dalam proses kompilasi dari OPD

4.4 Indikator Kinerja

Untuk memperloleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Berikut target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Tabel 4. 10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Realisasi 2024	Target Tahun 2025 (RPD)	Target Tahun 2025 (RKPD)	Target Tahun 2025 (RKPD-P)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Indeks Kota Syariah (IKS)	Indeks		81,27	81,27	81,27
2	Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	Indeks Ketenteraman Umum	Indeks		82,34	82,34	82,34
3	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,34	93,9	93,9	93,9
		Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	BB	BB	BB	BB
4	Optimalnya Kualitas Pendidikan	Indeks Kualitas Pendidikan	Indeks		95,38	95,38	95,38
5	Optimalnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kualitas Kesehatan	Indeks		94,717	94,717	94,717
6	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,08	4,8	4,8	4,8
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,55	7,74	7,74	7,74
		Persentase Pemenuhan Layanan SPM Sosial	%		100	100	100
7	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jiwa	420,537	550,000	550,000	550,000
8	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya	Indeks Pelestarian Budaya Daerah	Indeks		81,84	81,84	81,84
9	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman	Rata-rata Capaian Layanan Infrastuktur Dasar Perkotaan	%	95,44	91,49	91,49	91,49

10	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks		76,08	76,08	76,08
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks		67,46	67,46	67,46
		Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota	%		14,375	14,375	14,375
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Kelas Risiko (Skor)		Sedang (97,02)	Sedang (97,02)	Sedang (97,02)
12	Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Indeks Pemberdayaan Pemuda Dan Pembinaan Olahraga	Indeks		25,18	25,18	25,18
13	Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%		3.18	3.18	3.18

Sumber : RPD dan RKPD Kota Banda Aceh

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator Rata-rata capaian Layanan infrastruktur Perkotaan tingkat realisasi mencapai 95,44 %. Ini berarti pemerintah Kota Banda Aceh telah berhasil dalam memberikan layanan infrastruktur. Tingkat capaian ini bahkan lebih besar dari target yang ditetapkan pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh pada tahun 2025 sebesar 6,08%. Hal ini menandakan makin berkembangnya sektor-sektor unggulan kota, terutama perdagangan dan jasa.

Selain terhadap Indikator Kinerja Utama, evaluasi juga dilakukan terhadap Indikator Kinerja Daerah. Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah alat ukur kuantitiatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang dilaksanakan. Melalui Indikator kinerja daerah dapat diperoleh gambaran tingkat kemampuan kinerja yang dapat dicapai oleh organisai Perangkat Daerah. Pencapaian IKD Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 61 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target		
				RPD 2025	RKPD 2025	RKPD-P 2025
1	2	3	4	5	6	7
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Pertumbuhan PDRB	%	6,08	4,8	4,8	4,8
2	Laju Inflasi	%	2,16	2,29	2,29	2,29

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target		
				RPD 2025	RKPD 2025	RKPD-P 2025
1	2	3	4	5	6	7
3	PDRB per kapita (ADHK)	Juta Rupiah	-	68,59	68,59	68,59
4	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rupiah	98,20	86,18	86,18	86,18
5	Indeks Gini	Indeks	-	0,327	0,327	0,327
6	Persentase Penduduk Miskin	%	6,95	6,89	6,89	6,89
7	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	19.970	20.723	20.723	20.723
8	IPM	Indeks	88,85	87,47	87,47	87,47
9	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	%		3,18	3,18	3,18
Kesejahteraan Sosial						
Pendidikan						
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,94	17,84	17,83	17,84
2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	13,10	12,85	12,85	12,85
Kesehatan						
3	Angka harapan hidup	Tahun		72,30	72,30	72,30
4	Persentase balita gizi buruk	%		0,20	0,20	0,20
5	Prevalensi balita gizi kurang	%		1,04	1,04	1,04
Ketenagakerjaan						
6	Tingkat pengangguran terbuka	%		7,45	7,45	7,45
Keuangan						
7	Peroleh Opini dari BPK terhadap laporan Keuangan daerah	Opini BPK		WTP	WTP	WTP
8	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%		22	22	22
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Layanan Urusan Wajib Dasar						
1.	PENDIDIKAN					
1.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD	%		100	100	100
1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD	%		100	100	100
1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun dalam pendidikan SMP	%		100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target		
				RPD 2025	RKPD 2025	RKPD-P 2025
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	Nilai		100	100	100
1.5	Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai		2,16	2,16	2,16
1.6	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai		2,00	2,00	2,00
1.7	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai		2,25	2,25	2,25
1.8	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai		2,10	2,10	2,10
1.9	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang Mendapatkan Akreditasi A	%		52	52	52
1.10	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP) yang Mendapatkan Akreditasi A	%		45	45	45
1.11	Persentase Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%		52	52	52
1.12	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C	%		62	62	62
1.13	Persentase Pendidik SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%		45	45	45
1.14	Persentase Pendidik SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%		62	62	62
1.15	Persentase Pendidik PAUD Formal yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%		31	31	31

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target		
				RPD 2025	RKPD 2025	RKPD-P 2025
1	2	3	4	5	6	7
1.16	Persentase Pendidik PAUD Formal yang Memiliki Kualifikasi S1/D IV	%		84	84	84
1.17	Rasio Pengawas/Penilik PAUD	Rasio		1:22	1:22	1:22
1.18	Persentase Lulusan SD yang mampu menghafal minimal satu juz Al Qur'an	%		11	11	11
1.19	Persentase Lulusan SMP yang mampu menghafal minimal dua juz Al Qur'an	%		11	11	11
1.20	Jumlah Dayah yang terakreditasi sesuai standar	Dayah		35	35	35
1.21	Jumlah rekomendasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD) yang dihasilkan	rekomendasi		2	2	2
2.	KESEHATAN					
2.1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%		100	100	100
2.2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%		100	100	100
2.3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%		100	100	100
2.4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%		100	100	100
2.5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		100	100	100
2.6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target		
				RPD 2025	RKPD 2025	RKPD-P 2025
1	2	3	4	5	6	7
2.7	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		100	100	100
2.8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		100	100	100
2.9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		100	100	100
2.10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%		100	100	100
2.11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%		100	100	100
2.12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%		100	100	100
2.13	Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%		100	100	100
2.14	Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit	%		90	90	90
2.15	Prevalensi Stunting	%		20,70	20,70	20,70
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
3.1	Layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	80,26	100	100	100
3.2	Layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,07	100	100	100
3.3	Cakupan Pelayanan Air Minum	%	80,26	93,47	93,47	93,47
3.4	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	%	95,07	87,67	87,67	87,67

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target		
				RPD 2025	RKPD 2025	RKPD-P 2025
1	2	3	4	5	6	7
3.5	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	%	76,45	82,07	82,07	82,07
3.6	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	21,41	44,05	44,05	44,05
3.7	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	81,05	96,15	96,15	96,15
3.8	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	%	75,04	74,73	74,73	74,73
3.9	Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikasi	Orang	0	50	50	50
3.10	Ketaatan terhadap RTRW/RDTR	%	81,67	81,97	81,97	81,97
3.11	Persentase bangunan Umum yang Memiliki Aksesibilitas	%	60,61	67,03	67,03	67,03
3.12	Jumlah kawasan Strategis Yang Tertata	Kawasan	1	0	0	0
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
4.1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100
4.2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100
4.3	Persentase Luas Pemukiman yang Tertata	%	71,58	77,30	77,30	77,30
4.4	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	95,45	93,0	93,00	93,00
4.5	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	6,26	6,64	6,64	6,64
4.6	Cakupan lingkungan Yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	100	98,60	98,60	98,60
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
5.1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,	%		89,5	89,5	89,5

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target		
				RPD 2025	RKPD 2025	RKPD-P 2025
1	2	3	4	5	6	7
	Keindahan)					
5.2	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Rasio		5,64	5,64	5,64
5.3	Persentase Penegakan Perda/Qanun	%		85	85	85
5.4	Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks		0,64	0,64	0,64
5.5	Layanan informasi rawan bencana	%		100	100	100
5.6	Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%		100	100	100
5.7	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%		100	100	100
5.8	Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%		100	100	100
5.9	Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%		30	30	30
5.10	Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi nonkebakaran) oleh Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan)	Kali		70	70	70
5.11	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota	%		100	100	100
6.	SOSIAL					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target		
				RPD 2025	RKPD 2025	RKPD-P 2025
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	%		100	100	100
6.2	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak Terlantar di Luar Panti	%		100	100	100
6.3	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	%		100	100	100
6.4	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	%		100	100	100
6.5	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah Kab/Kota	%		100	100	100
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
1.	TENAGA KERJA					
1.1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%		61,23	61,23	61,23
1.2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%		23,26	23,26	23,26
1.3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%		0,71	0,71	0,71
1.4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%		65,00	65,00	65,00
1.5	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%		42,90	42,90	42,90
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%		18,52	18,52	18,52
1.7	Cakupan bina kelompok pengrajin	%		28,16	28,16	28,16

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target		
				RPD 2025	RKPD 2025	RKPD-P 2025
1	2	3	4	5	6	7
1.8	Jumlah Industri Kecil Menengah Produktif	Jumlah IKM		1,370	1.370	1.370
1.9	Persentase jumlah IKM yang terdaftar di SIINas	%		7,30	7,30	7,30
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2.1	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	%	65,40	80	80	80
2.3	Rasio KDRT	%	0,08	0,10	0,10	0,10
2.4	Persentase Gampong Layak Anak	%	25,55	64,44	64,44	64,44
2.5	Prevalensi pemakaian kontrasepsi	%	64,50	88,72	88,72	88,72
2.6	Persentase Indikator Gampong KB yang di penuhi	%	100	92,31	92,31	92,31
3.	PANGAN					
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%		87,00	87,00	87,00
4.	LINGKUNGAN HIDUP					
4.1	Timbunan Sampah yang Ditangani	%	97,61	98,00	98,00	98,00
4.2	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota	%	14,33	14,37	14,370	14,370
4.2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	65,29	45,76	45,76	45,76
4.3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	86,64	83,59	83,59	83,59
4.4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	30,35	29,20	29,20	29,20
4.5	Persentase Penerangan Jalan Umum	%	85,04	86,50	86,50	86,50
4.6	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	%	95,95	97,70	97,70	97,70
4.7	Penghargaan Adipura	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target		
				RPD 2025	RKPD 2025	RKPD-P 2025
1	2	3	4	5	6	7
5.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
5.1	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%		99,50	99,50	99,50
5.2	Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak	%		75,70	75,70	75,70
5.3	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%		96,90	96,90	96,90
5.4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%		85,50	85,50	85,50
5.5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai		95,60	95,60	95,60
6.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG					
6.1	Indeks Gampong Membangun (IGM)	Indeks	0,8676	0,818	0,818	0,818
6.2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan desa yang Baik	%	98,89	100	100	100
6.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok Binaan	2,8	2,9	2,90	2,9
6.4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok Binaan	22,4	22,5	22,50	22,5
6.5	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100
6.6	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100
7.	PERHUBUNGAN					
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	2.360.241	1.698.457	1.698.457	1.698.457
7.2	Rasio ijin trayek	%	0,005	0,25	0,25	0,25
7.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	7.488	10.800	10.800	10.800
7.4	Jumlah Terminal Bis	Unit	3	3	3	3
7.5	Persentase layanan Angkutan Darat	%	0,1	0,18	0,18	0,18
7.6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	14,29	17	17	17
7.7	Pemasangan Rambu-rambu	%	90,54	100	100	100
8.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target		
				RPD 2025	RKPD 2025	RKPD-P 2025
1	2	3	4	5	6	7
8.1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor		2,77	2,77	2,77
8.2	Persentase website OPD yang aktif	%		86	86	86
8.3	Cakupan layanan E-Government yang dilaksanakan	%		61	61	61
9.	KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN					
9.1	Persentase koperasi aktif	%		83	83	83
9.2	Persentase peningkatan usaha mikro yang produktif dan bernilai tambah	%		17	17	17
9.3	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang berfungsi optimal	Unit		10	10	10
9.4	Persentase Pasar yang Representatif	%		66,67	66,67	66,67
9.5	Jumlah Usaha Mikro	UM		19.643	19.643	19.643
9.6	Jumlah Koperasi	Unit Usaha		519	519	519
9.7	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam /Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha		405	405	405
9.8	Jumlah pasar yang sudah berfungsi optimal	Jumlah Pasar		7	7	7
9.9	Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah	UTTP		1908	1908	1908
10.	PENANAMAN MODAL					
10.1	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (milyar)		630,06	630,06	630,06
11.	PEMUDA DAN OLAHRAGA					
11.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%		22,22	22,22	22,22
11.2	Cakupan pembinaan atlet muda	%		28,14	28,14	28,14
12.	STATISTIK					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target		
				RPD 2025	RKPD 2025	RKPD-P 2025
1	2	3	4	5	6	7
12.1	Persentase data statistik sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	%		31	31	31
13	KEBUDAYAAN					
13.1	Indeks Pelestarian Budaya Daerah	Indeks		81,84	81,84	81,84
13.2	Persentase sanggar seni dan budaya daerah yang aktif	%		69	69	69
13.3	Persentase cagar budaya dan situs sejarah yang ditetapkan	%		85	85	85
13.4	Jumlah rekomendasi Majelis Adat Aceh (MAA) yang dihasilkan	rekomendasi		2	2	2
14.	PERPUSTAKAAN					
14.1	Jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan	Jiwa		20.597	20.597	20.597
15	KEARSIPAN					
15.1	Persentase OPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara manual dan berbasis TIK sesuai peraturan	%		75	75	75
Layanan Urusan Pilihan						
1	PARIWISATA					
1.1	Jumlah Kunjungan Wisataan	Jiwa	420.637	550.000	550.000	550.000
1.2	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Banda Aceh	%	0,0029	4,3	5,3	5,3
2	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
2.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton		1.049,95	1.049,95	1.049,95
2.2	Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap	Ton		22.197,853	22.197,853	22.197,853
2.3	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton		428,77	428,77	428,77

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target		
				RPD 2025	RKPD 2025	RKPD-P 2025
1	2	3	4	5	6	7
3	PETERNAKAN					
3.1	Jumlah Produksi Ternak					
	a. Sapi	Ton		318,13	318,13	318,13
	b. Kambing	Ton		25,70	25,70	25,70
	c. Unggas	Ton		2,032	2.032	2.032
	PENUNJANG URUSAN:					
1.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak		Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD/RPD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada/Tidak		Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak		Ada	Ada	Ada
1.4	Penjabaran konsistensi Program RPJMD/RPD kedalam RKPD	%		100	100	100
2.	KEUANGAN					
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK		WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%		22	22	22
3.	KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
3.1	Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi	Indeks		79	79	79
4.	INSPEKTORAT					
4.1	Presentase tindak lanjut temuan	%		90,21	90,21	90,21
5.	SEKRETARIAT DPRK					
5.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat	Ada/Tidak ada		Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target		
				RPD 2025	RKPD 2025	RKPD-P 2025
1	2	3	4	5	6	7
	Kelengkapan DPRD Kota					
5.2	Tersusun dan terintegrasi Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak ada		Ada	Ada	Ada
5.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak ada		Ada	Ada	Ada
	KESATUAN BANGSA					
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik					
1.1	Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial	%		100	100	100
1.2	Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	%		-	-	-
	KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH					
1.	KEAGAMAAN					
1.1	Indeks Kota Syariah (IKS)	Indeks		81,27	81,27	81,27
1.2	Jumlah rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang dihasilkan	Rekomendasi		30	30	30
	ASPEK DAYA SAING DAERAH :					
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,26	0,52	0,52	0,52

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target		
				RPD 2025	RKPD 2025	RKPD-P 2025
1	2	3	4	5	6	7
2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	839.128	1.222.000	1.222.000	1.222.000
		Barang	168.912	79.242	79.242	79.242
3	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang/ Barang	2.360.241	1.698.457	1.698.457	1.698.457

Sumber: OPD di Lingkungan Pemko Banda Aceh

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD serta menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan daerah dengan visi misi dan program Walikota Banda Aceh Tahun 2025-2029.

5.1 Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025 telah disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Aceh. Terkait Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah terlampir pada Buku 2 Perubahan RKPD Tahun 2025.

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat rancangan perubahan kerangka ekonomi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD yang berisikan uraian mengenai kegiatan lanjutan, pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah, perubahan kebijakan pembiayaan daerah, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan RKPD Kota Banda Aceh disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun ketiga melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kota Banda Aceh dilakukan untuk mengakomodir kebijakan Asta Cita Presiden dan wakil presiden serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Walikota terpilih. Perubahan RKPD 2025 berfungsi sebagai pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBK untuk Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025.
2. Perubahan RKPD ini bersifat strategis, karena tingkat keberhasilan pelaksanaan dari Perubahan RKPD tahun berjalan akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada tahun tersebut. Selain itu, Evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan tahun 2025 akan dilakukan berdasarkan perubahan RKPD.

WALIKOTA BANDA ACEH

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDA ACEH

Jalan Nyak Adam Kamil, No.19 Neusu Jaya, Kota Banda Aceh
Telp. (0651) 32398, Fax. (0651) 32397, Email. bappeda@bandaaceh.go.id

bappedabna bappeda.sosmed www.bappeda.bandaacehkota.go.id